



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Kuini Nomor 79 B Padang, 25224 Telpn (0751) 21686 Fax. (0751) 22583
Website : <http://sumbar.kemenag.go.id> Email : kanwilsumbar@kemenag.go.id

Nomor : B-1/Kw.03/OT.01.2/02/2026
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2025
Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

13 Februari 2026

Yth. Bapak Menteri Agama
(cq. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama)
Jakarta

Dengan hormat

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama dan Surat Sekjen Kementerian Agama Nomor : 0062./SJ/B.IV.2/OT.01.2/01/2026 tanggal 20 Januari 2026 perihal Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 dan Penyampaian Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025, disampaikan Laporan Kinerja Tahun 2025 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana terlaampir

Laporan kinerja tahun 2025 ini, sudah menghitung capaian kinerja organisasi, capaian kinerja anggaran dan capaian kinerja mendukung asta protas Kementerian Agama Berdampak yang dilaksanakan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta membandingkan pencapaian kinerja dengan tahun sebelumnya,

Demikian kami sampaikan, terima kasih

Kepala



Mustafa



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT



Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. LKj ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi selama tahun 2025. Penyusunan LKj ini, berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama.

LKj ini memberikan gambaran dan informasi terkait upaya, dan langkah strategis, yang dilakukan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2025, meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan pembangunan bidang agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan di Sumatera Barat. Tentu, dalam pelaksanaannya terdapat hambatan dan permasalahan dengan segala dinamika yang terjadi, serta rencana tindak lanjut yang harus segera dilaksanakan untuk mendukung berjalannya program prioritas sebagai indikator keberhasilan kinerja Kementerian Agama.

Tahun 2025 adalah periode awal dari pelaksanaan Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat periode 2025-2029. Oleh karena itu seluruh target dan capaian yang sudah ditetapkan dalam tahun 2025, menjadi bahan evaluasi perbaikan dan peningkatan kinerja secara komprehensif untuk menghadapi periode Renstra 2025-2029.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada stakeholders, baik internal maupun eksternal yang telah mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat sepanjang tahun 2025

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi seluruh langkah kita



Padang, 19 Januari 2026
Kepala Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Barat



Mustafa

Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
BAB I : PENDAHULUAN	13
A. Latar Belakang	13
B. Maksud dan Tujuan	13
C. Tugas dan Fungsi	14
D. Struktur Organisasi dan Komposisi Pegawai Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat	14
E. Sumber Daya Manusia	19
F. Sistematika Penulisan	22
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	23
A. Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	23
A.1 Visi dan Misi	23
A.2 Tujuan	26
A.3 Sasaran	26
A.4 Arah Kebijakan	26
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	34
C. Kerangka Pendanaan	44
D. Manajemen Resiko Pembangunan Nasional	46
E. Metadata/ metode pengukuran IKSK	72
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	141
A. Capaian Kinerja Organisasi	141
B. Capaian Kinerja Anggaran	196
B.1 Kendala Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025	210
C. Capaian Kinerja Mendukung Asta Protas Kementerian Agama Berdampak	212
D. Analisis Efisiensi	215
E. Tindak Lanjut Atas Saran Tahun 2024	216
F. Pergantian Pimpinan	221

BAB IV : PENUTUP	222
LAMPIRAN	227
Perkin Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 (awal)	228
Perkin Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 (revisi)	237

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 1.1 : Kantor Kementerian Agama dan KUA Kecamatan se Sumatera Barat	22
Tabel 1.2 : Jumlah RA, MI, MTs dan MA se Sumatera Barat	23
Tabel 1.3 : Jumlah ASN berdasarkan jabatan	24
Tabel 1.4 : Jumlah ASN berdasarkan latar belakang pendidikan	25
Tabel 1.5 : Jumlah ASN berdasarkan latar belakang pendidikan	25
Tabel 2.1 : Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Mendukung Pencapaian Tujuan 1	32
Tabel 2.2 : Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Mendukung Pencapaian Tujuan 2	32
Tabel 2.3 : Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Mendukung Pencapaian Tujuan 3	34
Tabel 2.4 : Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Mendukung Pencapaian Tujuan 4	35
Tabel 2.5 : Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Mendukung Pencapaian Tujuan 4	37
Tabel 2.6 : Lampiran Perjanjian Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	39
Tabel 2.7 : Lampiran Revisi Perjanjian Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	44
Tabel 2.8 : Pendanaan program dan kegiatan tahun 2025	49
Tabel 2.9 : Managenen Resiko Pembangunan NASional	51
Tabel 3.1 : Pengukuran Kinerja 2025	147
Tabel 3.2 : Capaian Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Atas Pelaksanaan Revisi Perjanjian Kinerja 2025	148
Tabel 3.3 : Rerata Capaian Kinerja (SK-1) : Meningkatnya Jaminan Beragama, Toleransi dan Cinta Kemanusiaan Umat Beragama	153
Tabel 3.4 : Nilai Indeks KUB Sumatera Barat dan Nasional, 2021-2025	154
Tabel 3.5 : Dimensi Nilai Indeks KUB Sumatera Barat dan Nasional, 2021-2025	154
Tabel 3.6 : Jumlah Aktor Kerukunan	150
Tabel 3.7 : Desa Kerukunan di Sumatera Barat	157
Tabel 3.8 : Kampung Moderasi Beragama di Sumatera Barat	157
Tabel 3.9 : Jumlah Lembaga FKUB di Sumatera Barat	159
Tabel 3.10 : Pembinaan Moderasi Beragama di Sumatera Barat	160
Tabel 3.11 : KUA yang menyelenggarakan EWS Tahun 2025	161
Tabel 3.12 : Daerah Penyelenggara Dialog antar umat beragama	162

Tabel 3.13	: Peserta dan Audiens MTQ Tingkat Provinsi Sumatera Barat	163
Tabel 3.14	: Peserta Event Seni Budaya Islam 2025	163
Tabel 3.15	: Rerata Capaian Kinerja (SK-2) Meningkatnya Kualitas Layanan Keagamaan yang Profesional, Inklusif, dan Berdampak	164
Tabel 3.16	: Pengukuran Kinerja Penyuluh Agama	165
Tabel 3.17	: Kelompok Sasaran Penuluh Agama	167
Tabel 3.18	: Jumlah Madrasah/ Sekolah Sasaran BRUS 2024 dan 2025	168
Tabel 3.19	: Jumlah masjid dan mushalla yang telah lakukan pengukuran arah kiblat	169
Tabel 3.20	: Jumlah kitab suci/ buku keagamaan yang didistribusikan dan jumlah keluarga yang tidak memiliki kitab suci/ buku keagamaan	170
Tabel 3.21	: Rerata Capaian Kinerja (SK-3) : Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji	171
Tabel 3.22	: Rerata Capaian Kinerja (SK-4) : Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	171
Tabel 3.23	: Rerata Capaian Kinerja (SK-5) : Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah	173
Tabel 3.24	: Rerata Capaian Kinerja (SK-6) : Meningkatnya kualitas pelayanan Jemaah Haji	174
Tabel 3.25	: Rerata Capaian Kinerja (SK-7) : Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	174
Tabel 3.26	: Rerata Capaian Kinerja (SK-8) : Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	175
Tabel 3.27	: Rerata Capaian Kinerja (SK-9) : Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	177
Tabel 3.28	: Jumlah Santri Disabilitas Sasaran Pendidikan Inklusi di Sumatera Barat	177
Tabel 3.29	: Jumlah Siswa RA, MI, MTs dan MA Tahu Pelajaran 2025/2026	178
Tabel 3.30	: Jumlah Siswa PKPPS, PDF dan SPM di Provinsi Sumatera Barat	178
Tabel 3.31	: Jumlah Siswa Kelas I MI Tidak PAUD 2025	179
Tabel 3.32	: Jumlah Anak Kelas 1 Tingkat Ula Tahun 2025	180
Tabel 3.33	: Rerata Capaian Kinerja (SK-10) : Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	181
Tabel 3.34	: Nilai AN Madrasah 2020-2024	182
Tabel 3.35	: Jumlah Peserta dan Nilai AN Madrasah 2025	183
Tabel 3.36	: Rekapitulasi Juara 1-3 yang diraih siswa dari kegiatan ekstrakurikuler Berdasarkan Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat Tahun 2025	183
Tabel 3.37	: Jumlah Perangkat Kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta	184

	kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	
Tabel 3.38	: Akreditasi Tahun 2025	185
Tabel 3.39	: Sebaran Madrasah Unggul 2025 di Sumatera Barat	186
Tabel 3.40	: Sebaran Madrasah Biligual 2025 Sumatera Barat	186
Tabel 3.41	: Jumlah materi ajar digital yang tersedia dan digunakan dalam proses	188
Tabel 3.42	: Rerata Capaian Kinerja SK-11 : Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	189
Tabel 3.43	: Persentase Guru Madrasah yang memiliki Sertifikat Pendidik	190
Tabel 3.44	: Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kualifikasi dan kompetensi minimal	190
Tabel 3.45	: Jumlah guru yang memperoleh nilai rapor hasil AKG minimal predikat terampil	190
Tabel 3.46	: Jumlah kepala madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKK minimal predikat terampil	191
Tabel 3.47	: Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	191
Tabel 3.48	: Jumlah guru madrasah yang meningkat jenjang karirnya berdasarkan Kabupaten Kota	192
Tabel 3.49	: Jumlah pengawas madrasah yang meningkat jenjang karirnya berdasarkan Kabupaten Kota	192
Tabel 3.50	: Rerata Capaian Kinerja SK-12 : Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran	193
Tabel 3.51	: Rerata Capaian Kinerja SK-13 : Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	194
Tabel 3.52	: Rerata Capaian Kinerja SK-14 : Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	194
Tabel 3.53	: Rerata Capaian Kinerja SK-15 : Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai	195
Tabel 3.54	: Rekapitulasi Indeks Profesionalisme ASN 2025	196
Tabel 3.55	: Rerata Capaian Kinerja SK-16 : Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	197
Tabel 3.56	: Rerata Capaian Kinerja SK-17 : Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	197
Tabel 3.57	: Rerata Capaian Kinerja SK-18 : Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	197
Tabel 3.58	: Rerata Capaian Kinerja SK-19 : Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	197
Tabel 3.59	: Rerata Capaian Kinerja SK-20 : Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan	198
Tabel 3.60	: Perbandingan Capaian Kinerja Mendukung Pelaksanaan Tujuan Kementerian Agama Tahun 2023 - 2025	198

Tabel 3.61	: Rerata Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	198
Tabel 3.62	: Rerata Capaian Kinerja IKS Perjanjian Kinerja Tahun 2025	199
Tabel 3.63	: Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Jajaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2025	203
Tabel 3.64	: Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Jajaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2025	204
Tabel 3.65	: Capaian Kinerja Anggaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	215
Tabel 3.66	: Pemetaan Langkah Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran 2025	217
Tabel 3.67	: Kegiatan Mendukung Asta Protas Menteri Agama	218
Tabel 3.68	: Tindak Lanjut Atas Saran Tahun 2024	222
Tabel 4.1	: Capaian Kinerja Mendukung Tujuan Kementerian Agama, 2023-2025	223

Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 3.1 : Fluktuasi Nilai Indeks KUB Sumatera Baarat	154
Gambar 3.2 : Pembinaan Aktor Kerukunan di Sumatera Barat	156
Gambar 3.3 : Forum Pokja Penyuluh Lintas Agama	157
Gambar 3.4 : Dialog antar umat beragama di Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman	162
Gambar 3.5 : Penghargaan Atas Peran Penyuluh Agama dari Kepala Lapas Kelas II A Padang	166
Gambar 3.6 : Penghargaan PAI Terbaik Tingkat Nasional 2025	166
Gambar 3.7 : Penghulu Sumbar Ujung Tombak Pencegahan Stunting	167
Gambar 3.8 : Penandatanganan serah terima gedung asrama Haji Batang Anai	172
Gambar 3.9 : One Stop Service Layanan Haji 2025	174
Gambar 3.10 : Pembukaan Bimtek Petugas Haji 2025	175
Gambar 3.11 : PHTC MTsS Muhammadiyah Kurai Taji Kabupaten Padang Pariaman	176
Gambar 3.12 : Nilai Pembangunan ZI Hasil Penilaian Tim TP	194
Gambar 3.13 : Penanaman Pohon Matoa di Halaman MAN 2 Kota Padang	220
Gambar 3.14 : Peluncuran Program BERANI Tahun 2025	220

Daftar Grafik

	Halaman
Grafik 1.1 : Struktur dan Pola Koordinasi Pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat	18

Ringkasan Eksekutif

Pelaksanaan pembangunan bidang agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan di Sumatera Barat selama tahun 2025 ditandai peristiwa penting dan capaian keberhasilan, yaitu :

1. Terjadinya pergantian pimpinan

Pada hari rabu tanggal 11 November 2025, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar resmi melantik H. Mustafa MA, menggantikan H. Mahyudin, MA sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat yang ke 14, di Gedung Kementerian Agama, Jakarta.



2. Peningkatan Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 mencapai 85.02. Mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan 5 tahun terakhir.

Indeks KUB	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Sumatera Barat	67.87	63.42	71.58	70.87	85.02
Nasional	72.39	73.09	76.02	76.47	77.89

Dari ketiga dimensi Indeks KUB, indikator “kebersamaan” mendapatkan skor paling tinggi dari seluruh provinsi 89.09 sedangkan “toleransi” mendapatkan nilai 85.79 dan “kesetaraan” mendapatkan nilai 79.18.

	Nilai IKUB	Dimensi Toleransi	Dimensi Kebersamaan	Dimensi Kestaraan
Provinsi Sumatera Barat	85.02	85.79	89.09	79.18
Nasional	77.89	88.82	65.49	79.35

11 Tahun perkembangan nilai Indeks KUB Sumatera Barat, dan di tahun 2025 menjadikan nilai Indeks KUB Sumatera Barat di Urutan 5 Tertinggi Nasional

<https://indonesiamadani.com/sumatera-barat-5-besar-indeks-toleransi-2025/>



Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran pertama dalam periode Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat 2025–2029. Laporan ini menyajikan tingkat pencapaian sasaran strategis, efektivitas pemanfaatan anggaran, serta upaya strategis dalam memperkuat reformasi birokrasi dan kualitas layanan keagamaan serta pendidikan keagamaan di wilayah Sumatera Barat.

A. Capaian Kinerja Strategis

Secara umum, hasil evaluasi kinerja per 31 Desember 2025 menunjukkan bahwa Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat berhasil mencapai tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar **100%** kategori **Baik**, dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Mendukung Tujuan Kementerian Agama	2023		2024		2025	
	% Rata Rata Capaian Kinerja	Kategori Penilaian	% Rata Rata Capaian Kinerja	Kategori Penilaian	% Rata Rata Capaian Kinerja	Kategori Penilaian
Tujuan 1	100	Baik	91,67	Baik	100	Baik
Tujuan 2	96,3	Baik	120,26	Sangat Baik	100	Baik
Tujuan 3	88,9	Baik	132,65	Sangat Baik	100	Baik
Tujuan 4	96,6	Baik	88,63	Baik	98,00	Baik
Tujuan 5	98,0	Baik	99,18	Baik	99,62	Baik
% Rata Rata Capaian Kinerja	95,96	Baik	106,478	Sangat Baik	100	Baik

1. Persentase rata rata capaian kinerja mendukung tujuan 1, 2 dan 3 Kementerian Agama mencapai 100% sedangkan persentase rata rata capaian kinerja mendukung tujuan 4 dan 5, masing masingnya 98% dan 99.62%
2. Capaian kinerja tahun 2025 lebih baik jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun 2023.
3. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024, capaian kinerja tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 6,478%
4. Capaian kinerja 20 Sasaran Kegiatan (SK) dan 80 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)
 - a. Dari 20 SK, terdapat 3 SK (15%) yang persentase rata rata capaian kinerjanya **sangat baik** sedangkan 17 SK (85%) lainnya **baik**
 - b. Dari 80 IKSK, terdapat 4 IKSK (5%) yang persentase raata rata capaian kinerjanya **sangat baik**. 74 IKSK (92%) capaian kinerjanya **baik** dan 2 IKSK capaian kinerjanya **cukup**

Capaian Kinerja Anggaran Satuan Kerja Jajaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

1. Total anggaran seluruh Satuan Kerja Jajaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, semula berjumlah **Rp. 1.720.523.479.000,-** (satu trilyun, tujuh ratus dua puluh milyar, lima ratus dua puluh tiga juta, empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), meningkat menjadi **Rp. 1.983.853. 114.000,-**

(satu trilyun sembilan ratus delapan puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus empat belas ribu rupiah).

2. Peningkatan anggaran sebanyak **Rp. 263.329.635.000,-** (dua ratus enam puluh tiga milyar, tiga ratus dua puluh sembilan juta, enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Tambahan anggaran ini diprioritaskan untuk pemenuhan tunjangan profesi guru (TPG) atau tunjangan kinerja guru, khususnya guru bukan ASN pada RA dan Madrasah, termasuk pemberian tunjangan insentif guru bukan ASN sebesar Rp250.000 per bulan yang dibayarkan secara bertahap
3. Sampai akhir pelaksanaan tahun anggaran 2025, terealisasi sebesar **Rp 1.898.557.053.558** (satu trilyun delapan ratus sembilan puluh lima milyar, lima ratus lima puluh tujuh juta, lima puluh tiga ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), realisasi anggaran mencapai **95.70%**. Sisa anggaran sebanyak **Rp. 85.296.060.442,-** (delapan puluh lima milyar, dua ratus sembilan puluh enam juta, enam puluh ribu empat ratus empat puluh dua rupiah)

Capaian Kinerja Anggaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

Anggaran 2025			% Realisasi Anggaran
Pagu	Realisasi	Sisa	
(Rp)			
138.162.132.00	133.939.714.236	4.222.417.764	96,94

Dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2024, realisasi anggaran tahun 2025 mengalami penurunan sebesar **-0.80%**.

Tahun	Anggaran			% Realisasi Anggaran
	Pagu	Realisasi	Sisa	
	(Rp)			
2024	219.666.193.000	214.691.581.801	4.974.611.199	97,74
2025	138.162.132.000	133.939.714.236	4.222.417.764	96,94

Nilai Efisiensi

Nilai efisiensi atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2025. adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Efisiensi} &= \text{Capaian Kinerja} / \text{Realisasi Anggaran} \\
 &= 100 / 96.94 \\
 &= 1.03
 \end{aligned}$$

Biaya (input) yang kecil, digunakan untuk menghasilkan hasil (output) yang semakin tinggi

B. Kinerja Bidang Agama dan Pendidikan

1. Bidang Agama

Pada tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat memprioritaskan peningkatan moderasi beragama, penguatan kerukunan antarumat, serta peningkatan kualitas layanan keagamaan.

- a. Hasil capaian program menunjukkan perkembangan yang signifikan pada berbagai aspek. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi Sumatera Barat, meningkat menjadi 85,02, atau naik sebesar 14,18 poin dibandingkan tahun 2024.
- b. Peningkatan ini selaras dengan berbagai kegiatan pencegahan, mitigasi konflik dan kegiatan merawat kerukunan serta penguatan peran FKUB dan pelaksanaan program **Kampung Moderasi Beragama** yang telah diimplementasikan di 39 Kampung/ Nagari/ Desa/ Kelurahan serta pembentukan **5 Desa Kerukunan** di Sumatera Barat
- c. Di layanan keagamaan, kinerja KUA Kecamatan menunjukkan peningkatan kualitas yang cukup berarti, dengan 96% KUA telah menerapkan program Revitalisasi KUA yang berorientasi pada layanan digital serta ramah terhadap penyandang disabilitas. Begitu juga dengan layanan Haji Umrah juga menunjukkan tren positif, tercermin dari tingkat kepuasan jamaah yang mencapai 92,5%, didorong oleh perbaikan sistem manajemen asrama haji dan integrasi layanan melalui “Siskohat Online”.
- d. Selanjutnya, pengelolaan zakat dan wakaf mengalami kemajuan substansial. Hal ini ditunjukkan dengan 87% lembaga wakaf yang telah memiliki sertifikat sah serta meningkatnya optimalisasi kolaborasi antara BAZNAS dan BWI dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat. Secara keseluruhan, capaian tersebut menggambarkan komitmen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dalam memperkuat tata kelola layanan keagamaan dan meningkatkan kualitas kehidupan keberagamaan masyarakat

2. Bidang Pendidikan

Bidang pendidikan keagamaan dan madrasah pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang semakin kompetitif.

- a. Peningkatan akses pendidikan tercermin dari bertambahnya peserta didik baru pada jenjang Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA).
- b. Dari aspek mutu, 92% madrasah telah memperoleh akreditasi minimal kategori “B”, sementara seluruh madrasah telah mendapatkan pendampingan intensif dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.
- c. Profesionalisme pendidik juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan 98,6% guru madrasah dan ustadz pesantren yang telah mengikuti program pengembangan kompetensi, termasuk pelatihan microteaching digital sebagai bagian dari adaptasi terhadap kebutuhan pembelajaran berbasis teknologi. Di sisi lain, integrasi pembelajaran digital semakin menguat melalui pemanfaatan platform “E-Learning Madrasah” telah diterapkan pada 85% satuan pendidikan madrasah di Sumatera Barat.
- d. Selain itu, pendidikan pesantren dan diniyah terus berkembang sebagai pusat penguatan moderasi beragama. Implementasi program “Pesantren Ramah Anak dan Toleran”, menunjukkan komitmen kuat dalam membentuk lingkungan pendidikan yang inklusif, aman, dan berorientasi pada nilai-nilai moderasi beragama.

C. Capaian Kinerja Mendukung Asta Protas Kementerian Agama Berdampak

Dukungan terhadap pelaksanaan Asta Protas Kementerian Agama Berdampak, dijabarkan dalam berbagai kegiatan sebagai berikut

No	Asta Protas Menteri Agama	Bentuk Kegiatan
1	Kerukunan dan cinta kemamasiaan	1. AMAL (Awali Morning Dengan Do'a Agar Lancar) Mengawali aktifitas di tempat kerja dengan doa bersama yang dipandu oleh rohaniwan masing-masing agama. 2. KARENA (Kamis Rezeki Nyata Antar Sesama) Donasi uang dari ASN Kementerian Agama pada hari Kamis ditukarkan dengan bahan-bahan makanan pokok seperti beras dan telur, dan langsung didistribusikan pada hari itu juga kepada masyarakat yang membutuhkan
2	Ekoteologi	1. BERSERI Bersih-Bersih Rabu Sehat, Indah, dan Rapi: suatu gerakan membersihkan dan merapikan tempat kerja masing-masing ASN, dilaksanakan setiap hari Rabu setelah senam pagi 2. PEDULI Pegawai Hijau untuk Lingkungan Lestari: merupakan aksi yang dilakukan oleh ASN Kementerian Agama, berupa membawa tanaman hias untuk ditempatkan di lingkungan tempat kerja, serta memelihara dan merawatnya secara berkesinambungan. 3. CATIN NAMPAK Calon Pengantin Menanam dan Berdampak: merupakan inovasi layanan pra-nikah berbasis ekoteologi, yakni mengajarkan pasangan untuk menanam tumbuhan sebagai simbol komitmen menjaga bumi dan keluarga. Aksi ini dalam bentuk menanam pohon produktif di sekitar tempat tinggal atau tempat ibadah calon pengantin bersangkutan 4. GEMES BERSERI Gerakan Madrasah Mengelola Sampah, Sehat dan Berteknologi: merupakan langkah nyata untuk menanamkan kesadaran ekologis di madrasah. Aksi ini mengintegrasikan pendidikan lingkungan berbasis nilai Islam dengan teknologi sederhana dalam pengelolaan sampah dan kesehatan lingkungan madrasah. Bentuk kegiatannya adalah: • Pelatihan pengelolaan sampah dengan teknologi sederhana komposter, biopori, bank sampah digital. • Aksi madrasah hijau dan festival inovasi ekoteologi. 5. Kolaborasi lintas instansi: Dinas Lingkungan Hidup, Balai Diklat, dan Perguruan Tinggi Keagamaan
3	Layanan keagamaan berdampak	Sinergi Layanan Nikah dengan Layanan Dokumen Kependudukan: merupakan aksi mensinergikan layanan nikah pada KUA dengan penerbitan dokumen kependudukan. Secara bertahap, Aksi ini dilakukan pada beberapa KUA dengan terlebih dahulu berkolaborasi dengan OPD Catatan Sipil dan Kependudukan di Kabupaten/Kota setempat.
4	Pendidikan unggul, ramah dan terintegrasi	SIGMA Sinergi dan Integrasi Ilmu Guru Madrasah: bertujuan menyatukan ilmu pengetahuan dan nilai Islam agar pembelajaran di madrasah lebih holistik dan kontekstual. Bentuk kegiatannya adalah: a. Pelatihan integrasi sains dan Islam bagi guru.

No	Asta Protas Menteri Agama	Bentuk Kegiatan
		b. Pengembangan modul pembelajaran integrative c. Kompetisi riset sains islami antar madrasah
5	Pesantren berdaya	LPQ BERSINAR(Lembaga Pendidikan Quran Berdampak) Berprestasi dan Bersinergi: merupakan upaya penguatan lembaga pembelajaran Al-Qur'an agar berdaya saing dan berkontribusi terhadap masyarakat. Bentuk kegiatannya adalah: a. Pelatihan dan sertifikasi guru LPQ. b. Lomba-lomba tahfiz dan tilawah tingkat provinsi c. Pembentukan BKS LPQ Sumatera Barat
6	Pemberdayaan ekonomi umat	BERANI Bedah Rumah dan Bina Penghuni: adalah gerakan sosial keagamaan yang mengintegrasikan perbaikan rumah tidak layak huni dengan pembinaan keagamaan dan pemberdayaan masyarakat. Tahapannya adalah: 1. Identifikasi rumah tidak layak huni. 2. Pembinaan penghuni oleh penyuluh agama. 3. Kolaborasi dengan Baznas, LAZ, dan pemerintah daerah. 4. Pelaksanaan bedah rumah
7	Pemberdayaan rumah ibadah	Pengembangan Masjid Ramah bertujuan untuk mewujudkan masjid yang modern, profesional, dan berdaya guna bagi masyarakat luas. Kategori Masjid Ramah yaitu: 1. Masjid Ramah Anak MRA Menyediakan ruang aman, nyaman, kreatif, dan rekreatif untuk kegiatan positif anak-anak. 2. Masjid Ramah Difabel dan Lansia Memiliki fasilitas dan aksesibilitas yang mendukung kenyamanan penyandang disabilitas dan lansia. 3. Masjid Ramah Lingkungan (MRL) Mengedepankan konstruksi dan arsitektur yang ramah lingkungan. 4. Masjid Ramah Keragaman Mendorong inklusivitas dan toleransi antarumat beragama dan berbagai latar belakang. 5. Masjid Ramah Dhuafa dan Musafir Memberikan perhatian khusus dan bantuan bagi fakir miskin serta musafir.
8	Digitalisasi tatakelola	1. APIK ASN Pembelajar untuk Inovasi dan Kompetensi: merupakan aksi kegiatan pembelajaran secara daring oleh ASN Kementerian Agama dengan materi-materi yang diutamakan terkait dengan pemanfaatan IT, seperti pengelolaan Aplikasi Srikandi, Aplikasi SI-ASN, penggunaan software Canva dan CapCut. 2. PETARUNG KEREN Pelayanan Terpadu Unggul Ramah Kelompok Rentan: merupakan pengembangan aplikasi layanan digital pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

D. Kunci Keberhasilan dan Tantangan Utama

1. Faktor-faktor kunci keberhasilan kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa capaian Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, tidak terlepas dari kebersamaan yang kuat dalam mengimplementasikan Perjanjian Kinerja di seluruh satuan kerja jajaran Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Sehingga mendorong terciptanya budaya kerja yang disiplin dan akuntabel,

sekaligus memastikan bahwa setiap level organisasi memiliki arah pencapaian yang selaras.

2. Selain itu, sinergi lintas bidang—meliputi Urais, Penais-Zawa, Penmad, Pakis, PHU, dan Pembimas—berjalan lebih terstruktur melalui koordinasi yang sistematis, pembagian peran yang jelas, serta mekanisme monitoring yang terukur. Kontribusi sistem digitalisasi kinerja juga menjadi pendorong utama, di mana pemanfaatan aplikasi berbasis data memperkuat ketepatan pelaporan, meningkatkan efisiensi proses bisnis, dan mengoptimalkan pengambilan keputusan berbasis evidence.
3. Dukungan masyarakat dan lembaga keagamaan turut menjadi modal sosial yang signifikan dalam menjaga harmoni sosial, sementara efisiensi pengelolaan anggaran memastikan bahwa alokasi sumber daya difokuskan pada program prioritas yang memberikan dampak langsung bagi umat.

Namun demikian, pelaksanaan program strategis di tahun 2025 juga menghadapi sejumlah tantangan struktural yang memerlukan perhatian serius.

1. Keterbatasan jumlah tenaga fungsional penyuluh lintas agama di berbagai kabupaten/kota masih menjadi kendala dalam memperluas jangkauan moderasi beragama dan pembinaan kerukunan. Ketimpangan kapasitas infrastruktur pendidikan, termasuk konektivitas digital antar-madrasah, menciptakan kesenjangan mutu layanan pendidikan keagamaan, terutama antara wilayah perkotaan dan daerah.
2. Pada saat yang sama, tingkat literasi digital sebagian ASN di bidang teknis masih rendah, sehingga menghambat optimalisasi implementasi sistem kerja digital dan transformasi layanan berbasis teknologi.
3. Tantangan lainnya berkaitan dengan kebutuhan peningkatan integrasi sistem data lintas bidang, yang saat ini masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya terhubung dalam satu platform analitik kinerja yang komprehensif. Keterbatasan ini berdampak pada kesulitan dalam melakukan evaluasi kinerja berbasis data secara real time serta dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap dinamika lapangan.
4. Selain itu, sinergi antara Kementerian Agama ditingkat provinsi maupun kabupaten/ kota dengan pemerintah daerah dan lembaga pendidikan keagamaan non-formal masih perlu diperkuat, baik dalam bentuk kolaborasi program, regulasi pendukung, maupun harmonisasi perencanaan pembangunan bidang keagamaan. Tanpa penguatan sinergi ini, efektivitas program pemberdayaan dan peningkatan mutu pendidikan keagamaan berpotensi tidak optimal.

E. Rekomendasi Strategis Untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2026

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi tahun 2025, beberapa langkah strategis direkomendasikan untuk memperkuat kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat di tahun 2026, yaitu:

1. Optimalisasi peran FKUB dan penyuluh lintas agama untuk menjaga harmoni sosial berbasis komunitas dan budaya lokal serta pembentukan FKUB di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Tanah Datar

2. Percepatan akreditasi dan peningkatan mutu madrasah dan pesantren, melalui dukungan pendampingan akademik dan peningkatan infrastruktur pendidikan.
3. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data real time, sebagai dasar perencanaan berbasis bukti (evidence-based policy).
4. Kolaborasi strategis dengan lembaga daerah dan sektor swasta, untuk pemberdayaan zakat, wakaf, dan ekonomi umat berbasis keadilan sosial.
5. Penguatan kapasitas SDM dan tata kelola berbasis kompetensi, melalui capacity building, coaching, dan program “Manajemen Talenta ASN” berbasis hasil asesmen kompetensi.
6. Peningkatan digitalisasi layanan publik, dengan perluasan Smart Religious Office yang terintegrasi di seluruh kabupaten/kota.

Dengan capaian kinerja yang sangat baik di tahun pertama pelaksanaan Renstra 2025–2029 ini, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk terus memperkuat peran sebagai pelayan umat yang profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan, demi terwujudnya masyarakat Sumatera Barat yang rukun, maslahat, dan cerdas menuju Indonesia Emas 2045.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan MENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, maka Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat sebagai instansi vertikal Kementerian Agama

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama di provinsi, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat telah menyusun sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan yang dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja, sebagai upaya mendukung pencapaian misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Agama. Pelaporan dan analisis atas capaian kinerja dilakukan secara komprehensif, yang disajikan pada bagian akhir laporan sebagai upaya ke depan yang akan ditempuh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan dan mengakselerasi capaian kinerja di masa mendatang



B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan selama tahun 2025.
2. Tujuan dari penyusunan laporan ini untuk menggambarkan hasil evaluasi atas pencapaian kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dan dukungan terhadap pencapaian tujuan Kementerian Agama selama tahun 2025 dan selanjutnya dijadikan bahan masukan dalam penetapan kebijakan dan strategi pada tahun berikutnya

C. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Kanwil Kementerian Agama Provinsi berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

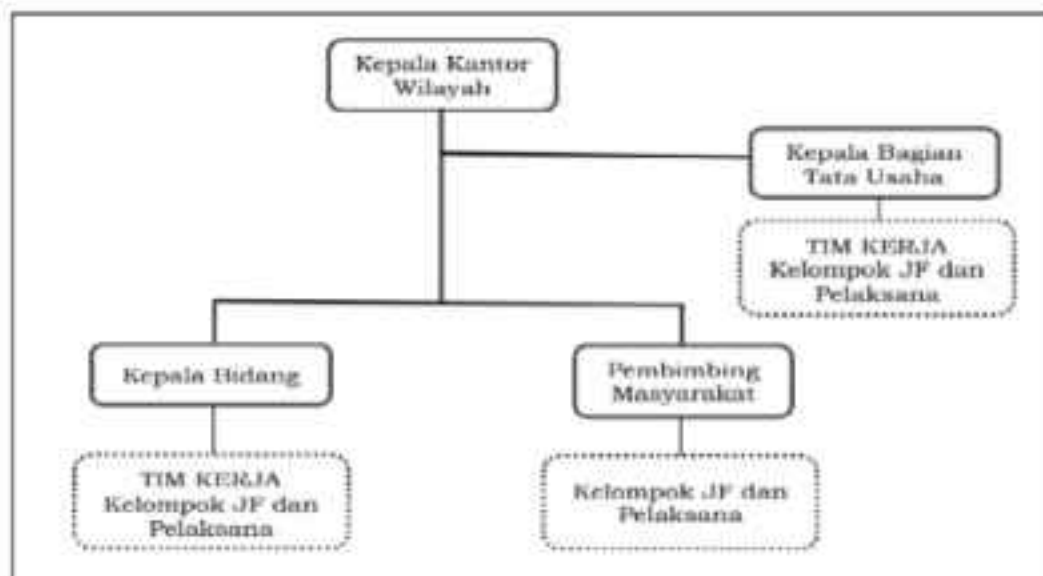
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kanwil Kementerian Agama Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi;
- Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama;
- Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;
- Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
- Pembinaan kerukunan umat beragama;
- Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan; dan
- Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di provinsi.

D. Struktur Organisasi dan Komposisi Pegawai Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat memiliki 9 unit kerja

**Grafik 1.1 Struktur dan Pola Koordinasi
Pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat**



Sumber : SK Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 1705/Kw.03.1/KP.07.6/12/2024

1. Bagian Tata Usaha

Bertugas melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas, pelayanan, pemberian dukungan, dan bina administrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi. Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, perjanjian kinerja, kegiatan dan anggaran, evaluasi, serta laporan;
- b. Pelaksanaan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara;
- c. Penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen, dan pengembangan pegawai;
- d. Penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar, dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan zona integritas;
- e. Penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, analisis, advokasi, dan penyuluhan hukum, serta kerja sama dan pengawasan orang asing;
- f. Pelaksanaan bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, dan harmonisasi umat beragama; pengelolaan data, pengembangan sistem informasi, hubungan masyarakat, dan publikasi; dan
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, serta fasilitasi pelayanan terpadu pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi.

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha, terdiri atas kelompok jabatan fungsional

2. Bidang Pendidikan Madrasah,

Bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan madrasah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi. Bidang Pendidikan Madrasah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan;
- b. Pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan madrasah;
- c. Bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum dan evaluasi, sarana prasarana, kelembagaan, pengembangan potensi siswa, guru dan tenaga kependidikan, kerja sama, dan pengelolaan sistem informasi pendidikan madrasah; dan
- d. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan.

Susunan organisasi Bidang Pendidikan Madrasah, terdiri atas kelompok jabatan fungsional

3. Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren,

Bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang pendidikan diniyah, diniyah takmiliyah, kesetaraan, Al-Quran, dan pondok pesantren berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi. Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren;
- b. Pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan diniyah dan pondok pesantren;
- c. Bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan diniyah takmiliyah, pendidikan diniyah formal dan ma'had aly, pendidikan pondok pesantren dan kesetaraan, dan pendidikan Al-Quran, serta pengelolaan sistem informasi pendidikan diniyah dan pondok pesantren; dan
- d. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren.

Susunan organisasi Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren terdiri atas kelompok jabatan fungsional

4. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah,

Bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan haji dan umrah
- b. Pelayanan dan pemenuhan standar pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah;
- c. Bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran, dokumen haji, transportasi, perlengkapan, akomodasi haji reguler, bina haji regular, advokasi haji, bina penyelenggara umrah dan haji khusus, serta administrasi dana haji dan sistem informasi haji dan umrah;
- d. Koordinasi pelayanan di asrama haji; dan
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

Susunan organisasi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, terdiri atas kelompok jabatan fungsional

5. Bidang Urusan Agama Islam,

Bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama Islam berdasarkan

kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi. Bidang Urusan Agama Islam menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang urusan agama Islam;
- b. Pelayanan dan pemenuhan standar nasional urusan agama Islam;
- c. Bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemasjidan, hisab rukyat dan bina syariah, bina paham keagamaan dan kepustakaan Islam, kepenghuluhan dan fasilitasi keluarga sakinah, fasilitasi bina lembaga dan sarana prasarana kantor urusan agama, serta pengelolaan sistem informasi urusan agama Islam;
- d. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang urusan agama Islam dan bina kantor urusan agama.

Susunan organisasi Bidang Urusan Agama Islam, terdiri atas kelompok jabatan fungsional

6. Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf

Bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi. Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf;
- b. Pelayanan dan pemenuhan standar nasional penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf;
- c. Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerangan dan penyuluhan agama Islam, kemitraan umat, publikasi dakwah, dan hari besar Islam, seni budaya Islam, musabaqah Al-Quran dan Al-Hadits, pemberdayaan, pemantauan, dan evaluasi lembaga pengelola zakat dan harta benda wakaf, serta pengelolaan sistem informasi penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf;
- d. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf.

Susunan organisasi Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf terdiri atas kelompok jabatan fungsional

7. Pembimbing Masyarakat Kristen

Bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

8. Pembimbing Masyarakat Katolik

Bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

9. Pembimbing Masyarakat Hindu

Bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

10. Pembimbing Masyarakat Buddha

Bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Susunan organisasi Pembimbing Masyarakat Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha terdiri atas kelompok jabatan fungsional

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh satuan kerja/ unit kerja yang tersebar di wilayah Sumatera Barat, dengan rincian

1. 19 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota dan 174 KUA Kecamatan

Tabel 1.1 : Kantor Kementerian Agama dan KUA Kecamatan di Sumatera Barat

No	Kementerian Agama	Jumlah KUA
1	Kabupaten Agam	16
2	Kabupaten Dharmasraya	11
3	Kabupaten Kepulauan Mentawai	5
4	Kabupaten Lima Puluh Kota	12
5	Kabupaten Padang Pariaman	17
6	Kabupaten Pasaman	12
7	Kabupaten Pasaman Barat	12
8	Kabupaten Pesisir Selatan	15
9	Kabupaten Sijunjung	8
10	Kabupaten Solok	14
11	Kabupaten Solok Selatan	7
12	Kabupaten Tanah Datar	14
13	Kota Bukittinggi	3
14	Kota Padang	11
15	Kota Padang Panjang	2
16	Kota Pariaman	4
17	Kota Payakumbuh	5

No	Kementerian Agama	Jumlah KUA
18	Kota Sawahlunto	4
19	Kota Solok	2
Jumlah		174

Sumber : Bidang Urusan Agama Islam

2. 430 RA, 159 MI (Negeri dan Swasta), 417 MTsN (Negeri dan Swasta) dan 222 MA (Negeri dan Swasta)

Tabel 1.2 : Jumlah RA, MI, MTs dan MA di Sumatera Barat

Kabupaten/Kota	RA				MI			MTs			MA		
	Akreditasi			Jml	Status		Jml	Status		Jml	Status		Jml
	A	B	C		N	S		N	S		N	S	
Kepulauan Mentawai	-	2	2	17		1	1	2	3	5		3	3
Pesisir Selatan	-	5	8	73	13	10	23	13	19	32	4	13	17
Solok	-	3	8	22	4	6	10	7	28	35	3	13	16
Sijunjung	-	-	6	31		4	4	6	8	14	2	2	4
Tanah Datar	-	4	8	14	3	4	7	17	32	49	4	20	24
Padang Pariaman	-	4	13	41	5	5	10	10	18	28	4	7	11
Agam	-	2	4	18	8	4	12	13	46	59	5	27	32
Lima Puluh Kota	-	7	8	19	1	9	10	7	21	28	1	9	10
Pasaman	-	5	7	16	2	8	10	5	12	17	2	11	13
Solok Selatan	-	1	7	28	7	12	19	6	11	17	2	6	8
Dharmasraya	-	20	10	37	2	6	8	1	18	19	1	13	14
Pasaman Barat	-	-	16	49	2	8	10	7	53	60	6	26	32
Kota Padang	2	14	14	50	7	8	15	7	14	21	3	7	10
Kota Solok	-	3	-	7	1	2	3	1	1	2	1		1
Kota Sawah Lunto	-	5	1	10	3	2	5	2	1	3	1	1	2
Kota Padang Panjang	-	2	-	3		3	3	1	5	6	3	6	9
Kota Bukittinggi	1	2	-	6	1	2	3	2	4	6	2	4	6
Kota Payakumbuh	-	10	1	12	1	1	2	2	4	6	3	2	5
Kota Pariaman	-	-	1	4	2	2	4	3	6	9	1	3	4
Sumatera Barat	3	89	114	457	62	97	159	112	304	416	48	173	221

Sumber : Bidang Penmad

3. 11 PKPPS Ula, 56 PKPPS Wustha dan 48 PKPPS Ulya

E. Sumber Daya Manusia

Jumlah ASN pada Satuan Kerja Jajaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat berdasarkan data simpeg.kemenag.go.id per 15 Januari 2026 sebanyak 13.346 orang dengan rincian berdasarkan jabatan, latar belakang pendidikan, dan golongan kepangkatan.

1. Berdasarkan Jabatan

Komposisi ASN pada Satuan Kerja Jajaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat berdasarkan uraian jabatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3 : Jumlah ASN berdasarkan jabatannya

No	Jabatan	Jumlah
I	Struktural	
1	JPT Pratama	1
2	Jabatan Administrator	27
3	Jabatan Pengawas	117
4	Jabatan Pelaksana	134
Jumlah Pejabat Struktural dan Pelaksana		270
II	Fungsional	
1	Guru	8.048
2	Jabatan Pelaksana	2.745
3	Penyuluh Agama	1.140
4	Penghulu	401
5	Pengawas	136
6	Pengembang Teknologi Pembelajaran	118
7	Pranata Keuangan	96
8	Jabatan Fungsional Umum	61
9	Pranata Komputer	52
10	Analisis SDM Aparatur	46
11	Perencana	46
12	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	44
13	Arsiparis	36
14	Pranata Humas	31
15	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	28
16	Pengawas Jaminan Produk Halal	21
17	Analisis Hukum	4
18	Pranata SDM Aparatur	3
19	Pustakawan	3
20	Analisis Kebijakan	2
21	Statistisi	2
22	Pamong Belajar	1
23	Pamong Budaya	1
24	Penerjemah	1
25	Penggerak Swadaya Masyarakat	1
Jumlah Pejabat Fungsional		13.067
Jumlah		13.346

Sumber : Tim Kerja Kepegawaian (simpeg.kemenag.go.id)

Pasca penetapan Kementerian Haji dan Umrah serta BPJH, sebanyak 319 ASN Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat mengalami perpindahan

2. Berdasarkan Pendidikan

Susunan ASN pada Satuan Kerja Jajaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat berdasarkan latar belakang pendidikan

Tabel 1.4 : Jumlah ASN berdasarkan latar belakang pendidikan

No.	Kanwil / Kantor Kementerian Agama	Jumlah	Pendidikan									
			SD	SLTP	SLTA	DI	D.II	D.III	D.IV	S1	S2	S3
1	Kanwil Provinsi Sumatera Barat	246	24	4	27	0	1	2	1	121	60	6
2	Kabupaten Lima Puluh Kota	587	13	5	70	0	8	7	1	440	41	2
3	Kabupaten Agam	1167	1	7	84	2	13	16	2	969	31	2
4	Kabupaten Padang Pariaman	932	1	1	80	0	3	17	1	763	64	2
5	Kabupaten Pasaman	650	1	1	59	2	2	7	2	530	45	1
6	Kabupaten Pesisir Selatan	1616	6	7	113	1	10	24	2	1365	87	1
7	Kabupaten Sijunjung	425	1	4	57	0	2	8	0	329	24	0
8	Kabupaten Solok	777	10	4	36	0	7	13	2	642	63	0
9	Kabupaten Tanah Datar	1175	3	3	81	0	7	18	3	975	84	1
10	Kabupaten Kepulauan Mentawai	159	0	1	33	0	1	4	0	118	2	0
11	Kabupaten Pasaman Barat	841	4	5	71	0	9	14	0	688	49	1
12	Kabupaten Solok Selatan	585	17	8	54	0	11	8	4	470	13	0
13	Kabupaten Dharmasraya	321	2	10	32	0	2	2	0	258	15	0
14	Kota Bukittinggi	449	2	2	17	0	7	5	1	349	66	0
15	Kota Padang	1340	1	11	87	0	7	31	1	1032	166	4
16	Kota Padang Panjang	364	1	4	27	0	3	7	1	271	49	1
17	Kota Payakumbuh	554	0	1	60	0	4	15	6	417	51	0
18	Kota Sawahlunto	245	0	1	12	0	1	1	0	190	39	1
19	Kota Solok	238	0	0	9	0	4	4	3	200	17	1
20	Kota Pariaman	356	11	0	21	0	1	9	1	277	35	1
Jumlah		13.027	98	79	1.030	5	103	212	31	10.404	1.041	24

Sumber : Tim Kerja Kepegawaian (simpeg.kemenag.go.id)

ASN dengan latar belakang pendidikan S-1 berjumlah 10.404 orang, terbanyak dibandingkan dengan latar belakang pendidikan lainnya

3. Berdasarkan Golongan

Susunan ASN, berdasarkan uraian golongan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.5 : Jumlah ASN Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat berdasarkan golongan

No	Golongan Ruang	Jumlah	Persentase
PNS		7.733	59,36
1	Golongan I	3	0,02
2	Golongan II	244	1,87
3	Golongan III	5354	41,10
4	Golongan IV	2132	16,37
PPPK		5.294	40,64
1	Golongan I	7	0,05
2	Golongan V	567	4,35
3	Golongan VII	132	1,01

No	Golongan Ruang	Jumlah	Persentase
4	Golongan IX	4588	35,22
Jumlah		13.027	100

Sumber : Tim Kerja Kepegawaian (simpeg.kemenag.go.id)

Ditinjau dari golongan, jumlah ASN Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat terbanyak pada golongan III sebanyak 5.354 orang pegawai atau 41,40% dari jumlah seluruh ASN. Berikutnya golongan IV sebanyak 2.132 orang atau 16,37%. Sedangkan golongan IX merupakan jumlah PPPK terbanyak, 4.588 orang atau 35,22% dan golongan I sebanyak 7 orang atau 0,05%.

F. Sistematika Pelaporan

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama

	BAB I PENDAHULUAN Bagian ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi
	BAB II PERENCANAAN KINERJA Bagian ini menguraikan tentang Rencana Strategis Tahun 2020—2024 beserta perubahan terhadap rencana strategis tersebut berdasarkan hasil reviu dan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025
	BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Bab ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: Bagian 1, Capaian Kinerja Organisasi, yang menguraikan capaian kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kinerja Tahun 2025 sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan analisis serta evaluasi terhadap capaian kinerja tersebut; Bagian 2, Capaian Kinerja Anggaran, yang menguraikan tentang anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Bagian 3, Capaian Kinerja Lainnya



BAB IV PENUTUP

Bagian ini menguraikan tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2025 dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja di tahun selanjutnya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Nomor 690 Tahun 2025 tentang Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, disusun dengan menujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2026 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025 - 2029. Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat merupakan perencanaan strategis 5 tahunan yang memuat penjabaran tujuan, sasaran program, dan indikator kinerja Kementerian Agama.

Dokumen Renstra ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Kementerian Agama. Renstra, dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan dalam periode tahun 2025-2029 serta penyusunan Perjanjian Kinerja dan menjadi dokumen penting dalam penyusunan eKinerja. Dokumen Renstra ini juga mendukung pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.

A.1 Visi dan Misi

Visi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat merujuk pada visi Kementerian Agama 2025-2029

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG RUKUN, MASLAHAT DAN CERDAS BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Terdapat tiga kata kunci dalam Visi Kementerian Agama, yaitu **Rukun, Maslahat, dan Cerdas**. Kandungan makna dalam masing-masing kata tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Rukun** merupakan dasar kehidupan bermasyarakat yang harmonis di tengah keberagaman Indonesia. Rukun atau kerukunan berarti hubungan yang harmonis antara berbagai kelompok masyarakat, termasuk antarumat beragama, antarsuku, dan antara masyarakat dan pemerintah. Kerukunan tidak hanya berarti tidak adanya konflik, tetapi juga adanya kolaborasi aktif untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai negara dengan berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa, rukun menjadi kunci utama untuk menjaga persatuan.

Rukun sendiri memiliki tiga dimensi, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Toleransi berarti sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam keyakinan, praktik keagamaan, dan kebebasan beribadah tanpa memaksakan pandangan pribadi kepada orang lain. Kerukunan juga mengisyaratkan cara pandang keagamaan dan kebangsaan terhadap kesetaraan sebagai anak bangsa yang memiliki hak yang sama dalam menjalankan keyakinan dan beribadah tanpa diskriminasi.

Makna kesetaraan dalam kerukunan beragama merujuk pada pengakuan dan perlakuan yang adil terhadap setiap pemeluk agama tanpa membedakan latar belakang keyakinan.

Kesetaraan ini menempatkan setiap individu dalam posisi yang sama di hadapan hukum, negara, dan masyarakat, sehingga tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah berdasarkan agamanya. Dalam konteks kerukunan, kesetaraan mendorong terciptanya ruang dialog yang sehat, saling menghargai perbedaan, serta kerja sama yang harmonis antarumat beragama demi menciptakan kehidupan sosial yang damai, toleran, dan inklusif. Kerukunan juga mengandung kerjasama sebagai kesediaan untuk melakukan aktivitas bersama dalam lingkup sosial atau ekonomi, dalam ikatan komunitas, pemukiman ataupun lingkaran profesi, kesukaan terhadap hal tertentu. Keberagamaan yang mengedepankan kerukunan adalah kunci dalam membangun kebersamaan sebagai bangsa Indonesia dan berkontribusi terhadap pembangunan.

2. **Maslahat.** Maslahat dalam konteks beragama adalah keberagamaan yang relevan dengan kebutuhan zaman, tidak hanya bersifat ritualistik tetapi juga menyentuh aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya serta memberi manfaat bagi kebaikan sosial lingkungan alam semesta. Beragama yang maslahat adalah praktek keagamaan yang mengedepankan manfaat bagi pihak lain, orang lain dan lingkungan. Ajaran agama diharapkan mampu menjadi panduan untuk menciptakan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Beragama maslahat mencerminkan keberagamaan yang memberikan manfaat dan membawa kebaikan, baik secara individu maupun kolektif, sehingga terbangun kesejahteraan bersama.
3. **Cerdas** adalah istilah yang merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menganalisis, dan menerapkan informasi atau pengetahuan secara efektif dalam berbagai situasi. Visi cerdas adalah capaian kondisi masyarakat yang memiliki keandalan dari aspek mental, emosional, sosial, dan praktis yang memungkinkan individu-individu mampu beradaptasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang bijaksana. Pencapaian visi cerdas dilakukan Kemenag melalui program pendidikan yang dikembangkan melalui sejumlah institusi pendidikan di seluruh Indonesia.

Visi tersebut merupakan wujud dari komitmen bersama untuk membangun masyarakat Indonesia yang harmonis, sejahtera, dan berdaya saing tinggi, sejalan dengan cita-cita besar bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini mengandung semangat transformasi dan kolaborasi yang mendalam, dan mencerminkan arah pembangunan bangsa dalam jangka panjang. Visi ini juga menggambarkan arahan strategis yang menuntun seluruh elemen bangsa untuk berkontribusi dalam membangun Indonesia yang harmonis, sejahtera, dan berdaya saing. Melalui kolaborasi, inovasi, dan kerja keras, visi ini menjadi panduan untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa di tahun 2045, dengan tetap menjaga nilai-nilai luhur kebangsaan dan keberlanjutan pembangunan untuk generasi mendatang.

Kementerian Agama menetapkan misi 2025-2029 merupakan langkah strategis untuk mewujudkan visi besar “Terwujudnya Masyarakat yang Rukun, Maslahat, dan Cerdas Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Misi ini dirancang untuk menjembatani gagasan besar visi ke dalam program kerja nyata yang dapat diimplementasikan secara berkesinambungan. Setiap misi mencerminkan upaya konkret

untuk mendukung elemen dalam visi, yaitu menciptakan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan cerdas.

Adapun misi Kementerian Agama 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan

Misi pertama bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, memperkuat harmoni dalam kehidupan beragama, yang sejalan dengan kata kunci rukun dan maslahat dalam visi Kemenag. Kehidupan beragama yang rukun adalah pondasi bagi terciptanya masyarakat yang harmonis, sementara orientasi pada kemaslahatan memastikan agama menjadi kekuatan positif yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui misi ini, masyarakat Indonesia diharapkan tidak hanya hidup rukun, tetapi juga memanfaatkan nilai-nilai agama untuk membangun kesejahteraan bersama. Dengan harmoni yang terjaga, masyarakat akan lebih siap menghadapi tantangan global dan berkontribusi pada cita-cita besar Indonesia Emas 2045.

2. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum dengan kekhasan agama, pesantren dan pendidikan keagamaan, Ramah dan Terintegrasi (Asta 4) dan Pesantren Berdaya

Misi kedua bertujuan untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan mendukung kata kunci masyarakat cerdas dalam visi Kemenag. Cerdas diwujudkan melalui pendidikan yang berkualitas sebagai elemen penting dalam mencetak generasi yang tidak hanya memahami nilai-nilai agama tetapi juga memiliki kemampuan intelektual dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Pendidikan yang berkualitas menjadikan masyarakat Indonesia memiliki kemampuan intelektual dan memiliki kesadaran moral yang tinggi. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan nilai-nilai agama menjadi kunci dalam membentuk generasi yang unggul secara akademik sekaligus berkarakter mulia. Generasi terdidik dan berdaya mendorong terciptanya ekosistem inovatif, harmoni dan bemaslahat, serta berkontribusi pada kemajuan bangsa.

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Misi ketiga mencerminkan pentingnya tata kelola yang baik untuk mendukung pencapaian visi Kemenag. Tata kelola yang baik adalah prasyarat untuk memastikan keberhasilan implementasi program di bidang agama dan pendidikan—program yang mendukung toleransi, kemaslahatan, dan kerukunan. Untuk itu, seluruh pelaksanaan program harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan profesional, sehingga setiap prosesnya dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan tata kelola yang demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat, sehingga memudahkan terciptanya kolaborasi dalam mewujudkan masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas. Hal ini juga akan mempercepat langkah menuju Indonesia yang maju dan berdaya saing pada tahun 2045.

A.2 Tujuan

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, mendukung lima tujuan strategis Kementerian Agama dengan memperhatikan tantangan di bidang agama, pendidikan dan tata kelola. Berikut lima tujuan tersebut:

1. Perwujudan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan melalui peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa dengan indikator tujuan, yaitu Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Kesalehan Umat Beragama;
2. Peningkatan kualitas umat beragama yang berdampak melalui pelayanan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji, dan pemberdayaan ekonomi yang merata, adil, dan inklusif berbasis ekoteologi dengan indikator tujuan yaitu, Indeks Layanan Keagamaan;
3. Peningkatan akses pendidikan yang terintegrasi, berkeadilan, ramah, dan terjangkau dengan indikator tujuan Tingkat Penyelesaian Pendidikan MA/ Ulya/ SMTK/ SMAK/ Utama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha;
4. Peningkatan mutu dan lulusan lembaga pendidikan dan pesantren yang mandiri, unggul dan berdaya saing dengan indikator tujuan yaitu, Persentase peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan pendidikan keagamaan yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) Literasi (b) Numerasi, persentase guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan;
5. Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya yang bersih dan melayani berbasis digital dengan indikator tujuan Nilai Reformasi Birokrasi.

A.3 Sasaran

Untuk mendukung pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Agama, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 4 Program, dengan 20 Sasaran Kegiatan (SK) dan 81 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) pada tahun 2025. Karena pemisahan Penyelenggaraan Haji dan Umrah, ditahun 2026 melaksanakan 15 SK dan 74 IKSK yang mencerminkan kondisi ideal yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2029. Setiap sasaran ini dilengkapi dengan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dan dapat dijadikan acuan dalam menilai ketercapaian target yang diharapkan

A.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan Kanwil Kementeerian Agama Provinsi Sumatera Barat, dalam mendukung kebijakan Kementerian Agama diuraikan dengan mempertimbangkan 5 tujuan Kementerian Agama. Strategi yang telah dirumuskan, disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan wewenang yang diberikan kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Arah kebijakan dan strategi tersebut dirumuskan sebagai berikut

1. Mendukung Tujuan 1 Kementerian Agama : Perwujudan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan melahui peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat

untuk kemaslahatan bangsa dengan indikator tujuan, yaitu Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Kesalehan Umat Beragama (tabel 2.1)

Tabel 2.1 : Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Mendukung Pencapaian Tujuan 1

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
SS 1	Meningkatnya masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni social	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama 2. Indeks Kesalehan Umat Beragama

Dilakukan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat melalui Program Kerukunan Umat Beragama dan Layanan Kehidupan Beragama, dengan 2 kegiatan, 1 SK dan 2 IKSK

Program Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama

Kegiatan • Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
• Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah

SK-1 Meningkatkan jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama

IKSK 1. Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00
2. Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS

2. Mendukung Tujuan 2 Kementrian Agama : Peningkatan kualitas umat beragama yang berdampak dilakukan melalui pelayanan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji, dan pemberdayaan ekonomi yang merata, adil dan inklusif berbasis ekoteologi, dapat tercapai dengan sasaran berikut:

Tabel 2.2 : Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Mendukung Pencapaian Tujuan 2

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
SS 2	Meningkatnya layanan keagamaan transformative	Indeks Layanan Keagamaan

Dilakukan melalui pelaksanaan Program Kerukunan Umat Beragama dan Layanan Kehidupan Beragama, dengan 11 kegiatan, 7 SK dan 22 IKSK, berikut :

Program Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama

Kegiatan • Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
• Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
• Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen
• Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik
• Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu
• Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha
• Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
• Pembinaan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

- Pelayanan Haji Dalam Negeri
- Pelayanan Haji Luar Negeri
- Pembinaan Haji

- IKSK
1. Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk menumuskan rekomendasi EWS
 2. Persentase peningkatan audiens MTQ/ Pesparawi/ Pesparani/ Utsawa Dharma Gita/ Swayamvara Tripitaka Gatha
 3. Persentase peningkatan peserta event seni budaya
 4. Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan

SK-2 Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak

- IKSK
1. Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)
 2. Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
 3. Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi
 4. Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah
 5. Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan
 6. Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan
 7. Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat
 8. Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan
 9. Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah
 10. Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional
 11. Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan

SK-3 Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji

- IKSK
1. Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota

SK-4 Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji

- IKSK
1. Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan
 2. Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu

SK-5 Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah

IKSK Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A);

- Lembaga penyelenggara haji khusus\
- Lembaga penyelenggara umrah

SK-6 Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji

IKSK Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar

SK-7 Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji

- IKSK
- Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75
 - Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji

3. Mendukung Tujuan 3 Kementerian Agama : Peningkatan akses pendidikan yang terintegrasi, berkeadilan, ramah dan terjangkau, dapat tercapai dengan sasaran berikut:

Tabel 2.3 : Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Mendukung Pencapaian Tujuan 3

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
SS 3	Meningkatnya pemerataan akses pendidikan	Tingkat Penyelesaian Pendidikan MA/ Ulya/ SMTK/ SMAK /Utama Widyalyaya/ Utama Dhammasekha

Dilakukan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat melalui pelaksanaan Program Wajib Belajar 13 Tahun, dengan 2 kegiatan, 2 SK dan 7 IKS

Program Program Wajib Belajar 13 Tahun

- Kegiatan**
- Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam
 - Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah

SK-8 Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan

IKSK Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik

SK-9 Meningkatnya sarana dan prasa rana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas

- IKSK
- Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggara kan pendidikan inklusif
 - Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang

- memperoleh peningkatan sarana prasarana
3. Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren
 4. Persentase Anak Kelas 1 MI yang pernah mengikuti PAUD (TK/RA/BA)
 5. Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah
 6. Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren
4. Mendukung Tujuan 4 Kementerian Agama : Peningkatan mutu dan luhusan lembaga pendidikan dan pesantren yang mandiri, unggul dan berdaya saing

Tabel 2.4 : Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Mendukung Pencapaian Tujuan 4

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
SS 4	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah	1. Persentase peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan pendidikan keagamaan yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional : a. Literasi membaca b. Numerasi
		2. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anak
SS 5	Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan

Dilakukan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat melalui pelaksanaan Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran, dengan 5 kegiatan, 2 SK dan 24 IKS,

Program Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

- Kegiatan**
- Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam
 - Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah
 - Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
 - Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah
 - Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam

SK-10 Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan

relevan

- IKSK 1. Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk:
- Literasi membaca
 - Numerasi
2. Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas
3. Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran
4. Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler
5. Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinian, tanggung jawab)
6. Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan
7. Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B
8. Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara
9. Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual
10. Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional
11. Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik
12. Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran

SK-11 Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan

- IKSK 1. Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP
2. Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal
3. Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik
4. Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil
5. Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil
6. Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik
7. Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan Kristen (AKP) minimal predikat terampil

8. Persentase guru yang meningkat jenjang karir
 9. Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir
 10. Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)
 11. Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan
5. Mendukung Tujuan 5 Kementerian Agama: Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya yang bersih dan melayani berbasis digital dapat tercapai dengan sasaran berikut:

Tabel 2.5 : Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Mendukung Pencapaian Tujuan 5

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
SS 7	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	Nilai reformasi birokrasi

Mendukung pencapaian tujuan 5, dilakukan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat melalui pelaksanaan Program Dukungan Manajemen, dengan 8 kegiatan, 9 SK dan 27 IKSK, berikut

Program Program Dukungan Manajemen

Kegiatan

- Pembinaan Administrasi Perencanaan
- Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
- Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN
- Pembinaan Administrasi Kepegawaian
- Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN
- Pembinaan Administrasi Umum
- Pembinaan Administrasi Kehumasan dan Komunikasi Publik
- Peningkatan Layanan Data dan Teknologi Informasi
- Dukungan Manajemen Pendidikan

SK-12 Meningkatkan kualitas perencanaan dan anggaran

IKSK Nilai Kinerja Anggaran

SK-13 Meningkatkan kualitas penerapan Reformasi Birokrasi

- IKSK**
1. Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar
 2. Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75

SK-14 Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan BMN

- IKSK**
1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
 2. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
 3. Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu
 4. Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas

- Pelaporan Keuangan (PIPK)
5. Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu
- SK-15 Meningkatkan kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)**
- IKSK
1. Indeks Profesionalisme ASN
 2. Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan
 3. Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/ Inspiratif
- SK-16 Meningkatkan kualitas layanan dan bantuan hukum**
- IKSK
1. Persentase kasus hukum yang terselesaikan
 2. Persentase rekomendasi izin orang asing
- SK-17 Meningkatkan kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa**
- IKSK
1. Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses
 2. Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap
- SK-18 Meningkatkan layanan informasi dan dokumentasi**
- IKSK
1. Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID
 2. Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi
- SK-19 Meningkatkan kualitas data dan sistem informasi**
- IKSK
1. Indeks Pembangunan Statistik
 2. Persentase data statistik yang dipublikasi
- SK-20 Meningkatkan Layanan Prima Bidang Pendidikan**
- IKSK
1. Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output
 2. Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama
 3. Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media
 4. Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media
 5. Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK
 6. Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra
 7. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

B. Perjanjian Kinerja 2025

Perjanjian Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 disusun dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan Target Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014. Pada dokumen Perjanjian Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, telah ditetapkan **25 (dua lima) Sasaran Kegiatan dan 95 (sembilan puluh lima) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan**, sebagaimana dokumen yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut:

**Tabel 2.6 : Lampiran Perjanjian Kinerja
Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Jaminan Kebebasan Beribadah	1 Persentase rekomendasi Early Warning System yang di tindaklanjuti	60
		2 Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi	70
2.	Meningkatnya kualitas penyiaran agama yang berdampak pada spiritual dan sosial dan event keagamaan	3 Nilai kesalehan umat beragama pada Kanwil dengan kategori tinggi	87
		4 Persentase peningkatan jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/perayaan agama bernafaskan agama (MTQ, Pesparani, Pesparawi, Utsawa Dharmagita, Swayamvara Tripitaka Gatha)	89
		5 Persentase penyiar agama yang memperoleh sertifikat kompetensi	40
3.	Peningkatan kemitraan dengan tokoh dan lembaga keagamaan	6 Persentase tokoh agama, lembaga agama dan ormas keagamaan yang dibina	92,5
4.	Meningkatnya sarana pendukung pelayanan keagamaan	7 Persentase peningkatan sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	88,38
		8 Persentase peningkatan kitab suci yang disediakan	50
		9 Persentase peningkatan buku keagamaan yang disediakan	50
		10 Persentase masjid/ musholla bersertifikat arah kiblat	70
5.	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama	11 Persentase Mou, PKS dan bentuk kerjasama penyuluhan yang ditindaklanjuti	100
		12 Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	1 : 12
		13 Persentase pemenuhan jumlah penyuluh pada tiap jenjang fungsional	74,35
6.	Meningkatnya akses Catin terhadap layanan bimbingan perkawinan	14 Presentase calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan	75
		15 Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah	85

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
7.	Meningkatnya partisipasi keluarga dalam layanan bimbingan keluarga	16 Persentase keluarga mendapatkan bimbingan keluarga sakinah/ bahagia/ sakinah/ kristiani/ hittasukhaya	76,65
8.	Meningkatnya kualitas pelayanan KUA	17 Jumlah KUA yang direvitalisasi	100
		18 Persentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana	100
		19 Persentase KUA yang menyelenggarakan layanan inovatif dan berbasis digital	50
		20 Persentase penghulu yang memenuhi komposisi kebutuhan KUA	80
9.	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	21 Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar	95
10.	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	22 Persentase pusat pendaftaran dan pembatalan haji yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	30
		23 Tingkat kepuasan pusat pendaftaran dan pembatalan haji	75
11.	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	24 Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	90
12.	Meningkatnya kualitas penerimaan zakat dan wakaf/dana sumbangan /sosial keagamaan	25 Persentase kolaborasi program pen dayagunaan zakat dan pengem bangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejah teraan	60
		26 Persentase harta benda wakaf yang di kelola dan dikembangkan produktif	98
		27 Persentase kerjasama pengembang an pemanfaatan aset wakaf	98
13.	Meningkatnya profesionalitas lembaga dana sosial keagamaan	28 Persentase lembaga dana sosial keagamaan/ zakat yang sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan professional	98
		29 Persentase lembaga zakat dan wakaf yang dibina	100
14.	Meningkatnya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas	30 Persentase satuan pendidikan/ pesantren yang memenuhi standar sarpras	78,5
		31 Persentase satuan pendidikan/ pesantren yang menyediakan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif	2,25
		32 Persentase peningkatan jumlah siswa/ santri pada satuan pendidikan	35
		33 Persentase peningkatan jumlah siswa/ santri pada satuan pendidikan daerah 3 T	3
		34 Persentase Anak Kelas 1 MI/ ula/ Sederajat yang pernah mengikuti PAUD (TK/RA/BA)	55
		35 Persentase ATS yang mengikuti Program Pendidikan Kesetaraan (PPK) di Pondok Pesantren	3

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		36 Persentase satuan pendidikan nonformal yang direvitalisasi	65
15.	Meningkatnya persentase penyelesaian pendidikan MA/Ulya/ SMTK/ SMAK/ Utama Widyalyaya/ sederajat	37 Persentase siswa dalam satu kohort yang lulus tepat waktu	82,5
16	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	38 Persentase siswa yang mengikuti asesmen (AN)	87,5
		39 Persentase santri yang mengikuti Imtihan Wathani (IW)	44
		40 Indeks keberagamaan siswa pada madrasah/sekolah/widyalyaya/widya dharma	75
		41 Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa	63,33
17.	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang inovatif	42 Persentase satuan pendidikan /pesantren yang menerapkan kurikulum yang berfokus pada kompetensi esensial, adaptif, dan kontekstual	62,5
		43 Persentase satuan pendidikan/ pesantren yang menerapkan kurikulum agama bermuatan moderasi beragama	97,5
		44 Persentase satuan pendidikan /pesantren yang memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern	77,5
18	Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu	45 Persentase PAUD/RA/Pratama Widyalaya/ Taman Seminari/Nava Dhamma sekha yang terakreditasi minimal B	50
		46 Persentase MI/SDTK/Adhi Widyalaya/ Mula Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	70
		47 Persentase MTs/ SMPTK/ Madyama Widyalaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	75
		48 Persentase MA/ SMTK/ SMAK /Utama Widyalaya/Uttama Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	70
		49 Persentase Satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil asesmen minimal jayyid	25
		50 Persentase peserta didik pada pendidikan keagamaan/pesantren yang menyelesaikan pendidikan setara formal	40
		51 Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	43,5
		52 Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	1,75
		53 Persentase lulusan pendidikan keagamaan dan pendidikan pesantren yang memperoleh rekognisi	60
19.	Meningkatnya kualitas pendidikan vokasi berbasis kerjasama	54 Persentase MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri	50

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		55 Persentase MA Kejuruan dan MA Program Keterampilan yang meningkatkan life skill melalui program magang	50
20.	Menguatnya pendidikan karakter siswa	56 Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	65
21.	Meningkatnya kualitas lingkungan belajar	57 Persentase satuan pendidikan Ramah Anak	55,5
		58 Persentase siswa yang memperoleh nilai karakter minimal baik	82,5
		59 Persentase satuan pendidikan yang memiliki kultur mutu kelembagaan	60
22.	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamuakaan	60 Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada madrasah yang bermuatan moderasi beragama	120
		61 Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina	222
23.	Menguatnya Implementasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI)	62 Persentase RA/PAUDQU/Pratama Widyalyaya/ Taman Seminari/Nava Dhamasekha yang menerapkan program Holistik-Integratif	60
		63 Persentase PAUD/TK yang menerapkan kurikulum agama yang berfokus pada kompetensi esensial secara adaptif dan kontekstual	50
24.	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	64 Persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidik S1	85,33
		65 Persentase tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi pendidik S1	71,66
		66 Persentase guru yang memiliki Sertifikat Pendidik	66,66
		67 Persentase tenaga kependidikan yang memperoleh sertifikat kompetensi	57,16
		68 Persentase pemenuhan kebutuhan Guru Pendidikan Agama pada satuan pendidikan	56,5
		69 Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	42,5
		70 Persentase Kepala Madrasah/Sekolah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	40
		71 Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal baik	42,5
		72 Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah/Sekolah (AKP) minimal predikat terampil	45

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		73 Persentase satuan pendidikan yang memiliki indikator kualitas pembelajaran dengan kategori baik	70
		74 Persentase guru yang meningkat jenjang karir	25,5
		75 Persentase pengawas yang meningkat jenjang karir	25,25
25.	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	76 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75
		77 Persentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai standar	90
		78 Persentase satuan kerja yang memperoleh nilai tingkat kematangan penerapan manajemen risiko minimal 3	60
		79 Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar dan tepat waktu	80
		80 Persentase satuan kerja yang menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi	60
		81 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90
		82 Persentase penyelesaian kerugian negara pada Kementerian Agama	80
		83 Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	2
		84 Indeks Profesionalisme ASN	71
		85 Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	85
		86 Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan /Inspiratif	10
		87 Persentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	85
		88 Nilai Kepuasan Layanan (Langsung) Kepengawain	100
		89 Persentase kasus hukum yang terselesaikan	100
		90 Persentase rekomendasi izin orang asing	100
		91 Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang discounter	100
		92 Jumlah viewer yang memanfaatkan Digital layanan Kementerian Agama	100.000
		92 Persentase layanan keagamaan dan pendidikan berbasis IT	75
		94 Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	90
		95 Persentase digitalisasi arsip yang mudah diakses	80

Sumber : Tim Kerja Perencanaan

Dengan terbitnya PMA Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama 2025-2029 dan Surat Keputusan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Nomor 690 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat 2025-2029, berdasarkan Surat Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Kementerian Agama Nomor 0062/SJ/B.IV.2/OT.01.2/01/2026 tanggal 20 Januari 2026 perihal Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 dan Penyampaian Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025, perlunya merevisi Perjanjian Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 untuk menyeleraskan dengan Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2025-2029. Perjanjian Kinerja 2025, setelah revisi, menjadi :

**Tabel 2.7 : Lampiran Revisi Perjanjian Kinerja
Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025
BIDANG AGAMA				
1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemasyarakatan umat beragama	1 Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi	Nilai	70,89
		2 Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	Persen	16,00
		3 Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Persen	30,40
		4 Persentase peningkatan audiens MTQ/ Pesparani/ Pesparawi/ Utsawa Dhar magita/ Swayam Vara Tripitaka Gatha	Persen	22,80
		5 Persentase peningkatan peserta event seni budaya	Persen	30,40
		6 Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Persen	76,00
2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	1 Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Persen	81,99
		2 Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Persen	1:5
		3 Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi	Persen	30,00
		4 Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	Persen	12,14
		5 Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	Persen	15,00
		6 Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	Persen	16,63

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025
		7 Persentase masjid/musholla bersertifi kat arah kiblat	Persen	2,38
		8 Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan	Persen	19,00
		9 Persentase buku keagamaan pendu kung peribadatan yang sesuai kaidah	Persen	19,00
		10 Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	Persen	14,73
		11 Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan	Persen	18,00
3	Meningkatnya kualitas pelayan an jemaah haji	Persentase calon jamaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	Persen	99,85
4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1 Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	Persen	52,63
		2 Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu	Nilai	75,00
5	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah	Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A):	Persen	
		a. Lembaga penyelenggara haji khusus;		75,00
		b. Lembaga penyelenggara umrah		85,00
6	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar	Persen	95
7	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	1 Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	Persen	90
		2 Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	Persen	100
BIDANG PENDIDIKAN				
8	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik	Persen	73,15
9	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	1 Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendid ikan inklusif	Persen	2,19
		2 Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	Persen	60,80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025
		3 Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren	Persen	0,71
		4 Persentase Anak Kelas 1 MI/SD /Adi Widyalyaya/Mula Dhamma sekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/ Taman Seminari/Pratama Widya laya/ Nava Dhammasekha)	Persen	13,30
		5 Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	Persen	19,00
		6 Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	Persen	20,05
10	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	1 Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a Literasi membaca b Numerasi	Nilai	65,31 62,23
		2 Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Persen	83,00
		3 Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Persen	95,00
		4 Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Jumlah	500
		5 Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	Persen	0,71
		6 Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	Persen	93,00
		7 Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	Persen	61,75
		8 Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	Persen	1,75
		9 Persentase satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	Persen	14,25
		10 Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Persen	0,71

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025
		11 Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Persen	49,40
		12 Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	Persen	41,50
11	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	1 Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Persem	41,50
		2 Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	Persen	1 : 10
		3 Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Persen	29
		4 Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	28,74
		5 Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Persen	38,60
		6 Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	Persen	64,65
		7 Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	Persen	40,17
		8 Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan Kristen (AKP) minimal predikat terampil	Persen	68,40
		9 Persentase guru yang meningkat jenjang karir	Persen	1,44
		10 Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	Persen	24,01
		11 Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Persen	39,48
		12 Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Persen	46,39
BIDANG TATA KELOLA				
12	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	90,00
13	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1 Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	Persen	72,68

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025
		2 Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	Nilai	38,24
14	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	83,00
		2 Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persen	85,50
		3 Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Persen	92,49
		4 Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Persen	76,00
		5 Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Persen	93,58
15	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1 Indeks Profesionalisme ASN	Persen	76,58
		2 Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Persen	75,00
		3 Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/ Inspiratif	Orang	6
16	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1 Persentase kasus hukum yang terselesaikan	Persen	87,03
		2 Persentase rekomendasi izin orang asing	Persen	78,50
17	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1 Persentase digitalisasi arsip dan mudah di akses	Persen	71,73
		2 Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	Persen	83,00
		3 Nilai layanan kesehatan	Persen	88,00
18	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	1 Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	Persen	89,48
		2 Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	Persen	18,00
19	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1 Indeks Pembangunan Statistik	Nilai	1,5
		2 Persentase data statistik yang dipublikasi	Persen	58
20	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan	1 Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	Persen	96,00
		2 Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama	Persen	1,8
		3 Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persen	16,00

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025
	4 Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persen	16,00
	5 Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK	Persen	73,00
	6 Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra	Persen	67,76
	7 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bidang Pendidikan	Nilai	88,35

Sumber : Tim Kerja Perencanaan

C. Kerangka Pendanaan

Alokasi anggaran sebagaimana tercantum pada lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sebesar **Rp. 1.720.523.479.000,-** (satu trilyun, tujuh ratus duapuluh milyar, lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Tabel 2.8 : Pendanaan Program dan Kegiatan 2025

Kode	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)
025.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	45.892.556.000
2104	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	19.374.584.000
2122	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	997.200.000
2123	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	12.584.000.000
2124	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	2.240.000.000
2137	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	1.445.000.000
2140	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	2.105.380.000
2143	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	266.000.000
2145	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha	429.170.000
5620	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	1.893.596.000
025.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	136.782.438.000
2129	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	134.841.588.000
2136	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	863.850.000
2142	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	55.000.000
4012	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha	172.000.000
025.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	69.929.958.000
2127	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	8.986.246.000
2133	Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	58.718.772.000
4433	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam	1.554.000.000
4434	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen	283.000.000

Kode	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)
4435	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik	2397.940.000
4437	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha	150.000.000
025.WA	Program Dukungan Manajemen	1.467.918.527.000
2098	Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	137.385.000
2099	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	339.914.000
2100	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	263.244.923.000
2101	Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	744.362.000
2102	Pembinaan Administrasi Perencanaan	690.009.000
2103	Pembinaan Administrasi Umum	19.506.606.000
2106	Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	316.594.000
2125	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	8.329.222.000
2135	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	41.212.894.000
2138	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	70.000.000
2141	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik	213.870.000
2144	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu	163.100.000
5100	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha	245.800.000
5102	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	230.000.000
5105	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	3.095.305.000
6708	Dukungan Manajemen Pendidikan	1.129.144.019.000

Sumber : Tim Kerja Perencanaan

D. Manajemen Resiko Pembangunan Nasional

Indikasi risiko dari 20 Sasaran Kegiatan (SK) bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi atas pencapaian SK dan IKSK.

Tabel 2.9 : Manajemen Resiko Pembangunan Nasional

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RISIKO
BIDANG AGAMA			
1. Meningkatkan jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemasyarakatan umat beragama, dengan IKSK:			
a. Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83 b. Persentase KUA yang menyelesaikan EWS c. Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS d. Persentase peningkatan subtema MTQ/Pesawaran Pesparan/Uthmaniyah Dharma Gita/ Swayanwara Tripitaka Gatha e. Persentase peningkatan peserta event seni budaya f. Persentase lembaga agama dan sosial kerukunan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola keberagaman	1. Rendahnya nilai indeks KUB Provinsi Sumatera Barat	1.1 a. Melaksanakan pengkutan moderasi beragama secara masif di berbagai lapisan masyarakat, termasuk melalui kurikulum pendidikan. b. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghormati keyakinan dan praktik keagamaan yang berbeda, serta mencegah cara-cara dakwah yang agresif. c. Meningkatkan koordinasi antara pengelola rumah ibadah dengan masyarakat d. Memberikan pelatihan manajemen konflik bagi tokoh/penyiar agama, penyuluh, dan tokoh pemuda/penggerak masyarakat e. Menggagas belajar schon bersama dan kunjungan kerukunan ibadah antar siswa lintas iman f. Memperkuat ruang pertemuan formal dan informal antar pemuda dan tokoh agama lintas iman (dialog, kerja sosial dan round tables)	Bagian Tata Usaha, Bidang Penata- Penyelenggara Zawa Bidang Urus, Dinas (Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) dan Kepala Kementerian di Sumatera Barat

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
	2. a. Kurang optimalnya KUA dalam menyelenggarakan EWS b. Penyelesaian konflik yang kurang efektif	2.1 a. Memperkuat peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam mediasi dan dialog b. Mendorong pembentukan agen kerukunan di tingkat provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan / desa/ nagari 2.2 a. Peningkatan kapasitas dan kemapuan SDM Penghulu, Penyuluh Agama dan Foklors pada KUA b. Mengembangkan dan menerapkan Standard Operating Prosedur (SOP) yang jelas dan terstruktur untuk seluruh pelayanan EWS Menggunakan platform digital atau aplikasi khusus yang memudahkan proses pelayanan, pemantauan, dan analisis data potensi konflik secara real-time c. Memperkuat kerja sama antara FKUB, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, aparat keamanan (Polsek/ Kompol) dan di tingkat kecamatan untuk memvalidasi informasi dan mengkoordinasikan respons d. Membentuk tim khusus di tingkat KUA yang siap bergerak cepat untuk melakukan mediasi atau intervensi awal jika terdeteksi adanya indikasi konflik e. Menyelenggarakan forum diskusi secara berkala antar KUA untuk:	Bagian Tata Usaha, Bidang Pemula- Penyelenggara Zawa Bidang Urus, Bimas (Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) dan Kepala Kankemenag di Sumatera Barat

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
		membahas kebutuhan di lapangan dan berbagi praktik teknik dalam pencegahan konflik. f. Memastikan adanya dukungan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan FWS termasuk pelatihan, operasional lapangan, dan sarana transportasi. g. Memastikan KUA memiliki fasilitas kerja dan sumber daya yang cukup untuk menjalankan fungsi FWS secara optimal. 2.2 a. Meningkatkan proses penanganan konflik yang terkoordinasi untuk mengidentifikasi, menilai, merespons, dan memantau risiko a. Meningkatkan proses penanganan konflik yang terkoordinasi untuk mengidentifikasi, menilai, merespons, dan memantau risiko b. Meningkatkan komunikasi terbuka dan efektif antar pihak yang berkonflik atau antar pemangku kejestinaan c. Mendorong pihak pihak yang terlibat konflik untuk memahami akar masalah dan ventilasi isu, secara mendalam. d. Menetapkan strategi penanganan resiko (mitigasi) sesuai dengan sifat dan ukuran konflik e. Penetapan tugas dan tanggung jawab yang jelas mengenai	Bagian Tata Usaha Bidang Penata- Penyelenggara Zawa Bidang Urus, Himas (Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) dan Kepala Kanikemenag se Sumatera Barat

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
		siapnya harus mengafektasi risiko dan menyelesaikan konflik f. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui peran penyuluh terhadap dampak negatif jika konflik tidak diselesaikan dengan baik, seperti rusaknya hubungan, kerugian finansial, atau menurunnya produk tivitas, yang dapat menyebabkan kurangnya argensi dalam penanganan g. Menyusun mekanisme untuk mematahkan perkembangan upaya penyelesaian konflik dan mengevaluasi efektivitas tindakan yang telah diambil, sehingga masalah yang sama tidak terulang	Bagian Tata Usaha, Bidang Pemis- Penyelesaian Zawa Bidang Urus, Bimas (Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) dan Kepala Kantor/Kemeng se Sumatera Barat
	3. a. Dialog harus melibatkan kelompok atau tokoh tertentu ini, sehingga rekomendasi yang dihasilkan tidak mewakili seluruh spektrum masyarakat (eksklusif) b. Pelaksanaan dialog tidak terstruktur dengan baik. c. Ketidaksiaran rekomendasi LWS	3.1 Menubuhkan prasyarat pada pelaksanaan dialog, agar rekomendasi yang dihasilkan dimasa efektif dan dapat menyelesaikan akar permasalahan kerukunan dimasyarakat secara keseluruhan. 3.2 Menghadirkan penaham dialog yang jelas, terstruktur dan terukur hasilnya 3.3 Melaksanakan forum dialog dan mem berikan rekomendasi LWS yang spesifik dan memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) untuk setiap risiko yang teridentifikasi.	

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
		4 a. Efektivitas promosi dan Komunikasi yang lemah b. Format acara yang monoton, lokasi yang sulit dijangkau, fasilitas yang kurang memadai, atau jadwal yang tidak sesuai dengan waktu luang masyarakat	4.1 Mengoptimalkan promosi dan komunikasi 4.2 Mengoptimalkan pemanfaatan media on line dalam kegiatan keagamaan	Bagian Tata Usaha, Bidang Pasis- Penyelenggara Zawa Bidang Urus, Binas (Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) dan Kepala Kaukemenag se Sumatera Barat
		5 Partisipasi umat beragama dalam mengikuti perayaan keagamaan dan event keagamaan rodat	5.1 a. Peningkatan penyelenggaraan event keagamaan dan budaya b. Peningkatan penyiaran agama melalui ruang publik dan media elektronik c. Mendukung penyuluh dan penyiar agama agama mempromosikan dialog keagamaan	
		6 Kualitas tata kelola lembaga agama dan lembaga keagamaan belum optimal	6.1 a. Pemberdayaan lembaga agama dan lembaga keagamaan untuk layanan keagamaan dan pendidikan b. Penguatan tata kelola lembaga agama dan lembaga keagamaan yang skematis dan profesional	
2	Mendukungnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak dengan IKSK			
a. Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja b. Berkatagari baik (Taporan Isian, Konten Digital, Keaktifan) c. Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	1 a. Kemampuan kompetensi penyuluh agama terkait Ilm b. Agama dan Sosial Keagamaan, Komunikasi, Sosiokultural, dan Kolaborasi c. Kemampuan pemanfaatan layanan digital	1.1 a. Pelatikan dan pengembangan kompetensi digital para penyuluh d. Mendukung penyuluh memanfaatkan teknologi digital secara optimal	1.2 a. Peningkatan frekuensi layanan penyuluhan agama	

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
d. Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi	d. Penilaian kinerja penyuluh belum dapat dipertanggung jawabkan	b. Peningkatan konten keagamaan yang dipublikasi	Bagian Tata Usaha, Bidang Pemai- Penyelenggara Zawa Bidang Umat, Dinas (Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) dan Kepala Kantor/utug sa Sumatera Barat
e. Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pernikahan		1.3 Metode penilaian kinerja harus jelas, terstruktur dan dapat diukur	
f. Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	2 a. Rendahnya ratio penyuluh agama dengan kelompok sasaran	2.1 a. Melakukan pemetaan tugas dan objek bisnis penyuluh secara lebih akurat berdasarkan data demografi dan geografis kelompok sasaran	
g. Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana peribadatan	c. Bimbingan yang tidak maksimal dapat menghambat pengoptimalan perspektif moderasi beragama di masyarakat	b. Standarisasi pengelolaan kualitas layanan bimbingankeagamaan	
h. Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat		c. Peningkatan bimbingan kelompok sasaran bisnis (Lembaga agama dan rumah ibadah)	
i. Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan		2.2 Menggunakan platform digital atau metode penyuluhan non-tatap muka (seperti yang relevan selama pandemi) untuk menjangkau kelompok sasaran yang lebih luas, terutama di daerah yang sulit dijangkau.	
j. Persentase bukti keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah	3 Bimbingan perkawinan tidak efektif	3.1 Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Penghulu dan sertifikasi fasilitator bimbingan perkawinan	
k. Persentase rekomendasi hasil pengawasaan hasil pada wilayah kabupaten/kota yang diterbitkan	4 Terjadinya pernikahan dini (di bawah usia perkawinan)	4.1 Pendidikan pra nikah pada remaja usia sekolah dilakukan terstruktur dan berdampak	
	5 a. Terbatasnya tenaga konselor bimbingan perkawinan	5.1 Mengaktifkan kembali BP4	
	b. Belum adanya standar kualitas layanan bimbingan perkawinan	5.2 Mengembangkan dan menerapkan prosedur operasi standar (SOP) untuk memastikan konsistensi dan kualitas layanan	

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
		6 a. Kedisiplinan bantuan yang diterima tidak digunakan untuk peruntukan yang semestinya	6.1 Menetapkan kriteria objektif dan trans- paran alokasi bantuan dan melakukan audit distribusi secara berkala	Bagian Tata Usaha, Bidang Pembi- ayaan Penyelenggara Zawa- hidang Umat, Biro (Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) dan Kepala Kankemenag se Sumatera Barat
			6.2 Memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) proses-penyalurkanan dan kewajiban laporan penggunaan dana/borang oleh penerima bantuan.	
		7 Layutan pengaliran arah kiblat belum menjangkau seluruh masjid/ musalla yang ada	7.1 a. Sosialisasi intensif tentang penting- nya arah kiblat yang akurat secara syar'i dan ilmiah b. Mengadakan program peningkatan ulang arah kiblat secara berkala oleh petugas yang kompeten (ahli fisika/ geoprosesol design menggunakan teknologi yang akurat)	
		8 Distribusi kitab suci dan buku keagamaan belum menjangkau rumah ibadah yang ada	8.1 Distribusi kitab suci dan buku keagamaan dilakukan secara terbuka, merata dan menjangkau rumah ibadah	
		9 Ketidakeakuratan data (data tidak valid)	9.1 a. Melakukan verifikasi dan validasi data secara berapis sebelum penerbitan b. Menetapkan sistem informasi yang terintegrasi dan audit internal secara rutin.	
		10 a. Jumlah UMM yang mengajikan sertifikasi halal terhadap jasa dan barang yang dihasilkannya belum maksimal b. Kurangnya kompetensi petugas peng dan auditor halal	10.1 a. Peningkatan layanan sertifikasi halal secara self declare b. Peningkatan sarana dan prasarana layanan sertifikasi halal c. Peningkatan layanan konsultasi dan literasi halal	Bidang Umat dan Kepala Kankemenag se Sumatera Barat

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
			10.2 a. Menawarkan pendamping, TPH dan auditor halal untuk mengulangi pelatihan intensif dan mendapatkan sertifikasi kompetensi dari lembaga yang terakreditasi. b. Menetapkan prosedur operasional standar (SOP) yang jelas dan rinci untuk proses pendampingan dan audit, serta memastikan kepatuhan terhadap standar tersebut. c. Meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya peran pendamping dan auditor yang kompeten, sehingga mereka juga dapat mengidentifikasi potensi masalah.	Bidang Urus dan Kepala Kankemenag se Sumatera Barat
3	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji, dengan IKSK:			
	Persentase calon jemaah haji yang diberangkatkan sesuai kuota	1. Gagal berangkat karena risiko kesehatan, keuangan dan faktor ekonomi	1.1. Menitigasi tindakan yang timbul akibat karakteristik jemaah haji yang cenderung berisiko tinggi (risk) dari segi kesehatan	
4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji, dengan IKSK:			
	a. Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan b. Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu	1. Ketidak eutugas sarana pemungut karena kerusakan, atau ketidak restasian fasilitas fisik dengan standar yang dipersyaratkan	1.1 a. Melengkapi sarana pemungut dan melakukan pemeliharaan rutin untuk semua fasilitas (listrik, AC, lift, sistem air, dan sanitasi) untuk mencegah kerusakan mendadak. b. Fasilitas rencana darurat jika terjadi bencana atau kerusakan besar (tsunami, kebakaran, banjir) yang mengganggu operasional layanan.	Bidang PHU dan Kepala Kankemenag se Sumatera Barat

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
		2 a. Masyarakat atau jemaah tidak memahami layanan yang tersedia di PLHUT b. Sumber daya aparatur yang tidak memadai c. Fasilitas dan infrastruktur yang kurang optimal	termasuk ketersediaan tenaga darurat dan sistem pemadam kebakaran. 2.1 Meningkatkan sosialisasi tentang kebera- dan dan fungsi PLHUT, alur layanan, dan fasilitas yang tersedia melalui berbagai media (cetak, digital, pertemuan). 2.2 Menyelenggarakan pelatihan rutin bagi petugas PLHUT mengenai prosedur layanan, manajemen konflik, ketertahan, dan pelayanan yang ramah busia/disabel. 2.3 Memastikan ketersediaan fasilitas dasar yang nyaman (ruang tunggu, toilet, area parkir, akses bagi disabel), serta kerja sama yang baik dengan bank mitra terkait agar layanan perbankan mudah diakses di lokasi.	Bisang PHU dan Kepala Kantor se Sumatera Barat
5	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah, dengan IKSK: Persentase lembaga penyelenggara m haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A) a. Lembaga penyelenggara haji khusus b. Lembaga penyelenggara umrah	1 Lemahnya pengawasan terhadap biro perjalanan haji dan umrah.	1.1 a. Membentuk tim khusus yang memonitor dan mengimplementa- sikan perubahan regulasi terbaru secara proaktif b. Melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan semua aspek operasional, kemitraan, dan pelayanan tetap sesuai dengan standar akreditasi dan hukum yang berlaku.	
6	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji, dengan IKSK: Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar	1 Nilai survey kepuasan jemaah menurun	1.1 Meningkatkan koordinasi pelayanan (aka- modasi, konsumsi, transportasi) jema- ah haji sesuai standar	

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
7	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji, dengan IKSK:			
	a. Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	1. Kurangnya kompetensi petugas	1.1. Peningkatan sertifikasi petugas haji	
	b. Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	2. Minimnya inovasi manasik haji berbasis teknologi	2.1. Penguatan sistem manasik haji	
BIDANG PENDIDIKAN				
8	Meningkatnya akses dan payaudalan pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan, dengan IKSK:			
	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhawatiran agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik	1. Tidak meningkatnya kualitas lulusan	1.1. a. Peningkatan kualitas dan profesionalitas tenaga pendidik b. Peningkatan akses dan kualitas sarana prasarana c. Menerapkan early warning system (EWS) untuk mendeteksi siswa berisiko tidak lulus (indikator: nilai rendah, ketidakhadiran, masalah perilaku)	Bidang Pemas dan Bidang Popkris dan Kepala Kementag se Sumatera Barat
	9. Meningkatkan sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas, dengan IKSK:			
	a. Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhawatiran agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	1. Masih minimnya jumlah satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	1.1. a. Menyediakan pelatihan dan pendidikan khusus bagi guru b. Fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dan aksesibel serta alat bantu yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran inklusi c. Mendorong terciptanya lingkungan madrasah yang hangat, ramah, menerima keragaman, dan menghargai perbedaan untuk mencegah diskriminasi dan perundungan	
	b. Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhawatiran agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana			

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
c. Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan d. kelasnya agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren e. Persentase Anak Kelas 1 MI yang pernah mengikuti PAUD (TK/RA/BA) f. Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah g. Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	2. Belum terumahnya bantuan sarana prasarana pendidikan	2.1. Mengembangkan sistem prioritas bantuan berdasarkan tingkat kebutuhan yang paling mendesak (misalnya, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan air bersih, atau akses listrik/internet) pada satuan pendidikan yang belum terasah bantuan	Bidang Pemas, Bidang Pemas, Kepala Kantor/Kepala Kantor di Sumatera Barat
	3. Terbatasnya kualitas dan kuantitas ruang belajar	3.1. a. Mendukung peran Komite Sekolah untuk memfasilitasi sarana dan prasarana sekolah b. Fasilitas sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai seperti laboratorium IPA, laboratorium komputer, perpustakaan, dan akses internet	
	4. Tidak memiliki kemampuan literasi dan numerasi dasar yang lebih baik	4.1. Mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan non formal (PATD)	
	5. Responsive gangguan kesehatan pada siswa lambat ditasi	5.1. a. Fasilitas layanan kesehatan sekolah pada setiap satuan pendidikan Islam di Sumatera Barat b. Mendukung satuan pendidikan Islam untuk melakukan kerjasama dengan puskesmas terdekat	
	6. Solitnya mendapatkan data anak tidak sekolah yang real time dan valid	6.1. a. Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah melalui pendidikan kesetaraan b. Menyusun data base (pendataan) anak tidak sekolah	

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
10 Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem pelatihan pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan, dengan dengan IKSEK: a. Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a. Literasi membaca dan Numerasi b. Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas c. Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran d. Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler e. Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab) f. Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan g. Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B h. Persentase satuan pendidikan unggul yang terakreditasi i. Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	1 a. Keterbatasan kompetensi pendidik dalam menerapkan metode pembelajaran yang efektif dan berpusat pada siswa b. Kurangnya budaya membaca dan belajar 2 Masukan, ide, dan sumber daya dari berbagai pemangku kepentingan di luar lingkungan sekolah (orang tua, tokoh masyarakat, alumni dan dunia usaha) dalam penyusunan rencana kerja tahunan masih rendah 3 a. Banyak siswa yang tidak memahami pentingnya nilai-nilai profil pelajar Pancasila b. Minimnya tindakan positif dari pendidik	1.1 a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tentang penerapan metode pembelajaran yang inovatif b. Penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung kondisi pembelajaran 1.2 a. Peningkatan sarana pendukung pembelajaran (alat peraga pembelajaran, digitalisasi pembelajaran, sarana praktik pembelajaran) b. Mengajak anak menggunakan berbagai prinsip matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari c. Mengintegrasikan kegiatan literasi dan numerasi dalam semua mata pelajaran 2.1 Menyusun strategi tindakan nyata untuk mengelola potensi masalah, ancaman, dan hambatan yang diidentifikasi bersama oleh pihak sekolah dan sekolah (orang tua, tokoh masyarakat, alumni dan dunia usaha) 3.1 a. Mengajarkan dan membiasakan anak untuk berperilaku sesuai nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila dalam lingkungan keluarga, sekolah dan Masyarakat	Didang Pemasid, Bidang PPKIS, Kepala Kantor se Sumatera Barat

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
j. Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional k. Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik l. Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran		b. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan karakter siswa berbasis pembiasaan agama, praktik beragama siswa, sikap toleransi, dan kewarganegaraan 3.2 Pelatihan guru tentang metode pembelajaran berbasis keteladanan dalam menanamkan karakter	Bidang Pemas, Bidang PPKS, Kepala Kantor Wilayah Sumatera Barat
	4 Kegiatan ekstrakurikuler yang kurang variatif	4.1 Memperluas kegiatan pemadukan, OSIS, kegiatan keagamaan, dan program bakti sosial sebagai media pembentukan karakter	
	5 a. Fokus pembelajaran yang lebih menitikberatkan pada aspek kognitif dibandingkan afektif dan psikomotorik	5.1 Peningkatan penyelenggaraan pendidikan karakter siswa berbasis pembelajaran agama, praktik beragama siswa, sikap toleransi, dan kewarganegaraan	
	b. Ketidakefektifan penerapan aturan dan disiplin di sekolah maupun rumah	5.2 Penguatan keterlibatan masyarakat dalam mendukung upaya yang dilakukan satuan pendidikan untuk meningkatkan karakter dan wellbeing peserta didik dan pendidik	
	6 Kurikulum yang belum sepenuhnya mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	6.1 Mengembangkan bahan ajar dan modul pembelajaran kontekstual yang mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	
	7 Memanutnya nilai akreditasi	7.1 Fasilitasi sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai seperti ruang kelas, ruang pendidik dan tenaga kependidikan, laboratorium IPA, laboratorium komputer, perpustakaan, dan akses internet	

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
	8 a. Kualitas dan kompetensi tenaga pendidik yang belum optimal b. Sarana prasarana yang tidak memadai atau tidak sesuai standar c. Kurikulum yang kurang relevan atau tidak adaptif terhadap kebutuhan zaman d. Lingkungan belajar yang tidak kondusif atau aman e. Keterlibatan orang tua dan masyarakat yang rendah dalam mendukung pendidikan f. Sistem evaluasi dan pengantian umu internal yang lemah 9 a. Ketidapastian kompetensi pendidik dalam mendukung pembelajaran digital b. Minimnya sarana dan prasarana pendukung	8.1 Mengintensifkan program pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan profesional berkelanjutan bagi tenaga pendidik 8.2 Melakukan pemajaman atau pembangunan fasilitas fisik, laboratorium, dan teknologi pendukung pembelajaran 8.3 Melakukan evaluasi dan pembaran kurikulum secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan industri dan kebutuhan peserta didik 8.4 Menerapkan kebijakan kurikulum, program anti-perundungan, dan menciptakan budaya sekolah yang inklusif dan positif 8.5 Mengadakan pertemuan rutin, program komitmen sekolah-orang tua, dan melibatkan komite sekolah secara aktif 8.6 Menerapkan sistem pengantian umu internal (SPMI) yang efektif dan memanfaatkan data dari Laporan Pendidikan untuk analisis dan perencanaan tindak lanjut 9.1 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mendukung pembelajaran digital 9.2 Pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung peningkatan pembelajaran digital	Bidang Pramad, Bidang Pnglis, Kepala Kerkemeng se Sumatera Barat

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
	10 Sedikitnya jumlah siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional 11 a. Sekolah belum cukup aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah b. Sekolah belum menghadirkan suasana belajar yang merangsang toleransi keberagaman c. Sekolah belum memfasilitasi kebebasan murid dengan kebebasan berpikir, bertindak, dan berprestasi 12 a. Guru dan siswa tidak memiliki akses yang memadai ke materi digital (karena keterbatasan infrastruktur, perangkat, atau jaringan), yang dapat menyebabkan kurangnya dalam kesempatan belajar	10.1 a. Penguatan sarana untuk pembelajaran pilihan untuk memfasilitasi minat, bakat dan kemampuan peserta didik b. Penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung kualitas pembelajaran 11.1 Mendukung keterlibatan siswa dan Komite Sekolah dalam kegiatan pembelajaran 11.2 Meningkatkan frekuensi supervisi kelas untuk memastikan interaksi guru-siswa mendukung iklim belajar kondusif 11.3 a. Memberikan lebih banyak kesempatan untuk siswa saling berinteraksi secara positif dengan siswa lain dari beragam latar belakang, suku, ras dan agama b. Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas belajar agar aman, nyaman, dan ramah anak 12.1 a. Mengembangkan dan memelihara basis ke materi digital yang dapat diakses, tanpa koneksi internet (misalnya, melalui aplikasi pembelajaran offline USB drive, atau server lokal KIPIN)	Bidang Pemasar, Bidang Pabrik, Kepala Kankemenag se Sumatera Barat

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
		b. Guru tidak terlatih menggunakan materi pembelajaran digital c. Guru dan/atau siswa tidak memiliki literasi digital yang cukup untuk memanfaatkan materi ajar digital secara optimal.	b. Mencetak materi ajar digital menjadi bahan cetak (buku, modul, lembar kerja) untuk memastikan ketersediaan sumber belajar bagi yang tidak memiliki perangkat atau jaringan yang memadai 12.2 a. Mengadakan FGD yang direncanakan untuk meningkatkan keterampilan digital guru b. Melatih guru menggunakan Learning Management System (LMS) atau platform pendidikan lainnya untuk mengelola materi, tugas, dan penilaian secara daring c. Menantang guru yang lebih mahir teknologi (jika sudah) dengan rekan yang mendambakan bantuan (guru non-tech savvy). Untuk menciptakan ruang yang aman untuk bertanya dan belajar d. Mendorong pembentukan komunitas di mana guru dapat berbagi pengalaman, tantangan, dan solusi terkait pengguna an materi digital.	Bidang Prasarana, Bidang PPKn, Kepala Kantor daerah Sumatera Barat
11	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan, dengan IKSK:			
a. Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	1	a. Kelengkapan sertifikasi yang berbasis-uruk, meliputi kesiapan dan ketrampilan di kalangan guru	1.1 Menyediakan program pelatihan yang terstruktur dan pendampingan yang memadai sebelum uji sertifikasi dilakukan	
b. Rasio guru satuan pendidikan				

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
terhadap siswa memenuhi SNP c. Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal d. Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik e. Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil. Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen f. Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil g. Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik h. Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan Kristen (AKP) minimal predikat terampil i. Persentase pengawas dan guru yang mengikuti jenjang karir j. Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	b. Ketersediaan guru mengajar menjadi terbatas 2. Lingkupn belajar lebih kondusif 3. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendukung tugas tenaga kependidikan 4. Ketersediaan guru mengajar menjadi terbatas 5. Terbatasnya akses Guru dan Kepala Sekolah untuk mengikuti Program Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB) 6. Tidak bisa menjadi teladan (role model)	1.2. Pemetaan dan pemerataan guru madrasah 2.1. Menempatkan metode pembelajaran yang inovatif, aktif, dan kolaboratif untuk memaksimalkan potensi siswa. 3.1 a. Inventarisasi dan evaluasi berkala terhadap fasilitas yang ada untuk memastikan pemanfaatan yang optimal dan mencegah kerusakan. b. Menerapkan jadwal pembelajaran sesuai dan prasarana secara berkala untuk memperpanjang masa pakai dan menjaga kondisi fasilitas agar tetap layak digunakan. 4.1. Pemetaan dan pemerataan/ distribusi guru 5.1 a. Fasilitas Guru dan Kepala Sekolah untuk mengikuti kursus, seminar, inkubasi, atau diklat fungsional yang diselenggarakan secara daring. b. Mengadakan kegiatan studi banding atau kunjungan ke sekolah lain yang dianggap lebih maju untuk berbagi praktik baik (best practices). c. Mengoptimalkan peran KKG/MGMP 6.1 a. Mencontolakan nilai-nilai moderasi (integritas, solidaritas, dan tanggung masa)	Bidang Pramad, Bidang Pkps dan Kepala Karkemadag se Sumatera Barat

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
k. Persentase rekomendasi pengadaan		b. Membangun saling pengertian antar siswa dari latar belakang daerah, suku, dan budaya yang berbeda, sehingga tercipta suasana yang lebih aman dan nyaman bagi semua	Bidang Pemas, dan Kepala Kantorsetrag se Sumatera Barat
	7. Peningkatan jenjang karir belum sebanding dengan peningkatan profesionalisme dan kompetensi	7.1 Melakukan evaluasi kompetensi (pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial) secara berkala	
	8. Anggaran tunjangan profesi bagi guru yang lulus PPG belum terlaksanakan pada DIPA	8.1 Penjaminan kesejahteraan pendidik dalam bentuk finansial dan nonfinansial	
	9. Tidak adanya koordinasi dalam pengadaan dan pemerataan guru agama pada sekolah umum	9.1 Monitoring dan evaluasi rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama pada sekolah umum berbasis rencana kebutuhan yang ditindak lanjut	Bidang PPKS dan Kepala Kantorsetrag se Sumatera Barat
BIDANG TATA KELOLA			
12. Meningkatkan kualitas perencanaan dan anggaran, dengan DSK:			
Nilai Kinerja Anggaran	1. Nilai Kinerja Anggaran rendah	1.1. a. Melakukan analisis penyebab rendahnya nilai kinerja anggaran Melakukan revisi Halaman III DIPA secara rutin (di awal tahunan) untuk menyelaraskan anggaran dengan realisasi. b. Menyusunproyeksi penarikan dana yang cermat, termasuk belanja pegawai, barang, dan modal, dengan mempertimbangkan realisasi sebelumnya. c. Akselerasi proses pengadaan barang/jasa (PBJ) dan pelaksanaan program	Bagian Tata Usaha dan Kantorsetrag Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
			kegiatan untuk mempercepat realisasi. d. Memastikan "revolving" UP mencapai minimal 100% per bulan sesuai kebutuhan Fiskal tidak setor kembali ke kas negara. Percepat digitalisasi pembayaran untuk meningkatkan efisiensi. e. Melakukan monv secara berkala	
13 Meningkatkan kualitas penerapan Reformasi Birokrasi, dengan IKSK:				
a. Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar b. Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	1	a. Penyusunan laporan kinerja tidak tepat waktu b. Belum dilakukan revisi	1.1 Melakukan evaluasi dan penilaian ulang terhadap proses yang menyebabkan keterlambatan	Bagian Tata Usaha dan Kelembagaan Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat
			1.2 a. Memastikan semua data dalam laporan sudah lengkap dan akurat b. Berkordinasi dengan pihak eksternal untuk segera melakukan revisi terhadap laporan kinerja	
	2	a. Penilaian eksternal per bangunan ZI dibawah 75 b. Rendahnya kualitas pelayanan public c. Minimnya inovasi	2.1 a. Melakukan analisis terhadap hasil evaluasi (penilaian eksternal) b. Menyusun rencana aksi perbaikan c. Melakukan perbaikan di 6 Area Perubatan d. Pemantauan dan evaluasi internal berkelanjutan e. Kemitraan keterlibatan aktif pimpinan	
			2.2 a. Menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang jelas dan terukur. b. Mengadakan pelatihan frontline	

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
			tentang pelayanan prima d. Membuka mekanisme pengaduan dan survey kepuasan masyarakat secara rutin. Menindaklanjuti hasil pengaduan dan survey dengan rekomendasi perbaikan yang wajib diimplementasikan. 2.3 a. Membentuk unit atau tim inovasi di setiap bagian b. Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi/industri untuk adopsi inovasi	Bagian Tata Usaha dan Kemendagri Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat
14	14 Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan BMN, dengan IKSK: a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) b. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan c. Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu d. Persentase satuan kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) e. Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	1 Nilai IKPA rendah	1.1 a. Meningkatkan kualitas perencanaan va. b. Mempercepat pelaksanaan belanja, c. Disiplin dalam penyerapan anggaran setiap bulan, dan d. Melakukan analisis rutin untuk mengidentifikasi satuan kerja atau indikator yang bermasalah e. Memberikan reward dan punishment	
		2 TLLHP belum dapat ditindaklanjuti	2.1 a. Identifikasi dan Analisis Kendala secara Menyehurdi b. Melaporkan kendala dan kendala yang dihadapi secara resmi kepada pihak pengawas c. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang aktif dengan aparat pengawas	
		3 Kesalahan laporan	3.1 a. Mengevaluasi dan mengidentifikasi kesalahan secara spesifik	

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
		4. Bersifat administratif, belum beriringan dengan aksi nyata	4.1 a. Perubahan pola pikir dan komitmen pimpinan b. Peningkatan kualitas desain dan dokumentasi pengendalian c. Implementasi pengendalian yang terstruktur d. Penyelesaian, penulisan dan perbaikan berkelanjutan e. Penyusunan dan evaluasi SOP berkelanjutan	
		5. Belum dilakukan Orname Fisik Ruang Inventaris (OFBI) dan penghapusan	5.1 Melakukan OFBI dan penghapusan secara terjadwal, transparan dan akuntabel	
15	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai), dengan IKSE:			
a. Indeks Profesionalisme ASN	1. Nilai indeks tidak sebanding dengan profesionalisme ASN	1.1 Menerapkan sanksi tegur tegur bagi yang tidak melaksanakan komitmen (teguran tertulis, penulisan kenaikan pangkat)	Bagian Tata Usaha dan Kemendagri Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat	
b. Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	2. a. Rencana kebutuhan pegawai tidak berdasarkan ANJAH b. Penempatan pegawai yang diangkat, tidak pada satuan kerja yang mengesekusi	2.1 Memberikan pendampingan dan evaluasi penyusunan rencana kebutuhan pegawai berdasarkan ANJAH 2.2 Penempatan pegawai berdasarkan kebutuhan satuan kerja		
c. Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/ inspiratif	3. a. Belum ada ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/ inspiratif a. Kinerja individu ASN belum sepenuhnya mencerminkan kinerja organisasi	3.1 a. Memberikan peluang dan dukungan bagi ASN untuk mengikuti pemilihan pegawai teladan/ inspiratif b. Memberikan penghargaan (insentif, promosi, apresiasi) bagi unit/pega wat berprestasi 3.2 Menetapkan target kinerja individu ASN mendukung kinerja organisasi		

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
16 Meningkatkan kualitas layanan dan bantuan hukum, dengan IKSK: a. Persentase kasus hukum yang terselesaikan b. Persentase rekomendasi izin orang asing	1 Kasus hukum yang ada belum sepenuhnya baru diselesaikan 2 Mekanisme penuntutan aktivitas orang asing yang diberi rekomendasi belum ada	1.1 Penguatan kapabilitas dan kapasitas SDM 2.1 Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan penuntutan aktivitas orang asing	Bagian Tata Usaha dan Koordinasi Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat
17 Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persurutan, arsip dan layanan pengaduan barang rusak, dengan IKSK: a. Persentase Digitalisasi Arsip dan rumah di akses b. Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	1. Potensi data hilang, rusak, atau dimanipulasi secara tidak sah, yang membahayakan kredibilitas dan keandalan arsip 2. a. Runding pengembangan sarana dan prasarana tidak mendukung sasaran atau target kinerja utama organisasi. b. Kemandirian kantor dapat berubah seiring waktu	1.1 a. Memastikan data diarsip ke lokasi yang aman, baik secara fisik (<i>hard drive</i> eksternal terenkripsi) maupun di layanan cloud yang aman, dan pastikan salinan data terdapat tersedia untuk pemulihan b. Membatasi akses ke dokumen sensitif hanya untuk personal yang berwenang dan memiliki kebutuhan kerja yang sah c. Menggunakan enkripsi untuk melindungi semua data sensitif d. Menerapkan TTI dan metode standar untuk menjamin kredibilitas dan integritas arsip digital 2.1 Identifikasi kesenjangan spesifik antara kondisi infrastruktur yang diinginkan (untuk mencapai target kinerja) dan apa yang saat ini direncanakan dalam roadmap 2.2 a. Menerapkan manajemen pembelian yang produktif dan memiliki pola pikir yang fleksibel b. Pengadaan sarana dan prasarana kantor didasarkan oleh kebutuhan aktual untuk	

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
		memaksimalkan produktivitas dan menghambat anggaran	
18. Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi, dengan IKSR:			
a. Tingkat kemahiran penyelenggara PPID	1. Nilai PPID belum maksimal	1.1 a. Rvizu dan mualkarkan SOP b. Penyusunan dan penatalkahan Daftar Informasi Publik (DIP) dan menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan c. Menyediakan layanan informasi berbasis digital yang mudah diakses, ramah pengguna, dan mendukung aksesibilitas (melalui web-site, media sosial, atau aplikasi) d. Pastikan permintaan informasi ditanggapi dengan cepat dan berikan solusi yang efektif terhadap kebutuhan pemohon Pelatihan berkelanjutan bagi PPID dan tim layanan informasi publik untuk meningkatkan kompetensi dan pelayanan prima e. Menggunakan hasil evaluasi dan umpan balik masyarakat sebagai dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan pada kualitas layanan PPID	Bagian Tata Usaha dan Kankemenag Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat
b. Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	2. a. Data dan informasi tidak valid b. Konten keagamaan yang tidak moderasi atau ekstrem berpotensi memicu radikalisme, ujaran kebencian, dan intoleransi antar umat beragama	2.1 Memastikan data dan informasi yang akan dipublikasikan sudah terverifikasi dengan baik 2.2 Mengampanyekan nilai-nilai moderasi beragama secara luas, baik melalui media konvensional maupun digital, untuk menumbuhkan sikap seimbang, toleran,	

SASARAN KEGLATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGLATAN		INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
19	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi, dengan IKSIS:	c. Kualitas siswa membedakan konten pembelajaran yang berkualitas baik dari yang buruk	dan saling menghargai di masyarakat	Bagian Tata Usaha dan Kemendagri Kabupaten/ Kota se Sumatera Utara
			2.3 Konten pendidikan yang dipublikasikan mendukung metode pembelajaran pada satuan pendidikan	
		1. Nilai Indeks Pembangunan Statistik Rendah	1.1 a. Menastikan data yang dikumpulkan dan dipublikasikan akurat, lengkap, atas relevan, dan mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang benar b. Penggunaan metodologi sesuai standar, tepat dalam pengumpulan dan pengolahan data dan menghasilkan data yang valid dapat diperbandingkan	
			2.1 Pemangangan basis data untuk mengorganisir data secara efisien dan mengurangi redundansi (penyimpanan salinan data yang sama di lebih dari satu tempat) 2.2 Penggunaan metodologi sesuai standar dan ketentuan yang berlaku 2.3 a. Menetapkan aturan/ standar yang jelas untuk pembuatan, pemeliharaan, dan peninjauan metadata serta dokumentasi semua aset data b. Pemangangan sistem atau katalog data untuk mengelola dan menyimpan metadata, untuk memisahkan pengguna, menentukan, memelihara,	

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
			dan mengakses informasi yang relevan dengan output	Bagian Tata Usaha dan Kankemenag Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat
			2.4 Menetapkan alir kerja (workflow) yang jelas dan terstandarisasi untuk publikasi data	
20 Meningkatkan Layanan Prima Bidang Pendidikan, dengan IKSK:				
a. Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output b. Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama c. Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media d. Persentase pemenuhan infrastruktur dan layanan dukungan TIK e. Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran		1 a. Adanya gap (kesenjangan) signifikan antara penyerapan anggaran dan capaian output b. Penyerapan tinggi, output rendah c. Penyerapan rendah, output tinggi d. Ketidaktepatan perencanaan program dan penganggaran	1.1 a. Memastikan rencana kerja dan anggaran disusun secara realistis dan akurat sejak awal b. Melakukan penjelasan anggaran dan kinerja c. Menyusun rencana penarikan belanja yang detail dan akurat untuk memastikan ketersediaan kas yang tepat waktu dan menghemat penempatan pencairan di akhir tahun d. Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa e. Mempercepat pelaksanaan kegiatan dan proyek pembangunan f. Penguatan monitoring dan evaluasi 1.2 a. Memastikan tujuan program dan anggaran selaras dengan sasaran strategis Kementerian Agama, serta dapat diukur dan realistis b. Manfaatkan data kinerja dan realisasi anggaran periode sebelumnya sebagai dasar untuk proyeksi di masa mendatang c. Memastikan data keuangan dan operasional yang digunakan dalam	

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
		perencanaan akurat, lengkap, dan realistis	
	2. Target yang ditetapkan tidak tercapai	2.1 a. Melakukan evaluasi terhadap target dan proses yang ada b. Mengidentifikasi hambatan c. Menyusun rencana perbaikan yang realistis untuk periode berikutnya	
	3. Pemberitaan opini publik yang salah	3.1 a. Kebijakan yang disampaikan harus jelas dan terukur b. Mencounter pemberitaan negative tentang Kementerian Agama	
	4. a. Tidak semua pemangku kepegawaian (siswa, guru, orang tua dan masyarakat) dengan latar belakang kondisi yang berbeda memiliki akses yang sama untuk mendapatkan informasi yang diperlukan b. Informasi yang disampaikan tidak menarik	4.1 Membuat konten layanan publik yang mudah diakses pengguna 4.2 Mengelola tampilan informasi yang mudah dimengerti dan mudah dipahami	Bagian Tata Usaha dan Kelembagaan Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat
	5. Belum optimalnya pengelolaan dan penyajian data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra	5.1 a. Mengelola dan menyajikan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra b. Menbitkan publikasi Data Kuwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra	
	6. Nilai Kinerja Anggaran Program Pendidikan Islam rendah	6.1 a. Melakukan analisis penyebab rendahnya nilai kinerja anggaran b. Melakukan revisi Halaman III DIPA secara rutin (di awal triwulan	

SASARAN KEGLATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGLATAN	INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
		untuk menyalurkan anggaran dengan realisasi c. Menyusunproyeksi penarikan dana yang akurat, termasuk belanja pegawai, barang, dan modal, dengan mempertimbangkan realisasi sebelumnya.Akselerasi proses pengajuan barang / jasa (PBJ) dan pelaksanaan program/kegiatan untuk mempercepat realisasi. d. Menastikan "revolving" LP mencapai minimal 100% per bulan sesuai kebutuhan. Jika tidak, setor kembali ke kas negara.Digitalisasi pembayaran untuk meningkatkan efisiensi e. Melakukan money score berkala	Begitu Tats Usaha dan Kemendagri Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat

Sumber : Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2025-2029

E. Metadata/ metode pengukuran IKS

1. Pengukuran IKS Bidang Agama

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan (Badan Litbang dan Diklat) Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi diatas 83,00
3	Konsep/Definisi	IKUB merupakan indeks yang menyatakan kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta bekerjasama dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
4	Interpretasi	Semakin tinggi capaian IKUB, maka semakin baik kondisi kehidupan intra dan antar umat beragama yang saling berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling menghargai, serta menghormati perbedaan dan kebebasan menjalankan ibadah masing-masing.
5	Metode / Rumus Perhitungan	IKUB = (Nilai Dim.Toleransi + Nilai Dim.Kesetaraan + Nilai Dim.Kerjasama) / 3
6	Nama Variabel Pembangun	1. Nilai Dimensi Toleransi 2. Nilai Dimensi Kesetaraan 3. Nilai Dimensi Kerjasama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyelesaian kasus sosial keagamaan 2. Pelaksanaan cegah konflik 3. Penguatan FKUB 4. Peningkatan frekuensi dialog keagamaan 5. Pendataan atas pengaduan kasus konflik melalui EWS
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. 00-20 = Rukun Sangat Rendah 2. 20,1-40 = Rukun Rendah 3. 40,1-60 = Rukun Sedang 4. 60,1-80 = Rukun Tinggi 5. 80,1-100 = Rukun Sangat Tinggi
11	Level Estimasi	Nasional dan Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	https://ppid.kemenag.go.id/v5/indeks_kub.php

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Urusan Agama Islam
2	Nama Indikator	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi KUA yang aktif menjalankan deteksi dini konflik keagamaan, mencakup pemantauan isu, pelaporan potensi konflik, koordinasi lintas sektor, dan rekomendasi penanganan dini.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase KUA yang melaksanakan EWS, semakin kuat kapasitas kelembagaan di tingkat akar rumput dalam menjaga stabilitas dan kerukunan umat beragama
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah KUA yang aktif menyelenggarakan Early Warning System (EWS) b. Jumlah total KUA
6	Nama Variabel Pembangun	Persentase KUA penyelenggara EWS
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Implementasi Sistem Informasi EWS Berbasis KUA 2. Pelatihan Petugas KUA dalam Pemantauan Isu Keagamaan 3. Pembentukan Forum Komunikasi Keagamaan di Tingkat Kecamatan 4. Pemetaan Wilayah Rawan Konflik Keagamaan 5. Rekomendasi Tindak Lanjut atas Potensi Gangguan Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. KUA dengan Petugas Khusus EWS 2. KUA dengan Penyuluh/Penghulu 3. KUA yang Bekerja Sama dengan Lembaga Mitra
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha, Bidang Urusan Agama Islam, Pembimas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha serta FKUB
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan dialog kerukunan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS

3	Konsep/Definisi	Dialog kerukunan yang difasilitasi oleh Kementerian Agama atau mitra strategis bertujuan untuk meredam potensi konflik dan memperkuat moderasi beragama. Dalam kegiatan ini, dihasilkan rekomendasi berbasis EWS (sistem peringatan dini) yang dapat digunakan dalam mitigasi konflik dan penguatan kohesi sosial.
4	Interpretasi	Persentase ini menunjukkan seberapa besar peningkatan jumlah dialog kerukunan yang terfasilitasi dari tahun sebelumnya. Makin tinggi persentasenya, makin kuat perhatian terhadap pencegahan dini konflik keagamaan di masyarakat Islam.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase Peningkatan = $((a - b) / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah dialog kerukunan menurut agama yang difasilitasi pada tahun berjalan b. Jumlah dialog kerukunan yang difasilitasi pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah kegiatan dialog kerukunan menurut agama tahun berjalan 2. Jumlah kegiatan dialog kerukunan menurut agama tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan lokasi dan skala kegiatan: 1. Tingkat Provinsi 2. Tingkat Kota/ Kabupaten
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Penais dan Penyelenggara Zawa, Bimas Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan audiens MTQ/ Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/ Swaya mvara Tripitaka Gatha
3	Konsep/Definisi	Persentase peningkatan jumlah audiens atau penonton MTQ/ Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/ Swaya mvara Tripitaka Gatha yang diukur dari perbandingan jumlah audiens tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, baik secara langsung (luring) maupun daring (online streaming)

4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan peningkatan minat dan partisipasi masyarakat dalam menyaksikan pelaksanaan MTQ/ Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/ Swayamvara Tripitaka Gatha, baik di lokasi maupun melalui media digital
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus $=((a - b) / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah audiens MTQ/ Pesparani/ Pesparawi/ Utsawa Dharma Gita/ Swaya mvara Tripitaka Gatha tahun berjalan b. Jumlah audiens MTQ/ Pesparani/ Pesparawi/ Utsawa Dharma Gita/ Swaya mvara Tripitaka Gatha tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah audiens MTQ/ Pesparani/ Pesparawi/ Utsawa Dharma Gita/ Swaya mvara Tripitaka Gatha tahun berjalan 2. Jumlah audiens MTQ/ Pesparani/ Pesparawi/ Utsawa Dharma Gita/ Swaya mvara Tripitaka Gatha tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penyelenggaraan MTQ/ Pesparani/Pesparawi/ Utsawa Dharma Gita/ Swaya mvara Tripitaka Gatha Tingkat Provinsi
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Audiens Langsung (Luring) 2. Audiens Daring (Streaming) 3. Audiens Media Penyiaran (TV/Radio)
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Penais dan Penyelenggara Zawa, Bimas Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/ perayaan agama bernaifaskan agama (MTQ/ Pesparani/ Pesparawi/ Utsawa Dharma Gita/ Swayamvara Tripitaka Gatha)
3	Konsep/Definisi	Suatu ukuran untuk menghitung jumlah peningkatan peserta pada event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/ peraayaan agama dibandingkan dengan jumlah peserta pada tahun sebelumnya

4	Interpretasi	Semakin meningkat persentase jumlah peserta maka semakin luas syiar agama pada umat
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = $[(a-b) / b] \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah peserta tahun ini b. Jumlah peserta tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/ perayaan keagamaan 2. Jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/ perayaan keagamaan tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Jumlah peserta tahun ini 2. Jumlah peserta tahun sebelumnya
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Berkurang = < 0% 2. Meningkat = 0%-5% 3. Meningkat Pesat = >5%
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Penais dan Penyelenggara Zawa, Bimas. Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha
2	Nama Indikator	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan
3	Konsep/Definisi	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah mendapatkan program pembinaan atau pendampingan pemerintah untuk meningkatkan tata kelola kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak lembaga agama dan sosial keagamaan yang mendapatkan pembinaan kelembagaan untuk meningkatkan kapasitas, kinerja, serta akuntabilitas dalam menjalankan fungsi sosial-keagamaan
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus : $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan/ pembinaan b. Jumlah total lembaga agama dan sosial keagamaan

6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan/ pembinaan
		2. Jumlah total lembaga agama dan sosial keagamaan yang terdaftar
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Program Pendampingan Tata Kelola Kelembagaan Keagamaan 2. Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Lembaga Keagamaan 3. Pelatihan Manajemen Kelembagaan Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Pelatihan Tata Kelola Kelembagaan Keagamaan 2. Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Lembaga Keagamaan 3. Pendampingan Administrasi dan Keuangan Lembaga Keagamaan 4. Workshop Penguatan Kapasitas Organisasi Keagamaan
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Penais dan Penyelenggara Zawa, Bimas Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha
2	Nama Indikator	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)
3	Konsep/Definisi	Nilai Kinerja penyuluh agama mencerminkan capaian kinerja penyuluh dalam menjalankan tugasnya, yang dinilai melalui tiga aspek utama: 1. Laporan Harian: Kegiatan penyuluhan yang dilaporkan secara periodik. 2. Konten Digital: Produksi dan penyebaran konten dakwah/penyuluhan berbasis media digital. 3. Kediklatan: Partisipasi dalam pelatihan atau diklat peningkatan kapasitas.
4	Interpretasi	Angka ini menunjukkan proporsi penyuluh agama yang menunjukkan kinerja baik berdasarkan evaluasi dari tiga aspek tersebut. Semakin tinggi persentasenya, semakin efektif peran penyuluh

		agama dalam menyampaikan nilai-nilai keagamaan secara produktif dan profesional.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah penyuluh agama yang memperoleh nilai kinerja dengan kategori baik b. Total jumlah penyuluh agama yang dievaluasi kinerjanya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Data hasil evaluasi kinerja penyuluh agama (aspek laporan, konten digital, dan diklat) 2. Jumlah total penyuluh agama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan agama: a. Islam, b. Kristen, c. Katolik, d. Hindu, dan e. Buddha
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Penais dan Penyelenggara Zawa, Bimas Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha
2	Nama Indikator	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
3	Konsep/Definisi	Pengukuran data kelompok sasaran yang dimiliki Penyuluh Agama Islam PNS, PPPK dan Non PNS yang mendapatkan bimbingan penyuluhan
4	Interpretasi	Bertambahnya jumlah penyuluh agama islam maka akan lebih banyak lagi kelompok sasaran masyarakat yang terbimbing dan mendapatkan layanan advokasi keagamaan
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus : $x = b / a$ sehingga rasionya menjadi 1:x <u>Keterangan</u> a. Jumlah penyuluh agama yang aktif b. Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah penyuluh agama yang aktif 2. Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Layanan bimbingan penyuluhan 2. Layanan advokasi 3. Layanan keagamaan lainnya
8	Ukuran/Satuan	Rasio
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Kelompok sasaran umum, khusus dan medsos
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Urusan Agama Islam, Bimas Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha
2	Nama Indikator	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi
3	Konsep/Definisi	Penghulu/ fasilitator bimbingan perkawinan adalah seseorang yang memandu, mendampingi, dan membangun kesadaran calon pengantin agar mereka siap menjalani kehidupan rumah tangga yang kokoh dan sejahtera
4	Interpretasi	
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah penghulu/ fasilitator yang bersertifikat b. Total jumlah penghulu/ fasilitator yang ada
6	Nama Variabel Pembangun	1. Layanan BP4 2. Layanan keagamaan lainnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Urusan Agama Islam, Bimas Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha
2	Nama Indikator	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah

3	Konsep/Definisi	BRUS adalah bimbingan yang diberikan kepada remaja dalam rangka membekali pengetahuan dan ketrampilan yang bertujuan untuk membantu remaja dalam mengembangkan potensi diri dalam menghadapi tantangan dan membuat keputusan yang tepat. isu yang diangkat dari pelaksanaan bimbingan ini adalah cegah kawin anak, cegah seks pranikah, dan penyalahgunaan Napza serta kenakalan remaja lainnya. Berdasarkan data dari BPS Sumatera Barat 2024, Jumlah Remaja Usia 15-19 tahun di Sumatera Barat adalah 49.287.000 jiwa.
4	Interpretasi	Semakin tinggi partisipasi remaja mengikuti bimbingan, semakin besar peran pemerintah dalam ikut serta membangun ketahanan keluarga
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = $(a/b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah remaja yang mendapatkan bimbingan b. Jumlah remaja usia 15-19 tahun berdasarkan data BPS
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah 2. Jumlah penduduk usia 15-19 tahun berdasar data BPS Provinsi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Peningkatan SDM melalui Bimtek Fasilitator 2. Penyiapan Peer Educator bagi madrasah/sekolah 3. Model bimbingan bekerjasama dengan madrasah/ sekolah /pondok pesantren dan lembaga
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Urusan Agama Islam, Bimas Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan
3	Konsep/Definisi	Layanan yang diberikan pada keluarga Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha, i dapat berupa konseling individu untuk anggota keluarga, konseling kelompok, lokakarya, atau program-

		program yang melibatkan seluruh keluarga sebagai sistem yang tidak terpisahkan dalam penyelesaian masalah.
4	Interpretasi	Semakin banyak layanan diberikan, akan dapat membantu keluarga dalam berbagai bidang, seperti pribadi, belajar, sosial, dan karir, sehingga dapat mencapai kesejahteraan dan mengoptimalkan potensi masing-masing anggota keluarga.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = $[(a-b) / b] \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan bimbingan keluarga tahun berjalan b. Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan bimbingan keluarga tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pengembangan materi dan metode bimbingan keagamaan keluarga 2. Pelatihan dan peningkatan kapasitas pembimbing keagamaan keluarga 3. Evaluasi dan monitoring efektivitas layanan bimbingan keagamaan 4. Survei kepuasan keluarga terhadap layanan bimbingan keagamaan 5. Penyediaan sarana dan media edukasi keagamaan bagi keluarga
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Urusan Agama Islam, Bimas Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha
2	Nama Indikator	Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan
3	Konsep/Definisi	Bantuan yang diberikan untuk peningkatan sarana dan prasarana pada rumah ibadah
4	Interpretasi	Indikator yang mengukur seberapa banyak rumah ibadah dari total jumlah rumah ibadah yang ada telah menerima bantuan untuk pembangunan atau peningkatan sarana dan prasarana ibadahnya, seperti bangunan, fasilitas, dan perlengkapan yang menunjang kegiatan keagamaan.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = $(a/b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah rumah ibadah yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana b. Jumlah rumah ibadah yang ada
6	Nama Variabel Pembangun	1. Data jumlah rumah ibadah berdasarkan agama yang mendapat bantuan 2. Jumlah total rumah ibadah yang terdata
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Urusan Agama Islam
2	Nama Indikator	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat
3	Konsep/Definisi	Sertifikasi arah kiblat merupakan proses verifikasi dan penetapan arah kiblat oleh instansi berwenang untuk memastikan kesesuaian arah shalat di masjid atau musholla. Sertifikasi ini dilakukan berdasarkan metode hisab dan observasi yang akurat.
4	Interpretasi	Angka ini menunjukkan proporsi masjid/musholla yang telah memperoleh sertifikat arah kiblat. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak masjid/musholla yang telah terstandarisasi arah kiblatnya secara sah dan ilmiah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah masjid/musholla yang bersertifikat arah kiblat b. Total jumlah masjid/musholla yang terdata
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah masjid/musholla bersertifikat arah kiblat 2. Jumlah total masjid/musholla
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis masjid: Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jami'.

11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Urusan Agama Islam, Bimas Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan kitab suci agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha yang disediakan
3	Konsep/Definisi	Persentase peningkatan kitab suci yang disediakan adalah ukuran perubahan jumlah kitab suci yang tersedia dalam suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya. Indikator ini mencerminkan upaya peningkatan akses terhadap literatur kitab suci bagi masyarakat.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase peningkatan ini, semakin banyak buku keagamaan yang tersedia, yang dapat mendukung peningkatan pemahaman keagamaan dan literasi masyarakat. Jika persentase rendah atau negatif, hal ini menunjukkan stagnasi atau penurunan dalam penyediaan buku keagamaan, yang dapat berdampak pada keterbatasan akses terhadap sumber bacaan keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = $((a - b) / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun berjalan b. Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun berjalan 2. Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pengadaan dan Distribusi Kitab Suci 2. Digitalisasi dan Akses Kitab Suci Online 3. Fasilitasi Cetak dan Penerjemahan Kitab Suci 4. Kemitraan dengan Penerbit dan Lembaga Keagamaan 5. Monitoring Kebutuhan dan Ketersediaan Kitab Suci
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan kitab suci masing-masing agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha

11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Urusan Agama Islam, Bimas Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha
2	Nama Indikator	Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah
3	Konsep/Definisi	Naskah dan buku keagamaan yang dinyatakan layak edar adalah naskah/buku yang telah melalui proses penilaian oleh lembaga atau otoritas berwenang (misalnya Lajnah Pentashihan Mushaf - Al-Qur'an, Direktorat Urusan Agama, atau lembaga keagamaan masing-masing) dan dinyatakan sesuai dengan kaidah ajaran agama, nilai nilai moderasi, serta peraturan perundangan.
4	Interpretasi	Indikator ini menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan jumlah naskah/buku keagamaan yang memenuhi standar kelayakan edar. Makin tinggi persentasenya, makin banyak literatur keagamaan yang berkualitas, sesuai kaidah, dan moderatif yang tersedia di masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase peningkatan = $((a - b)) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar sesuai kaidah b. Jumlah naskah/buku keagamaan yang terdaftar
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun berjalan 2. Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Urusan Agama Islam, Bimas Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha
2	Nama Indikator	Persentase jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan Islam terintegrasi basis data terpadu nasional
3	Konsep/Definisi	Integrasi pemanfaatan penerima manfaat penyaluran dana zakat, infak, sedekah dan pemanfaatan wakaf dengan dapat penduduk miskin yang ada pada sistem data kemiskinan di daerah. Jumlah data mustahik yang selaras dengan data kemiskinan regsosek
4	Interpretasi	Semakin tinggi penerima manfaat dari dana sosial keagamaan, maka semakin produktif peran dana sosial keagamaan yang dikembangkan untuk pengentasan kemiskinan, dan data saling terintegrasi
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = (a / b) x 100% <u>Keterangan</u> a. Jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan yang terintegrasi dengan Regsosek b. Jumlah penduduk miskin pada Regsosek
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan yang terintegrasi dengan Regsosek 2. Jumlah penduduk miskin pada Regsosek
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan dan Verifikasi Mustahik 2. Integrasi Data dengan Basis Data Terpadu Nasional 3. Penyelarasan Kriteria Mustahik dengan Standar Nasional 4. Digitalisasi dan Pemutakhiran Data Mustahik 5. Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Sosial
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Mustahik zakat 2. Calon penerima dana sosial keagamaan
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Urusan Agama Islaml Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat
2	Nama Indikator	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan
3	Konsep/Definisi	Rekomendasi hasil pemantauan merupakan tindak lanjut dari kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal. Rekomendasi ini diterbitkan oleh pengawas halal sebagai hasil evaluasi terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap standar halal yang berlaku.
4	Interpretasi	Angka ini mencerminkan proporsi rekomendasi yang berhasil diterbitkan dari seluruh hasil pemantauan yang dilakukan. Semakin tinggi persentasenya, semakin optimal pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan dalam sistem jaminan produk halal.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah rekomendasi hasil pemantauan yang diterbitkan b. umlah total hasil pemantauan yang dilakukan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah rekomendasi hasil pemantauan yang diterbitkan 2. Jumlah total hasil pemantauan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pemantauan dan Evaluasi Pengawas Halal
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
2	Nama Indikator	Persentase calon jamaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota
3	Konsep/Definisi	Persentase calon jamaah haji kategori lanjut usia (lansia), yaitu berusia 65 tahun ke atas, yang diberangkatkan ke tanah suci sesuai alokasi kuota khusus lansia yang ditetapkan setiap tahun oleh Kementerian Agama
4	Interpretasi	Nilai yang tinggi menunjukkan keberhasilan sistem seleksi, alokasi kuota, dan kesiapan administratif dalam mewujudkan layanan haji yang inklusif dan

		berkeadilan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = $(a/b) \times 100$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah calon jemaah lansia yang diberangkatkan pada tahun berjalan b. Total kuota jemaah lansia yang tersedia pada tahun berjalan
6	Nama Variabel Pembangun	Persentase jemaah haji lansia yang diberangkatkan sesuai kuota tahunan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penetapan dan alokasi kuota jemaah lansia 2. Verifikasi administrasi dan kesehatan calon jemaah lansia 3. Pemantauan daftar antrean haji berdasarkan usia 4. Penyiapan dan pemberangkatan calon jemaah lansia 5. Evaluasi pelaksanaan kebijakan afirmasi lansia dalam penyelenggaraan haji
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Lansia Prioritas Berangkat (Usia 65 Tahun ke Atas) 2. Lansia dengan Pendamping 3. Lansia Mandiri 4. Lansia Gagal Berangkat (Pengganti Kuota)
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
2	Nama Indikator	Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan
3	Konsep/Definisi	Presentasi PLHUT yang telah memenuhi kriteria standar minimum sarana-prasarana dan standar pelayanan publik sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Agama. Standar ini mencakup fasilitas fisik, sistem layanan terintegrasi, serta kualitas SDM dan prosedur layanan kepada jemaah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin optimal penyelenggaraan layanan haji dan umrah terpadu, yang berorientasi pada kemudahan, kecepatan, kenyamanan, dan kepastian layanan bagi masyarakat.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = $(a/b) \times 100$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah PLHUT yang telah memenuhi seluruh atau sebagian besar indikator standar pelayanan dan sarana-prasarana b. Jumlah total PLHUT yang terdaftar dan aktif
6	Nama Variabel Pembangun	Persentase PLHUT yang memenuhi standar pelayanan dan sarana-prasarana
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Verifikasi dan evaluasi standar pelayanan PLHUT 2. Monitoring pemenuhan standar sarana dan prasarana 3. Pembinaan teknis dan peningkatan kapasitas SDM PLHUT 4. Audit dan supervisi kualitas layanan publik keagamaan 5. Pengembangan sistem layanan digital PLHUT
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. PLHUT dengan Sarana dan Prasarana Lengkap 2. PLHUT dengan Pelayanan Terstandar 3. PLHUT yang Terintegrasi secara Digital 4. PLHUT dalam Proses Pemenuhan Standar
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
2	Nama Indikator	Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu
3	Konsep/Definisi	Persentase pengguna Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) yang menyatakan puas terhadap kualitas layanan administrasi haji dan umrah yang diterima, meliputi aspek kecepatan, ketepatan, kenyamanan, dan kemudahan layanan
4	Interpretasi	Semakin tinggi tingkat kepuasan menunjukkan bahwa kualitas layanan PLHUT memenuhi ekspektasi jamaah atau masyarakat dalam proses penyelenggaraan ibadah haji dan umrah
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah pengguna PLHUT yang menyatakan puas b. Jumlah total responden survei

6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah pengguna PLHUT yang menyatakan puas 2. Jumlah total pengguna PLHUT yang menjadi responden survey
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Survei Kepuasan Layanan PLHUT 2. Monitoring dan Evaluasi Layanan PLHUT
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Kecepatan Layanan 2. Ketepatan Layanan 3. Kenyamanan Layanan 4. Kemudahan Akses Layanan
11	Level Estimasi	Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
2	Nama Indikator	Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A); a. Lembaga penyelenggara haji khusus b. Lembaga penyelenggara umrah
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi lembaga penyelenggara haji khusus dan umrah yang memperoleh akreditasi predikat A sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian Agama melalui mekanisme penilaian akreditasi berbasis kinerja, kepatuhan regulasi, serta kualitas layanan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, semakin besar proporsi lembaga yang memberikan layanan dengan standar prima, akuntabel, dan sesuai regulasi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = $(a/b) \times 100$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah PIHK dan/atau PPIU yang memperoleh akreditasi A pada tahun berjalan b. Jumlah total PIHK dan/atau PPIU yang terdaftar aktif pada tahun berjalan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Persentase PIHK terakreditasi A 2. Persentase PPIU terakreditasi A
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Proses penilaian dan akreditasi PIHK dan PPIU 2. Monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah 3. Penerbitan sertifikat akreditasi 4. Pembinaan dan pengawasan reguler lembaga penyelenggara 5. Digitalisasi dan pelaporan akreditasi pada sistem informasi haji dan umrah

8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Lembaga Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) Terakreditasi A 2. Lembaga Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Terakreditasi A
11	Level Estimasi	- Provinsi - Kabupaten/ Kota

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
2	Nama Indikator	Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar
3	Konsep/Definisi	Persentase unit layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi bagi jemaah haji yang telah memenuhi standar pelayanan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kontrak layanan haji
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin baik kepatuhan penyedia layanan dalam memenuhi standar mutu layanan haji, yang berdampak pada kenyamanan, keselamatan, dan kepuasan jemaah haji
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: = (a / b) x 100% <u>Keterangan</u> a. Jumlah unit layanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) yang memenuhi standar b. Jumlah total unit layanan yang tersedia
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah unit layanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) yang sesuai standar 2. Jumlah total unit layanan yang disediakan untuk jemaah haji
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Verifikasi Kelayakan Akomodasi Jemaah Haji 2. Pemeriksaan Kualitas Konsumsi Jemaah Haji 3. Pemeriksaan Kelayakan Transportasi Jemaah Haji
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Pelayanan Akomodasi 2. Pelayanan Konsumsi 3. Pelayanan Transportasi

11	Level Estimasi	- Provinsi - Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
2	Nama Indikator	Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75
3	Konsep/Definisi	Persentase petugas haji yang mencapai skor kinerja di atas batas minimal 75 berdasarkan hasil penilaian atas pelaksanaan tugas pelayanan, pembimbingan, dan perlindungan jemaah haji selama operasional haji
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak petugas haji yang melaksanakan tugas dengan baik dan memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah petugas haji yang memperoleh nilai kinerja di atas 75 b. Jumlah total petugas haji yang dievaluasi
6	Nama Variabel Pembangun	- Jumlah petugas haji yang memperoleh nilai kinerja di atas 75 - Total petugas haji yang dievaluasi kinerjanya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Evaluasi Kinerja Petugas Haji - Penilaian dan Pemantauan Pelaksanaan Tugas Petugas Haji
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Petugas Kloter (TKHL, TPHL, TPIHL) - Petugas Non-Kloter (PPIH Arab Saudi) - Petugas PPIH Embarkasi/Debarkasi
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
2	Nama Indikator	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji

3	Konsep/Definisi	Persentase calon jemaah haji yang telah mengikuti kegiatan bimbingan manasik haji dan memperoleh sertifikat sebagai bukti kelulusan pelatihan manasik haji
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak calon jemaah haji yang telah memahami tata cara pelaksanaan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai rukun dan ketentuan ibadah haji
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik b. Jumlah total calon jemaah haji
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji 2. Jumlah total calon jemaah haji pada tahun berjalan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji 2. Penerbitan Sertifikat Manasik Haji
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Jemaah Haji Reguler 2. Jemaah Haji Khusus
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

E.2 Pengukuran IKS Bidang Pendidikan

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
2	Nama Indikator	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik
3	Konsep/Definisi	Ukuran proporsi siswa/santri yang berhasil menyelesaikan pendidikan dengan predikat "sangat baik" di tiga jenis satuan pendidikan yang berbeda: pendidikan umum dengan kekhasan agama, pendidikan keagamaan, dan pesantren.
4	Interpretasi	Persentase kelulusan "sangat baik" pada satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan, dan satuan pendidikan

		pesantren menunjukkan kinerja akademik dan potensi lulusan dari masing-masing lembaga pendidikan dalam mencapai standar tertinggi, namun memerlukan analisis lebih mendalam terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang mendorong keberhasilan ini
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah siswa/ santri yang berhasil menyelesaikan pendidikan dengan predikat sangat baik b. Total jumlah santri/ siswa
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan 2. Jumlah siswa/ santri 3. Rekapitulasi hasil belajar
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenjang Pendidikan: RA/ sederajat, MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif
3	Konsep/Definisi	Persentase madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, yaitu menyediakan layanan pendidikan yang mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dalam satu lingkungan pendidikan dengan peserta didik lainnya.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan telah menyediakan akses dan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

		Persentase yang tinggi menunjukkan komitmen terhadap prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pendidikan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggara kan pendidikan inklusif b. Total jumlah madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif 2. Total jumlah madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan atau survei penyelenggaraan pendidikan inklusif oleh kementerian/lembaga terkait 2. Laporan satuan pendidikan tentang penyelenggaraan layanan inklusif
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenjang Pendidikan: RA/ sederajat, MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana
3	Konsep/Definisi	Persentase madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada komponen sarana dan prasarana. Pemenuhan ini menunjukkan kesiapan infrastruktur dan fasilitas dasar untuk mendukung proses belajar mengajar sesuai standar yang ditetapkan secara nasional.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana pada madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan

		keagamaan lainnya. Persentase yang tinggi mencerminkan kualitas layanan pendidikan yang lebih baik dan terpenuhinya kebutuhan ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas pendukung lainnya.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras b. Jumlah total madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan yang ada
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras 2. Jumlah madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren
3	Konsep/Definisi	Persentase kenaikan jumlah peserta didik (siswa) yang terdaftar pada madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan dalam periode tertentu dibandingkan dengan jumlah siswa pada periode sebelumnya.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan partisipasi siswa pada madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan. Persentase yang positif menunjukkan adanya peningkatan minat, akses, atau keberlanjutan layanan pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan keagamaan tersebut.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a - b) / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun berjalan b. Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun berjalan 2. Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan siswa melalui EMIS, SIMPATIKA, atau sistem data pendidikan lainnya yang dikelola kementerian/lembaga terkait 2. Rekap laporan jumlah siswa dari satuan pendidikan keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenjang Pendidikan: RA/ sederajat, MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
2	Nama Indikator	Persentase Anak Kelas 1 MI/Ula yang Pernah Mengikuti TK/ RA
3	Konsep/Definisi	Persentase peserta didik kelas 1 pada MI/ Ula, yang sebelumnya pernah mengikuti pendidikan anak usia dini (PAUD), baik formal maupun nonformal
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian layanan PAUD sebagai fondasi kesiapan belajar anak sebelum memasuki pendidikan dasar. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak anak yang memperoleh stimulasi dan pembelajaran awal melalui PAUD.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah siswa kelas 1 MI/ Ula yang pernah mengikuti PAUD b. Total jumlah siswa kelas 1 MI/ Ula
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah siswa kelas 1 MI/ Ula yang pernah mengikuti PAUD 2. Total jumlah siswa kelas 1 MI/ Ula

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan riwayat pendidikan anak melalui sistem EMIS, PPDB, atau instrumen pendataan siswa baru 2. Laporan satuan pendidikan mengenai latar belakang pendidikan anak sebelum masuk kelas 1
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan satuan pendidikan: MI, SDTK, Adhi Widyalyaya, Mula Dhammasekha
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah
3	Konsep/Definisi	Persentase satuan pendidikan yang menyediakan layanan kesehatan sekolah, meliputi kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan berkala, UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), pelayanan gizi, kesehatan reproduksi, dan layanan promotif atau preventif lainnya yang terintegrasi dalam program sekolah.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana satuan pendidikan telah mengimplemen tasikan layanan kesehatan bagi peserta didik di lingkungan sekolah. Persentase yang tinggi menunjukkan perhatian sekolah terhadap kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraan peserta didik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah satuan pendidikan yang menyelengga rakan layanan kesehatan sekolah b. Total jumlah satuan pendidikan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan yang menyeleng garakan layanan kesehatan sekolah 2. Total jumlah satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan melalui sistem EMIS, Dapodik, atau survei layanan kesehatan sekolah oleh kementerian/ lembaga terkait 2. Laporan satuan pendidikan tentang kegiatan UKS dan layanan kesehatan lainnya

8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: RA/ sederajat, MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
2	Nama Indikator	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan pada Pesantren
3	Konsep/Definisi	Jumlah anak usia sekolah yang sebelumnya tidak bersekolah (drop out atau tidak pernah mengenyam pendidikan formal) yang kemudian mengikuti program Pendidikan Kesetaraan (setara Paket A, B, atau C) yang diselenggarakan oleh pesantren.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur peran pesantren dalam memperluas akses pendidikan bagi anak yang tidak sekolah melalui jalur Pendidikan Kesetaraan. Angka yang tinggi menunjukkan kontribusi pesantren dalam menekan angka anak tidak sekolah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan pada Pesantren
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan peserta Pendidikan Kesetaraan di pesantren melalui EMIS atau sistem pendataan lembaga nonformal lainnya 2. Laporan program Pendidikan Kesetaraan dari pesantren penyelenggara
8	Ukuran/Satuan	Orang
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang kesetaraan yang diikuti: setara Paket A/ sederajat, Paket B/ sederajat, Paket C/ sederajat
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
2	Nama Indikator	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a. Literasi membaca b. Numerasi
3	Konsep/Definisi	Rata-rata skor capaian peserta didik pada asesmen kompetensi tingkat nasional (AKM) dalam aspek literasi membaca dan numerasi, yaitu kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan teks tertulis serta kemampuan berpikir menggunakan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari.
4	Interpretasi	Nilai rata-rata ini mencerminkan tingkat penguasaan kompetensi minimum siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Semakin tinggi skor rata-rata, semakin baik penguasaan literasi membaca dan numerasi siswa.
		Indikator ini berguna untuk melihat efektivitas pembelajaran dan kesetaraan hasil belajar di berbagai daerah dan jenjang pendidikan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai rata-rata = $(\sum \text{ skor peserta didik}) / (\text{jumlah peserta didik})$
6	Nama Variabel Pembangun	1. Skor literasi membaca peserta didik 2. Skor numerasi peserta didik 3. Jumlah peserta didik yang mengikuti AKM
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas

3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi satuan pendidikan yang menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan melibatkan partisipasi aktif dari komunitas pendidikan (orang tua, komite sekolah, tokoh masyarakat, dll).
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan bahwa perencanaan program pendidikan di satuan pendidikan melibatkan pemangku kepentingan secara partisipatif, yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan relevansi program dengan kebutuhan lingkungan sekitar.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah satuan pendidikan yang menyusun RKT berbasis partisipasi komunitas b. Total jumlah satuan pendidikan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan yang menyusun RKT berbasis partisipasi komunitas 2. Jumlah total satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan proporsi satuan pendidikan yang menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter ke dalam proses pembelajaran secara sistematis dan terstruktur.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan yang berkomitmen membentuk peserta didik berkarakter melalui integrasi dalam kurikulum dan kegiatan pembelajaran.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran b. Jumlah total satuan pendidikan yang menjadi sasaran
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter 2. Jumlah total satuan pendidikan sasaran
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, dan MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
2	Nama Indikator	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler
3	Konsep/Definisi	Jumlah prestasi yang diraih siswa madrasah/ satri pesantren dari kegiatan ekstrakurikuler merujuk pada total hasil atau pencapaian yang diperoleh siswa melalui partisipasi mereka dalam berbagai kegiatan di luar kurikulum formal, seperti kemenangan dalam kompetisi, meraih penghargaan, atau mencapai tingkat keterampilan tertentu di bidang minat mereka, yang kemudian dicatat dan diakui sebagai bukti usaha dan kemampuan mereka di luar akademik.
4	Interpretasi	Prestasi adalah hasil akhir dari suatu kegiatan yang telah dilakukan secara sungguh-sungguh.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler
6	Nama Variabel Pembangun	
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan

10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikannya: ...
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan peningkatan capaian nilai-nilai karakter siswa yang diperoleh melalui partisipasi aktif dalam kegiatan kepramukaan.
4	Interpretasi	Angka ini mencerminkan seberapa besar pengaruh kegiatan kepramukaan dalam membentuk dan meningkatkan karakter siswa, terutama pada aspek disiplin, gotong royong, kepemimpinan, dan tanggung jawab.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a - b) / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Rata-rata nilai karakter siswa setelah mengikuti kegiatan kepramukaan b. Rata-rata nilai karakter siswa sebelum mengikuti kegiatan kepramukaan
6	Nama Variabel Pembangun	a. Nilai karakter siswa pra-kegiatan kepramukaan b. Nilai karakter siswa pasca-kegiatan kepramukaan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyelenggaraan pembelajaran berbasis pendidikan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila 2. Peningkatan kegiatan ekstrakurikuler dan kepramukaan 3. Fasilitasi peningkatan dan pendampingan kegiatan kepramukaan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, dan MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
2	Nama Indikator	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan proporsi perangkat kurikulum yang telah melalui proses evaluasi dan pengembangan agar selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian terhadap lingkungan.
4	Interpretasi	Angka ini menunjukkan komitmen dan upaya sistem pendidikan dalam merevisi dan menyempurnakan kurikulum agar mendukung pembentukan karakter siswa yang peduli sesama dan lingkungan hidup.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan dengan muatan cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan b. Jumlah total perangkat kurikulum yang ada
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan 2. Jumlah total perangkat kurikulum
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi satuan pendidikan yang telah memenuhi kriteria sebagai satuan pendidikan unggul berdasarkan standar yang ditetapkan oleh kementerian/ lembaga terkait.

4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan pendidikan dengan kualitas unggul sesuai indikator mutu dan keunggulan tertentu (akademik, karakter, inovasi, dll).
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah satuan pendidikan yang terselenggara sebagai satuan pendidikan unggul b. Total jumlah satuan pendidikan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan unggul 2. Total jumlah satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: PAUD/ sederajat, MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
2	Nama Indikator	Persentase madrasah, satuan pendidikan pesantren menerapkan program pendidikan bilingual
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi madrasah dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan program pendidikan dengan dua bahasa pengantar, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa asing (umumnya bahasa Inggris atau bahasa Arab), dalam proses pembelajarannya.
4	Interpretasi	Persentase yang lebih tinggi menunjukkan semakin banyak madrasah dan pondok pesantren yang memberikan layanan pendidikan bilingual, yang berpotensi meningkatkan kompetensi bahasa siswa dan daya saing lulusan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah madrasah dan pondok pesantren yang menerapkan program pendidikan bilingual b. Total jumlah madrasah dan pesantren

6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah madrasah dan pesantren dengan program pendidikan bilingual
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi Implementasi Program Pendidikan Bilingual pada Madrasah dan Pesantren
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah
2	Nama Indikator	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi siswa pada satuan pendidikan yang berpartisipasi dalam ajang kompetisi berskala nasional atau internasional di bidang akademik, non-akademik, atau keagamaan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak siswa yang aktif dan memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional, mencerminkan kualitas pembinaan dan dukungan sekolah/ madrasah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional b. Total jumlah siswa
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah siswa peserta kompetisi nasional/ internasional 2. Total jumlah siswa
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi madrasah yang menerapkan tata kelola satuan pendidikan secara partisipatif (melibatkan komunitas sekolah, komite, orang tua, dan pihak lain) dan memperoleh penilaian pada kategori baik dalam aspek pengelolaan tersebut.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak madrasah yang melaksanakan prinsip good governance dalam pengelolaan pendidikan, yang berkontribusi pada peningkatan mutu layanan pendidikan
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah madrasah dengan nilai pengelolaan partisipatif kategori baik b. Total jumlah madrasah yang dinilai pengelolannya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Nilai pengelolaan madrasah 2. Kategori penilaian pengelolaan 3. Jumlah madrasah dinilai
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah
2	Nama Indikator	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menunjukkan proporsi materi ajar digital yang telah dikembangkan dan secara aktif dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar.
4	Interpretasi	Angka ini mencerminkan kesiapan dan adopsi teknologi digital dalam mendukung proses pembelajaran, serta sejauh mana materi ajar digital digunakan oleh pendidik dan peserta didik.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah materi ajar digital yang digunakan dalam pembelajaran b. Jumlah total materi ajar digital yang tersedia
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah materi ajar digital yang tersedia 2. Jumlah materi ajar digital yang digunakan dalam pembelajaran
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat

11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
2	Nama Indikator	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik
3	Konsep/Definisi	Sertifikat pendidik adalah pengakuan formal atas kompetensi dan profesionalisme guru yang dikeluarkan oleh pihak berwenang sebagai bukti bahwa guru tersebut memenuhi standar untuk menjalankan tugasnya.
4	Interpretasi	Menggambarkan tingkat profesionalisme dan kepatuhan guru terhadap standar kompetensi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah guru madrasah dan GPAI yang memiliki sertifikat pendidik b. Total jumlah guru madrasah dan GPAI
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah Guru yang memiliki sertifikat pendidik 2. Total Jumlah Guru:
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Jumlah guru yang belum mengikuti PPG
8	Ukuran/Satuan	Persen

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang: MI MTs dan MA
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah
2	Nama Indikator	Rasio guru madrasah terhadap siswa yang memenuhi SNP
3	Konsep/Definisi	Perbandingan jumlah guru pada madrasah dengan jumlah siswa di madrasah tersebut, yang menunjukkan sejauh mana rasio ini memenuhi ketentuan rasio ideal sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan untuk jenjang pendidikan tertentu.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur ketersediaan guru di madrasah dalam melayani siswa secara optimal sesuai standar minimal yang diatur dalam SNP.
		Rasio yang memenuhi SNP mencerminkan terpenuhinya standar layanan pendidikan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan efektif.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rasio = 1 : (Jumlah siswa / Jumlah guru) (Hasil rasio kemudian dibandingkan dengan rasio maksimal sesuai SNP pada masing-masing jenjang)
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru madrasah 2. Jumlah siswa madrasah
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan jumlah guru madrasah oleh kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah 2. Pendataan jumlah siswa madrasah pada sistem administrasi pendidikan
8	Ukuran/Satuan	Rasio
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan madrasah: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	- Provinsi - Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah
2	Nama Indikator	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal
3	Konsep/Definisi	Persentase tenaga kependidikan selain guru, seperti kepala madrasah/sekolah, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga kebersihan, yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan dan kompetensi kerja sesuai ketentuan standar nasional atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan standar minimal kualifikasi pendidikan dan kompetensi bagi tenaga kependidikan lainnya di satuan pendidikan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin baik kualitas SDM pendukung pendidikan dalam menjalankan tugas layanan administrasi, manajemen, dan teknis penunjang proses belajar mengajar.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dan sertifikasi kompetensi b. Total jumlah tenaga kependidikan lainnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dan sertifikasi kompetensi 2. Jumlah tenaga kependidikan lainnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Verifikasi data kualifikasi pendidikan dan kompetensi tenaga kependidikan melalui sistem informasi pendidikan 2. Pendataan dan penilaian kesesuaian dengan standar minimal yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga terkait 3. Pemberian bantuan pendidikan 4. Peningkatan pelatihan dan pendidikan administrasi dan teknis sesuai jabatan fungsional
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten / Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
2	Nama Indikator	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik
3	Konsep/Definisi	Sertifikat pendidik adalah pengakuan formal atas kompetensi dan profesionalisme guru agama yang dikeluarkan oleh pihak berwenang sebagai bukti bahwa guru tersebut memenuhi standar untuk menjalankan tugasnya.
4	Interpretasi	Menggambarkan tingkat profesionalisme dan kepatuhan guru terhadap standar kompetensi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah guru agama yang memiliki sertifikat pendidik b. Total jumlah guru agama yang ada
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru agama yang Memiliki Sertifikat Pendidik 2. Total Jumlah Guru Agama: .
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Jumlah guru agama yang belum mengikuti PPG
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang: SD/ Sederajat, SMP/ Sederajat dan SMA/ Sederajat
11	Level Estimasi	- Provinsi - Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
2	Nama Indikator	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil
3	Konsep/Definisi	Persentase guru pada satuan pendidikan yang memperoleh nilai minimal predikat terampil pada rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG).

		AKG adalah asesmen yang dilakukan untuk mengukur kompetensi pedagogik dan profesional guru sesuai standar kompetensi yang ditetapkan.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kualitas kompetensi guru dalam aspek pedagogik dan profesional telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru yang memiliki kemampuan mengajar, merencanakan pembelajaran, mengelola kelas, serta menguasai materi ajar dengan baik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah guru yang memperoleh nilai rapor hasil AKG minimal predikat terampil b. Total jumlah guru yang mengikuti AKG
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru yang memperoleh nilai rapor hasil AKG minimal predikat terampil 2. Total jumlah guru yang mengikuti AKG
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Guru (AKG) oleh kementerian/lembaga terkait 2. Rekapitulasi dan publikasi hasil rapor AKG yang mencantumkan predikat kompetensi guru
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah
2	Nama Indikator	Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil
3	Konsep/Definisi	Persentase Kepala Madrasah yang mendapatkan nilai minimal pada kategori terampil dalam rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK). AKK adalah asesmen yang dilakukan untuk mengukur kompetensi manajerial, supervisi akademik, kewirausahaan, dan kompetensi lainnya yang wajib dimiliki oleh kepala madrasah.

4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana kualitas kompetensi Kepala Madrasah telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak Kepala Madrasah yang memiliki kompetensi memadai dalam memimpin, mengelola satuan pendidikan, melakukan supervisi, serta mendorong inovasi di madrasah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKK minimal predikat terampil b. Total Kepala Madrasah yang mengikuti AKK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKK minimal predikat terampil 2. Total Kepala Madrasah yang mengikuti AKK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	3. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/ Sekolah (AKK) oleh kementerian/ lembaga terkait 4. Rekapitulasi hasil rapor AKK yang memuat predikat kompetensi Kepala Madrasah
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang madrasah: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
2	Nama Indikator	Persentase guru agama dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik
3	Konsep/Definisi	Persentase guru mata pelajaran agama dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang memperoleh nilai minimal kategori baik pada dimensi moderasi beragama dalam rapor hasil Asesmen Kompetensi. Nilai moderasi beragama ini menggambarkan sejauh mana guru agama dan tenaga kependidikan memiliki sikap keberagamaan yang moderat, toleran, anti-kekerasan, dan menghargai kebhinekaan.

4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat internalisasi nilai-nilai moderasi beragama pada guru agama dan tenaga kependidikan berdasarkan hasil asesmen kompetensi. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru agama dan tenaga kependidikan yang memiliki pandangan keagamaan yang inklusif, toleran, dan selaras dengan prinsip moderasi beragama.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan a. Jumlah guru agama dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal kategori baik pada rapor hasil Asesmen Kompetensi b. Total guru agama dan tenaga kependidikan yang mengikuti Asesmen Kompetensi
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru agama dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal kategori baik 2. Total guru agama dan tenaga kependidikan yang mengikuti Asesmen Kompetensi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi oleh kementerian/lembaga terkait yang memuat penilaian moderasi beragama 2. Rekapitulasi hasil rapor Asesmen Kompetensi guru agama dan tenaga kependidikan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
2	Nama Indikator	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) minimal predikat terampil

3	Konsep/Definisi	Persentase pengawas madrasah yang memperoleh nilai minimal pada kategori terampil dalam rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP). AKP adalah asesmen yang dilakukan untuk mengukur kompetensi pengawas dalam melaksanakan supervisi akademik dan manajerial, pembinaan guru dan kepala madrasah, serta pemantauan pelaksanaan standar nasional pendidikan di madrasah.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kompetensi pengawas madrasah telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak pengawas madrasah yang memiliki kemampuan memadai dalam melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan mutu madrasah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% <u>Keterangan</u> a. Jumlah pengawas madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKP minimal predikat terampil b. Total pengawas madrasah yang mengikuti AKP
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah pengawas madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKP minimal predikat terampil 2. Total pengawas madrasah yang mengikuti AKP
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) oleh kementerian/lembaga terkait 2. Pengolahan dan rekapitulasi hasil rapor AKP pengawas madrasah
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang madrasah binaan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
2	Nama Indikator	Persentase guru yang meningkat jenjang karir

3	Konsep/Definisi	Persentase guru pada satuan pendidikan yang mengalami peningkatan jenjang karir, yaitu naik dari jabatan fungsional lama ke jabatan fungsional yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional guru. Jenjang karir guru umumnya meliputi: Guru Pertama, Guru Muda, Guru Madya, dan Guru Utama.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur perkembangan karir guru sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadap peningkatan kompetensi, kinerja, dan pemenuhan angka kredit. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru yang terus mengembangkan diri dan memenuhi persyaratan kenaikan pangkat/jabatan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah guru yang naik jenjang karir dalam periode tertentu b. Total guru pada periode yang sama
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru yang meningkat jenjang karir 2. Total jumlah guru
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penilaian dan penetapan angka kredit guru 2. Proses kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
2	Nama Indikator	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir
3	Konsep/Definisi	Persentase pengawas madrasah yang mengalami peningkatan jenjang karir, yaitu naik dari jabatan fungsional pengawas madrasah pada jenjang tertentu ke jenjang yang lebih tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional pengawas.

4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur perkembangan karir pengawas madrasah sebagai bentuk penghargaan terhadap peningkatan kompetensi, kinerja, dan pemenuhan angka kredit. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak pengawas madrasah yang terdorong untuk meningkatkan kualitas diri dan memenuhi persyaratan kenaikan jabatan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah pengawas satuan pendidikan yang meningkat jenjang karir dalam periode tertentu b. Total pengawas satuan pendidikan pada periode yang sama
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah pengawas satuan pendidikan yang meningkat jenjang karir 2. Total pengawas satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penilaian dan penetapan angka kredit pengawas pada satuan pendidikan 2. Proses kenaikan pangkat/jabatan fungsional pengawas madrasah oleh kementerian/ lembaga terkait
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Pengawas pada Satuan Pendidikan Umum dengan kekhasan agama dan Satuan Pendidikan Keagamaan 2. Pengawas pada Satuan Pendidikan Umum
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)
3	Konsep/Definisi	Persentase pertumbuhan jumlah lulusan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. PPG agama adalah program pendidikan setelah program sarjana yang mempersiapkan lulusan menjadi guru profesional pada bidang studi pendidikan agama.

4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa besar peningkatan jumlah lulusan program PPG agama dari tahun ke tahun. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru agama yang telah menempuh jalur profesional melalui PPG, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan agama pada semua jenjang satuan pendidikan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase peningkatan = $[(a - b) / b] \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah lulusan PPG pada tahun berjalan b. Jumlah lulusan PPG pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada tahun berjalan 2. Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyelenggaraan program Pendidikan Profesi Guru oleh perguruan tinggi penyelenggara PPG 2. Pendataan kelulusan PPG yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
2	Nama Indikator	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan
3	Konsep/Definisi	Persentase jumlah rekomendasi terkait pengadaan (penambahan) dan pemerataan distribusi guru pendidikan agama yang diterbitkan berdasarkan analisis rencana kebutuhan guru terhadap total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah telah menindak lanjuti hasil perencanaan kebutuhan guru agama dengan menerbitkan rekomendasi formal untuk pengadaan dan pemerataan distribusi guru agama.

		Persentase yang tinggi menunjukkan proses perencanaan kebutuhan guru agama berjalan baik dan direspons dengan penerbitan rekomendasi kebijakan
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama yang diterbitkan berbasis rencana kebutuhan b. Total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun dan siap ditindaklanjuti
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama yang diterbitkan berbasis rencana kebutuhan 2. Total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan rencana kebutuhan guru agama berdasarkan analisis data kebutuhan dan ketersediaan guru 2. Penerbitan rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama oleh kementerian/ lembaga terkait atau pemerintah daerah
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

E.3 Pengukuran IKS Bidang Tatakelola

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Nilai Kinerja Anggaran
3	Konsep/Definisi	Nilai yang menunjukkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam suatu instansi pemerintahan, mencakup perbandingan antara realisasi anggaran dengan rencana anggaran serta pencapaian output dan outcome yang diharapkan
4	Interpretasi	Menggambarkan seberapa baik instansi dalam mengelola dan menggunakan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta seberapa tepat waktu dan akurat pelaksanaan anggaran tersebut.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggabungkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dengan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
6	Nama Variabel Pembangun	1. Rencana Anggaran 2. Realisasi Anggaran 3. Output 4. Outcome
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Perencanaan Anggaran 2. Pelaksanaan Anggaran 3. Evaluasi Kinerja Anggaran
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- NKA > 90% (Sangat Baik); - NKA > 80% sampai dengan 90% (Baik); - NKA > 60% sampai dengan 80% (Cukup); - NKA lebih dari 50% sampai dengan 60% (Kurang); - NKA sampai dengan 50% (Sangat Kurang)
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar
3	Konsep/Definisi	Indikator untuk mengetahui tingkat kualitas laporan kinerja satuan kerja Kementerian Agama
4	Interpretasi	Semakin tinggi capaian yang diperoleh maka semakin baik kepatuhan pelaporan kinerja Kementerian Agama
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen dari KMA 94 Tahun 2021
6	Nama Variabel Pembangun	Memenuhi kriteria dan sistematika dalam KMA 94 Tahun 2021
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	
----	---	--

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75
3	Konsep/Definisi	Indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas Kementerian Agama
4	Interpretasi	Semakin tinggi capaian yang diperoleh maka semakin baik sistem tata kelola dan layanan Kementerian Agama
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen dari KemenPAN RB
6	Nama Variabel Pembangun	1. Nilai Komponen Pengungkit (aspek pemenuhan dan aspek reform) 2. Nilai Komponen Hasil 3. Hasil Survei IPAK dan IPKP 4. Nilai SAKIP 5. Prosentase penyelesaian hasil pengawasan 6. Kepatuhan pelaporan LHKAN 7. Kualitas sarana layanan publik
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendampingan PMPZI 2. Penilaian Pendahuluan 3. Monitoring dan evaluasi PMPZI 4. Tindak lanjut hasil evaluasi ZI
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahmnan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
3	Konsep/Definisi	IKPA adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran

4	Interpretasi	Kenaikan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah tanda positif yang mencerminkan peningkatan dalam kualitas pelaksanaan anggaran oleh suatu kementerian/lembaga
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus perhitungan dilakukan oleh Kementerian Keuangan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran; 2. Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran; 3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	a. Sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ; b. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$; c. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau d. Kurang, apabila nilai IKPA < 70 .
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Website Kemenkeu

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
3	Konsep/Definisi	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan adalah ukuran yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas internal maupun eksternal. Indikator ini mencerminkan efektivitas pengelolaan pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi serta kebijakan yang berlaku.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase penyelesaian tindak lanjut, semakin baik tingkat kepatuhan dan efektivitas organisasi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti b. Jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang harus ditindaklanjuti,

		2. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti 3. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait tindak lanjut hasil pengawasan; 2. Pengembangan dashboard pemantauan kepatuhan; 3. Penguatan kerja sama dengan auditor internal dan eksternal
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada Kantor Wilayah 2. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada Satuan Kerja
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu
3	Konsep/Definisi	Persentase Satuan Kerja yang Menyusun RKBMN Tepat Waktu adalah ukuran kinerja yang menunjukkan proporsi satuan kerja yang berhasil menyusun dan menyampaikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan atau pedoman yang berlaku. Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan disiplin satuan kerja dalam perencanaan kebutuhan BMN
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasi satuan kerja yang menyusun RKBMN semakin tinggi kesadaran dan kepatuhan organisasi terhadap perencanaan kebutuhan aset negara
5	Metode / Rumus Perhitungan	Jumlah satuan kerja yang menyusun dan menyerahkan RKBMN tepat waktu di bandingkan dengan Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun RKBMN
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun RKBMN dan Jumlah satuan kerja yang menyusun dan menyerahkan RKBMN tepat waktu
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelatihan bagi pengelola BMN di satuan kerja terkait tata cara penyusunan RKBMN; 2. Pendampingan bagi satuan kerja dalam

		menyusun RKBMN. 3. Evaluasi berkala terhadap kendala yang dihadapi satuan kerja dan pemberian solusi.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Persentase satuan kerja yang menyusun RKBMN
11	Level Estimasi	Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur tingkat implementasi sistem Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) oleh satuan kerja untuk memastikan laporan keuangan disusun secara andal, akurat, dan sesuai standar akuntansi pemerintah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa semakin banyak satuan kerja yang telah menerapkan PIPK secara memadai untuk mendukung akuntabilitas dan keandalan laporan keuangan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah satuan kerja yang menerapkan PIPK b. Jumlah total satuan kerja
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan PIPK sesuai pedoman 2. Jumlah seluruh satuan kerja yang menjadi objek evaluasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Pengendalian Intern / Akuntabilitas Keuangan / Tata Kelola Pemerintahan
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu
3	Konsep/Definisi	Persentase Satuan Kerja yang Menyusun RKBMN Tepat Waktu adalah ukuran kinerja yang menunjukkan proporsi satuan kerja yang berhasil menyusun dan menyampaikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan atau pedoman yang berlaku. Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan disiplin satuan kerja dalam perencanaan kebutuhan BMN sebagai bagian dari pengelolaan aset negara yang efektif dan transparan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase satuan kerja yang menyusun RKBMN semakin tinggi kesadaran dan kepatuhan organisasi terhadap perencanaan kebutuhan aset negara
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah satuan kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu b. Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun RKBMN
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satker yang menyusun RKBMN tepat waktu 2. Jumlah seluruh satker yang diwajibkan menyusun RKBMN
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelatihan bagi pengelola BMN di satuan kerja terkait tata cara penyusunan RKBMN; 2. Pendampingan bagi satuan kerja dalam menyusun RKBMN. 3. Evaluasi berkala terhadap kendala yang dihadapi satuan kerja dan pemberian solusi.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Pengelolaan Barang Milik Negara/Tata Kelola Aset/Perencanaan Pemerintah
11	Level Estimasi	Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Indeks Profesionalitas ASN
3	Konsep/Definisi	Indeks profesionalisme ASN Kementerian Agama merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN (profesionalitas), memiliki integritas, tanggung jawab, inovasi dan keteladanan, serta berperilaku moderat (komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi) dalam melakukan tugas jabatannya.
4	Interpretasi	Semakin Tinggi Capaian Indeks Profesionalisme ASN pada Kementerian Agama maka Semakin Meningkat Presentasi SMART dan Moderat Religius ASN Kementerian Agama
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen yang disusun BKN
6	Nama Variabel Pembangun	Variabel Profesionalisme ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN (profesionalitas), memiliki integritas, tanggung jawab, inovasi dan keteladanan, serta berperilaku moderat (komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi) dalam melakukan tugas jabatannya.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Lingkup Variabel Profesionalisme ASN berdasar kan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN (profesionalitas), memiliki integritas, tanggung jawab, inovasi dan keteladanan, serta berperilaku moderat (komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi) dalam melakukan tugas jabatannya.
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan

3	Konsep/Definisi	Setiap satuan kerja wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja
4	Interpretasi	Semakin Tinggi Satuan Kerja yang melakukan penyusunan maka semakin meningkat Pemenuhan Kebutuhan ASNnya
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen yang disusun oleh BKN dan Kemenpanrb
6	Nama Variabel Pembangun	Penyusunan Kebutuhan ASN berdasarkan Jumlah dan Jenis Jabatan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Penyusunan Kebutuhan ASN berdasarkan Jumlah dan Jenis Jabatan di masing-masing satuan kerja
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/ inspiratif
3	Konsep/Definisi	Predikat Pegawai Teladan merupakan bentuk penghargaan bagi pegawai Kementerian Agama yang diberikan setiap tahun. Pegawai teladan merupakan role model bagi pegawai ASN lainnya. Dinilai berdasarkan sikap, perilaku, kinerja dan inovasi
4	Interpretasi	Semakin banyak partisipan yang disertakan maka semakin banyak role model dan reinforcement yang diperoleh
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen yang disusun oleh Kementerian Agama
6	Nama Variabel Pembangun	Dinilai berdasarkan sikap, perilaku, kinerja dan inovasi. Dan dibagi menjadi 4 kategori pegawai teladan (JPT Pratama, Jabatan Administrator/JF Madya, Jabatan Pengawas/JF Muda, Jabatan Pelaksana/JF Pertama/JF Keterampilan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan

10	Klasifikasi	Dinilai berdasarkan sikap, perilaku, kinerja dan inovasi. Dan dibagi menjadi 4 kategori pegawai teladan (JPT Pratama, Jabatan Administrator/JF Madya, Jabatan Pengawas/JF Muda, Jabatan Pelaksana/JF Pertama/JF Keterampilan
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Persentase kasus hukum yang terselesaikan
3	Konsep/Definisi	Indikator ini menunjukkan efektivitas sistem penanganan dan advokasi dalam menangani dan menyelesaikan kasus hukum, baik di tingkat peradilan pidana, perdata, administrasi, maupun kasus hukum lainnya.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik efektivitas sistem hukum dalam menyelesaikan perkara
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) * 100% <u>Keterangan</u> a. Jumlah kasus hukum yang terselesaikan b. Jumlah kasus hukum
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah kasus hukum yang terselesaikan 2. Jumlah Kasus hukum
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan naskah peraturan 2. Pelatihan/pembinaan/Sosialisasi
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Triwulan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis kasus hukum: 1. Kasus Sengketa tanah 2. Kasus hukum ASN 3. Dll
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Persentase rekomendasi izin orang asing
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur persentase jumlah rekomendasi izin yang diberikan kepada orang asing yang akan melakukan kegiatan keagamaan atau pendidikan atau orang Indonesia yang akan melakukan kegiatan keagamaan dan pendidikan ke luar negeri dalam suatu periode tertentu
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin cepat dan efektif proses pengambilan keputusan terkait izin orang asing.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% <u>Keterangan</u> a. Jumlah rekomendasi izin orang asing yang diterbitkan b. Jumlah rekomendasi izin orang asing
6	Nama Variabel Pembangun	▪ Rekomendasi Izin Tinggal Terbatas (ITAS) ▪ Rekomendasi Visa Tinggal Terbatas (VITAS) ▪ Rekomendasi Izin Tinggal Tetap (ITAP) ▪ Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) ▪ Rekomendasi Pengesahan RPTKA Non DKP-TKA ▪ Rekomendasi Izin Tinggal Dinas ▪ Izin Penelitian ▪ Izin Studi ▪ Izin Penelitian ▪ Izin Studi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan Regulasi 2. Penyusunan SOP 3. Penerbitan rekomendasi 4. Monev
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Triwulan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis izin: • Rekomendasi Izin Tinggal Terbatas (ITAS) • Rekomendasi Visa Tinggal Terbatas (VITAS) • Rekomendasi Izin Tinggal Tetap (ITAP) • Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) • Rekomendasi Pengesahan RPTKA Non DKP-TKA • Rekomendasi Izin Tinggal Dinas • Izin Penelitian • Izin Studi • Izin Penelitian

		• Studi
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur tingkat arsip yang telah dialihmedia (digitalisasi) dan dapat diakses dengan mudah melalui sistem elektronik, sebagai bagian dari transformasi tata kelola kearsipan modern.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa instansi semakin optimal dalam melakukan digitalisasi arsip serta memastikan aksesibilitasnya bagi pengguna internal maupun publik sesuai kewenangan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah arsip yang telah didigitalisasi dan dapat diakses dengan mudah b. Jumlah total arsip yang seharusnya didigitalisasi
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah arsip digital yang tersedia dan terakses 2. Jumlah keseluruhan arsip yang wajib didigitalisasi 3. Sistem penyimpanan dan akses digital yang digunakan (misalnya e-arsip, SRIKANDI)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Kearsipan / Transformasi Digital / Tata Kelola Informasi Pemerintah
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap

3	Konsep/Definisi	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan sesuai roadmap adalah Indikator yang menunjukkan sejauh mana pengembangan infrastruktur perkantoran, baik fisik maupun digital, telah direalisasikan sesuai dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan dalam roadmap pengembangan instansi atau organisasi. Indikator ini mencerminkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan atau renovasi fasilitas perkantoran dengan target yang telah direncanakan dalam periode tertentu.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik keselarasan antara pembangunan sarana-prasarana dengan roadmap yang ditetapkan
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah kegiatan pengembangan sarana dan prasarana yang sesuai dengan roadmap b. Jumlah total kegiatan pengembangan sarana dan prasarana
6	Nama Variabel Pembangun	1. Sarana dan prasaran 2. Pengelolaan Fasilitas Perkantoran
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Laporan pembangunan, 2. Roadmap pengembangan, data aset perkantoran 3. Sistem manajemen infrastruktur
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Triwulan dan Tahunan
10	Klasifikasi	1. $\geq 80\%$ Sebagian besar sarana dan prasarana telah dikembangkan sesuai roadmap dan berjalan optimal. 2. 60% - 79% Pembangunan cukup sesuai roadmap, tetapi ada beberapa target yang belum terealisasi. 3. 40% - 59% Pembangunan berjalan namun masih banyak yang tertunda atau tidak sesuai roadmap. 4. 20% - 39% Sebagian kecil sarana dan prasarana telah dikembangkan sesuai roadmap, tetapi masih jauh dari target. 5. $< 20\%$ Pengembangan sarana dan prasarana perkantoran masih sangat minim atau tidak sesuai roadmap.
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	
----	---	--

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID
3	Konsep/Definisi	Ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah atau badan publik telah mengimplementasikan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi secara efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator ini mencerminkan kesiapan, kualitas, dan efektivitas penyelenggaraan layanan informasi publik oleh PPID dalam memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terbuka dan dapat diakses dengan mudah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi tingkat kematangan, semakin efektif pula PPID dalam memberikan layanan informasi publik yang transparan dan akuntabel.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan instrumen dari Komisi Informasi
6	Nama Variabel Pembangun	1. Kebijakan dan Regulasi 2. Struktur Organisasi dan SDM PPID 3. Ketersediaan dan Kualitas Informasi Publik 4. Layanan Informasi Publik 5. Pengelolaan dan Inovasi Teknologi Informasi 6. Monitoring dan Evaluasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan peraturan tentang pelaksanaan PPID pada Satuan Kerja 2. Pembinaan/Pelatihan 3. Monitoring dan Evaluasi
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Sangat Maju PPID sudah sepenuhnya digital, transparan, responsif, dan memenuhi standar keterbukaan informasi. 2. Maju PPID telah berjalan dengan baik tetapi masih memerlukan sedikit penyempurnaan dalam aspek tertentu. 3. Berkembang PPID telah tersedia tetapi belum sepenuhnya efektif dalam penyelenggaraan layanan informasi.

		4. Dasar
--	--	----------

		PPID baru terbentuk dan masih dalam tahap pengembangan sistem serta kapasitas SDM. 5. Belum Berkembang PPID belum berfungsi secara optimal dan masih memerlukan banyak perbaikan.
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi
3	Konsep/Definisi	Indikator yang mengukur pertumbuhan jumlah konten berbasis keagamaan dan pendidikan yang diterbitkan dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Konten ini dapat berupa artikel, video, podcast, modul pembelajaran, atau materi digital lainnya yang tersedia di berbagai platform, seperti website resmi, media sosial, dan aplikasi pendidikan
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase peningkatan, semakin aktif produksi dan distribusi konten keagamaan dan pendidikan
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a - b) / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi pada tahun berjalan b. Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Konten Keagamaan dan Pendidikan 2. Media Informasi Publik
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan konten keagamaan dan pendidikan 2. Pengadaan sistem informasi 3. Melakukan monitoring dan Evaluasi 4. Pelatihan dan sosialisasi
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Konten Digital 2. Konten Cetak
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	
----	---	--

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Indeks Pembangunan Statistik
3	Konsep/Definisi	Ukuran yang menggambarkan tingkat kemajuan pembangunan statistik kementerian/instansi berdasarkan ketersediaan, kualitas, dan pemanfaatan data statistik. IPS digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kementerian/lembaga telah mengembangkan sistem statistik yang andal, akurat, dan relevan guna mendukung pengambilan kebijakan berbasis data
4	Interpretasi	Semakin berkualitas Kementerian/Lembaga mampu menyediakan sistem statistik data yang akurat, berkualitas, relevan, dan tepat waktu maka semakin berkualitas untuk mendukung pengambilan kebijakan dan pembangunan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	
6	Nama Variabel Pembangun	1. Prinsip SDI 2. Kualitas Data 3. Proses Bisnis Statistik 4. Kelembagaan; dan 5. Sistem Statistik
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyelenggaraan satu data Kementerian Agama 2. Penyusunan data Statistik 3. Penguatan jabatan fungsional statistisi 4. Pengadaan sistem informasi satu data Kementerian Agama
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Menggunakan ukuran skala tingkat kematangan 1 sampai 5 dengan satuan poin tingkat kematangan
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Persentase data statistik yang dipublikasikan
3	Konsep/Definisi	Proporsi data statistik yang memenuhi standar akurasi dan kualitas tertentu yang digunakan

		sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan
4	Interpretasi	Data yang dipublikasikan adalah data yang akurat dengan kualitas tertentu dan memenuhi syarat sebagai dasar untuk perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a - b) / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah data statistik pada tahun berjalan b. Jumlah data statistik pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Menyatakan berapa banyak perubahan yang terjadi pada suatu nilai statistik antara dua titik waktu yang berbeda.
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur sejauh mana realisasi anggaran bidang pendidikan digunakan secara efektif sesuai dengan output atau hasil yang direncanakan, baik dari sisi volume, kualitas, maupun ketepatan sasaran program.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa anggaran pendidikan tidak hanya terserap, tetapi juga menghasilkan output yang sesuai target, mencerminkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Nilai anggaran yang digunakan sesuai dengan output yang tercapai b. Total anggaran bidang pendidikan yang direalisasikan

6	Nama Variabel Pembangun	1. Realisasi anggaran pendidikan 2. Capaian output kegiatan (misalnya jumlah siswa terbantu, sarana pendidikan yang dibangun, pelatihan yang diselenggarakan) 3. Rencana kerja dan target output yang ditetapkan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Indikator ini mengukur sejauh mana realisasi anggaran bidang pendidikan digunakan secara efektif sesuai dengan output atau hasil yang direncanakan, baik dari sisi volume, kualitas, maupun ketepatan sasaran program.
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur pertumbuhan kinerja Kementerian Agama dari tahun ke tahun berdasarkan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan adanya peningkatan efektivitas, efisiensi, dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Agama.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = ((a - b) / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> b. Nilai kinerja Kementerian Agama pada tahun berjalan c. Nilai kinerja Kementerian Agama pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Capaian indikator kinerja utama (IKU) tahun berjalan 2. Capaian IKU tahun sebelumnya 3. Skor evaluasi kinerja kementerian dari instansi pembina (misal KemenPAN-RB atau Bappenas)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kementerian Agama

8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Perencanaan dan Evaluasi Kinerja / Reformasi Birokrasi / Manajemen Kinerja Pemerintah
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi kebijakan prioritas di bidang pendidikan yang telah dikomunikasikan secara aktif kepada publik melalui berbagai media, baik konvensional maupun digital, sebagai bagian dari transparansi dan edukasi publik.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa instansi semakin responsif dan terbuka dalam menyampaikan informasi kebijakan pendidikan kepada masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah kebijakan prioritas bidang pendidikan yang telah disampaikan melalui media b. Jumlah total kebijakan prioritas bidang pendidikan yang ditetapkan
6	Nama Variabel Pembangun	- Daftar kebijakan prioritas pendidikan - Jumlah kebijakan yang dipublikasikan di media (TV, radio, media cetak, media sosial, website resmi, dll) - Kanal/media penyampaian informasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Diseminasi dan Publikasi Kebijakan Prioritas Bidang Pendidikan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Komunikasi Publik / Pendidikan / Transparansi Kebijakan Pemerintah
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur pertumbuhan dari sisi aksesibilitas dan kualitas penyampaian informasi terkait program atau kebijakan prioritas bidang pendidikan kepada publik melalui berbagai media resmi, untuk memastikan informasi sampai secara tepat, luas, dan mudah dipahami.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan peningkatan keterjangkauan dan mutu publikasi informasi pendidikan, yang mencerminkan transparansi, akuntabilitas, serta keberhasilan strategi komunikasi publik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a - b) / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Nilai capaian akses dan kualitas informasi tahun berjalan b. Nilai capaian akses dan kualitas informasi tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah kanal/media yang digunakan untuk publikasi 2. Jumlah jangkauan atau interaksi publik terhadap informasi 3. Tingkat keterbacaan dan pemahaman konten 4. Frekuensi dan konsistensi publikasi kebijakan pendidikan 5. Penilaian kualitas konten oleh pengguna atau pemantauan internal
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Diseminasi dan Publikasi Program/Kebijakan Prioritas Bidang Pendidikan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: • Komunikasi Publik • Pendidikan • Transparansi Informasi Pemerintah
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur tingkat kecukupan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang tersedia untuk mendukung layanan digital dan operasional sistem informasi di lingkungan instansi pemerintah
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa kebutuhan infrastruktur TIK (seperti jaringan, server, perangkat keras, dan pusat data) telah terpenuhi secara optimal guna mendukung kelancaran layanan digital.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah kebutuhan infrastruktur TIK yang telah terpenuhi b. Jumlah total kebutuhan infrastruktur TIK yang direncanakan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah perangkat keras (hardware) yang tersedia 2. Jumlah kebutuhan jaringan dan konektivitas yang terpenuhi 3. Jumlah layanan server/cloud yang tersedia 4. Total kebutuhan infrastruktur yang diidentifikasi dalam perencanaan TIK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Infrastruktur TIK
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Teknologi Informasi dan Komunikasi / Infrastruktur Digital / Dukungan Layanan Pemerintah Digital
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi data prioritas yang telah tersedia dan sesuai dengan kebutuhan pengukuran indikator pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) instansi.

4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa instansi telah menyediakan data yang relevan dan selaras dengan perencanaan nasional dan sektoral, sehingga mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah data prioritas yang tersedia dan selaras dengan indikator Renstra b. Jumlah total data yang dibutuhkan untuk mengukur indikator Renstra
6	Nama Variabel Pembangun	1. Daftar indikator RPJMN dan Renstra yang membutuhkan data 2. Jumlah data yang telah tersedia dalam format dan frekuensi yang sesuai 3. Kesesuaian metadata dan definisi operasional data
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Data Prioritas Pembangunan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahman
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Perencanaan Pembangunan / Satu Data Indonesia / Tata Kelola Data Pemerintah
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur kualitas pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja berdasarkan aspek kepatuhan, efektivitas penyerapan anggaran, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi penggunaan dana, sebagaimana dinilai oleh Kementerian Keuangan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilai kinerja, menunjukkan bahwa satuan kerja semakin baik dalam merencanakan dan merealisasikan anggarannya secara tertib, efisien, dan sesuai peraturan yang berlaku.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai dari Kementerian Keuangan
6	Nama Variabel Pembangun	Berdasarkan aspek penilaian: • Perencanaan Anggaran, • Pelaksanaan Anggaran.

		• Efektivitas, Efisiensi, dan • Kepatuhan terhadap Regulasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten / Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

A.1 Pengukuran Kinerja

Salah satu pondasi utama dalam pengelolaan birokrasi adalah pengukuran kinerja sebagai cara untuk menjamin adanya peningkatan layanan publik dan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi outcome. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja aktual fakta yang ada dengan kinerja yang diharapkan target. Pengukuran ini dilakukan secara berkala, yaitu triwulanan dan tahunan.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, dilakukan pengukuran terhadap indikator berdasarkan satuan ukurnya masing-masing, yaitu:

1. Pengukuran indikator yang dinyatakan dalam satuan indeks diperoleh dari hasil survei, baik internal maupun eksternal.
2. Pengukuran indikator yang dinyatakan dalam satuan angka/rerata/predikat/ opini diperoleh dari data sekunder/pihak/instansi yang berwenang.
3. Pengukuran indikator yang dinyatakan dalam satuan persentase diperoleh dari jumlah capaian dibanding total jumlah satuan masing-masing indikator.
4. Batas atas capaian kinerja mengacu pada Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama adalah 120 dan batas bawah capaian kinerja adalah 0.

Akuntabilitas kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Dengan didasarkan atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.

Metode pengukuran capaian kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Untuk menetapkan kategori capaian kinerja telah ditetapkan empat kategori capaian kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1 : Pengukuran Kinerja 2025

No	Kategori	Rentang Nilai	Kode
1	Sangat Baik	> 100 – 120	Biru
2	Baik	80 – 100	Hijau
3	Cukup	50 – 79,99	Kuning
4	Kurang	< 50	Merah

Sumber : Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021

Persentase rata rata capaian kinerja organisasi atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mencapai nilai **100** kategori **Baik** table 3.2

Tabel 3.2 : Capaian Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Atas Pelaksanaan Revisi Perjanjian Kinerja 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Revisi Perkin 2025		Capaian Kinerja	Kategori
		Target	Realisasi		
1 Meningkatkan jaminan beragama, toleransi, dan cinta kerukunan umat beragama	1 Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi	70.89	85.02	119.93	Sangat Baik
	2 Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	16.00	16.00	100	Baik
	3 Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	30.40	30.40	100	Baik
	4 Persentase peningkatan audiens MTQ/ Pesparani/ Pesparawi/ Utsawa Dharma/ Swayam Vara Tripitaka Gatha	22.80	22.80	100	Baik
	5 Persentase peningkatan peserta event seni budaya	30.40	30.40	100	Baik
	6 Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	76.00	76.00	100	Baik
2 Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	1 Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja kategori baik Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan	81.99	81.99	100	Baik
	2 Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	1:5	1:5	100	Baik
	3 Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi	30.00	30.00	100	Baik
	4 Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	12.14	12.14	100	Baik
	5 Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	15.00	15.00	100	Baik
	6 Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	16.63	16.63	100	Baik
	7 Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	2.38	2.38	100	Baik
	8 Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan	19.00	19.00	100	Baik
	9 Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaedah	19.00	19.00	100	Baik

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Revisi Perkin 2025		Capaian Kinerja	Kategori
			Target	Realisasi		
		10 Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	14.73	14.73	100	Baik
		11 Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan	18.00	18.00	100	Baik
3	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	99.85	99.85	100	Baik
4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1 Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	52.63	52.63	100	Baik
		2 Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu	75.00	75.00	100	Baik
5	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah	Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi A;				
		a. Lembaga penyelenggara haji khusus;	75.00	75.00	100	Baik
		b. Lembaga penyelenggara umrah	85.00	85.00	100	Baik
6	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	Persentase pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi jemaah haji sesuai standar	95	95	100	Baik
7	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	1 Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	90	90	100	Baik
		2 Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	100	100	100	Baik
8	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik	73.15	73.15	100	Baik
9	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	1 Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	2.19	2.19	100	Baik
		2 Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	60.80	60.80	100	Baik
		3 Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren	0.71	9.71	100	Baik

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Revisi Perkin 2025		Capaian Kinerja	Kategori
			Target	Realisasi		
		4 Persentase Anak Kelas 1 MI / SD /Adi Widyala ya/Mula Dhamma sekha yang Pernah Mengikuti PAUD TK/RA/ BA/ Taman Seminari/ Pratama Widyalyaya/ Nava Dhammasekha	13.30	13.30	100	Baik
		5 Persentase satuan pendidik an yang menyelenggarakan layanan kesehat an sekolah	19.00	19.00	100	Baik
		6 Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	20.05	20.05	100	Baik
10	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan.	1 Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a Literasi membaca b Numerasi	65.31 62.23	68.23 64.96	104.47 104.39	Sangat Baik Sangat Baik
		2 Persentase satuan pendidik an yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	83.00	83.00	100	Baik
		3 Persentase satuan pendidik an yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	95.00	95.00	100	Baik
		4 Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	500	500	100	Baik
		5 Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab	0.71	0.71	100	Baik
		6 Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemamusiaan dan pelestarian lingkungan	93.00	93.00	100	Baik
		7 Persentase satuan pendidik an yang terakreditasi minimal B	61.75	61.75	100	Baik
		8 Persentase satuan pendidik an unggul yang terselenggara	1.75	1.75	100	Baik
		9 Persentase satuan pendidik an satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	14.25	14.25	100	Baik
		10 Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	0.71	0.71	100	Baik
		11 Persentase satuan pendidik an dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	49.40	49.40	100	Baik

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Revisi Perkin 2025		Capaian Kinerja	Kategori
			Target	Realisasi		
		12 Persentase materi ajar digital modul, video, e-book yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	41.50	41.50	100	Baik
11	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	1 Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	41.50	41.50	100	Baik
		2 Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	1 : 10	1 : 10	100	Baik
		3 Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	29.00	26.56	91.59	Baik
		4 Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	28.74	26.89	93.56	Baik
		5 Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru AKG minimal predikat terampil	38.6	34.10	88.34	Baik
		6 Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah AKK minimal predikat terampil	64.65	48.51	75.03	Cukup
		7 Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	40.17	40.17	100	Baik
		8 Persentase guru yang meningkat jenjang karir	1.44	1.44	100	Baik
		9 Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	24.01	24.01	100	Baik
		10 Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru PPG	39.48	39.48	100	Baik
		11 Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	46.39	46.39	100	Baik
12	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	Nilai Kinerja Anggaran	90.00	88.56	98.40	Baik
13	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1 Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	72.68	72.68	100	Baik
		2 Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	38.24	30.00	78.45	Cukup
14	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	83.00	89.67	108.03	Sangat Baik
		2 Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	85.50	85.50	100	Baik

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Revisi Perkin 2025		Capaian Kinerja	Kategori
			Target	Realisasi		
		3 Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	92.49	92.49	100	Baik
		4 Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan PIPK	76.00	76.00	100	Baik
		5 Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	93.58	93.58	100	Baik
15	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai	1 Indeks Profesionalisme ASN	76.58	78.61	102	Sangat Baik
		2 Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur ASN sesuai kebutuhan	75.00	75.00	100	Baik
		3 Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/ inspiratif	6	12	120	Sangat Baik
16	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1 Persentase kasus hukum yang terselesaikan	87.03	87.03	100	Baik
		2 Persentase rekomendasi izin orang asing	78.50	78.50	100	Baik
17	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1 Persentase digitalisasi arsip dan mudah di akses	71.73	71.73	100	Baik
		2 Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	83.00	83.00	100	Baik
		3 Nilai layanan kesehatan	88.00	88.00	100	Baik
18	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	1 Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	89.48	89.48	100	Baik
		2 Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	18.00	18.00	100	Baik
19	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1 Indeks Pembangunan Statistik	1.5	1.5	100	Baik
		2 Persentase data statistik yang dipublikasi	58	58	100	Baik
20	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan	1 Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	96.00	96.00	100	Baik
		2 Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama	1.8	1.8	100	Baik
		3 Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	16.00	16.00	100	Baik
		4 Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/ kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	16.00	16.00	100	Baik

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Revisi Perkin 2025		Capaian Kinerja	Kategori
		Target	Realisasi		
	5 Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK	73.00	73.00	100	Baik
	6 Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra	67.76	67.76	100	Baik
	7 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bidang Pendidikan	88.35	88.35	100	Baik
Rata Rata Capaian Kinerja Atas Pelaksanaan Perkin 2025 Revisi				100	Baik

Sumber : Diolah dari Laporan Kinerja Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2025

A.2. Capaian Kinerja Mendukung Pelaksanaan Tujuan Kementerian Agama

A.2.1 Mendukung Pelaksanaan Tujuan 1 dan Tujuan 2 Kementerian Agama

Dalam mendukung tujuan 1 Kementerian Agama : Perwujudan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan dilakukan melalui peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa dan tujuan 2: Peningkatan kualitas umat beragama yang berdampak dilakukan melalui pelayanan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji, dan pemberdayaan ekonomi yang merata, adil dan inklusif berbasis ekoteologi. Capaian kinerja mendukung tujuan 1 dan tujuan 2 Kementerian Agama, diukur dari capaian SK 1-7, dengan penjelasan sebagai berikut

A.2.1.1 Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama SK-1

Tabel 3.3 : Rerata Capaian Kinerja SK-1 : Meningkatnya Jaminan Beragama, Toleransi dan Cinta Kemanusiaan Umat Beragama

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Revisi Perkin 2025		Capaian Kinerja	Kategori
		Target	Realisasi		
1	Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi	70.89	85.02	119.93	Sangat Baik
2	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	16.00	16.00	100	Baik
3	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	30.40	30.40	100	Baik
4	Persentase peningkatan audiens MTQ/ Pesparani/ Pesparawi/ Utsawa Dhar magita/ Swayam Vara Tripitaka Gatha	22.80	22.80	100	Baik
5	Persentase peningkatan peserta event seni budaya	30.40	30.40	100	Baik
6	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	76.00	76.00	100	Baik
Rata rata Capaian Kinerja SK-1				103.23	Sangat Baik

Sumber : Diolah dari Laporan Kinerja Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2025

Penjelasan

1. Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan Kementerian Agama bersama Pusat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat P3M Universitas Indonesia UI, nilai Indeks

Kerukunan Umat Beragama IKUB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 mencapai 85.02. Mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan 5 tahun terakhir.

Tabel 3.4 : Nilai Indeks KUB Sumatera Barat dan Nasional. 2021-2025

Indeks KUB	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Sumatera Barat	67.87	63.42	71.58	70.87	85.02
Nasional	72.39	73.09	76.02	76.47	77.89

Sumber : Kementerian Agama dan P3M Universitas Indonesia UI

Dari ketiga dimensi Indeks KUB, indikator “kebersamaan” mendapatkan skor paling tinggi dari seluruh provinsi 89.09 sedangkan “toleransi” mendapatkan nilai 85.79 dan “kesetaraan” mendapatkan nilai 79.18.

Tabel 3.5 : Dimensi Nilai Indeks KUB Sumatera Barat dan Nasional. 2021-2025

	Nilai IKUB	Dimensi Toleransi	Dimensi Kebersamaan	Dimensi Kestaraan
Provinsi Sumatera Barat	85.02	85.79	89.09	79.18
Nasional	77.89	88.82	65.49	79.35

Sumber : Kementerian Agama dan P3M Universitas Indonesia UI

11 Tahun perkembangan nilai Indeks KUB Sumatera Barat, dan di tahun 2025 menjadikan nilai Indeks KUB Sumatera Barat di Urutan 5 Tertinggi Nasional <https://indonesiamadani.com/sumatera-barat-5-besar-indeks-toleransi-2025/>

Gambar 3.1 : Fluktuasi Nilai Indeks KUB Sumatera Baarat



Sumber : Tim Kerja KUB

Kerukunan di Sumatera Barat bukan hasil kebijakan instan, apalagi rekayasa politik. Ia lahir dari sejarah panjang ko-eksistensi, dialog kultural, dan kemampuan masyarakat menjaga batas antara keyakinan dan kebencian. Fakta bahwa indikator kebersamaan mencapai skor tertinggi 89.09 memperlihatkan kuatnya kohesi sosial lintas kelompok, lintas agama, dan lintas identitas.

Namun di balik capaian yang membanggakan ini, ada ironi yang patut disampaikan secara jujur dan bertanggung jawab. Prestasi kerukunan yang tinggi tidak selalu diiringi oleh perhatian dan fasilitasi yang memadai dari pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB, yang secara konstitusional dan regulatif menjadi instrumen utama pengelolaan kerukunan, justru kerap bekerja dalam keterbatasan. Dukungan anggaran yang minim, fasilitas kelembagaan yang tidak memadai, serta posisi FKUB yang sering dipandang sekadar pelengkap administratif, menunjukkan adanya gap antara pengakuan simbolik dan dukungan struktural.

Kerukunan tidak tumbuh dengan sendirinya. Ia memerlukan ruang dialog, mediasi konflik, literasi keberagaman dan kerja-kerja pencegahan yang berkelanjutan. Semua itu membutuhkan fasilitasi negara—bukan dalam bentuk kontrol berlebihan, tetapi dalam dukungan kebijakan, anggaran, dan keberpihakan yang adil. Ironisnya, daerah dengan indeks kerukunan tinggi justru sering dianggap “aman”, sehingga tidak menjadi prioritas perhatian. Pendekatan seperti ini berisiko. Kerukunan bukan sesuatu yang statis; ia dinamis dan rentan jika tidak dirawat. Ketika ruang dialog menyempit, ketimpangan dibiarkan, dan suara-suara moderat tidak diperkuat, potensi gesekan sosial bisa muncul dari arah yang tidak terduga.

Karena itu, capaian peringkat ke-5 nasional ini semestinya menjadi alarm kebijakan, bukan sekadar bahan seremoni. Pemerintah daerah perlu menjadikan data indeks toleransi sebagai dasar penguatan program, bukan sekadar laporan tahunan. FKUB perlu diposisikan sebagai mitra strategis, bukan hanya forum seremonial. Fasilitasi yang memadai—anggaran, sekretariat, program kerja—adalah bentuk tanggung jawab negara terhadap modal sosial yang telah dibangun masyarakat.

Lebih jauh, capaian ini juga menjadi pesan bahwa Sumatera Barat bukan daerah intoleran sebagaimana kerap disederhanakan dalam narasi dangkal. Ia adalah daerah dengan tradisi religius yang kuat, sekaligus memiliki mekanisme sosial yang matang dalam mengelola perbedaan.

Menjaga kerukunan adalah kerja sunyi, tidak selalu viral, dan jarang mendapat sorotan. Tetapi justru di sanalah fondasi keutuhan bangsa diletakkan. Peringkat ke-5 Indeks Toleransi 2025 adalah prestasi bersama masyarakat Sumatera Barat. Tugas negara—melalui pemerintah daerah—adalah memastikan prestasi sosial ini tidak dibiarkan berjalan sendirian. Kerukunan yang sudah tinggi harus dipelihara, difasilitasi, dan diwariskan. Jika tidak, kita berisiko menyalakan salah satu modal kebangsaan paling berharga yang kita miliki.

Berbagai upaya strategis dilakukan Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se Sumatera Barat, bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan FKUB Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat, dalam menjaga kerukunan dan mencegah terjadinya konflik. Upaya tersebut diantaranya

a. Penyelesaian insiden kesalah pahaman sosial

Pada tanggal 27 Juli 2025, viral dimedia sosial terjadinya “insiden pembubaran kegiatan ibadah di rumah doa milik umat Kristen di Padang, Sumatera Barat”. Sekelompok warga membubarkan ibadah di rumah doa Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia GKSI di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, pada 27 Juli 2025. Dalam insiden tersebut, terjadi kepanikan di kalangan jemaat, termasuk anak-anak, serta aksi perusakan fasilitas oleh massa. Video yang beredar menunjukkan puluhan orang mendatangi rumah doa sambil membawa kayu. Jemaat yang ada dalam rumah itu keluar, sementara sebagian massa merusak

kursi dan kaca. Insiden yang mendatangkan tanggapan dari berbagai pihak di Sumatera Barat dan Nasional. Menteri Agama menyampaikan rasa prihatinnya atas terjadinya peristiwa ini <https://sumbar.kemenag.go.id/berita/post/harap-aksi-pembubaran-rumah-doa-tak-terulang-menag-siapkan-dua-upaya-penanganan>

Setelah dilakukan pertemuan antara pimpinan Pemerintah Daerah Kota Padang, FKUB Kota Padang, Kantor Kementerian Agama Kota Padang, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda serta Unsur Muspika Kecamatan Koto Tangah, permasalahan yang terjadi bukanlah “kasus pelanggaran hak beragama” melainkan kesalahpahaman sosial <https://kemenag.go.id/daerah/klarifikasi-isu-kerukunan-di-padang-sarai-kemenag-bukan-konflik-sara>.

- b. Berbagai kegiatan dilakukan untuk menjaga kerukunan umat beragama sekaligus mendorong peningkatan nilai indeks KUB. Bersama pemerintah daerah, FKUB Provinsi dan Kabupaten/ Kota, menyelenggarakan:

- 1) Pembinaan aktor kerukunan

Pembinaan terhadap aktor aktor kerukunan yang terdiri dari pimpinan lembaga keagamaan dan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yang berperan dalam kegiatan kerukunan di Sumatera Barat

Gambar 3.2 : Pembinaan Aktor Kerukunan di Sumatera Barat



Sumber : Tim Kerja KUB

Tabel 3.6 : Jumlah Aktor Kerukunan

Keterangan	Tokoh Agama					Tokoh Masyarakat/ Tokoh Adat
	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	
Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat/ tokoh adat aktor kerukunan yang berperan dalam pembinaan kerukunan	127	41	27	3	7	45

Sumber : Tim Kerja KUB

- 2) Cegah konflik-menjalin kebersamaan.

- Jalan Sehat Kerukunan <https://sumbar.kemenag.go.id/berita/post/jalan-sehat-kerukunan-kanwil-kemenag-sumbar-dan-gubernur-mahyeldi-gaungkan-persatuan-umat-beragama>
- Pembinaan Toleransi Beragama Lintas Suku

3) Pembentukan Forum Pokja Penyuluh Lintas Agama

Keanggotaan Forum Pokja Penyuluh Lintas Agama berjumlah 1.585 orang terdiri dari penyuluh agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha di Sumatera Barat

Gambar 3.3 : Forum Pokja Penyuluh Lintas Agama



Sumber : Tim Kerja KUB

4) Model Desa kerukunan

Desa kerukunan adalah sebuah desa yang menjadi percontohan dalam menjaga toleransi dan harmoni di tengah masyarakat yang beragam, baik dalam hal agama, adat, tradisi, maupun budaya. Konsep ini mendorong masyarakat untuk hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, menghargai perbedaan, dan bekerja sama dalam kegiatan pembangunan, dengan tetap berpegang pada prinsip

Tabel 3.7. : Desa Kerukunan di Sumatera Barat

Nama Desa Kerukunan	Dasar Penetapan
1. Desa Mahakarya di Kabupaten Pasaman Barat	SK Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Nomor : 550 Tahun 2020 tanggal 7 Desember 2020
2. Desa Sikabau Kabupaten Dharmasraya	SK Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Nomor : 553 Tahun 2020 tanggal 8 Desember 2020
3. Desa Purwajaya di Kabupaten Limapuluh Kota	SK Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Nomor : 554 Tahun 2020 tanggal 8 Desember 2020
4. Nagari Sungai Buluh Barat Kabupaten Padang Pariaman	SK Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Nomor : 816 Tahun 2023 tanggal 8 Desember 2023
5. Kelurahan Belakang Pondok di Kota Padang	SK Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Nomor : 156 Tahun 2024 tanggal 29 Februari 2024

Sumber : Tim Kerja KUB

5) Kampung Moderasi Beragama KMB

Salah satu strategi implementasi moderasi beragama adalah melalui pembentukan dan pengembangan KMB. 39 lokasi KMB di Sumatera Barat

Tabel 3.8 : Kampung Moderasi Beragama di Sumatera Barat

No	Nama Desa/Nagari/Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota
1	Nagari Balal Gurah	Ampek Angkek	Kabupaten Agam
3	Nagari Sikabau	Pulau Pinjung	Kabupaten Dharmasraya

No	Nama Desa/Nagari/Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota
4	Nagari Kurnia Selatan	Sungai Rumbai	Kabupaten Dharmasraya
5	Desa Talkako	Sikakap	Kabupaten Kep. Mentawai
6	Desa Sido Makmur	Sipora Utara	Kabupaten Kep. Mentawai
7	Nagari Gunung Malintang	Pangkalan Koto Baru	Kabupaten Lima Puluh Kota
8	Nagari Tanjung Bungo	Suliki	Kabupaten Lima Puluh Kota
9	Nagari Sungai Buluah Barat	Batang Anai	Kabupaten Padang Pariaman
10	Nagari Koto Tinggi	Enam Lingkung	Kabupaten Padang Pariaman
11	Jorong Sentosa	Padang Gelugur	Kabupaten Pasaman
12	Jorong Cengkeh	Panti	Kabupaten Pasaman
13	Teluk Kasai. Koto Nan 2 Koto Hilia	Batang Kapas	Kabupaten Pesisir Selatan
14	Lereng Bukit. Gurni Panjang	Bayang	Kabupaten Pesisir Selatan
15	Kandang Harimau. Nagari Sijunjung	Sijunjung	Kabupaten Sijunjung
16	Pandan. Nagari Tanjung Gadang	Tanjung Gadang	Kabupaten Sijunjung
17	Nagari Bukit Tandang	Bukit Sindi	Kabupaten Solok
18	Slunggal-Anggai. Alahan Tigo	Hiliran Gumanti	Kabupaten Solok
19	Nagari Pakan Rabaa Timur	KPGD	Kabupaten Solok Selatan
20	Nagari Pasir Talang Selatan	Sungai Pagu	Kabupaten Solok Selatan
21	Nagari Andaleh	Batipuh	Kabupaten Tanah Datar
22	Nagari Simawang	Rambatan	Kabupaten Tanah Datar
23	Nagari Padang Canduh	Kinali	Kabupaten Pasaman Barat
24	Mahakarya. Nagari Mahakarya	Luhak Nan Duo	Kabupaten Pasaman Barat
25	Kelurahan Belakang Balok	Aur Birugo Tigo Baleh	Kota Bukittinggi
26	Kelurahan Kubu Gulai Baneah	MKS	Kota Bukittinggi
27	Kelurahan Kampung Olo	Nanggalo	Kota Padang
28	Kelurahan Jati Baru	Padang Timur	Kota Padang
29	Kelurahan Tanah Pak Lambik	Padang Panjang Timur	Kota Padang Panjang
30	Kelurahan Tanah Hitam	Padang Panjang Barat	Kota Padang Panjang
31	Cimparuh	Pariaman Tengah	Kota Pariaman
32	Kampung Baru	Pariaman Tengah	Kota Pariaman
33	Desa Bungo Tanjung	Pariaman Timur	Kota Pariaman
34	Kelurahan Tanah Lapang	Lembah Segar	Kota Sawahlunto
35	Desa Sikalang	Talawi	Kota Sawahlunto
36	Kelurahan VI Suku	Lubuk Sikarah	Kota Solok
37	Kelurahan Kampung Jawa	Tanjung Harapan	Kota Solok
38	Kelurahan Koto Tengah	Payakumbuh Barat	Kota Payakumbuh
39	Kelurahan Ompang Tanah Sirih	Payakumbuh Utara	Kota Payakumbuh

Sumber: Lampiran IV-Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 604 Tahun 2024

6) Optimalisasi Peran FKUB

Berbagai upaya fasilitasi dan penguatan Sekretariat Bersama Sekber FKUB terus dilakukan. melalui dukungan operasional, penguatan tata kelola, serta peningkatan kapasitas SDM. Sejak tahun 2020 hingga 2025, sebanyak 18 FKUB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota telah mendapatkan Bantuan Operasional BOP secara konsisten, mencakup dukungan peralatan kantor, ATK, kegiatan

dialog lintas iman, mediasi, advokasi kasus keagamaan, serta penguatan penyusunan laporan BOP

Seluruh FKUB tercatat telah memperoleh peningkatan layanan secara penuh 100. Penguatan kapasitas SDM juga dilakukan melalui pelatihan dan workshop berkelanjutan, seperti Pelatihan Pengelolaan Konflik Sosial Berbasis Moderasi Beragama 2021–2022, Workshop Penguatan FKUB dalam Pencegahan Konflik Sosial 2024-2025, serta Rapat Koordinasi FKUB yang berfokus pada efektivitas penggunaan BOP.

Tabel 3.9 : Jumlah Lembaga FKUB di Sumatera Barat

No	FKUB
1	FKUB Provinsi Sumatera Barat
2	FKUB Kota Padang
3	FKUB Kota Padang Panjang
4	FKUB Kota Bukittinggi
5	FKUB Kota Payakumbuh
6	FKUB Kota Solok
7	FKUB Kota Sawahlunto
8	FKUB Kota Pariaman
9	FKUB Kabupaten Padang Pariaman
10	FKUB Kabupaten Solok
11	FKUB Kabupaten Sijunjung
12	FKUB Kabupaten Solok Selatan
13	FKUB Kabupaten Lima Puluh Kota
14	FKUB Kabupaten Pasaman
15	FKUB Kepulauan Pasaman Barat
16	FKUB Kabupaten Solok Selatan
17	FKUB Kabupaten Dharmasraya
18	FKUB Kabupaten Kepulauan Mentawai

Sumber : Tim Kerja KUB

Isu strategis optimalisasi peran FKUB adalah, belum terbentuknya FKUB di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Tanah Datar. Melalui pertemuan dengan Wakil Gubernur Wagub Sumatera Barat Sumbar, Vasko Ruseimy, Kapus KUB Dorong Sumbar Percepat Pembentukan FKUB Tanah Datar dan Pesisir Selatan (<https://sumbar.kemenag.go.id/berita/post/kapus-kub-dorong-sumbar-percepat-pembentukan-fkub-tanah-datar-dan-pesisir-selatan>)

Diantara peran FKUB Provinsi dan FKUB Kabupaten/ Kota

a) Pembinaan/ sosialisasi moderasi beragama

Mensosialisasikan dan mempromosikan nilai-nilai moderasi beragama untuk membentengi generasi muda dari ancaman radikalisme dan memperkuat toleransi.

Tabel 3.10 : Pembinaan Moderasi Beragama di Sumatera Barat

No	Tema Kegiatan	Jumlah Peserta	Sasaran Kegiatan
1	Penguatan Moderasi Beragama	180	Tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus FKUB Provinsi Sumatera Barat dan pengurus FKUB Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat
2	Bimbingan teknis moderasi beragama bagi pengulu	90	Kepala KUA dan pengulu perwakilan Kabupaten Kota
3	Penguatan Moderasi Beragama pada Lembaga Keagamaan Buddha	55	Ketua dan pengurus lembaga Keagamaan Buddha
4	Pembinaan Moderasi Beragama bagi siswa pendidikan agama Buddha	120	Siswa-siswi beragama Buddha
5	Dialog Moderasi intern umat Kristen	120	Pimpinan gereja

Sumber : Tim Kerja KUB

b) Pencegahan konflik

Sebagai mediator, fasilitator dialog, dan koordinator yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat. Dialog pencegahan konflik tahun 2023 di Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Agam. Di tahun 2025 dialog pencegahan konflik dilakukan FKUB Sumatera Barat di Kabupaten Pasaman, Kota Bukittinggi dan Kabupaten Tanah Datar

c) Mediator konflik

Sebagai mediator yang efektif dalam menyelesaikan potensi perselisihan atau konflik antar umat beragama, sering kali dengan pendekatan berbasis kearifan lokal.

d) Respons terhadap isu kekinian

FKUB cepat tanggap terhadap dinamika sosial politik dan isu-isu kekinian, mengimbau masyarakat untuk tetap bijak, menjaga persatuan, dan menyampaikan aspirasi secara elegan.

SETARA Institut merilis Indeks Kota Toleran IKT 2024.

Kota Padang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat, salah satu kota yang dalam beberapa episode IKT sebelumnya, menduduki peringkat 10 kota dengan skor toleransi terendah. Favoritisme kebijakan menjadi salah satu pekerjaan rumah, beserta ekspresi yang mengarah kepada mayoritarianisme masyarakat. Namun, perlahan tapak kaki menuju ekosistem toleransi mulai terlihat.

FKUB Kota Padang membangun berbagai ruang dialog dan perjumpaan lintas agama, serta studi banding ke kota-kota yang dianggap relevan dengan isu toleransi beragama. Pemerintah Kota, dalam hal ini Kepala Daerah dan Wakilnya, menaruh perhatian serius dalam hal ini, termasuk dengan mengapresiasi FKUB dengan acara temu lintas umat beragama. Elemen masyarakat sipil juga memberikan pengaruh signifikan dalam pemajuan toleransi di Kota Padang. Bahkan kerap menjadi penghubung atau jembatan dialog antara pemerintah kota dengan berbagai kalangan

masyarakat terkait isu toleransi. Salah satunya, Pelita Padang yang menggandeng FKUB Kota Padang, menyelenggarakan “Dialog Tokoh Pemuda Lintas Agama: Menuju Padang Kota Moderasi Beragama” pada 16 Oktober 2024. Lalu menjelang Pemilu 2024, para calon legislatif berbincang-bincang dengan Pelita Padang, komunitas-komunitas, serta masyarakat umum mengenai persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan KBB di Sumatera Barat terutama Kota Padang. Dalam konteks ekosistem toleransi, hal ini menunjukkan kepemimpinan kemasyarakatan societal leadership yang promotif terhadap pembenahan toleransi di Kota Padang

Sumber : Indeks Kota Toleran 2024, halaman 42. Setara Institute

2. Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS

Di Tahun 2025, Dari 174 KUA Kecamatan yang ada di Sumatera Barat, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, melalui Bidang Urusan Agama Islam menargetkan 16 KUA menyelenggarakan EWS =28 KUA Kecamatan

Tabel 3.11 : KUA yang menyelenggarakan EWS Tahun 2025

No	Kodefikasi KUA	Nama KUA	Kabupaten/ Kota
1	1306021	Lubuk Basung	Kabupaten Agam
2	1306141	Candung	Kabupaten Agam
3	1306091	Tilatang Kamang	Kabupaten Agam
4	1310061	Timpah	Kabupaten Dairi
5	1310111	Koto Besar	Kabupaten Dairi
6	1309011	Pagai Utara	Kabupaten Kepulauan Mentawai
7	1307071	Kapur IX	Kabupaten Lima Puluh Kota
8	1307031	Payakumbuh	Kabupaten Lima Puluh Kota
9	1305061	V Batang Anai	Kabupaten Padang Pariaman
10	1305021	Batang Anai	Kabupaten Padang Pariaman
11	1305121	Padang Sago	Kabupaten Padang Pariaman
12	1305101	Ulakan Tapakih	Kabupaten Padang Pariaman
13	1308171	Padang Gehurugur	Kabupaten Pasaman
14	1308181	Rao Utara	Kabupaten Pasaman
15	1308041	Banjol	Kabupaten Pasaman
16	1312101	Luhak Nan Duo	Kabupaten Pasaman Barat
17	1312041	Talamau	Kabupaten Pasaman Barat
18	1312051	Kinali	Kabupaten Pasaman Barat
19	1301091	Linggo Sari Baganti	Kabupaten Pesisir Selatan
20	1301141	Ranah Ampek Hulu Tapan	Kabupaten Pesisir Selatan
21	1301131	Airpura	Kabupaten Pesisir Selatan
22	1303081	Koto VII	Kabupaten Sijunjung
23	1302061	Lembang Jaya	Kabupaten Solok
24	1302071	Gunung Talang	Kabupaten Solok
25	1302181	Tigo Lurah	Kabupaten Solok
26	1311031	Koto Parik Gadang Disteh	Kabupaten Solok Selatan
27	1311071	Sangir Balai Janggo	Kabupaten Solok Selatan
28	1304061	Lintau Buo	Kabupaten Solok Selatan

Sumber : Bidang Urusan Agama Islam

3. **Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS.** Penyelenggaraan forum dialog antar umat beragama
- a. Dialog antar pemuka agama di Bukittinggi. diikuti 80 orang peserta
 - b. Dialog lintas agama di Padang Panjang. diikuti 60 orang peserta
 - c. Dialog antar umat beragama di Padang Pariaman. diikuti 60 orang peserta lintas iman

Gambar 3.4 : Dialog antar umat beragama di Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman



Sumber : Tim Kerja Hukmas

- d. Dialog kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Tanah Datar. diikuti 60 orang peserta

Tabel 3.12 : Daerah Penyelenggara Dialog antar umat beragama

2024	2025
▪ Provinsi Sumatera Barat ▪ Kota Padang ▪ Kota Bukittinggi ▪ Kota Pariaman ▪ Kota Payakumbuh ▪ Kota Padang Panjang ▪ Kabupaten Dharmasraya ▪ Kabupaten Sijunjung ▪ Kabupaten Solok ▪ Kabupaten Lima Puluh Kota ▪ Kabupaten Pasaman Barat ▪ Kabupaten Padang Pariaman ▪ Kabupaten Pasaman	▪ Provinsi Sumatera Barat ▪ Kota Padang ▪ Kota Bukittinggi ▪ Kota Pariaman ▪ Kota Payakumbuh ▪ Kota Padang Panjang ▪ Kota Solok ▪ Kabupaten Dharmasraya ▪ Kabupaten Sijunjung ▪ Kabupaten Solok ▪ Kabupaten Lima Puluh Kota ▪ Kabupaten Pasaman Barat ▪ Kabupaten Padang Pariaman ▪ Kabupaten Pasaman ▪ Kabupaten Solok Selatan ▪ Kabupaten Kepulauan Mentawai

Sumber : Tim Kerja KUB

- e. Kegiatan Silaturahmi Daerah Silatda Tokoh Agama dan Lembaga Keagamaan Provinsi Sumatera Barat yang difokuskan pada Penguatan Kerukunan Beragama, salah satu bentuk fasilitasi terhadap lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama dan tokoh masyarakat

4. Persentase peningkatan audiens MTQ/ Pesparani/ Pesparawi/ Utsaawa Dharma gita/ Swayam Vara Tripitaka Gatha

MTQ Tingkat Provinsi Sumatera Barat ke 41 Tahun 2025. dilaksanakan di Kota Bukittinggi. Dibandingkan dengan pelaksanaan MTQ ke 40 Tahun 2023. terjadi peningkatan audiens. baik yang datang langsung maupun yang menonton melalui kanal youtube



Tabel 3.13 Peserta dan Audiens MTQ Tingkat Provinsi Sumatera Barat

Tahun	Lokasi	Peserta Orang	Penonton	
			Penonton audiens	Persentase Peningkatan Jumlah Penonton
MTQ Ke-39 2021	Kota Padang Panjang https://www.kabarsumbar.com/berita/1-159-peserta-akan-bertanding-dalam-mtq-tingkat-provinsi-sumbar	1.159	35.000	13.98
MTQ Ke-40 2023	Kabupaten Solok Selatan https://mi.co.id/ipitek/479258/mtq-sumbar-ke-xi-resmi-ditabuh-1149-peserta-siap-berkompetisi	1.156	40.000	14.29
MTQ ke-41 2025	Kota Bukittinggi https://www.bukittinggikota.go.id/news_detail/2510/MTQ20Nasional20ke-41	1.091	70.000	75.00

Sumber : Bidang Penais dan Pemberdayaan Zawa

5. Persentase peningkatan peserta event seni budaya

Tahun 2025 diadakan Festival Kasidah Kolaborasi. bagian dari kegiatan nasional yang digelar oleh Direktorat Penerangan Agama Islam. Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama. yang melibatkan seluruh Kanwil Kementerian Agama Provinsi se-Indonesia. Berbeda dari pelaksanaan sebelumnya. festival tahun ini digelar secara digital.

Peserta Seni Qasidah Kolaborasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sejumlah 18 grup dengan total peserta sebanyak 322 orang

Tabel 3.14 : Peserta Event Seni Budaya Islam 2025

No	Nama Grup	Utusan
1.	Qasidah Masjid Raya Rambatan	Kabupaten Tanah Datar
2.	Qasidah Asy-Syifa Tanah Datar	Kabupaten Tanah Datar
3.	Qasidah Kemenag Kabupaten Pasaman Barat	Kabupaten Pasaman Barat
4.	Qasidah Kolaborasi Solok Selatan	Kabupaten Solok Selatan
5.	Qasidah Rebana Kemenag Kabupaten Padang Pariaman	Kabupaten Padang Pariaman
6.	Qasidah Rebana Ulul Albab Nagari Simuk	Kabupaten Padang Pariaman
7.	El Zahra	Kota Padang
8.	Qasidah Kemenag Kabupaten Sijunjung	Kabupaten Sijunjung
9.	Rebana Muzdhalifah	Kabupaten Pasaman

No	Nama Grup	Utusan
10.	Qasidah Kemenag Lima Puluh Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota
11.	Qasidah Kolaborasi Kemenag Kota Solok	Kota Solok
12.	Bahana Gempita Salido	Kabupaten Pesisir Selatan
13.	Qasidah Al Ikhlas Kota Pariaman	Kota Pariaman
14.	Seni Kolaborasi Kemenag Kabupaten Agam	Kabupaten Agam
15.	MAN 1 Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya
16.	MT Zahratul Qalbi	Kabupaten Kepulauan Mentawai
17.	Al Husna	Kota Padang Panjang
18.	Al Hikmah	Kota Payakumbuh

Sumber : Bidang Penais dan Penyelenggara Zawa

Para peserta dari kabupaten dan kota diminta mengirimkan video kasidah dengan konsep live performance. Peserta berasal dari Tim Kasidah Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat. Tim kasidah utusan Kabupaten Limapuluh Kota berhasil meraih Terbaik I dalam ajang Festival Seni Budaya. Kasidah Kolaborasi tingkat Provinsi Sumatera Barat. Kota Pariaman sebagai Runner Up dan disusul utusan Kota Padang di peringkat ketiga.

A.2.1.2 Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak SK-2

Kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak adalah standar pelayanan prima yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan umat secara adil, transparan, dan mampu memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. 6 IKSK yang menjadi tolok ukur keberhasilan pencapaian SK ini sebagaimana dijelaskan pada tabel

Tabel 3.15 : Rerata Capaian Kinerja SK-2 : Meningkatnya Kualitas Layanan Keagamaan yang Profesional, Inklusif, dan Berdampak

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Revisi Perkin 2025		Capaian Kinerja	Kategori
		Target	Realisasi		
1	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik Laporan harian. Konten Digital. Kediklatan	81.99	81.99	100	Baik
2	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	1:5	1:5	100	Baik
3	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi	30.00	30.00	100	Baik
4	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	12.14	12.14	100	Baik
5	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	15.00	15.00	100	Baik
6	Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	16.63	16.63	100	Baik
7	Persentase masjid/musholla bersertifikasi arah kiblat	2.38	2.38	100	Baik
8	Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan	19.00	19.00	100	Baik
9	Persentase buku keagamaan pendu kung peribadatan yang sesuai kaedah	19.00	19.00	100	Baik
10	Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	14.73	14.73	100	Baik

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Revisi Perkin 2025		Capaian Kinerja	Kategori
		Target	Realisasi		
11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan	18.00	18.00	100	Baik
Rata rata Capaian Kinerja SK-2				100	Baik

Sumber : Diolah dari Laporan Kinerja Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2025

Penjelasan

1. Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori BAIK Laporan harian. Konten Digital. Kediklatan

Pengukuran kinerja penyuluh agama Islam melalui aplikasi e_PAJ Penyuluh Agama Islam baru dilaksanakan di tahun 2026. Pengukuran kinerja penyuluh agama Kristen menggunakan aplikasi SIMPAKRIS Penyuluh Agama Kristen, untuk penyuluh agama Katolik menggunakan aplikasi SIM2KAT Penyuluh Agama Katolik dan aplikasi SUPENAA BUDDHA untuk mengukur kinerja Penyuluh Agama Buddha. Sedangkan Penyuluh Agama Hindu berdasarkan SE Dirjen Bimas Hindu Nomor 3 Tahun 2025, menggunakan eKinerja BKN. Walaupun aplikasi untuk penilaian kinerja penyuluh belum dapat digunakan secara optimal, penilaian kinerja penyuluh agama PNS dan P3K menggunakan aplikasi eKinerja BKN, sama dengan PNS dan P3K lainnya

Tabel 3.16 : Pengukuran Kinerja Penyuluh Agama

Jumlah Penyuluh PNS, P3K dan Non PNS		Menggunakan Aplikasi e PAJ		Menggunakan Aplikasi SIMPAKRIS		Menggunakan Aplikasi SIM2KAT		e-Kinerja BKN SE Dirjen Bimas Hindu Nomor 3 Tahun 2024	Aplikasi SIPENA BUDDHA	
		S	B	S	B	S	B		S	B
Islam	1.480	-	1.480	-	-	-	-	-	-	-
Kristen	57	-	-	-	57	-	-	-	-	-
Katolik	63	-	-	-	-	60	3	-	-	-
Hindu	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Buddha	12	-	-	-	-	-	-	-	7	5
Jumlah	1.615	-	1.480	-	57	60	3	3	7	5

Keterangan : S = Sudah B = Belum

Sumber : Bidang Penais Zawa dan Bimas Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha

Dari 1.615 orang penyuluh agama di Sumatera Barat, 1.324 orang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik Laporan harian, Konten Digital dan Kediklatan. Beberapa kegiatan penyuluh agama Islam selama tahun 2025

- Program Syiar Keagamaan di Bulan Ramadhan 2025 <https://sumbar.kemenag.go.id/berita/post/sambut-ramadan-kemenag-sumbar-dan-tvri-berkomitmen-bangun-program-syiar-keagamaan>
- Program pembinaan bagi warga Lapas Kelas II A Padang

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan kategori berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari Lapas Kelas IIA Padang atas kontribusi Kementerian Agama Sumatera Barat melalui para penyuluh dalam mendukung berbagai program pembinaan bagi warga binaan

Gambar 3.5 : Penghargaan Atas Peran Penyuluh Agama dari Kepala Lapas Kelas II A Padang



Sumber : Bidang Penais dan Pemberdayaan Zawa

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan kategori berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari Lapas Kelas IIA Padang atas kontribusi Kementerian Agama Sumatera Barat melalui para penyuluh dalam mendukung berbagai program pembinaan bagi warga binaan

Penghargaan ini diterima Kabid Penaiszawa H Abrar Munanda. Senin 28/04/25 dalam rangka memperingati Hari Bakti Masyarakat ke-61 di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Masyarakat Sumatera Barat, yang digelar di Aula Lapas Kelas II A Padang. <https://sumbar.kemenag.go.id/berita/post/aktif-berpembinaan-kemenag-sumbar-terima-penghargaan-dari-lapas-ia>

c. PAI Award 2025

Diperhelatan PAI Award 2025, 8 orang Penyuluh Agama Islam Sumatera Barat Lolos ke Tahap Final. 2 diantaranya berhasil mendapatkan penghargaan terbaik di tingkat nasional <https://sumbar.kemenag.go.id/berita/post/8-pai-lolos-ke-tahap-final-sumbar-raih-nominator-terbanyak-kedua-nasional-pai-award-2025>

Gambar 3.6 : Penghargaan PAI Terbaik Tingkat Nasional 2025



Sumber : Tim Kerja Hukmas

2. Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama

Jumlah kelompok sasaran penyuluh agama dan jumlah kelompok sasaran penyuluh agama yang diberdayakan tahun 2021-2024 . Persentase jumlah kelompok sasaran penyuluh agama yang diberdayakan ditahun 2024 sebesar 7.92.

Tabel 3.17 : Kelompok sasaran penyuluh agama agama

Tahun	Jumlah kelompok sasaran penyuluh agama					Jumlah kelompok sasaran penyuluh agama yang diberdayakan				
	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha
2021	12.688	120	47	3	22	634	120	47	3	3
2022	12.644	100	32	3	23	633	100	32	3	3
2023	12.304	90	33	3	24	613	90	33	3	3
2024	11.804	310	33	3	25	592	310	33	3	3
2025	12.985	310	33	3	25	892	310	33	3	3

Sumber : Bidang Penaiszawa dan Bimas Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha

Ditahun 2025, target rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agamam 1 : 5 tercapai karena penambahan tenaga penyuluh agama dari P3K.

3. Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi

Fasilitator bimbingan perkawinan berperan sebagai pemandu, pendidik, dan konselor yang membekali calon pengantin dengan pengetahuan serta keterampilan untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Mereka bertugas memberikan materi komprehensif, mulai dari manajemen konflik, kesehatan reproduksi, perencanaan keuangan, hingga pengasuhan anak.

Gambar 3.7 : Penghulu Sumbar Ujung Tombak Pencegahan Stunting



Selain sebagai fasilitator bimbingan perkawinan, bekerjasama dengan BPJS Cabang Kota Padang. Khususnya jaminan Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, penghulu mengambil peran dalam mengatasi stunting di Sumatera Barat dalam program pembinaan keluarga.

Kolaborasi inovatif cegah stunting di Sumatera Barat, berpotensi menjadi pilot project pertama di Indonesia. <https://sumbar.kemenag.go.id/berita/post/sinergi-apri-bpjs-dikebut-penghulu-sumbar-ujung-tombak-pencegahan-stunting>

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, ditahun 2025 memberikan penghargaan terhadap Kinerja Penghulu yang rela bertarung nyawa mengarungi sungai demi menikahkan pasangan pengantin di pelosok desa. Ia adalah Ahad Nasution, Penghulu Kecamatan Duo Koto Kemenag Kabupaten Pasaman.

Penghulu adalah garda terdepan layanan Kementerian Agama di unit terkecil dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Layanan mereka tanpa batas, tak kenal waktu untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat <https://sumbar.kemenag.go.id/berita/post/plt-kakanwil-kemenag-sumbar-apresiasi-ahad-nasution-penghulu-jorong-batang-berenang-arungi-sungai-berikan-pelayanan-pada-masyarakat>

4. Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah

Pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah dilakukan KUA Kecamatan/ Penghulu/ Penyuluh Agama Islam bekerjasama dengan Kepala Sekolah



/Madrasah dan materi bimbingan di sampaikan oleh fasilitator yang terbimtek. Peserta adalah siswa siswi pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas SMA/MA sederjat yang berada pada wilayah kerja KUA kecamatan se Provinsi Sumatera Barat. Program ini bertujuan untuk membekali remaja dengan pemahaman komprehensif mengenai berbagai aspek kehidupan.

terutama dalam upaya pencegahan pernikahan dini dan pembentukan generasi yang berkualitas, beriman, dan berakhlak mulia. Dari tahun 2020 hingga 2024, peserta kegiatan BRUS mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Ditahun 2025 jumlah peserta mengalami peningkatan sebesar 12.14.

https://drive.google.com/drive/folders/1vCXoXdOvRX_HqjyzRuxrPgc0qMqgQXK6

Tabel 3.18 : Jumlah Madrasah/ Sekolah Sasaran BRUS 2024 dan 2025

Tahun	Penyelenggara BRUS	
	Lembaga Pendidikan Islam MA	Sekolah Umum SMA
2024	20	23
2025	25	30

Sumber : Bidang Urusan Agama Islam

5. Persentase masjid/mushalla bersertifikat arah kiblat

Fasilitasi pengukuran arah kiblat meliputi penyediaan bantuan, bimbingan, atau layanan ahli untuk membantu masyarakat dalam menentukan arah kiblat secara akurat dan diberikan sertifikat pengukuran arah kiblat.

Dibandingkan dengan jumlah masjid dan mushalla yang ada di Sumatera Barat, persentase jumlah masjid dan mushala yang sudah difasilitasi pengukuran arah kiblatnya dan diberikan sertifikat pengukuran arah kiblat, baru mencapai 1.40 masjid dan 0.26 mushalla. <https://sihat.kemenag.go.id/index.php/data>

Tabel 3.19 : Jumlah masjid dan mushalla yang telah lakukan pengukuran arah kiblat

Tahun	Sarana Ibadah		Fasilitas Umum			
	Masjid	Mushalla	Hotel	Rumah Makan/ Restoran	Fasilitas Pariwisata	Mall
2024	113	89	7	8	1	1
2025	150	112	7	8	1	1

Sumber : <https://sihat.kemenag.go.id/index.php/data>

Sedangkan jumlah tenaga ahli hisab rukyat di Sumatera Barat yang terdaftar pada aplikasi Sistem Hisab Rukyat Indonesia SIHAT Kementerian Agama sebanyak 33 orang tersebar di Kanwil dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat. Untuk meningkatkan peran masjid/ mushalla sebagai tempat singgah bagi pemudik yng merayakan lebaran di tahun 2025, telah disiapkan sebanyak 604 Masjid Ramah, tersebar di sepanjang jalur mudik dari dan ke Sumatera Barat



- Kota Bukittinggi 20 masjid
- Kota Padang 26 masjid
- Kota Pariaman 9 masjid
- Kota Payakumbuh 94 masjid
- Kota Sawahlunto 5 masjid
- Kota Solok 7 masjid
- Kota Padang Panjang 9 masjid
- Kabupaten Padang Pariaman 70 masjid
- Kabupaten Pasaman 71 masjid
- Kabupaten Pasaman Barat 16 masjid
- Kabupaten Solok Selatan 64 masjid
- Kabupaten Tanah Datar 28 masjid
- Kabupaten Agam 86 masjid
- Kabupaten Lima Puluh Kota 15 masjid
- Kabupaten Pesisir Selatan 37 masjid
- Kabupaten Sijunjung 19 masjid
- Kabupaten Solok 22 masjid
- Kabupaten Kepulauan Mentawai 5 masjid

<https://sumbar.kemenag.go.id/berita/post/sumbar-siapkan-604-masjid-ramah-di-jalur-mudik>

6. Persentase peningkatan kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan

Pendistribusian kitab suci dan buku keagamaan bertujuan utama untuk memenuhi kebutuhan literasi dan pemahaman keagamaan masyarakat, untuk memastikan akses terhadap teks suci bagi semua komunitas beragama. Upaya pendistribusian kitab suci didorong oleh kebutuhan spiritual dan keinginan untuk memperkuat tatanan sosial yang harmonis berdasarkan nilai-nilai agama.

Distribusi ditujukan pada rumah ibadah, Masyarakat dan lembaga pendidikan keagamaan. Pendistribusian kitab suci Alquran dan buku keagamaan dilakukan saat pelaksanaan Safari Ramadhan tahun 2025



Tabel 3.20 : Jumlah kitab suci/ buku keagamaan yang didistribusikan dan jumlah keluarga yang tidak memiliki kitab suci/ buku keagamaan

No	Jumlah kitab suci/ buku keagamaan yang didistribusikan					Jumlah keluarga yang tidak memiliki kitab suci / buku keagamaan				
	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha
2023	1.574	-	120	-	-	-	2.000	-	-	-
2024	1.374	750	230	50	-	-	3.000	-	-	-
2025	3.200									

Sumber : Bidang Urusan Agama Islam dan Bimas Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha

7. Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan

Sebagai tindak lanjut Surat dari Kepala BPJPH Republik Indonesia Nomor 8-382/DP.III.2/JH 06/04/2025 tanggal 29 April 2025, Satgas Layanan JPH Sumatera Barat beserta tim melakukan Pengawasan Peredaran 9 Produk Mengandung Unsur Babi Porcine Daging dan Produk Olahan Daging yang dilaksanakan secara serentak se-Sumatera Barat, mulai dari Provinsi sampai ke Kecamatan oleh KUA dan Penyuluh Agama serta Pendamping Halal.



Di Kota Padang, pengawasan halal dilakukan pada beberapa titik lokasi. Pasar Raya Padang 3 lokasi yakni Toko Ade, Toko Ema dan Batera Uma dan di Transmart 2 lokasi, Miniso dan Swalayan Transmart. Hasilnya tidak ada temuan 9 Produk yang mengandung unsur Babi Porcine di Kota Padang. <https://sumbar.kemenag.go.id/berita/post/satgas>

Upaya peningkatan kinerja pengawasan halal di Sumatera Barat. dilakukan melalui kegiatan :

- Pelatihan Mutu Auditor Halal. pada tanggal 23 September 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang (<https://sumbar.kemenag.go.id/berita/post/peningkatan-mutu-lph-auditor-halal-sumbar-diingatkan-edison-soal-integritas-dan-tanggung-jawab-di-hadapan-Allah>)
- Meningkatkan kuantitas SDM PJPH melalui pengangkatan 21 Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS formasi Pengawas Jaminan Produk Halal PJPH (<https://sumbar.kemenag.go.id/berita/post/21-cpns-pengawas-halal-siap-perkuat-layanan-halal-di-sumbar>)

A.2.1.3 Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji SK-3

Tabel 3.21 : Rerata Capaian Kinerja SK-3 : Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Revisi Perkin 2025		Capaian Kinerja	Kategori
	Target	Realisasi		
Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	99.85	99.85	100	Baik
Rata rata Capaian Kinerja SK-3			100	Baik

Sumber : Diolah dari Laporan Kinerja Triwulan I. II. III dan IV Tahun 2025

Jumlah jemaah haji lanjut usia lansia asal Sumatera Barat pada tahun 2025 tercatat sebanyak 369 orang usia 65 tahun ke atas dari total kuota 4.613 orang. Fokus layanan adalah memberikan pelayanan prima bagi jemaah lansia dan kelompok rentan

A.2.1.4 Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji SK-4

Tabel 3.22 : Rerata Capaian Kinerja SK-4 : Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Revisi Perkin 2025		Capaian Kinerja	Kategori
	Target	Realisasi		
1 Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	52.63	52.63	100	Baik
2 Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu	75.00	75.00	100	Baik
Rata rata Capaian Kinerja SK-4			100	Baik

Sumber : Diolah dari Laporan Kinerja Triwulan I. II. III dan IV Tahun 2025

Penjelasan

- Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu PLHUT yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan

Presentase PLHUT yang telah memenuhi kriteria standar minimum sarana-prasarana dan standar pelayanan publik sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Agama. Standar ini mencakup fasilitas fisik, sistem layanan terintegrasi, serta kualitas SDM dan prosedur layanan kepada jemaah. Semakin tinggi persentase, semakin optimal penyelenggaraan layanan haji dan umrah terpadu, yang berorientasi pada kemudahan, kecepatan, kenyamanan, dan kepastian layanan bagi masyarakat. Sampai tahun 2025

terdapat 8 bangunan gedung PLHUT di Sumatera Barat dan menyisakan 11 Kabupaten/ Kota yang belum memiliki gedung PLHUT.

Untuk meningkatkan kualitas layanan jemaah haji dan menindak lanjuti PMA Nomor 44 Tahun 2014 pengelolaan asrama haji di kelola oleh UPT Asrama Haji dilakukan serah terima Gedung Asrama Haji Batang Anai Padang Pariaman dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat ke UPT Asrama Haji pada tanggal 25 Februari 2025 <https://sumbar.kemenag.go.id/berita/post/kanwil-kemenag-sumbar-resmi-serahkan-gedung-asrama-batang-anai-ke-upt-asrama-haji>

Gambar 3.8 : Penandatanganan serah terima gedung asrama Haji Batang Anai



Sumber : Tim Kerja Hukmas

2. Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu

Persentase pengguna Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu PLHUT yang menyatakan puas terhadap kualitas layanan administrasi haji dan umrah yang diterima, meliputi aspek kecepatan, ketepatan, kenyamanan, dan kemudahan layanan. Semakin tinggi tingkat kepuasan menunjukkan bahwa kualitas layanan PLHUT memenuhi ekspektasi jemaah atau masyarakat dalam proses penyelenggaraan ibadah haji dan umrah

- a. Badan Pusat Statistik bekerja sama dengan Kementerian Agama menyelenggarakan kegiatan Survei Kepuasan Jemaah Haji Indonesia SKJHI sejak tahun 2010. Survei ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian jemaah haji terhadap layanan yang diberikan pemerintah Indonesia. Nilai Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia IKJHI tahun 2025 sebesar 88.46 sangat memuaskan meningkat sebesar 0.26 poin dibandingkan tahun 2024 (<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/09/10/2524/nilai-indeks-kepuasan-jemaah-haji-indonesia--ikjhi-tahun-2025-sebesar-88-46--sangat-memuaskan--meningkat-sebesar-0-26-poin-di-bandingkan-tahun-2024.html>)
- b. Hasil Survei yang dilakukan Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat terhadap tingkat kepuasan pendaftaran dan pembatalan haji dan pelimpahan porsi pada 31 Maret 2025
 - 1) Fokus survei, persyaratan yang harus dilengkapi meliputi persyaratan administrasi dan teknis yang harus dipenuhi oleh masyarakat, prosedur mencakup tata cara pelayanan, termasuk pengaduan dan mekanisme, serta waktu penyelesaian menilai efisiensi pelayanan public dari segi kecepatan penyelesaian

2) Sampel survei dilakukan terhadap 219 calon jemaah haji

3) Hasil survei

- Sangat puas terhadap pelayanan sebanyak 205 orang.
- Puas dengan pelayanan sebanyak 12 orang
- Cukup puas terhadap pelayanan sebanyak 1 orang.

A.2.1.5 Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah SK-5

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus PIHK dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PPIU wajib memiliki **sertifikasi akreditasi** yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Umrah dan Haji Khusus LSUHK yang ditunjuk oleh pemerintah. Sertifikasi ini berlaku selama 5 tahun, bertujuan untuk menjamin perlindungan dan mutu layanan bagi jemaah. Akreditasi ini berdasarkan pada KMA Nomor 1251 Tahun 2021 tentang Skema dan Kriteria Akreditasi serta Sertifikasi Usaha PIHK dan PPIU. Berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan, ditahun 2025 PIHK yang terakreditasi A sebanyak 75 dan PPIU yang terakreditasi A sebanyak 85

Tabel 3.23 : Rerata Capaian Kinerja SK-5 : Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Revisi Perkin 2025		Capaian Kinerja	Kategori
	Target	Realisasi		
Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi A:				
a. Lembaga penyelenggara haji khusus;	75.00	75.00	100	Baik
b. Lembaga penyelenggara umrah	85.00	85.00	100	Baik
Rata rata Capaian Kinerja SK-5			100	Baik

Sumber : Diolah dari Laporan Kinerja Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2025

Selain pemantauan dan pengawasan, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat melalui Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, menyerahkan 24 Izin Operasional KBIHU, sehingga Sumatera Barat memiliki 59 KBIHU <https://sumbar.kemenag.go.id/berita/post/serahkan-24-izin-operasional-kakanwil-minta-kbihu-wujudkan-jemaah-mandiri>

A.2.1.6 Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji SK-6

Untuk memberikan layanan prima kepada jemaah, PPIH Embarkasi Padang menerapkan layanan one stop service untuk memangkas waktu agar lebih efisien dan efektif, sehingga jemaah tidak perlu menunggu lama menuntaskan semua layanan. Skema layanan dimulai dari layanan pemeriksaan dan administrasi, pemeriksaan kesehatan lansia dan wanita usia subur, pembagian gelang identitas, distribusi akomodasi, living cost, serta pembagian paspor dan layanan penyerahan id card di lakukan diatas bus.

Gambar 3.9 : One Stop Service Layanan Haji 2025



Sumber : Tim Kerja Hukmas

Tabel 3.24 : Rerata Capaian Kinerja SK-6 : Meningkatnya kualitas pelayanan Jemaah Haji

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Revisi Perkin 2025		Capaian Kinerja	Kategori
	Target	Realisasi		
Persentase pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi jemaah haji sesuai standar	95	95	100	Baik
Rata rata Capaian Kinerja SK-6			100	Baik

Sumber : Diolah dari Laporan Kinerja Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2025

Begitu juga dengan layanan konsumsi. Bagi jemaah haji lansia, petugas akan mengantarkan sarapan langsung ke kamar jemaah. Peningkatan layanan ini mendapat pujian jemaah <https://rri.co.id/info-haji/1537912/jemaah-puji-pelayanan-petugas-asrama-haji>

A.2.1.7 Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji SK-7

Tabel 3.25 : Rerata Capaian Kinerja SK-7 : Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Revisi Perkin 2025		Capaian Kinerja	Kategori
	Target	Realisasi		
1 Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	90	90	100	Baik
2 Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	100	100	100	Baik
Rata rata Capaian Kinerja SK-7			100	Baik

Sumber : Diolah dari Laporan Kinerja Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2025

Bimtek bagi petugas haji merupakan tahapan krusial dalam penyelenggaraan ibadah haji, khususnya untuk memaksimalkan pelayanan, perlindungan, dan pembinaan kepada jemaah di Tanah Suci. Pada tahun 2025, Bimtek menekankan pada peningkatan disiplin, profesionalisme, dan pola kerja terintegrasi kloter, daerah, KBIHU.

Bimtek menyatukan berbagai latar belakang petugas ASN, TNI, Polri, Tenaga Kesehatan untuk membangun komunikasi yang solid. Ini penting karena petugas haji harus bekerja dalam tim yang kompak interkoneksi untuk melayani jutaan jemaah secara berkesinambungan dan melatih ketahanan mental petugas dalam situasi tekanan tinggi di Arab Saudi.

Gambar 3.10 : Pembukaan Bimtek Petugas Haji 2025



Sumber : Tim Kerja Hukmas

Materi mencakup manajemen krisis dan pengelolaan data SISKOHAT secara akurat untuk meminimalisir risiko, serta penguatan komitmen untuk melayani dengan keramahan gestur gembira. <https://sumbar.kemenag.go.id/berita/post/bimtek-petugas-kloter-kakanwil-mahyudin-sebut-tanpa-petugas-jemaah-kehilangan-arrah>

A.2.2 Mendukung Tujuan 3 Kementerian Agama

Dukungan terhadap pencapaian tujuan 3 Kementerian Agama : peningkatan akses pendidikan yang terintegrasi, berkeadilan, ramah dan terjangkau, diukur dari pelaksanaan 2 SK SK-8 dan SK-9

A.2.2.1 Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan SK-8

Tolok ukur pencapaian SK meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan adalah persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik. Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik merupakan ukuran proporsi siswa/santri yang berhasil menyelesaikan pendidikan dengan predikat "sangat baik" di tiga jenis satuan pendidikan yang berbeda: pendidikan umum dengan kekhasan agama, pendidikan keagamaan, dan pesantren. Persentase kelulusan "sangat baik", menunjukan kinerja akademik dan potensi lulusan dari masing-masing lembaga pendidikan dalam mencapai standar tertinggi, yang memerlukan analisis lebih mendalam terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang mendorong keberhasilan ini

Tabel 3.26 : Rerata Capaian Kinerja SK-8 : Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Revisi Perkin 2025		Capaian Kinerja	Kategori
	Target	Realisasi		
Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik	73.15	73.15	100	Baik
Rata rata Capaian Kinerja SK-8			100	Baik

Sumber : Diolah dari Laporan Kinerja Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2025

A.2.2.2 Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas (SK-9)

Kementerian Agama di Sumatera Barat secara konsisten melakukan supervisi dan pembangunan sarana dan prasarana lembaga pendidikan Islam untuk memastikan standar nasional pendidikan terpenuhi. MTsN dan MAN di Sumatera Barat kini semakin representatif dengan fasilitas laboratorium komputer yang memadai, akses internet, perpustakaan, serta meubelair yang menunjang kenyamanan proses pembelajaran. Pembangunan gedung baru, baik melalui SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) maupun dana mandiri, telah berhasil menciptakan ruang kelas yang bersih, sehat, dan kondusif

Perhatian terhadap pembangunan dan rehabilitasi madrasah swasta juga dilakukan. Melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Kementerian Pekerjaan Umum, menuntaskan Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana Madrasah PHTC Provinsi Sumatera Barat Paket 1 dan 2. Bangunan MTsS Muhammadiyah Kurai Taji, kini berdiri kokoh dan bukan sekadar dinding beton. Ia menjadi simbol kehadiran negara, tempat tumbuhnya mimpi-mimpi baru, dan ruang belajar bagi generasi yang kelak menjadi penopang masa depan bangsa. Dari ruang kelas yang lebih layak, harapan pun dibangun setiap hari bersama langkah-langkah kecil para siswa yang datang untuk menimba ilmu

Gambar 3.11 : PHTC MTsS Muhammadiyah Kurai Taji Kabupaten Padang Pariaman



Di sisi lain, pondok pesantren modern di Sumatera Barat, seperti Ponpes Al Kautsar dan Ponpes Kauman Padang Panjang, menjadi contoh lembaga yang menggabungkan sarana fisik berkualitas dengan pendidikan karakter. Pesantren-pesantren ini didukung dengan asrama yang tertata, tempat ibadah yang nyaman, serta sarana olahraga dan seni yang menunjang bakat santri. Penguatan sarpras ini sejalan dengan upaya meningkatkan daya saing, terbukti dengan aktifnya pesantren Sumatera Barat dalam ajang tingkat nasional.

Tabel 3.27 : Rerata Capaian Kinerja SK-9 : Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Revisi Perkin 2025		Capaian Kinerja	Kategori
		Target	Realisasi		
1	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	2.19	2.19	100	Baik
2	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	60.80	60.80	100	Baik
3	Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren	0.71	0.71	100	Baik
4	Persentase Anak Kelas 1 MI/SD /Adi Widyalya/Mula Dhamma sekha yang Pernah Mengikuti PAUD TK/RA/BA/ Taman Seminari/ Pratama Widyalya/ Nava Dhammasekha	13.30	13.30	100	Baik
5	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	19.00	19.00	100	Baik
6	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	20.05	20.05	100	Baik
Rata-rata Capaian Kinerja SK-9				100	Baik

Sumber : Diolah dari Laporan Kinerja Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2025

Penjelasan

1. Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif

Pentingnya inklusi pada pesantren dapat dilihat dari dampaknya yang positif bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Inklusi bukan hanya memberikan kesempatan yang setara bagi mereka, tetapi juga membantu mereka meraih potensi maksimal dan mengembangkan diri secara holistik. Melalui pendidikan inklusif, pesantren memberikan ruang bagi setiap individu untuk belajar, tumbuh, dan berinteraksi dalam lingkungan yang saling mendukung dan menghargai perbedaan. Salah satu manfaat utama dari inklusi dalam pesantren adalah menciptakan lingkungan belajar yang beragam dan kaya akan pengalaman.

Anak-anak dengan kebutuhan khusus membawa perspektif unik yang dapat memperkaya diskusi, saling belajar dari teman sebaya, dan memperluas pemahaman tentang agama dan kehidupan. Dalam suasana inklusif, mereka merasa diterima dan dihargai, sehingga dapat mengembangkan rasa percaya diri dan meningkatkan kualitas hubungan sosial mereka.

<https://drive.google.com/drive/folders/1LAG8WffRUeuKbuCST-6ixMc-L3YiVXpT>

Tabel 3.28 : Jumlah Santri Disabilitas Sasaran Pendidikan Inklusi di Sumatera Barat

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah		
		Pesantren	Santri	Guru/ Ustadz/Ustazah
1	Kabupaten Pesisir Selatan	1	12	1
2	Kabupaten Agam	2	6	6

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah		
		Pesantren	Santri	Guru/ Ustadz/Ustazah
3	Kabupaten Lima Puluh Kota	1	1	3
4	Kabupaten Padang Pariaman	1	1	1
5	Kota Payakumbuh	1	1	1
Jumlah		6	21	12

Sumber : Bidang Ppkis

2. Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren

Peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan berbasis agama, madrasah, dan pesantren menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan yang mengintegrasikan ilmu umum dan nilai-nilai keagamaan karakter/akhlaq. Fenomena ini mencerminkan kebutuhan akan pendidikan yang utuh untuk membentuk generasi yang mandiri, berilmu, dan memiliki moralitas tinggi di tengah perkembangan zaman

Tabel 3.29 : Jumlah Siswa RA, MI, MTs dan MA Tahu Pelajaran 2025/2026

No	Kabupaten/ Kota	Siswa TP 2025/2026				
		RA	MI	MTs	MA	Jumlah
Kabupaten						
1	Pesisir Selatan	2.116	3.056	9.462	2.461	17.095
2	Solok	614	1.968	5.658	2.038	10.278
3	Sijunjung	726	300	2.957	722	4.705
4	Tanah Datar	333	1.095	8.040	2.777	12.245
5	Padang Pariaman	1.238	966	4.234	1.912	8.350
6	Agam	453	1.941	13.593	4.752	20.739
7	Lima Puluh Kota	495	1.114	5.691	761	8.061
8	Pasaman	503	1.163	5.696	1.835	9.197
9	Kepulauan Mentawai	450	101	487	96	1.134
10	Dharmasraya	1.525	1.224	2.618	846	6.213
11	Solok Selatan	915	2.767	3.304	1.071	8.057
12	Pasaman Barat	1.492	2.972	10.850	4.829	20.143
Kota						
13	Padang	2.004	4.628	8.179	4.437	19.248
14	Solok	480	844	1.013	596	2.933
15	Sawahlunto	409	779	846	449	2.483
16	Padang Panjang	193	1.080	2.098	2.859	6.230
17	Bukittinggi	197	851	2.116	2.241	5.405
18	Payakumbuh	366	663	2.449	2.026	5.504
19	Pariaman	85	848	2.516	613	4.062
Total		14.594	28.360	91.807	37.321	172.082

Sumber : Bidang Pendidikan Madrasah

Sedangkan peningkatan jumlah santri di Sumatera Barat tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.30 : Jumlah Siswa PKPPS, PDF dan SPM di Provinsi Sumatera Barat

No	Lokasi PKPPS, PDF dan SPM	Jumlah Siswa							
		Tahun 2024				Tahun 2025			
		PKPPS	PDF	SPM	Jumlah	PKPPS	PDF	SPM	Jumlah
1	Kabupaten Agam	410	40	108	558	441	63	139	643
2	Kabupaten Dharmasraya	225			225	159			159

No	Lokasi PKPPS, PDF dan SPM	Jumlah Siswa							
		Tahun 2024				Tahun 2025			
		PKPPS	PDF	SPM	Jumlah	PKPPS	PDF	SPM	Jumlah
3	Kabupaten Kepulauan Mentawai	0			0	0			0
4	Kabupaten Lima Puluh Kota	182			182	231			231
5	Kabupaten Padang Pariaman	2910	197		3107	3294	232		3526
6	Kabupaten Pasaman	961	120		1081	981	153		1134
7	Kabupaten Pasaman Barat	186			186	454			454
8	Kabupaten Pesisir Selatan	220			220	300			300
9	Kabupaten Sijunjung	72			72	76			76
10	Kabupaten Solok	934		115	1049	915		131	1046
11	Kabupaten Solok Selatan	75	28		103	87	32		119
12	Kabupaten Tanah Datar	534			534	521			521
13	Kota Bukittinggi	214			214	400			400
14	Kota Padang	1352			1352	1280			1280
15	Kota Padang Panjang	0			0	0			0
16	Kota Pariaman	145			145	173			173
17	Kota Payakumbuh	1159			1159	1108			1108
18	Kota Sawahlunto	0			0	0			0
19	Kota Solok	743			743	636			636
Jumlah		10.322	385	223	10.930	11.056	480	270	11.806

Sumber : Bidang Pappis

3. Persentase anak kelas 1 MI/Ula/SD/Adi Widyalaya/Mula Dhammasekha yang pernah mengikuti PAUD TK/RA/BA/ Taman Seminari/ Pratama Widyalaya/ Nava Dhammasekha

Pendidikan Anak Usia Dini PAUD merupakan fondasi krusial sebelum anak masuk kelas 1 MI/Ula. berfungsi mematangkan kesiapan fisik, sosial-emosional, dan motorik anak. Mengikuti PAUD membantu anak beradaptasi dengan rutinitas, mengurangi stres saat transisi ke sekolah dasar, dan membangun interaksi sosial yang sehat.

Tabel 3.31 : Jumlah Siswa Kelas I MI Tidak PAUD 2025

No	Kantor Kementerian Agama	Jumlah Siswa MI Negeri + Swasta	Jumlah Siswa Kelas I MI	Jumlah Siswa Kelas I MI Tidak PAUD
1	Kota Padang	4.628	771	108
2	Kota Sawahlunto	779	130	18
3	Kota Padang Panjang	1.080	180	25
4	Kota Solok	844	141	20
5	Kota Bukittinggi	851	142	20
6	Kota Pariaman	848	141	20
7	Kota Payakumbuh	663	111	15
8	Kabupaten Padang Pariaman	966	161	23
9	Kabupaten Sijunjung	300	50	7
10	Kabupaten Solok	1.968	328	46
11	Kabupaten Pesisir Selatan	3.056	509	71
12	Kabupaten Tanah Datar	1.095	183	26
13	Kabupaten Agam	1.941	324	45
14	Kabupaten Pasaman	1.163	194	27
15	Kabupaten Lima Puluh Kota	1.114	186	26
16	Kabupaten Kepulauan Mentawai	101	17	2

No	Kantor Kementerian Agama	Jumlah Siswa MI Negeri + Swasta		Jumlah Siswa Kelas I MI Tidak PAUD
17	Kabupaten Dharmasraya	1.224	204	29
18	Kabupaten Solok Selatan	2.767	461	65
19	Kabupaten Pasaman Barat	2.972	495	69
Sumatera Barat		28.360	4.727	662

Sumber : Bidang Pendidikan Madrasah

Jumlah anak kelas I Tingkat Ula yang mengikuti / tidak mengikuti PAUD TK. RA dan BA Tahun 2025

Tabel 3.32 : Jumlah Anak Kelas 1 Tingkat Ula Tahun 2025

No	Nama Pondok Pesantren	Jumlah Santri Kelas 1		Jumlah
		Mengikuti PAUD TK. RA. BA	Tidak Mengikuti PAUD TK. RA. BA	
1	Pondok Pesantren Raudhatul Ulum	6	0	6
2	Ma'had Tahfizhul Quran Mutiara Sunnah	51	0	51
3	Pesantren Ibnu Qoyyim Payakumbuh	61	6	67
4	PPs Bunayya	29	0	29
5	Pondok Pesantren Dar El Iman	9	0	9
6	Ma'had Tahfidzul Qur'an Ibnu Katsir	21	0	21
7	Ma'had Mulazamah Al Huffazh	6	0	6
8	Darul Thalib	2	0	2
9	PPS Baitur Rafki Assa'diyah	12	0	12
Total		197	6	203

Sumber : Bidang Papkis

<https://drive.google.com/drive/folders/1UjFzJBgDI0v5Q37bl3ScxuLmbYrJ4y2O>

4. Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah

Kegiatan UKS difokuskan pada penerapan Trias UKS pendidikan, pelayanan, dan pembinaan lingkungan sehat untuk menciptakan madrasah sehat dan berkarakter. Program ini mencakup pelayanan P3K, pemeriksaan kesehatan berkala, promosi hidup bersih PHBS, serta pembinaan lingkungan sehat. Kegiatan ini diintensifkan melalui lomba/penilaian stratifikasi UKS/M tingkat provinsi untuk meningkatkan kualitas sarana, prasarana, dan inovasi madrasah. Pada Tahun 2025, jumlah Madrasah di Sumatera Barat yang telah menjalankan program UKS secara aktif dan terarah berjumlah 269 madrasah negeri dan swasta



A.2.3 Mendukung Tujuan 4 Kementerian Agama

Dukungan terhadap pencapaian tujuan 3 Kementerian Agama : peningkatan akses pendidikan yang terintegrasi, berkeadilan, ramah dan terjangkau, diukur dari pelaksanaan 2 SK SK-10 dan SK-11

A.2.3.1 Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan SK-10

Layanan pendidikan berkualitas dan inklusif diwujudkan melalui kurikulum adaptif yang relevan dengan kebutuhan individu, didukung sistem penilaian objektif-akuntabel. Ini memastikan seluruh peserta didik, tanpa terkecuali, mencapai kompetensi maksimal dalam lingkungan yang aman, berkeadilan, dan mendukung keberagaman potensi.

1. Pendidikan Inklusif dan Berkualitas. Layanan pendidikan menghapus segregasi dengan menyatukan peserta didik berkebutuhan khusus maupun reguler dalam lingkungan belajar yang sama, memberikan hak yang sama untuk berkembang. Fokusnya adalah pemenuhan kebutuhan individual, di mana guru berperan sebagai fasilitator, mediator, dan pendamping perkembangan siswa.
2. Kurikulum Adaptif dan Relevan. Pengembangan kurikulum difokuskan pada fleksibilitas kurikulum adaptif yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus dan keragaman karakteristik siswa. Kurikulum ini dirancang untuk menjawab tantangan zaman sekaligus relevan dengan potensi lokal, memastikan materi pembelajaran fungsional bagi masa depan siswa.
3. Penilaian Objektif dan Akuntabel. Penguatan sistem penilaian dilakukan dengan mengutamakan objektivitas kesesuaian dengan kompetensi dan akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini bertujuan untuk asesmen yang jujur terhadap kemajuan siswa, bukan sekadar pelabelan, melainkan sebagai dasar perbaikan pembelajaran.
4. Pencapaian Kompetensi Peserta Didik. Seluruh sistem yang terintegrasi kurikulum dan penilaian diarahkan untuk memaksimalkan potensi peserta didik agar kompeten, berempati, dan mandiri.

Tabel 3.33 : Rerata Capaian Kinerja SK-10 : Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Revisi Perkin 2025		Capaian Kinerja	Kategori
		Target	Realisasi		
1	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk:				
	a Literasi membaca	65.31	68.23	104.47	Sangat Baik
	b Numerasi	62.23	64.96	104.39	Sangat Baik
2	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	83.00	83.00	100	Baik
3	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	95.00	95.00	100	Baik

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Revisi Perkin 2025		Capaian Kinerja	Kategori
		Target	Realisasi		
4	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	500	500	100	Baik
5	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan disiplin, gotong royong, kepe mimpinan, tanggung jawab	0.71	0.71	100	Baik
6	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemamusiaan dan pelestarian lingkungan	93.00	93.00	100	Baik
7	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	61.75	61.75	100	Baik
8	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	1.75	1.75	100	Baik
9	Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	14.25	14.25	100	Baik
10	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	0.71	0.71	100	Baik
11	Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	49.40	49.40	100	Baik
12	Persentase materi ajar digital modul, video, e-book yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	41.50	41.50	100	Baik
Rata rata Capaian Kinerja SK-10				100.68	Sangat Baik

Sumber : Diolah dari Laporan Kinerja Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2025

Penjelasan

1. Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional

a Literasi membaca

b Numerasi

Rata rata nilai Asesmen Nasional AN siswa madrasah di Sumatera Barat dari tahun 2020-2024 menunjukan peningkatan dari tahun ketahun.

Kegiatan ini mencakup:

- Asesmen Kompetensi Minimum AKM untuk mengukur kemampuan literasi membaca dan numerasi dalam konteks pemecahan masalah yang relevan.
- Survei Karakter untuk menggambarkan nilai-nilai karakter peserta didik sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.
- Survei Lingkungan Belajar untuk mengetahui kualitas lingkungan di satuan pendidikan yang mendukung proses pembelajaran.



Tabel 3.34 : Nilai AN Madrasah 2020-2024

Jenjang Pendidikan	Rata Rata Nilai AN	Sumatera Barat				Kementerian Agama Nasional			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
MI	Literasi Membaca	60.00	64.00	65.00	66.00	45.53	48.23	49.58	51.19
	Numerasi	50.00	51.00	52.00	61.00	32.29	35.65	38.44	46.08

Jenjang Pendidikan	Rata Rata Nilai AN	Sumatera Barat				Kementerian Agama Nasional			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
MTs	Literasi Membaca	65.00	69.00	69.00	69.00	55.77	58.12	59.60	61.07
	Numerasi	50.00	61.00	62.00	66.00	51.85	51.56	54.69	56.73
MA	Literasi Membaca	65.00	69.00	71.00	70.00	59.38	58.28	61.93	63.50
	Numerasi	61.00	62.00	64.00	68.00	48.84	49.91	53.19	54.90

Sumber : <https://raporpendidikan.kemendikdasmen.go.id/>

Pada pelaksanaan AN Tahun 2025 yang dilaksanakan secara daring berbasis komputer dengan dukungan platform ANBK yang disediakan oleh Kemendikdasmen.

Tabel 3.35 : Jumlah Peserta dan Nilai AN Madrasah 2025

Jenjang Pendidikan	Jumlah Peserta	Literasi		Numerasi		Karakter		Kualitas pembelajaran	
		Capaian	Skor Rapor 2025	Capaian	Skor Rapor 2025	Capaian	Skor Rapor 2025	Capaian	Skor Rapor 2025
MI	3.072	Sedang	65.84	Sedang	61.490	Sedang	53.35	Sedang	57.03
MTs	13.325	Sedang	69.1	Sedang	65.620	Sedang	51.96	Sedang	57.97
MA	5.486	Sedang	69.75	Sedang	67.760	Sedang	53.82	Sedang	59.00
	21.793	Sedang	68.23	Sedang	64.96	Sedang	53.04	Sedang	58.00

Sumber : <https://raporpendidikan.kemendikdasmen.go.id/>

2. Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler

Jumlah prestasi yang diraih siswa madrasah/ satri pesantren dari kegiatan ekstrakurikuler merujuk pada total hasil atau pencapaian yang diperoleh siswa melalui partisipasi mereka dalam berbagai kegiatan di luar kurikulum formal, seperti kemenangan dalam kompetisi, meraih penghargaan, atau mencapai tingkat keterampilan tertentu di bidang minat mereka, yang kemudian dicatat dan diakui sebagai bukti usaha dan kemampuan mereka di luar akademik.

Tabel 3.36 : Rekapitulasi Juara 1-3 yang diraih siswa dari kegiatan ekstrakurikuler Berdasarkan Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat Tahun 2025

No	Kantor Kementerian Agama	Jenjang Pendidikan				Jumlah
		RA	MI	MTs	MA	
1	Kota Padang	0	23	41	22	86
2	Kota Sawahlunto	0	4	4	2	10
3	Kota Padang Panjang	0	5	10	14	30
4	Kota Solok	0	4	5	3	12
5	Kota Bukittinggi	0	4	11	11	26
6	Kota Pariaman	0	4	13	3	20
7	Kota Payakumbuh	0	3	12	10	26
8	Kabupaten Padang Pariaman	0	5	21	10	36
9	Kabupaten Sijunjung	0	2	15	4	20
10	Kabupaten Solok	0	10	28	10	48
11	Kabupaten Pesisir Selatan	0	15	47	12	75
12	Kabupaten Tanah Datar	0	5	40	14	60
13	Kabupaten Agam	0	10	68	24	101
14	Kabupaten Pasaman	0	6	28	9	43

No	Kantor Kementerian Agama	Jenjang Pendidikan				Jumlah
		RA	MI	MTs	MA	
15	Kabupaten Lima Puluh Kota	0	6	28	4	38
16	Kabupaten Kepulauan Mentawai	0	1	2	0	3
17	Kabupaten Dharmasraya	0	6	13	4	23
18	Kabupaten Solok Selatan	0	14	17	5	36
19	Kabupaten Pasaman Barat	0	15	54	24	93
Sumatera Barat		0	142	459	187	787

Sumber : Bidang Pendidikan Madrasah

3. Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab

Persentase ini menggambarkan peningkatan capaian nilai-nilai karakter siswa yang diperoleh melalui partisipasi aktif dalam kegiatan kepramukaan. Angka ini mencerminkan seberapa besar pengaruh kegiatan kepramukaan dalam membentuk dan meningkatkan karakter siswa, terutama pada aspek disiplin, gotong royong, kepemimpinan, dan tanggung jawab.



4. Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan an berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan

Persentase ini menggambarkan proporsi perangkat kurikulum yang telah melalui proses evaluasi dan pengembangan agar selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian terhadap lingkungan. Angka ini menunjukkan komitmen dan upaya sistem pendidikan dalam merevisi dan menyempurnakan kurikulum agar mendukung pembentukan karakter siswa yang peduli sesama dan lingkungan hidup.

Tabel 3.37 : Jumlah Perangkat Kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan

No	Kantor Kementerian Agama	Jumlah
1	Kota Padang	88
2	Kota Sawahlunto	12
3	Kota Padang Panjang	20
4	Kota Solok	12
5	Kota Bukittinggi	20
6	Kota Pariaman	19
7	Kota Payakumbuh	23
8	Kabupaten Padang Pariaman	88

No	Kantor Kementerian Agama	Jumlah
9	Kabupaten Sijunjung	50
10	Kabupaten Solok	81
11	Kabupaten Pesisir Selatan	140
12	Kabupaten Tanah Datar	87
13	Kabupaten Agam	113
14	Kabupaten Pasaman	54
15	Kabupaten Lima Puluh Kota	65
16	Kabupaten Kepulauan Mentawai	23
17	Kabupaten Dharmasraya	74
18	Kabupaten Solok Selatan	69
19	Kabupaten Pasaman Barat	141
Sumatera Barat		1.186

Sumber : Bidang Pendidikan Madrasah

5. Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B

Peningkatan sarana dan prasarana sarpras di RA, MI, MTs dan MA, bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan nyaman, guna meningkatkan kualitas pembelajaran serta hasil belajar peserta didik. Fasilitas yang memadai menunjang efektivitas mengajar guru, mendukung kegiatan ekstrakurikuler, memfasilitasi kebutuhan siswa, serta meningkatkan reputasi dan profesionalisme RA, MI, MTs dan MA.

Peningkatan sarpras memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap akreditasi, di mana kualitas fisik yang memadai berbanding lurus dengan peningkatan nilai akreditasi. Sarpras bukan sekadar fisik bangunan, melainkan instrumen penting yang menentukan kualitas pembelajaran dan menjadi komponen utama dalam standar penilaian BAN-S/M.

Tabel 3.38 : Akreditasi Tahun 2025

Jenjang Pendidikan	Jumlah	Sudah Akreditasi			Belum Akreditasi
		A	B	C	
RA	430	36	197	181	181
MI					
MTs	417	108	175	24	10
MA	222	65	92	58	7

Sumber : Bidang Pendidikan Madrasah

6. Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara

Mengukur proporsi satuan pendidikan yang telah memenuhi kriteria sebagai satuan pendidikan unggul berdasarkan standar yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga terkait. Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan pendidikan dengan kualitas unggul sesuai indikator mutu dan keunggulan tertentu akademik, karakter, inovasi, dll.

Tabel 3.39 : Sebaran Madrasah Unggul 2025 di Sumatera Barat

No	Kantor Kementerian Agama	Jumlah
1	Kota Padang	15
2	Kota Sawahlunto	5
3	Kota Padang Panjang	10
4	Kota Solok	2
5	Kota Bukittinggi	15
6	Kota Pariaman	4
7	Kota Payakumbuh	13
8	Kabupaten Padang Pariaman	12
9	Kabupaten Sijunjung	12
10	Kabupaten Solok	9
11	Kabupaten Pesisir Selatan	15
12	Kabupaten Tanah Datar	18
13	Kabupaten Agam	15
14	Kabupaten Pasaman	7
15	Kabupaten Lima Puluh Kota	7
16	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1
17	Kabupaten Dharmasraya	10
18	Kabupaten Solok Selatan	6
19	Kabupaten Pasaman Barat	9
Sumatera Barat		185

Sumber : Bidang Pendidikan Madrasah

7. Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual

Mengukur proporsi madrasah dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan program pendidikan dengan dua bahasa pengantar, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa asing umumnya bahasa Inggris atau bahasa Arab, dalam proses pembelajarannya. Persentase yang lebih tinggi menunjukkan semakin banyak madrasah dan pondok pesantren yang memberikan layanan pendidikan bilingual, yang berpotensi meningkatkan kompetensi bahasa siswa dan daya saing lulusan.

Tabel 3.40 : Sebaran Madrasah Biligual 2025 Sumatera Barat

No	Kantor Kementerian Agama	Jumlah
1	Kota Padang	10
2	Kota Sawahlunto	2
3	Kota Padang Panjang	7
4	Kota Solok	2
5	Kota Bukittinggi	8
6	Kota Pariaman	4
7	Kota Payakumbuh	6
8	Kabupaten Padang Pariaman	9
9	Kabupaten Sijunjung	8
10	Kabupaten Solok	5
11	Kabupaten Pesisir Selatan	9
12	Kabupaten Tanah Datar	10

No	Kantor Kementerian Agama	Jumlah
13	Kabupaten Agam	9
14	Kabupaten Pasaman	6
15	Kabupaten Lima Puluh Kota	5
16	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1
17	Kabupaten Dharmasraya	10
18	Kabupaten Solok Selatan	4
19	Kabupaten Pasaman Barat	5
Sumatera Barat		120

Sumber : Bidang Pendidikan Madrasah

8. Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional

Siswa madrasah di Sumatera Barat menorehkan prestasi internasional dan nasional yang gemilang di tahun 2025. Selain itu, belasan siswa dari berbagai madrasah lolos ke final OMI tingkat nasional, mempertegas keunggulan akademik sains dan agama. Prestasi Internasional dan Nasional Utama 2025:

- International Kangaroo Mathematics Contest IKMC 2025. Siswa MAN IC Padang Pariaman berhasil meraih medali emas dan perak pada Mei 2025.
- Kompetisi Sains Siswa Muslim Indonesia KoSSMI 2025. Siswa MAN IC Padang Pariaman meraih 5 medali 1 Emas, 3 Perak, 1 Perunggu.
- Olimpiade Madrasah Indonesia OMI 2025. Sebanyak 17 siswa madrasah Sumatera Barat lolos ke tingkat nasional. MAN IC Padang Pariaman, MAN 2 Kota Padang, dan MAS Nunul Yaqin Siti Manggopoh mendominasi perolehan medali perak dan perunggu di bidang sains terintegrasi.
- Juara pada ajang Shukaido Karate Open 2025. Siswa MAN 1 Solok meraih juara dalam ajang yang menuju tingkat internasional.

Prestasi Utama Regional/Nasional 2025

- MAN IC Padang Pariaman. Selain kompetisi di atas, juga meraih emas di Olimpiade Sains Nasional OSN tingkat nasional 2025.
- MAN 3 Kota Padang. Meloloskan 3 siswa ke tingkat Provinsi Sumbar dalam OMI 2025.
- MAN Kota Sawahlunto. 13 siswa lolos ke tingkat Provinsi Sumbar OMI 2025.
- MIN Kota Bukittinggi. 2 siswa meraih Juara 1 tingkat Provinsi Sumbar OMI 2025.
- MAN 2 Kota Padang. 6 siswa lolos ke OMI tingkat provinsi.
- MAN 4 Pesisir Selatan. 4 siswa lolos mewakili Sumbar ke tingkat nasional OMI 2025.

Prestasi ini menunjukkan komitmen tinggi madrasah di Sumatera Barat, dalam mencetak generasi unggul di bidang sains, matematika, dan agama tingkat internasional

Pada ajang Musabaqah Qiraatil Kutub MQK Nasional ke-8 dan MQK Internasional ke-1 Tahun 2025 yang diselenggarakan di Sulawesi Selatan, santri terbaik utusan

Sumatera Barat peringkat 7 nasional. Beberapa prestasi individu, di antaranya juara satu Marhalah Ulya Akhlak - M. Jibril Alfitri - Pondok Pesantren Terpadu Serambi Mekah, juara dua Marhalah Wustha Tafsir - Kharen Lizka - Pondok Pesantren Nurul Yaqin, serta prestasi debat bahasa Arab Putri - Natsya Miftahul, Luna Camil, Hanifah Shalihah - Thawalib Parabek.

9. Persentase materi ajar digital modul, video, e-book yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran

Persentase ini mencerminkan kesiapan dan adopsi teknologi digital dalam mendukung proses pembelajaran, serta sejauh mana materi ajar digital digunakan oleh pendidik dan peserta didik. Untuk mendukung pencapaian target kinerja 2025, Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Pembelajaran <https://sumbar.kemenag.go.id/berita/post/puluhan-kamad-sumbar-ikuti-sosialisasi-pe-manfaatan-teknologi-digital-dalam-pembelajaran>

Hingga akhir tahun 2025, rekapitulasi jumlah materi ajar digital modul, video, e-book yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran berdasarkan Kabupaten Kota terlihat dari table berikut :

Tabel 3.41 : Jumlah materi ajar digital yang tersedia dan digunakan dalam proses

No	Kantor Kementerian Agama	Jumlah
1	Kota Padang	9
2	Kota Sawahlunto	5
3	Kota Padang Panjang	8
4	Kota Solok	5
5	Kota Bukittinggi	7
6	Kota Pariaman	5
7	Kota Payakumbuh	5
8	Kabupaten Padang Pariaman	5
9	Kabupaten Sijunjung	5
10	Kabupaten Solok	5
11	Kabupaten Pesisir Selatan	5
12	Kabupaten Tanah Datar	7
13	Kabupaten Agam	7
14	Kabupaten Pasaman	5
15	Kabupaten Lima Puluh Kota	5
16	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1
17	Kabupaten Dharmasraya	3
18	Kabupaten Solok Selatan	3
19	Kabupaten Pasaman Barat	5
Sumatera Barat		100

Sumber : Bidang Pendidikan Madrasah

A.2.3.2 Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SK-11

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat di Tahun 2025, secara intensif melakukan pemetaan dan penataan GTK, terutama untuk jenjang MTs dan madrasah lainnya, untuk memenuhi kebutuhan distribusi guru yang seimbang. Penataan

ini bukan sekadar memindahkan guru. melainkan langkah krusial untuk memastikan tidak ada madrasah yang kekurangan guru mata pelajaran tertentu sementara madrasah lain kelebihan. terutama di daerah-daerah terpencil. Pemerataan tidak hanya soal sebaran. tetapi juga kualitas.

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat memastikan bahwa GTK yang didistribusi atau yang bertugas di daerah memiliki kompetensi yang memadai melalui pelatihan. termasuk in-house training IHT yang rutin diadakan di berbagai madrasah.

Tabel 3.42 : Rerata Capaian Kinerja SK-11 : Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan

	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Revisi Perkin 2025		Capaian Kinerja	Kategori
		Target	Realisasi		
1	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	41.50	41.50	100	Baik
2	Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	1 : 10	1 : 10	100	Baik
3	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	29.00	29.00	100	Baik
4	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	28.74	28.74	100	Baik
5	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru AKG minimal predikat terampil	38.60	38.60	100	Baik
6	Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah AKK minimal predikat terampil	64.65	64.65	100	Baik
7	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	40.17	40.17	100	Baik
8	Persentase guru yang meningkat jenjang karir	1.44	1.44	100	Baik
9	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	24.01	24.01	100	Baik
10	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru PPG	39.48	39.48	100	Baik
11	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	46.39	46.39	100	Baik
Rata rata Capaian Kinerja SK-11				100	Baik

Sumber : Diolah dari Laporan Kinerja Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2025

Penjelasan

1. Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik

Serdik Sertifikat Pendidik adalah dokumen resmi yang membuktikan seorang guru telah memenuhi standar profesional dan kompetensi sebagai pendidik profesional. yang diperoleh melalui program Pendidikan Profesi Guru PPG. dan menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan Tunjangan Profesi Guru TPG serta meningkatkan karir. Sertifikat ini berlaku seumur hidup dan diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan LPTK.

Serdik menggambarkan tingkat profesionalisme dan kepatuhan guru terhadap standar kompetensi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Tabel 3.43 : Persentase Guru Madrasah yang memiliki Sertifikat Pendidik

Jenjang Pendidikan	Persentase
RA	5.01
MI	14.13
MTS	54.28
MA	26.27

Sumber : Bidang Penmad

2. Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal

Persentase tenaga kependidikan selain guru, seperti kepala madrasah/sekolah, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga kebersihan, yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan dan kompetensi kerja sesuai ketentuan standar nasional atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan standar minimal kualifikasi pendidikan dan kompetensi bagi tenaga kependidikan lainnya di satuan pendidikan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin baik kualitas SDM pendukung pendidikan dalam menjalankan tugas layanan administrasi, manajemen, dan teknis penunjang proses belajar mengajar. Pada tahun 2025, jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kualifikasi dan kompetensi minimal dapat dilihat pada table 3.44

Tabel 3.44 : Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kualifikasi dan kompetensi minimal

Jenjang Pendidikan	Jumlah
RA	128
MI	415
MTS	1.177
MA	275

Sumber : Bidang Penmad

3. Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru AKG minimal predikat terampil

AKG adalah asesmen yang dilakukan untuk mengukur kompetensi pedagogik dan profesional guru sesuai standar kompetensi yang ditetapkan. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kualitas kompetensi guru dalam aspek pedagogik dan profesional telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru yang memiliki kemampuan mengajar, merencanakan pembelajaran, mengelola kelas, serta menguasai materi ajar dengan baik. Jumlah guru madrasah di Sumatera Barat, yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru AKG minimal predikat terampil di tahun 2025

Tabel 3.45 : Jumlah guru yang memperoleh nilai rapor hasil AKG minimal predikat terampil

Jenjang Pendidikan	Jumlah
RA	635
MI	1.864

Jenjang Pendidikan	Jumlah
MTS	6.992
MA	3.683

Sumber : Bidang Penmad

4. Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah AKK minimal predikat terampil

AKK adalah asesmen yang dilakukan untuk mengukur kompetensi manajerial, supervisi akademik, kewirausahaan, dan kompetensi lainnya yang wajib dimiliki oleh kepala madrasah. Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana kualitas kompetensi Kepala Madrasah telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan.

Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak Kepala Madrasah yang memiliki kompetensi memadai dalam memimpin, mengelola satuan pendidikan, melakukan supervisi, serta mendorong inovasi di madrasah. Tabel 3.46 menjelaskan tentang jumlah kepala madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKK minimal predikat terampil di tahun 2025

Tabel 3.46 : Jumlah kepala madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKK minimal predikat terampil

Jenjang Pendidikan	Jumlah
RA	33
MI	112
MTS	310
MA	166

Sumber : Bidang Penmad

5. Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat internalisasi nilai-nilai moderasi beragama pada guru agama dan tenaga kependidikan berdasarkan hasil asesmen kompetensi. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru agama dan tenaga kependidikan yang memiliki pandangan keagamaan yang inklusif, toleran, dan selaras dengan prinsip moderasi beragama.

Tabel 3.47 : Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik

Jenjang Pendidikan	Jumlah
RA	768
MI	1.332
MTS	4.324
MA	2.471

Sumber : Bidang Penmad

6. Persentase guru yang meningkat jenjang karir

Meningkatnya jenjang karir guru di Sumatera Barat merujuk pada proses kenaikan tingkat jabatan fungsional seorang pendidik yang didasarkan pada peningkatan

kompetensi, hasil kerja, dan pemenuhan angka kredit PAK serta **Kenalkan Pangkat**, yang kini semakin efisien melalui integrasi kinerja dengan sistem digital. Proses ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui perbaikan kualitas dan kesejahteraan guru.

Tabel 3.48 : Jumlah guru madrasah yang meningkat jenjang karirnya berdasarkan Kabupaten Kota

No	Guru Madrasah	Jumlah
1	Kota Padang	26
2	Kota Sawahlunto	3
3	Kota Padang Panjang	6
4	Kota Solok	4
5	Kota Bukittinggi	6
6	Kota Pariaman	6
7	Kota Payakumbuh	6
8	Kabupaten Padang Pariaman	15
9	Kabupaten Sijunjung	8
10	Kabupaten Solok	17
11	Kabupaten Pesisir Selatan	13
12	Kabupaten Tanah Datar	23
13	Kabupaten Agam	31
14	Kabupaten Pasaman	13
15	Kabupaten Lima Puluh Kota	14
16	Kabupaten Kepulauan Mentawai	2
17	Kabupaten Dharmasraya	10
18	Kabupaten Solok Selatan	13
19	Kabupaten Pasaman Barat	28
Sumatera Barat		236

Sumber : Bidang Pendidikan Madrasah

7. Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir

Pembinaan Pengawas Madrasah yang dilakukan Bidang Pendidikan Madrasah diarahkan pada peran pengawas madrasah sebagai agent of change dalam memajukan mutu pendidikan di lingkungan Kementerian Agama. Membangun mutu budaya, inovasi pembelajaran, dan keteladanan penguatan moderasi beragama.

<https://sumbar.kemenag.go.id/berita/post/sinergi-dan-kompetensi-pengawas-jadi-fokus-utama-kemenag-gelar-pembinaan-dan-penguatan-pengurus-2024-2028>

Tabel 3.49 : Jumlah pengawas madrasah yang meningkat jenjang karirnya berdasarkan Kabupaten Kota

No	Kantor Kementerian Agama	Jumlah Pengawas Madrasah	Jumlah Pengawas Madrasah yang meningkat jenjang karirnya
1	Kota Padang	16	12
2	Kota Sawahlunto	5	4
3	Kota Padang Panjang	4	3
4	Kota Solok	1	1

No	Kantor Kementerian Agama	Jumlah Pengawas Madrasah	Jumlah Pengawas Madrasah yang meningkat jenjang karirnya
5	Kota Bukittinggi	3	2
6	Kota Pariaman	1	1
7	Kota Payakumbuh	10	7
8	Kabupaten Padang Pariaman	2	1
9	Kabupaten Sijunjung	3	2
10	Kabupaten Solok	1	0
11	Kabupaten Pesisir Selatan	8	6
12	Kabupaten Tanah Datar	10	7
13	Kabupaten Agam	4	3
14	Kabupaten Pasaman	5	4
15	Kabupaten Lima Puluh Kota	7	5
16	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1	0
17	Kabupaten Dharmasraya	9	7
18	Kabupaten Solok Selatan	1	0
19	Kabupaten Pesisir Barat	8	6
Sumatera Barat		97	75

Sumber : Bidang Pendidikan Madrasah

A.2.4 Mendukung Tujuan 5 Kementerian Agama

Untuk mendukung tujuan 5 Kementerian Agama : Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya yang bersih dan melayani berbasis digital. diukur melalui pencapaian 9 SK dan 27 IKS

A.2.4.1 Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran SK-12

Tabel 3.50 : Rerata Capaian Kinerja SK-12 : Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Revisi Perkin 2025		Capaian Kinerja	Kategori
	Target	Realisasi		
Nilai Kinerja Anggaran	90.00	88.56	98.40	Baik
Rata rata Capaian Kinerja SK-12			98.40	Baik

Sumber : Diolah dari Laporan Kinerja Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2025

Nilai yang menunjukkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam suatu instansi pemerintahan, mencakup perbandingan antara realisasi anggaran dengan rencana anggaran serta pencapaian output dan outcome yang diharapkan. Menggambarkan seberapa baik instansi dalam mengelola dan menggunakan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta seberapa tepat waktu dan akurat pelaksanaan anggaran tersebut.

A.2.4.2 Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi SK-13

Tabel 3.51 : Rerata Capaian Kinerja SK-13 : Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Revisi Perkin 2025		Capaian Kinerja	Kategori
		Target	Realisasi		
1	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	72.68	72.68	100	Baik
2	Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	38.24	30.00	78.45	Cukup
Rata rata Capaian Kinerja SK-13				89.23	Baik

Sumber : Diolah dari Laporan Kinerja Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2025

Tahun 2025, Kanwil Kementerian Agama Provins Sumatera Barat, menargetkan LOLOS dalam penilaian pendahuluan menuju penilaian WBBM. Namun hasil penilaian awal dari Tim TPI Kementerian Agama, nilai Pembangunan Zona Integritas belum diatas 75

Gambar 3.12 : Nilai Pembannngunan ZI Hasil Penilaian Tim TPI



Sumber : Biro Ortala Kementerian Agama

A.2.4.3 Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN SK-14

Tabel 3.52 : Rerata Capaian Kinerja SK-14 : Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Revisi Perkin 2025		Capaian Kinerja	Kategori
		Target	Realisasi		
1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	83.00	89.67	108.03	Sangat Baik
2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	85.50	85.50	100	Baik
3	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	92.49	92.49	100	Baik
4	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan PIPK	76.00	76.00	100	Baik
5	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	93.58	93.58	100	Baik
Rata rata Capaian Kinerja SK-14				101.61	Sangat Baik

Sumber : Diolah dari Laporan Kinerja Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2025

A.2.4.4 Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai SK-15

Tabel 3.53 : Rerata Capaian Kinerja SK-15 : Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN pengadaan, penem patan, pembinaan dan pengembangan pegawai

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Revisi Perkin 2025		Capaian Kinerja	Kategori
	Target	Realisasi		
1 Indeks Profesionalisme ASN	76.58	78.61	102	Sangat Baik
2 Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur ASN sesuai kebutuhan	75.00	75.00	100	Baik
3 Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/ Inspiratif	6	12	120	Sangat Baik
Rata rata Capaian Kinerja SK-15			107.33	Sangat Baik

Sumber : Diolah dari Laporan Kinerja Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2025

Penjelasan

1. Indeks Profesionalisme ASN

Indeks Profesionalitas ASN IP ASN adalah ukuran statistik kuantitatif yang menggambarkan kualitas pegawai ASN PNS & PPPK aktif berdasarkan empat dimensi: kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Nilai IP ASN berfungsi sebagai standar pengembangan profesionalisme dan basis penilaian/evaluasi, dengan skala 0-100, mencerminkan integritas serta kompetensi ASN dalam tugas jabatan.

4 poin penting mengenai nilai IP ASN 1 **Kualifikasi**, tingkat pendidikan formal; 2. **Kompetensi**, kesesuaian jabatan dengan kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural; 3 **Kinerja**, hasil kerja SKP tahun sebelumnya dan 4. **Disiplin**, riwayat kepatuhan, di mana tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin memberikan nilai tertinggi 5 poin

Tabel 3.54 : Rekapitulasi Indeks Profesionalisme ASN 2025

No	Satuan Kerja	Nilai Rata-Rata	Keterangan
1	Kota Padang Panjang	81.51	Tinggi
2	Kota Bukittinggi	81.00	Tinggi
3	Kota Sawahlunto	80.70	Sedang
4	Kota Solok	80.41	Sedang
5	Kabupaten Solok	79.90	Sedang
6	Kota Pariaman	79.47	Sedang
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	79.40	Sedang
8	Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat	79.26	Sedang
9	Kota Payakumbuh	79.03	Sedang
10	Kabupaten Padang Pariaman	79.00	Sedang
11	Kabupaten Pesisir Selatan	78.92	Sedang
12	Kabupaten Agam	78.37	Sedang
13	Kabupaten Kepulauan Mentawai	78.33	Sedang
14	Kabupaten Tanah Datar	78.00	Sedang
15	Kabupaten Sijunjung	77.55	Sedang
16	Kabupaten Solok Selatan	77.00	Sedang

No	Satuan Kerja	Nilai Rata-Rata	Keterangan
17	Kota Padang	76.52	Sedang
18	Kabupaten Dharmasraya	76.25	Sedang
19	Kabupaten Pasaman	76.00	Sedang
20	Kabupaten Pasaman Barat	75.56	Sedang
Rata Rata		76.09	Sedang

Sumber : Diolah dari Laporan Indeks Profesionalisme ASN 2025

2. Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/ inspiratif

Beberapa guru madrasah di Sumatera Barat telah meraih penghargaan tingkat nasional sebagai pendidik inspiratif atas dedikasi dalam literasi, prestasi sains, dan inovasi pembelajaran. Guru-guru ini menunjukkan komitmen tinggi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah, baik melalui karya inovatif, literasi, maupun pencapaian prestasi di tingkat nasional, di antaranya

a. Dodi Saputra, S.Pd MAN IC Padang Pariaman

Meraih penghargaan Guru Inspiratif pada Ajang Anugerah GTK Madrasah Nasional Tahun 2025 dan masuk dalam Top 50 Peserta Terbaik Duta Guru Cinta Bangsa Paham Rupiah Championship 2025.

b. Ratna Murni MAN IC Padang Pariaman

Meraih medali perunggu dalam Merdeka Science Competition MSC untuk bidang Bahasa Inggris tingkat nasional.

c. Dafril MTsN 1 Padang

Meraih juara 1 Guru Berprestasi Tingkat Sumatera Barat yang diadakan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

Penyuluh Agama Islam PAI inspiratif Sumatera Barat tahun 2025 karena kreativitasnya dalam menyuluh di tengah masyarakat, termasuk memanfaatkan digitalisasi, pendampingan kelompok rentan, dan pelestarian lingkungan.

Prestasi ini diumumkan dalam ajang PAI Award 2025 tingkat nasional

a. Imamul Muttaqin Pasaman Barat. Juara Terbaik Kategori Metode Penyuluhan Baru.

b. Sastra Yunita, S.Sos.I Lima Puluh Kota. Juara Terbaik Kategori Literasi Al-Qur'an.

c. Pepi Rosanti, S.Sos.I Pesisir Selatan. Finalis Kategori Pendampingan Kelompok Rentan.

d. Agusrimanda, S.Sy. Finalis Kategori Kesehatan Masyarakat.

e. Suharman, S.Ag. M.Ag. Finalis Kategori Pemberdayaan Ekonomi Umat.

f. If Habibi, S.Thl. M.Ag. Finalis Kategori Pendampingan Hukum.

g. Rio Dwinanda, S.HI. Finalis Kategori Pelestarian Lingkungan.

h. Marlina, M.Pd.I. Finalis Kategori Penguatan Moderasi Beragama.

Ahmad Zakiy, Penghulu Ahli Pertama dari KUA Kecamatan Sungai Limau meraih **Juara I** Musabaqah Qira'atul Kutub MKQ antar Penghulu Tingkat Provinsi

Sumatera Barat tahun 2025. Prestasinya diakui sebagai bentuk dedikasi tinggi dalam peningkatan kompetensi penghulu

A.2.4.5 Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum SK-16

Tabel 3.55 : Rerata Capaian Kinerja SK-16 : Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Revisi Perkin 2025		Capaian Kinerja	Kategori
		Target	Realisasi		
1	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	87.03	87.03	100	Baik
2	Persentase rekomendasi izin orang asing	78.50	78.50	100	Baik
Rata rata Capaian Kinerja SK-16				100	Baik

Sumber : Diolah dari Laporan Kinerja Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2025

A.2.4.6 Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa SK-17

Tabel 3.56 : Rerata Capaian Kinerja SK-17 : Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Revisi Perkin 2025		Capaian Kinerja	Kategori
		Target	Realisasi		
1	Persentase digitalisasi arsip dan mudah di akses	71.73	71.73	100	Baik
2	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	83.00	83.00	100	Baik
3	Nilai layanan kesehatan	88.00	88.00	100	Baik
Rata rata Capaian Kinerja SK-17				100	Baik

Sumber : Diolah dari Laporan Kinerja Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2025

A.2.4.7 Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi SK-18

Tabel 3.57 : Rerata Capaian Kinerja SK-18 : Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Revisi Perkin 2025		Capaian Kinerja	Kategori
		Target	Realisasi		
1	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	89.48	89.48	100	Baik
2	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	18.00	18.00	100	Baik
Rata rata Capaian Kinerja SK-18				100	Baik

Sumber : Diolah dari Laporan Kinerja Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2025

A.2.4.8 Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi SK-19

Tabel 3.58 : Rerata Capaian Kinerja SK-19 : Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Revisi Perkin 2025		Capaian Kinerja	Kategori
		Target	Realisasi		
1	Indeks Pembangunan Statistik	1.5	1.5	100	Baik
2	Persentase data statistik yang dipublikasi	58	58	100	Baik
Rata rata Capaian Kinerja SK-19				100	Baik

Sumber : Diolah dari Laporan Kinerja Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2025

A.2.4.9 Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan SK-20

Tabel 3.59 : Rerata Capaian Kinerja SK-20 : Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Revisi Perkin 2025		Capaian Kinerja	Kategori
		Target	Realisasi		
1	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	96.00	96.00	100	Baik
2	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama	1.8	1.8	100	Baik
3	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	16.00	16.00	100	Baik
4	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	16.00	16.00	100	Baik
5	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK	73.00	73.00	100	Baik
6	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra	67.76	67.76	100	Baik
7	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bidang Pendidikan	88.35	88.35	100	Baik
Rata rata Capaian Kinerja SK-20				100	Baik

Sumber : Diolah dari Laporan Kinerja Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2025

Perbandingan capaian kinerja mendukung pelaksanaan tujuan Kementerian Agama 2023-2025 dapat dilihat dari table 3.57

Tabel 3.60 : Perbandingan Capaian Kinerja Mendukung Pelaksanaan Tujuan Kementerian Agama Tahun 2023 - 2025

Mendukung Tujuan Kementerian Agama	2023		2024		2025	
	Rata Rata % Capaian Kinerja	Kategori Penilaian	Rata Rata % Capaian Kinerja	Kategori Penilaian	Rata Rata % Capaian Kinerja	Kategori Penilaian
Tujuan 1	100	Baik	91.67	Baik	100	Baik
Tujuan 2	96.3	Baik	120.26	Sangat Baik	100	Baik
Tujuan 3	88.9	Baik	132.65	Sangat Baik	100	Baik
Tujuan 4	96.6	Baik	88.63	Baik	98.00	Baik
Tujuan 5	98.0	Baik	99.18	Baik	99.62	Baik
Rata Rata Capaian Kinerja	95.96	Baik	106.478	Sangat Baik	100	Baik

Sumber : Diolah dari Laporan Kinerja Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2025

A.3 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan

Rata rata capaian kinerja Sasaran Kegiatan atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar **100** kategori **BAIK** dengan rincian

Tabel 3.61 : Rerata Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Rata Rata % Capaian Kinerja	Kategori
1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	103	Sangat Baik
2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	100	Baik

No	Sasaran Kegiatan	Rata Rata % Capaian Kinerja	Kategori
3	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	100	Baik
4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	100	Baik
5	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah	100	Baik
6	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	100	Baik
7	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	100	Baik
8	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	100	Baik
9	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	100	Baik
10	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	101	Baik
11	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	95.32	Baik
12	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	98.4	Baik
13	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	89.225	Baik
14	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	101.6	Sangat Baik
15	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai	107.3	Sangat Baik
16	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	100	Baik
17	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	100	Baik
18	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	100	Baik
19	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	100	Baik
20	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan	100	Baik
Rata Rata Capaian Kinerja SK		100	Baik

Sumber : Diolah dari Laporan Kinerja Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2025

A.4 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan IKS

Capaian kinerja 81 IKS Perjanjian Kinerja 2025 yang dicapai Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dari table 3.62

Tabel 3.62 : Rerata Capaian Kinerja IKS Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Rata Rata % Capaian Kinerja	Kategori
1	Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi	119.9	Sangat Baik
2	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	100	Baik
3	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	100	Baik
4	Persentase peningkatan audiens MTQ/ Pesparani/ Pesparawi/ Utsawa Dharma/ Swayam Vira Tripitaka Gatha	100	Baik
5	Persentase peningkatan peserta event seni budaya	100	Baik
6	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	100	Baik

No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Rata Rata % Capaian Kinerja	Kategori
7	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan	100	Baik
8	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bombing an agama	100	Baik
9	Persentase fasilitator bombing an perkawinan agama yang tersertifikasi	100	Baik
10	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	100	Baik
11	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	100	Baik
12	Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	100	Baik
13	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	100	Baik
14	Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan	100	Baik
15	Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah	100	Baik
16	Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	100	Baik
17	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan	100	Baik
18	Persentase calon jamaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	100	Baik
19	Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	100	Baik
20	Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu	100	Baik
21	Persentase Lembaga penyeleng garaan haji khusus dan umrah yang terakreditasi A; a. Lembaga penyelenggara haji khusus; b. Lembaga penyelenggara umrah	100	Baik
22	Persentase pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi jemaah haji sesuai standar	100	Baik
23	Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	100	Baik
24	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	100	Baik
25	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik	100	Baik
26	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	100	Baik
27	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	100	Baik
28	Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren	100	Baik
29	Persentase Anak Kelas 1 MI / SD /Adi Widyala ya/Mula Dhamma sekha yang Pernah Mengikuti PAUD TK/RA/ BA/ Taman Seminari/ Pratama Widyalyaya/ Nava Dhammasekha	100	Baik
30	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	100	Baik
31	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	100	Baik
32	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a Literasi membaca b Numerasi	104.43	Baik
33	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	100	Baik
34	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	100	Baik

No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Rata Rata % Capaian Kinerja	Kategori
35	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	100	Baik
36	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan disip lin. gotong royong. kepemimpinan. tanggung jawab	100	Baik
37	Persentase perangkat kuri kulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	100	Baik
38	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	100	Baik
39	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	100	Baik
40	Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	100	Baik
41	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	100	Baik
42	Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	100	Baik
43	Persentase materi ajar digital modul. video. e-book yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	100	Baik
44	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	100	Baik
45	Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	100	Baik
46	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	91.59	Baik
47	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	93.56	Baik
48	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru AKG minimal predikat terampil	88.34	Baik
49	Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah AKK minimal predikat terampil	75.03	Cukup
50	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	100	Baik
51	Persentase guru yang meningkat jenjang karir	100	Baik
52	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	100	Baik
53	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru PPG	100	Baik
54	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	100	Baik
55	Nilai Kinerja Anggaran	98.4	Baik
56	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	100	Baik
57	Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	78.45	Cukup
58	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	108.03	Sangat Baik
59	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	100	Baik
60	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	100	Baik
61	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan PIPK	100	Baik
62	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	100	Baik
63	Indeks Profesionalisme ASN	102	Sangat Baik
64	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur ASN sesuai kebutuhan	100	Baik
65	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/ inspiratif	120	Sangat Baik
66	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	100	Baik
67	Persentase rekomendasi izin orang asing	100	Baik
68	Persentase digitalisasi arsip dan mudah di akses	100	Baik
69	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	100	Baik

No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Rata Rata % Capaian Kinerja	Kategori
70	Nilai layanan kesehatan	100	Baik
71	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	100	Baik
72	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	100	Baik
73	Indeks Pembangunan Statistik	100	Baik
74	Persentase data statistik yang dipublikasi	100	Baik
75	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	100	Baik
76	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama	100	Baik
77	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	100	Baik
78	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	100	Baik
79	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK	100	Baik
80	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra	100	Baik
Rata Rata Capaian Kinerja IKSK 2025		100	Baik

Sumber : Diolah dari Laporan Kinerja Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2025

B. Capaian Kinerja Anggaran

Total anggaran seluruh Satuan Kerja Jajaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, semula berjumlah **Rp. 1.720.523.479.000,-** (satu trilyun, tujuh ratus duapuluh milyar, lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), meningkat menjadi **Rp. 1.983.853.114.000,-** (satu trilyun sembilan ratus delapan puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus empat belas ribu rupiah). Peningkatan anggaran sebanyak **Rp. 263.329.635.000,-** (dua ratus enam puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh Sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Peningkatan anggaran sebanyak **Rp. 263.329.635.000,-** (dua ratus enam puluh tiga milyar, tiga ratus dua puluh sembilan juta, enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Tambahan anggaran ini diprioritaskan untuk pemenuhan tunjangan profesi guru (TPG) atau tunjangan kinerja guru, khususnya guru bukan ASN pada RA dan Madrasah, termasuk pemberian tunjangan insentif guru bukan ASN sebesar Rp250.000 per bulan yang dibayarkan secara bertahap

Sampai akhir pelaksanaan tahun anggaran 2025, terealisasi sebesar **Rp 1.898.557.053.558** (satu trilyun delapan ratus sembilan puluh lima milyar lima ratus lima puluh tujuh juta lima puluh tiga ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) atau presentase realisasi anggaran mencapai **95.70**. Sisa anggaran sebanyak **Rp. 85.296.060.442,-** (delapan puluh lima milyar dua ratus Sembilan puluh enam juta enam puluh ribu empat ratus empat puluh dua rupiah)

**Tabel 3.63 : Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran
Satuan Kerja Jajaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat
Per 31 Desember 2025**

No.	Kanwil/ Kantor Kementerian Agama	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	Realisasi
		Rp			
1	Kanwil Provinsi Sumatera Barat	138.162.132.000	133.939.714.236	4.222.417.764	96,94
2	Kota Padang	202.838.179.000	196.513.179.893	6.324.999.107	96,88
3	Kota Padang Panjang	60.761.474.000	55.866.883.112	4.894.590.888	91,94
4	Kota Bukittinggi	66.483.321.000	63.827.404.713	2.655.916.287	96,01
5	Kota Payakumbuh	73.012.669.000	69.968.571.174	3.044.097.826	95,83
6	Kota Sawahlunto	34.595.403.000	33.662.199.858	933.203.142	97,30
7	Kota Solok	39.083.709.000	37.724.884.515	1.358.824.485	96,52
8	Kota Pariaman	48.957.885.000	48.211.608.696	746.276.304	98,48
9	Kabupaten Solok	116.882.951.000	110.774.082.051	6.108.868.949	94,77
10	Kabupaten Solok Selatan	74.293.140.000	69.982.418.966	4.310.721.034	94,20
11	Kabupaten Lima Puluh Kota	91.557.536.000	88.425.007.827	3.132.528.173	96,58
12	Kabupaten Padang Pariaman	128.282.851.000	119.159.706.519	9.123.144.481	92,89
13	Kabupaten Pesisir Selatan	209.249.182.000	194.625.454.940	14.623.727.060	93,01
14	Kabupaten Agam	182.438.784.000	172.703.592.824	9.735.191.176	94,66
15	Kabupaten Tanah Datar	167.781.375.000	164.901.975.834	2.879.399.166	98,28
16	Kabupaten Sijunjung	63.086.539.000	60.747.620.944	2.338.918.056	96,29
17	Kabupaten Pasaman	89.243.221.000	85.329.782.815	3.913.438.185	95,61
18	Kabupaten Pasaman Barat	122.172.974.000	116.262.305.725	5.910.668.275	95,16
19	Kabupaten Dharmasraya	50.578.138.000	49.181.079.311	1.397.058.689	97,24
20	Kabupaten Kepulauan Mentawai	24.391.651.000	26.749.579.605	- 2.357.928.605	109,67
Total		1.983.853.114.000	1.898.557.053.558	85.296.060.442	95,70

Sumber : Tim Kerja Perencanaan

Penjelasan secara rinci pagu, realisasi dan sisa anggaran tahun 2025 pada satuan kerja jajaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, dapat dilihat pada table 3.64

Tabel 3.64 : Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran
Satuan Kerja Jajaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat
Per 31 Desember 2025

No	Kode / Nama Satuan Kerja	Anggaran (Rp)			% Realisasi Anggaran
		Pagu	Realisasi	Sisa	
A	SUMATERA BARAT	1,983,853,114,000	1,898,887,853,858	85,298,869,442	95,79
1	Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman	128,382,881,000	119,159,786,819	9,123,144,481	97,89
1	080561 MAN 1C Padang Pariaman	4,448,612,000	4,185,011,761	263,580,239	94,08
2	299392 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman	111,819,522,000	109,580,584,810	2,238,737,190	97,81
3	299393 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman	2,762,932,000	2,369,632,666	473,199,334	85,80
4	299394 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman	1,186,737,000	1,177,568,259	9,168,741	99,23
5	299395 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman	192,584,000	186,887,778	5,696,222	97,04
6	299440 MTsN 3 Padang Pariaman	633,673,000	629,719,518	3,953,482	99,38
7	299451 MTsN 1 Padang Pariaman	700,010,000	695,428,800	4,581,200	99,36
8	299460 MTsN 2 Padang Pariaman	1,246,099,000	1,241,641,837	4,457,163	99,59
9	424110 MAN 1 Padang Pariaman	1,308,672,000	1,303,587,718	5,084,282	99,61
10	552819 MTsN 5 Padang Pariaman	642,484,000	630,525,000	11,969,000	98,14
11	552828 MTsN 4 Padang Pariaman	597,630,000	592,017,200	5,612,800	99,06
12	571089 MTsN 6 Padang Pariaman	397,969,000	397,193,180	775,820	99,66
13	574001 MTsN 10 Padang Pariaman	260,600,000	251,886,262	8,713,738	96,66
14	574101 MTsN 5 Padang Pariaman	518,192,000	514,393,100	3,798,900	99,21
15	574111 MTsN 9 Padang Pariaman	473,892,000	466,724,020	7,167,979	98,39
16	663021 MAN 2 Padang Pariaman	318,772,000	328,765,000	19,993,000	91,55
17	674987 MAN 3 Padang Pariaman	414,820,000	409,820,000	5,000,000	98,79
18	676582 MTsN 7 Padang Pariaman	388,133,000	387,320,000	813,000	99,72
B	Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat	138,162,132,000	133,939,714,236	4,222,417,764	96,94
19	299275 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat	35,240,083,000	33,341,046,974	1,899,036,026	94,61

No	Kode / Nama Satuan Kerja	Anggaran (Rp)			% Realisasi Anggaran
		Pago	Realisasi	Sisa	
20	299322 Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat	10,882,314,000	10,323,179,113	559,134,885	94.86
21	299323 Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat	84,914,482,000	83,359,301,303	1,555,180,697	98.17
22	299324 Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat	785,550,000	747,880,083	37,669,917	95.20
23	299325 Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat	983,417,000	975,811,752	7,605,248	98.43
24	299326 Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat	248,910,000	247,946,000	963,400	99.61
25	299327 Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat	305,053,000	301,634,300	3,418,700	98.86
26	299328 Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat	5,097,791,000	4,942,592,509	155,198,491	96.96
III	Kementerian Agama Kota Padang	282,858,179,000	196,513,179,893	86,344,999,107	69.50
27	299392 Kantor Kementerian Agama Kota Padang	181,294,074,000	176,046,350,191	5,247,723,809	97.11
28	299393 MAN 1 Kota Padang	2,517,337,000	2,434,143,000	83,194,000	96.70
29	299394 Kantor Kementerian Agama Kota Padang	3,316,568,000	2,790,243,565	526,324,435	84.14
30	299395 Kantor Kementerian Agama Kota Padang	4,052,007,000	4,009,988,072	42,018,928	98.96
31	299396 Kantor Kementerian Agama Kota Padang	206,082,000	188,482,510	17,599,490	91.47
32	299474 MTsN 2 Kota Padang	1,123,020,000	1,083,988,190	39,031,810	96.56
33	309161 MTsN 6 Kota Padang	1,519,453,000	1,520,212,700	29,240,300	99.11
34	424081 MAN 1 Kota Padang	1,648,780,000	1,591,052,170	57,727,830	96.50
35	424048 MTsN 3 Kota Padang	930,546,000	885,416,886	45,129,114	94.24
36	424054 MTsN 4 Kota Padang	1,274,575,000	1,264,199,826	10,375,174	99.20
37	421880 MTsN 5 Kota Padang	1,206,393,000	1,213,369,273	35,180,727	99.90
38	574203 MTsN 7 Kota Padang	851,094,000	828,293,993	22,799,007	97.21
39	575841 MAN 3 Kota Padang	1,434,351,000	1,307,602,550	126,748,450	91.18
40	601700 MTsN 1 Kota Padang	1,331,682,000	1,321,752,082	9,929,918	98.40
IV	Kementerian Agama Kota Sawahlunto	34,695,403,000	33,662,199,898	1,033,203,102	97.00
41	299318 Kantor Kementerian Agama Kota Sawahlunto	31,022,342,000	30,283,707,291	738,634,709	97.62
42	299333 Kantor Kementerian Agama Kota Sawahlunto	659,121,000	551,887,876	107,233,124	83.22

No	Kode / Nama Satuan Kerja	Anggaran (Rp)			% Realisasi Anggaran
		Pagu	Realisasi	Sisa	
43	299334 Kantor Kementerian Agama Kota Sawahlunto	927,806,000	901,007,639	26,800,161	97.11
44	299335 Kantor Kementerian Agama Kota Sawahlunto	127,400,000	101,141,059	26,267,941	79.38
45	299338 MTSN 1 Kota Sawahlunto	479,712,000	459,209,159	20,502,841	95.73
46	309175 MTSN 2 Kota Sawahlunto	661,146,000	654,321,206	6,826,794	98.97
47	575820 MAN Kota Sawahlunto	737,860,000	730,947,648	6,912,352	99.06
V	Kementerian Agama Kota Padang Panjang	69,761,474,000	59,866,883,182	4,894,590,888	91.94
48	299343 Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang	53,630,636,000	49,151,113,083	4,779,522,917	91.14
49	299344 Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang	369,080,000	332,516,460	36,563,540	90.09
50	299347 Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang	133,181,000	133,181,000	-	100.00
51	299346 Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang	127,105,000	127,102,104	2,896	100.00
52	299371 MAN 1 Kota Padang Panjang	1,223,254,000	1,220,936,826	1,727,174	99.86
53	300196 MTSN Kota Padang Panjang	1,428,406,000	1,391,754,717	36,651,283	97.43
54	300201 MAN 2 Kota Padang Panjang	3,086,575,000	3,047,953,773	38,621,227	98.75
55	575837 MAN 3 Kota Padang Panjang	464,037,000	462,533,149	1,503,851	99.88
VI	Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar	167,781,575,000	164,901,975,854	2,879,599,166	98.28
56	299385 MTSN 4 Tanah Datar	624,182,000	622,306,780	1,875,220	99.56
57	299738 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar	153,393,806,000	150,945,460,213	2,448,344,788	98.40
58	299750 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar	1,486,966,000	1,285,255,157	211,710,843	85.86
59	299760 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar	1,121,086,000	1,055,012,820	66,073,180	91.83
60	299761 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar	113,060,000	106,225,793	7,434,208	93.46
61	299805 MTSN 1 Tanah Datar	548,765,000	542,082,240	6,682,760	98.93
62	299812 MTSN 2 Tanah Datar	273,014,000	266,013,600	7,000,400	97.44
63	299826 MTSN 3 Tanah Datar	591,271,000	583,189,700	8,081,300	98.63
64	299830 MTSN 5 Tanah Datar	619,347,000	616,627,600	2,719,200	99.88
65	299837 MAN 1 Tanah Datar	671,715,000	664,312,703	7,402,297	98.88

No	Kode / Nama Sumber Biaya	Anggaran (Rp)			% Realisasi Anggaran
		Pagu	Realisasi	Sisa	
66	309264 MTSN 6 Tanah Datar	1,068,028,000	1,067,328,000	3,600,000	99.86
67	309271 MAN 2 Tanah Datar	1,400,158,000	1,395,567,490	4,590,510	99.60
68	434817 MTSN 7 Tanah Datar	275,153,000	269,580,000	5,573,000	97.97
69	434823 MTSN 8 Tanah Datar	484,166,000	476,596,738	7,569,261	98.44
70	434832 MTSN 9 Tanah Datar	842,966,000	837,903,700	5,062,300	99.41
71	552880 MTSN 10 Tanah Datar	690,111,000	692,734,800	2,623,800	99.23
72	552890 MTSN 11 Tanah Datar	395,421,000	385,858,909	9,562,091	97.56
73	552908 MTSN 12 Tanah Datar	709,973,000	702,654,550	7,318,450	98.97
74	552912 MTSN 13 Tanah Datar	387,531,000	379,236,810	8,294,190	97.81
75	574176 MTSN 14 Indragiri Hilir	297,839,000	297,668,000	171,000	99.94
76	575816 MAN 3 Tanah Datar	277,668,000	267,154,750	10,513,250	96.21
77	601738 MTSN 17 Tanah Datar	243,741,000	243,704,020	36,980	99.99
78	601742 MTSN 18 Tanah Datar	274,181,000	266,021,023	8,159,977	97.02
79	601759 MTSN 16 Tanah Datar	232,567,000	232,536,000	31,000	99.99
80	601827 MAN 4 Tanah Datar	432,738,000	422,113,834	10,624,166	97.53
VII	Kementerian Agama Kota Pariaman	48,957,885,000	48,211,698,696	746,186,304	98.48
81	299481 MAN Kota Pariaman	916,958,000	890,883,000	26,075,000	87.34
82	309218 MTSN 1 Kota Pariaman	1,127,039,000	1,056,322,166	70,716,834	93.71
83	374982 MTSN 2 Kota Pariaman	881,676,000	732,316,000	149,360,000	83.01
84	661118 MTSN 3 Kota Pariaman	767,155,000	765,273,600	1,881,400	99.76
85	664209 Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman	43,665,404,000	43,302,983,963	362,420,036	99.17
86	664210 Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman	562,916,000	529,901,053	33,014,947	94.13
87	664211 Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman	862,407,000	862,406,679	329	100.00
88	664212 Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman	171,290,000	141,518,252	29,771,748	82.62

No	Kode / Nama Satuan Kerja	Paga	Rehabilitasi Orpi	Siswa	% Rehabilitasi Anggaran
VIII	Kementerian Agama Kabupaten Sijunjung	63,086,539,880	60,747,628,944	2,338,910,936	96.29
89	299105 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sijunjung	57,036,000,000	51,880,571,071	2,155,491,929	96.22
90	299106 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sijunjung	1,172,133,000	1,015,917,000	126,316,000	99.22
91	299407 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sijunjung	146,799,000	146,799,000	1,000	100.00
92	299208 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sijunjung	108,620,000	108,525,000	95,000	99.91
93	299521 MTsN 1 Sijunjung	930,754,000	923,953,720	6,800,280	99.27
94	299532 MTsN 1 Sijunjung	939,651,000	934,148,838	5,502,162	99.41
95	309222 MTsN 2 Sijunjung	422,703,000	417,819,830	4,883,170	98.89
96	309230 MTsN 2 Sijunjung	344,105,000	335,622,430	8,482,570	97.53
97	424741 MTsN 3 Sijunjung	963,921,000	958,128,000	5,800,999	99.40
98	552830 MTsN 4 Sijunjung	373,035,000	362,795,000	10,330,000	97.23
99	671306 MTsN 5 Sijunjung	303,206,000	296,078,000	7,132,000	97.65
100	676351 MTsN 6 Sijunjung	343,544,000	337,864,000	5,680,000	97.78
IX	Kementerian Agama Kabupaten Solok	116,882,951,880	110,774,882,651	6,108,068,949	94.77
101	299503 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok	106,345,544,000	100,720,337,867	5,625,206,133	94.71
102	299504 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok	1,778,382,000	1,512,675,300	265,706,700	85.06
103	299505 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok	1,540,123,000	1,916,965,680	23,157,320	98.81
104	299506 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok	108,080,000	108,080,722	10,278	99.99
105	299600 MTsN 1 Solok	278,090,000	276,095,650	2,000,250	99.47
106	424011 MTsN 1 Solok	1,371,894,000	1,241,559,000	128,095,000	90.66
107	552802 MTsN 2 Solok	1,010,847,000	1,007,953,872	23,887,128	97.78
108	574150 MTsN 3 Solok	973,993,000	964,583,050	9,004,950	99.08
109	575879 MTsN 2 Solok	585,865,000	581,516,180	4,348,820	99.26
110	601763 MTsN 6 Solok	600,262,000	593,512,000	6,750,000	98.88
111	601770 MTsN 4 Solok	278,800,000	271,093,780	7,706,220	97.34

No	Kode / Nama Satuan Kerja	Paga	Rehabilitasi Orpi	Siswa	% Rehabilitasi Anggaran
112	601764 MTSN 5 Solok	426,276,000	426,341,000	35,000	99.99
113	601096 MTSN 7 Solok	314,989,000	300,989,000	8,000,000	97.46
114	674970 MAN 3 Solok	730,326,000	714,523,000	6,001,000	99.20
X	Kementerian Agama Kabupaten Solok Selatan	74,393,140,000	69,983,418,964	4,318,721,034	94.20
115	299610 MTSN 1 Solok Selatan	818,519,000	811,485,220	7,033,780	99.14
116	309182 MAN 1 Solok Selatan	947,589,000	881,785,897	65,803,103	91.18
117	424801 MTSN 2 Solok Selatan	927,575,000	911,825,237	15,749,763	98.32
118	553739 MTSN 3 Solok Selatan	661,897,000	651,867,820	10,029,180	98.48
119	601791 MTSN 5 Solok Selatan	581,020,000	575,059,420	5,960,580	98.97
120	661053 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok Selatan	65,151,863,000	61,166,909,857	3,984,953,143	93.88
121	601054 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok Selatan	1,006,724,000	923,874,000	82,850,000	91.87
122	661055 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok Selatan	2,813,801,000	2,827,973,813	85,827,587	96.72
123	663956 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok Selatan	102,184,000	102,737,200	428,800	99.59
124	674291 MTSN 4 Solok Selatan	493,862,000	489,976,300	3,885,700	99.21
125	676343 MTSN 6 Solok Selatan	421,326,000	414,871,000	6,455,000	98.42
126	680188 MAN 2 Solok Selatan	586,380,000	543,459,702	22,920,298	95.95
XI	Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan	389,349,182,000	384,625,454,940	14,623,727,060	93.61
127	299627 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan	190,392,262,000	176,324,088,259	14,068,221,741	92.61
128	299628 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan	2,007,779,000	1,783,551,720	224,227,279	88.82
129	299629 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan	3,466,622,000	3,447,179,581	19,442,419	99.44
130	299630 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan	110,516,000	110,509,000	7,000	100.00
131	299680 MTSN 2 Pesisir Selatan	908,485,000	898,978,763	10,506,237	98.85
132	299691 MTSN 5 Pesisir Selatan	1,311,351,000	1,265,614,000	5,740,000	96.56
133	299702 MTSN 7 Pesisir Selatan	417,017,000	409,060,400	7,956,600	98.09
134	299716 MTSN 8 Pesisir Selatan	306,681,000	306,429,020	31,000	99.99

No	Kode / Nama Satuan Kerja	Paga	Rehabilitasi Orpi	Siswa	% Realisasi Anggaran
135	299720 / MAN 1 Pasisir Selatan	917,818,000	904,975,000	32,841,000	96.10
136	309203 / MITSN 1 Pasisir Selatan	969,213,000	862,497,100	8,703,900	89.41
137	309250 / MAN 2 Pasisir Selatan	1,359,299,000	1,331,310,000	6,708,996	99.37
138	424750 / MITSN 3 Pasisir Selatan	580,540,000	577,019,000	1,501,000	99.49
139	424765 / MITSN 5 Pasisir Selatan	328,040,000	326,299,000	1,740,100	99.47
140	424772 / MITSN 4 Pasisir Selatan	1,006,048,000	941,174,800	59,773,200	94.03
141	424781 / MITSN 12 Pasisir Selatan	805,376,000	723,018,590	82,856,410	89.72
142	552940 / MITSN 9 Pasisir Selatan	853,624,000	812,302,463	21,821,537	97.44
143	554113 / MAN 3 Pasisir Selatan	593,754,000	583,455,230	10,298,770	98.27
144	574102 / MITSN 10 Pasisir Selatan	749,916,000	712,538,360	37,357,640	95.02
145	601800 / MITSN 11 Pasisir Selatan	734,592,000	723,810,000	10,781,400	98.54
146	662017 / MAN 4 Pasisir Selatan	623,076,000	615,104,300	7,971,700	98.72
147	674264 / MITSN 13 Pasisir Selatan	493,936,000	487,379,000	6,557,000	98.67
XII	Kementerian Agama Kota Solok	39,083,709,890	37,754,884,515	1,328,824,485	96.83
148	299741 / Kantor Kementerian Agama Kota Solok	33,352,981,000	34,075,111,963	1,277,880,037	96.39
149	299742 / Kantor Kementerian Agama Kota Solok	412,400,000	386,022,819	26,377,181	93.80
150	299743 / Kantor Kementerian Agama Kota Solok	909,711,000	894,826,375	14,884,625	98.36
151	299751 / Kantor Kementerian Agama Kota Solok	111,218,000	104,710,835	6,517,165	94.14
152	424101 / MAN Kota Solok	1,082,900,000	1,066,330,000	17,570,000	98.39
153	552906 / MITSN Kota Solok	1,213,483,000	1,197,662,907	15,820,093	98.71
XIII	Kementerian Agama Kabupaten Agam	183,438,784,000	172,703,593,824	6,735,190,176	94.66
154	299868 / Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam	166,170,000,000	156,862,799,693	9,287,600,307	94.41
155	299869 / Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam	1,592,980,000	1,796,582,327	196,603,673	90.15
156	299870 / Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam	2,622,400,000	2,503,876,100	28,523,900	95.81
157	299871 / Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam	130,420,000	114,615,400	15,564,600	88.05

No	Kode / Nama Satuan Kerja	Paga	Rehabilitasi (Rp)	Siswa	% Rehabilitasi Anggaran
158	299915 / MTSN 5 Agam	822,656,000	818,076,000	4,580,000	99.44
159	299922 / MTSN 1 Agam	768,572,000	763,089,800	5,282,200	99.31
160	299936 / MTSN 3 Agam	710,521,000	713,550,200	26,970,800	96.36
161	299940 / MAN 2 Agam	648,728,000	635,479,257	13,248,743	97.96
162	434141 / MAN 1 Agam	283,530,000	474,967,800	8,567,600	98.23
163	424879 / MTSN 2 Agam	604,703,000	587,338,236	17,364,764	97.14
164	424895 / MTSN 4 Agam	567,921,000	564,247,000	3,674,000	99.33
165	552844 / MTSN 6 Agam	1,151,799,000	1,141,799,000	10,000,000	99.13
166	552851 / MTSN 7 Agam	921,860,000	912,259,700	9,300,300	98.99
167	552865 / MTSN 10 Agam	457,952,000	448,639,750	9,312,250	97.97
168	552872 / MTSN 8 Agam	529,118,000	519,328,833	10,089,167	98.09
169	553743 / MTSN 9 Agam	668,476,000	661,578,160	8,898,000	98.97
170	594109 / MAN 3 Agam	616,400,000	610,320,000	6,080,000	99.01
171	574125 / MTSN 12 Agam	500,777,000	491,995,200	8,781,800	98.25
172	574132 / MTSN 11 Agam	689,276,000	687,423,830	31,852,170	98.38
173	575802 / MAN 4 Agam	522,115,000	500,633,500	12,478,500	97.81
174	661101 / MTSN 13 Agam	451,843,000	433,794,130	18,048,870	96.01
175	662000 / MAN 5 Agam	376,522,000	371,973,800	4,548,000	98.79
XIV	Kementerian Agama Kota Bukittinggi	68,483,521,000	63,827,494,713	2,895,916,287	96.91
176	299957 / Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi	59,104,431,000	56,728,093,500	2,476,337,500	95.99
177	299958 / Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi	284,184,000	390,045,514	94,148,484	80.58
178	299959 / Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi	723,094,000	680,813,399	82,278,100	88.62
179	299962 / Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi	111,328,000	99,395,000	12,033,000	89.20
180	299978 / MTSN 1 Kota Bukittinggi	1,306,544,000	1,294,833,631	25,710,369	98.34
181	299982 / MAN 2 Kota Bukittinggi	1,730,690,000	1,708,028,016	24,651,984	98.58

No	Kode / Nama Satuan Kerja	Paga	Rehabilitasi Orpi	Siswa	% Realisasi Anggaran
182	309285 (MTSN 2 Kota Bukittinggi)	933,695,000	907,339,011	38,355,989	97,18
183	421120 (MAN 1 Kota Bukittinggi)	2,080,255,000	2,072,851,801	10,403,199	99,21
XV	Kemendiknas Agama Kabupaten Pasaman	89,243,221,890	88,329,793,818	3,913,428,105	98,61
184	299999 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman	79,693,711,000	76,001,978,594	3,691,732,405	95,37
185	309000 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman	1,284,554,000	1,290,051,028	194,502,972	85,90
186	309901 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman	908,508,000	908,929,869	1,878,151	99,53
187	309001 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman	130,598,000	130,325,890	273,130	99,79
188	418023 (MTSN 2 Pasaman)	1,344,861,000	1,341,141,000	3,720,000	99,72
189	418070 (MAN 1 Pasaman)	1,353,528,000	1,351,314,107	2,213,893	99,84
190	424005 (MTSN 1 Pasaman)	1,334,667,000	1,334,472,880	194,120	99,99
191	552951 (MTSN 3 Pasaman)	1,163,935,000	1,156,621,616	7,313,384	99,37
192	552961 (MTSN 4 Pasaman)	664,151,000	658,827,360	5,323,640	99,20
193	574107 (MTSN 5 Pasaman)	729,415,000	720,867,000	8,548,000	98,53
194	674066 (MAN 2 Pasaman)	435,293,000	435,210,500	42,500	99,99
XVI	Kemendiknas Agama Kabupaten Lima Puluh Kota	91,887,538,890	88,425,007,827	3,132,528,173	96,58
195	418032 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota	82,043,387,000	80,132,603,042	2,910,783,958	96,81
196	418033 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota	1,826,044,000	1,585,826,968	245,217,032	86,57
197	418051 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota	452,048,000	452,387,130	260,820	99,84
198	418055 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota	108,620,000	108,458,765	161,235	99,85
199	418048 (MTSN 1 Lima Puluh Kota)	882,296,000	881,045,088	1,250,912	99,88
200	418054 (MTSN 4 Lima Puluh Kota)	685,676,000	681,476,500	4,200,000	99,58
201	418080 (MTSN 2 Lima Puluh Kota)	689,729,000	688,728,851	11,000,149	98,38
202	418095 (MAN Lima Puluh Kota)	513,799,000	507,410,380	26,388,620	95,06
203	424797 (MTSN 3 Lima Puluh Kota)	1,347,775,000	1,342,321,343	5,453,657	99,60
204	552020 (MTSN 6 Lima Puluh Kota)	973,368,000	951,355,723	22,012,277	97,74

No	Kode / Nama Satuan Kerja	Paga	Rehabilitasi Orpi	Siswa	% Rehabilitasi Anggaran
205	052033 MTSN 5 Lina Pulau Kota	796,697,000	796,787,007	5,909,003	99.38
206	061062 MTSN 7 Lina Pulau Kota	337,537,000	337,428,160	308,800	99.97
XVII	Kementerian Agama Kota Payakumbuh	73,012,609,000	69,906,871,174	3,944,097,626	96.83
207	302202 MTSN 1 Kota Payakumbuh	1,431,660,000	1,431,044,000	621,010	99.96
208	418091 Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh	65,083,420,000	62,124,486,367	2,958,933,733	95.45
209	418092 Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh	623,432,000	578,531,720	48,900,280	92.48
210	418093 Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh	575,743,000	575,519,470	201,530	99.96
211	418096 Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh	111,488,000	111,368,700	119,300	99.99
212	418105 MAN 2 Kota Payakumbuh	2,232,666,000	2,209,617,092	23,048,008	98.97
213	424132 MAN 1 Kota Payakumbuh	1,318,645,000	1,317,015,720	1,629,280	99.88
214	552962 MTSN 2 Kota Payakumbuh	1,219,013,000	1,214,818,558	5,061,442	99.78
215	601810 MAN 3 Kota Payakumbuh	415,093,000	408,416,787	7,576,213	98.18
XVIII	Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Mentawai	24,393,651,000	26,749,879,605	2,357,928,605	109.67
216	601717 MTSN 1 Kepulauan Mentawai	429,620,000	429,620,000	-	100.00
217	601721 MTSN 2 Kepulauan Mentawai	412,820,000	412,880,000	270,000	99.93
218	650058 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Mentawai	22,608,627,000	25,054,770,605	2,446,143,605	110.82
219	650059 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Mentawai	936,668,000	536,691,000	57,975,000	90.28
220	650060 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Mentawai	141,207,000	124,570,000	16,637,000	88.21
221	650061 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Mentawai	42,000,000	42,000,000	-	100.00
222	650063 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Mentawai	60,605,000	60,234,000	400,000	99.24
223	650064 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Mentawai	100,016,000	87,361,000	12,655,000	87.35
XIX	Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya	69,578,118,000	69,181,679,211	3,397,058,689	97.24
224	551722 MTSN Dharmasraya	974,823,000	971,701,600	121,400	99.99
225	554807 MAN Dharmasraya	637,543,000	635,764,050	1,578,110	99.73
226	663949 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya	68,656,730,000	65,307,113,063	3,259,616,932	97.30

No	Kode / Nama Satuan Kerja	Paga	Refund Orpi	Siswa	% Refund Anggaran
227	661950 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya	1,405,511,000	1,271,031,463	134,517,532	90.43
228	661951 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya	797,539,000	797,193,783	345,213	99.98
229	661952 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya	106,332,000	103,272,500	3,079,500	99.99
XX	Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Barat	132,172,074,890	116,261,305,735	5,918,668,275	95.16
230	418017 MTSN 1 Pesisir Barat	454,734,000	454,734,000	-	100.00
231	424000 MAN 1 Pesisir Barat	1,162,408,000	1,156,098,000	6,310,000	99.48
232	424891 MTSN 2 Pesisir Barat	930,680,000	926,127,530	4,552,470	99.31
233	552975 MTSN 3 Pesisir Barat	816,890,000	810,033,600	6,856,400	99.19
234	553750 MTSN 4 Pesisir Barat	1,306,133,000	1,302,318,320	3,814,680	99.71
235	662038 MAN 4 Pesisir Barat	474,793,000	468,031,500	6,761,500	98.38
236	661960 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Barat	109,110,000,000	103,829,759,075	5,280,226,925	94.90
237	661961 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Barat	1,759,022,000	1,518,803,000	240,219,000	86.31
238	661962 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Barat	1,453,808,000	1,437,553,652	17,734,548	98.78
239	661964 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Barat	130,372,000	114,330,043	16,041,957	87.76
240	660193 MAN 5 Pesisir Barat	393,647,000	380,944,783	5,702,213	96.94
241	660970 MTSN Pesisir Barat	302,010,000	301,104,500	9,825,500	99.40
242	661285 MAN 6 Pesisir Barat	345,792,000	342,118,000	3,674,000	98.94
243	574171 MTSN 6 Pesisir Barat	361,690,000	456,470,800	8,825,100	98.19
244	574188 MTSN 5 Pesisir Barat	526,618,000	526,618,000	-	100.00
245	575858 MAN 3 Pesisir Barat	730,450,000	722,650,000	7,800,000	98.93
246	575862 MAN 2 Pesisir Barat	1,275,306,000	1,275,306,000	-	100.00

Sumber : Tim Kerja Keuangan diambil dari Aplikasi OMSPAN Kemendagri Per 31 Desember 2025

Sedangkan pagu dan realisasi anggaran pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 3.65 : Capaian Kinerja Anggaran
Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025**

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)			% Realisasi Anggaran
		Pagu	Realisasi	Sisa	
1	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	14.953.948.000	14.219.132.690	624.816.310	95,79
5620	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	60.000.000	60.000.000	-	100,00
2104	Pengeolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	8.309.761.000	7.810.753.911	499.007.089	93,99
2122	Pengeolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	334.558.000	329.565.834	4.992.166	98,51
2123	Pengeolaan dan Pembinaan Pentrangan Agama Islam	660.519.000	649.903.803	10.615.197	98,39
2124	Pengeolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	827.442.000	809.063.176	18.378.824	97,78
2137	Pengeolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	403.000.000	391.043.725	11.956.275	97,03
2140	Pengeolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	85.300.000	85.074.000	226.000	99,74
2143	Pengeolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	65.000.000	65.000.000	-	100,00
2145	Pengeolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha	140.120.000	133.120.000	7.000.000	95,00
2126	Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	16.380.000	16.338.405	41.595	99,75
2147	Pelayanan Haji Dalam Negeri	18.789.000	18.334.061	454.939	97,58
2148	Pembinaan Haji	3.933.060.000	3.860.935.775	72.144.225	98,17
2	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	16.670.070.000	16.219.896.220	450.183.780	97,30
2128	Pengeolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam	890.000.000	889.990.000	10.000	100,00
2129	Pengeolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	15.594.590.000	15.144.416.220	450.173.780	97,11
2136	Pengeolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	121.050.000	121.050.000	-	100,00
4012	Pengeolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha	64.430.000	64.430.000	-	100,00
3	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	68.020.896.000	67.969.510.320	51.385.680	99,92
2127	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	14.769.913.000	14.719.439.300	50.473.700	99,66
2133	Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	51.432.756.000	51.431.903.300	882.700	100,00
4433	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam	1.554.000.000	1.554.000.000	-	100,00
4434	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen	29.000.000	28.987.000	13.000	99,96
4435	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik	145.197.000	145.180.720	16.280	99,99
4437	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha	90.000.000	90.000.000	-	100,00
4	Program Dukungan Manajemen	38.617.217.000	36.748.892.322	1.868.414.678	95,16
2098	Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN			-	
2099	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	68.160.000	65.030.000	3.130.000	95,41
2100	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	23.636.946.000	23.376.621.017	260.324.983	98,90
2101	Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana			-	
2102	Pembinaan Administrasi Perencanaan			-	
2103	Pembinaan Administrasi Umum	4.550.376.000	4.130.982.548	419.393.452	90,78
2106	Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	71.825.000	53.001.619	18.823.381	73,79
2125	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Islam	750.054.000	739.481.891	10.572.109	98,59
2135	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	673.193.000	655.419.299	17.773.701	97,36
2138	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Kristen	54.500.000	36.499.025	18.000.975	66,97
2141	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Katolik	144.364.000	139.254.000	5.110.000	96,46
5102	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Badan Katolik	108.556.000	106.303.032	2.252.968	97,92

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)			% Realisasi Anggaran
		Pagu	Realisasi	Sisa	
2144	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu	183.910.000	182.946.600	963.400	99,48
5105	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha	214.105.000	214.104.900	100	100,00
2150	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	1.129.542.000	1.047.291.268	82.250.732	92,72
5100	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	178.030.000	170.300.333	7.729.667	95,66
6708	Dukungan Manajemen Pendidikan	6.853.656.000	3.831.566.790	1.022.089.210	85,08
Total		138.162.132.000	133.939.714.236	4.222.417.764	96,94

Sumber : Tim Kerja Keuangan diambil dari Aplikasi OMSPAN Kemenkeu Per 31 Desember 2025

Dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2024 (97,74%), realisasi anggaran tahun 2025 (96,91%) mengalami penurunan sebesar -0,8%.

Tabel 3.65 : Perbandingan Capaian Kinerja Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024-2025

Tahun	Anggaran (Rp_			% Realisasi Anggaran
	Pagu	Realisasi Anggaran	Sisa	
2024	219.666.193.000	214.691.581.801	4.974.611.199	97,74
2025	138.162.132.000	133.939.714.236	4.222.417.764	96,94

Sumber : Tim Kerja Keuangan diambil dari Aplikasi OMSPAN Kemenkeu Per 31 Desember 2025

B.1 Kendala Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025

Dalam pelaksanaan program dan anggaran tahun 2025, terdapat beberapa kendala meliputi Perjanjian Kinerja PERKIN Tahun 2025, tidak mengacu pada Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat 2025-2029, serapan belanja modal/proyek infrastruktur, kendala teknis-administratif seperti akurasi RPD (Rencana Penarikan Dana) dan penyesuaian sistem SAKTI serta kebijakan efisiensi belanja Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang membatasi kegiatan K/L

1. Perjanjian Kinerja PERKIN Tahun 2025, tidak mengacu pada Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2025-2029.

Atas permasalahan ini telah dilakukan percepatan penyelesaian penyusunan Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2025-2029 berpedoman pada Renstra Kementerian Agama, 2025-2029 yang ditetapkan berdasarkan PMA Nomor 17 Tahun 2025 tanggal 22 November 2025 dan mengajukan revisi terhadap Perjanjian Kinerja PER KIN 2025 mengacu pada SK Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Nomor 690 Tahun 2025 tentang Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2025-2029 pada Biro Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Agama

2. Tantangan Serapan dan Belanja Modal

Penyerapan anggaran sering terlambat pada semester I, terutama pada proyek modal, yang menumpuk di akhir tahun. Kebijakan penahanan belanja strategis oleh pemerintah untuk menjaga fiskal juga memperlambat realisasi.

3. Efisiensi Belanja Inpres Nomor 1 Tahun 2025

Kebijakan efisiensi menyebabkan banyak kegiatan K/L tidak dapat terlaksana, yang memengaruhi penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

4. Kendala Administratif dan Tekni

- Halaman III DIPA. Deviasi yang besar akibat ketidaksesuaian antara RPD dan realisasi, terutama pada belanja pegawai gaji CPNS/PPPK baru dan gaji ke-13.
- Pengelolaan UP/TUP. Banyak satuan kerja satker mengajukan *revolving* uang persediaan tidak tepat waktu/jumlah.
- Sistem SAKTI. Pengembangan sistem pada awal tahun sempat memengaruhi layanan transaksi keuangan.

5. Risiko Akhir Tahun.

Potensi risiko operasional seperti keterlambatan pengajuan SPM, kesalahan input, hingga risiko *fraud* proyek fiktif/penggelembungan harga meningkat di akhir tahun anggaran

Upaya untuk mempercepat serapan anggaran tahun 2025, dilakukan melalui pemetaan terhadap langkah-langkah yang akan dilakukan agar target serapan anggaran dapat dicapai, antara lain

Tabel 3.66 : Pemetaan Langkah Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran 2025

No	ASPEK	ISU STRATEGIS	UPAYA YANG DILAKUKAN
1	Rencana pada Halaman III DIPA	Penyerapan anggaran tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan	Melakukan percepatan penyerapan anggaran utamanya di bulan November yang merupakan akhir dari triwulan IV sesuai dengan target rencana yang tertuang dalam halaman III DIPA serta melakukan revisi dan penyesuaian RPD pada halaman III DIPA ke triwulan berikutnya
2	Dana belum terikat/ belum dikontraskan	Potensi sisa anggaran berupa dana yang tidak terikat masih besar	Melakukan proses pengadaan dan perikatan/ kontrak barang/ jasa khususnya pada belanja barang dan modal
3	Revisi DIPA	Terdapat Blokir terutama anggaran yang tidak termasuk dalam blokir automatic adjustmen	Melengkapi data dokumen pendukung untuk persyaratan pembukaan blokir
4	Pelaksanaan proses barang dan jasa	Pelaksanaan lelang yang belum optimal dan tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan	Mengoptimalkan UKPBJ dalam percepatan pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa
5	Penjadwalan dan pelaksanaan kegiatan	Tidak tersusunnya jadwal kegiatan yang mengacu pada tingkat penyerapan anggaran secara memadai sehingga sulit dilakukan langkah-langkah percepatan	Satker menjaga komitmen dan konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan pembayarannya
6	Pembangunan Gedung SBSN	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan	Melakukan pemantauan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengidentifikasi permasalahan dan melakukan tindakan penyelesaian segera

C. Capaian Kinerja Mendukung Asta Protas Kementerian Agama Berdampak

Asta Protas Kementerian Agama Berdampak adalah 8 program prioritas Kementerian Agama RI 2025–2029 yang diluncurkan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar untuk meningkatkan kerukunan, layanan keagamaan, pendidikan, dan kesejahteraan umat melalui tata kelola digital. Program ini berfokus pada dampak nyata, inovasi pelayanan, dan dukungan terhadap Asta Cita Presiden. Capaian kinerja mendukung Asta Protas ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.67 : Kegiatan Mendukung Asta Protas Menteri Agama

No	Asta Protas Menteri Agama	Bentuk Kegiatan
1	Kerukunan dan cinta kemutusiaan	1. AMAL Awali Morning Dengan Do'a Agar Lancar : mengawali aktifitas di tempat kerja dengan doa bersama yang dipandu oleh rohaniwan masing-masing agama. 2. KARENA Kamis Rezeki Nyata Antar Sesama: donasi uang dari ASN Kementerian Agama pada hari Kamis, ditukarkan dengan bahan-bahan makanan pokok seperti beras dan telur, dan langsung didistribusikan pada hari itu juga kepada masyarakat yang membutuhkan
2	Ekoteologi	1. BERSERI Bersih-Bersih Rabu Sehat, Indah, dan Rapi: suatu gerakan membersihkan dan merapikan tempat kerja masing-masing ASN, dilaksanakan setiap hari Rabu setelah senam pagi 2. PEDULI Pegawai Hijau untuk Lingkungan Lestari: merupakan aksi yang dilakukan oleh ASN Kementerian Agama, berupa membawa tanaman hias untuk ditempatkan di lingkungan tempat kerja, serta memelihara dan merawatnya secara berkesinambungan. 3. CATIN NAMPAK Calon Pengantin Menanam dan Berdampak: merupakan inovasi layanan pra-nikah berbasis ekoteologi, yakni mengajarkan pasangan untuk menanam tumbuhan sebagai simbol komitmen menjaga bumi dan keluarga. Aksi ini dalam bentuk menanam pohon produktif di sekitar tempat tinggal atau tempat ibadah calon pengantin bersangkutan. 4. GEMES BERSERI Gerakan Madrasah Mengelola Sampah, Sehat dan Berteknologi: merupakan langkah nyata untuk menanamkan kesadaran ekologis di madrasah. Aksi ini mengintegrasikan pendidikan lingkungan berbasis nilai Islam dengan teknologi sederhana dalam pengelolaan sampah dan kesehatan lingkungan madrasah. Bentuk kegiatannya adalah: • Pelatihan pengelolaan sampah dengan teknologi sederhana komposter, biopori, bank sampah digital. • Aksi madrasah hijau dan festival inovasi ekoteologi. 5. Kolaborasi lintas instansi: Dinas Lingkungan Hidup, Balai Diklat, dan Perguruan Tinggi Keagamaan
3	Layanan keagamaan berdampak	Sinergi Layanan Nikah dengan Layanan Dokumen Kependudukan: merupakan aksi mensinergikan layanan nikah pada KUA dengan penerbitan dokumen kependudukan. Secara bertahap. Aksi ini dilakukan pada beberapa KUA dengan terlebih dahulu berkolaborasi dengan OPD Catatan Sipil dan Kependudukan di Kabupaten/Kota setempat.

No	Asta Protas Menteri Agama	Bentuk Kegiatan
4	Pendidikan unggul, ramah dan terintegrasi	SIGMA Sinergi dan Integrasi Ilmu Guru Madrasah: bertujuan menyatukan ilmu pengetahuan dan nilai Islam agar pembelajaran di madrasah lebih holistik dan kontekstual. Bentuk kegiatannya adalah: a. Pelatihan integrasi sains dan Islam bagi guru. b. Pengembangan modul pembelajaran integrative. Kompetisi riset sains islami antar madrasah
5	Pesantren berdaya	LPQ BERSINAR Lembaga Pendidikan Quran Berdampak, Berprestasi, dan Bersinergi: merupakan upaya penguatan lembaga pembelajaran Al-Qur'an agar berdaya saing dan berkontribusi terhadap masyarakat. Bentuk kegiatannya adalah: a. Pelatihan dan sertifikasi guru LPQ. b. Lomba-lomba tahfiz dan tilawah tingkat provinsi. c. Pembentukan BKS LPQ Sumatera Barat
6	Pemberdayaan ekonomi umat	BERANI Bedah Rumah dan Bina Penghuni: adalah gerakan sosial keagamaan yang mengintegrasikan perbaikan rumah tidak layak huni dengan pembinaan keagamaan dan pemberdayaan masyarakat. Tahapannya adalah: 1. Identifikasi rumah tidak layak huni. 2. Pembinaan penghuni oleh penyuluh agama. 3. Kolaborasi dengan Baznas, LAZ, dan pemerintah daerah. 4. Pelaksanaan bedah rumah.
7	Pemberdayaan rumah ibadah	Pengembangan Masjid Ramah Bertujuan untuk mewujudkan masjid yang modern, profesional, dan berdaya guna bagi masyarakat luas. Kategori Masjid Ramah yaitu: 1. Masjid Ramah Anak MRA Menyediakan ruang aman, nyaman, kreatif, dan rekreatif untuk kegiatan positif anak-anak. 2. Masjid Ramah Difabel dan Lansia Memiliki fasilitas dan aksesibilitas yang mendukung kenyamanan penyandang disabilitas dan lansia. 3. Masjid Ramah Lingkungan (MRL) Mengehendakkan konstruksi dan arsitektur yang ramah lingkungan. 4. Masjid Ramah Keragaman Mendorong inklusivitas dan toleransi antarumat beragama dan berbagai latar belakang. 5. Masjid Ramah Dhuafa dan Musafir Memberikan perhatian khusus dan bantuan bagi fakir miskin serta musafir.
8	Digitalisasi tatakelola	1. APIK ASN Pembelajar untuk Inovasi dan Kompetensi: merupakan aksi kegiatan pembelajaran secara daring oleh ASN Kementerian Agama dengan materi-materi yang diutamakan terkait dengan pemanfaatan IT, seperti pengelolaan Aplikasi Srikandi, Aplikasi SI-ASN, penggunaan software Canva dan CapCut. 2. PETARUNG KEREN Pelayanan Terpadu Unggul Ramah Kelompok Rentan: merupakan pengembangan aplikasi layanan digital pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

Penjelasan

1. Ekoteologi = Jaga Kelestarian Lingkungan

Ditahun 2025. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat telah berhasil menanam 2.080 bibit pohon matoa di lingkungan satuan kerja jajaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

Gambar 3.13 : Penanaman Pohon Matoa di Halaman MAN 2 Kota Padang



<https://sumbar.kemenag.go.id/berita/post/siap-sukseskan-gerakan-satu-juta-pohon-kakanwil-optimis-madrasah-sumbar-mampu-jaga-kelestarian-lingkungan>

2. Pemberdayaan Ekonomi Umat

Program BERANI dilaksanakan dengan dana Rp. 20 juta per rumah yang bersumber dari zakat ASN Kementerian Agama melalui UPZ Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, bekerjasama dengan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat.

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat telah memetakan 118 rumah di seluruh Kabupaten/ Kota sebagai sasaran program BERANI. Setiap rumah akan menjadi pusat pembinaan keagamaan bagi 20 Kepala Keluarga KK disekitarnya, sehingga lebih dari 3.600 KK yang akan diberdayakan

Ditahun 2025, program perdana BERANI dilaksanakan di Kecamatan Pauh Kota Padang. Penerima manfaat pertama program ini Ismawati, seorang ibu tunggal yang menghidupi empat anaknya dengan berjualan kue keliling. Kegiatan peluncuran, dihadiri Kepala Dinas Sosial Sumatera Barat, Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang, Syaifullah, Anggota DPRD Kota Padang, Kepala Bidang Penais Zawa beserta jajaran serata perangkat daerah setempat

Gambar 3.14 : Peluncuran Program BERANI Tahun 2025



<https://rri.co.id/asta-cita/1967825/wujudkan-asta-cita-kemenag-sumbar-luncurkan-program-inovatif-berani>

D. Analisis Efisiensi

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini, menyajikan analisis efisiensi penggunaan anggaran, waktu, dan SDM sebagai wujud komitmen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan. Efisiensi diukur dari perbandingan antara serapan anggaran dengan capaian kinerja utama. Langkah-langkah inovatif telah diambil untuk memastikan proses operasional berjalan dengan prinsip hemat dan efektif

1. Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja. Sepanjang tahun 2025, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk memaksimalkan hasil **output** dengan meminimalkan penggunaan input, baik berupa anggaran, sarana prasarana, maupun sumber daya manusia. Upaya efisiensi ini dilakukan bukan dengan mengurangi target kinerja, melainkan melalui perbaikan proses kerja, digitalisasi layanan, dan pengendalian anggaran yang lebih ketat, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi pemangku kepentingan.

2. Fokus Finansial

Dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan strategi penganggaran berbasis kinerja. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan mengukur selisih antara realisasi anggaran dengan capaian target kinerja. Fokus pada pengurangan biaya operasional yang tidak bernilai tambah dan mengalihkannya untuk kegiatan produktif. Pendekatan ini memastikan bahwa Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, tetap produktif dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat *cost-saving* dibandingkan tahun sebelumnya

3. Berbasis Operasional/SDM Fokus Optimalisasi

Optimalisasi kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana merupakan fokus utama dalam laporan kinerja tahun 2025. Melalui penerapan standar operasional prosedur SOP yang lebih ramping dan pemanfaatan teknologi informasi, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, berhasil mempercepat waktu pelayanan dan mengurangi pemborosan material. Evaluasi rutin terhadap penggunaan input staf dan teknologi bertujuan agar seluruh aset organisasi bekerja pada titik efisiensi tertingginya.

Nilai efisiensi atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2025, adalah :

$$\begin{aligned}\text{Nilai Efisiensi} &= \text{Capaian Kinerja} / \text{Realisasi Anggaran} \\ &= 100 / 96.94 \\ &= 1.03\end{aligned}$$

Biaya (input) yang kecil, digunakan untuk menghasilkan hasil (output) yang semakin tinggi

E. Tindak Lanjut Atas Saran Tahun 2024

Berkaitan dengan saran kebijakan atas pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran 2024, pada pelaksanaan tahun anggaran 2025 ini telah ditindak lanjuti sebagai mana tercantum pada table 3.68

Tabel 3.68 : Tindak Lanjut Atas Saran Tahun 2024

No	Permasalahan Utama	Kendala	Tindak Lanjut
1	Perencanaan	- Belum terpenuhinya data dukung dalam penyusunan RAK-KL, berdampak pada diblokirnya anggaran - Revisi anggaran pada tahun berjalan	Memperbaiki sistem perencanaan, melalui peningkatan sistem data dukung yang lengkap dan valid
2	Pelaksanaan Anggaran	- Penyerapan anggaran tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan - Tidak tersusunnya jadwal kegiatan yang mengacu pada tingkat penyerapan anggaran secara memadai	Melakukan percepatan penyerapan, melakukan revisi dan penyesuaian RPD pada halaman III DIPA pada triwulan berikutnya Meminta Kepala Bidang dan Pembimas serta PPK untuk menjaga komitmen dan konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan pembayarannya
3	Pelaporan Kinerja Anggaran	- Penginputan data pada aplikasi smart.kemenkeu.go.id hanya bisa dilakukan pada aplikasi SAKTI modul komitmen, sehingga hanya dilakukan oleh operator capaian output di Aplikasi SAKTI - Pelaporan pada aplikasi emonev Bappenas berkaitan dengan security system yang sering autoblokir sehingga mengharuskan operator untuk melakukan reset password berulang kali. - Aplikasi emonev Bappenas masih belum terintegrasi dengan aplikasi penganggaran dan pelaporan lainnya sehingga tidak bisa dilakukan update database secara otomatis.	Mengaktifkan kembali menu input data capaian output pada aplikasi SMART agar dapat diakses oleh operator SMART Melakukan bimbingan teknis dan evaluasi berkala untuk meningkatkan kualitas SDM Pelaporan SMART dan EMONEV satuan kerja.
4	Pelaporan Capaian Kinerja	Data dukung capaian kinerja belum tersedia	Meminta Pimpinan Unit Kerja dan PPK untuk segera menyampaikan laporan kegiatan paling lambat 2 hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan

F. Pergantian Pimpinan

Menteri Agama RI Nasaruddin Umar resmi melantik H. Mustafa MA, sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat yang ke 14, Rabu (12/11/2025), di Gedung Kementerian Agama, Jakarta., menggantikan H. Mahyuddin



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi atas pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di tahun 2025. Penyusunannya berdasarkan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama.

Laporan kinerja ini merupakan periode pelaporan tahun pertama dalam merefleksikan pelaksanaan Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Secara umum, capaian kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PERKIN) 2025 menunjukkan kinerja yang baik, terlepas dari masih ada beberapa hal yang menjadi kendala dan hambatan, baik dari internal maupun eksternal yang perlu mendapat perhatian dimasa datang

Berdasarkan pengukuran terhadap setiap indikator kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, menunjukkan bahwa persentase rerata capaian kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat sebesar **100%** atau kategori **BAIK**.

1. Capaian Kinerja Organisasi

Tabel 4.1 : Capaian kinerja mendukung tujuan Kementerian Agama, 2023-2025

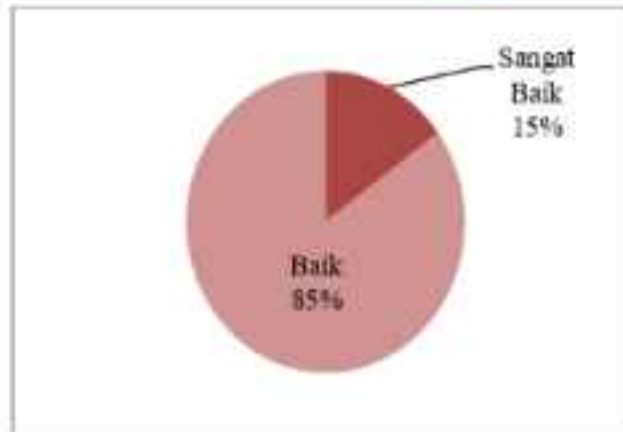
Mendukung Tujuan Kementerian Agama	2023		2024		2025	
	% Rata Rata Capaian Kinerja	Kategori Penilaian	% Rata Rata Capaian Kinerja	Kategori Penilaian	% Rata Rata Capaian Kinerja	Kategori Penilaian
Tujuan 1	100	Baik	91,67	Baik	100	Baik
Tujuan 2	96,3	Baik	120,26	Sangat Baik	100	Baik
Tujuan 3	88,9	Baik	132,65	Sangat Baik	100	Baik
Tujuan 4	96,6	Baik	88,63	Baik	98,00	Baik
Tujuan 5	98,0	Baik	99,18	Baik	99,62	Baik
% Rata Rata Capaian Kinerja	95,96	Baik	106,478	Sangat Baik	100	Baik

Penjelasan

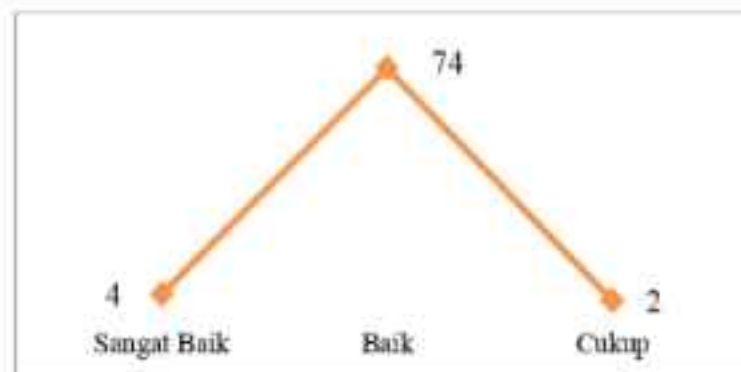
- Persentase rata rata capaian kinerja mendukung tujuan 1, 2 dan 3 Kementerian Agama mencapai 100% sedangkan persentase rata rata capaian kinerja mendukung tujuan 4 dan 5, masing masingnya 98% dan 99.62%
- Capaian kinerja tahun 2025 lebih baik jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun 2023.
- Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024, capaian kinerja tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 6,478%

d. Capaian kinerja 20 Sasaran Kegiatan (SK) dan 80 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

- 1) Dari 20 SK, terdapat 3 SK (15%) yang persentase rata rata capaian kinerjanya **sangat baik** sedangkan 17 SK (85%) lainnya **baik**



- 2) Dari 80 IKSK, terdapat 4 IKSK (5%) yang persentase raata rata capaian kinerjanya **sangat baik**. 74 IKSK (92%) capaian kinerjanya **baik** dan 2 IKSK capaian kinerja nya **cukup**



2. Capaian Kinerja Anggaran

a. Capaian Kinerja Anggaran Saruan Kerja Jajaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

- 1) Total anggaran seluruh Satuan Kerja Jajaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, semula berjumlah **Rp. 1.720.523.479.000,-** (satu trilyun, tujuh ratus dua puluh milyar, lima ratus dua puluh tiga juta, empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), meningkat menjadi **Rp. 1.983.853.114.000,-** (satu trilyun sembilan ratus delapan puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus empat belas ribu rupiah).
- 2) Peningkatan anggaran sebanyak **Rp. 263.329.635.000,-** (dua ratus enam puluh tiga milyar, tiga ratus dua puluh sembilan juta, enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Tambahan anggaran ini diprioritaskan untuk pemenuhan tunjangan profesi guru (TPG) atau tunjangan kinerja guru, khususnya guru bukan ASN pada RA dan Madrasah, termasuk pemberian tunjangan insentif guru bukan ASN sebesar Rp250.000 per bulan yang dibayarkan secara bertahap.
- 3) Sampai akhir pelaksanaan tahun anggaran 2025, terealisasi sebesar **Rp 1.898.557.053.558** (satu trilyun delapan ratus sembilan puluh lima milyar, lima ratus lima puluh tujuh juta, lima puluh tiga ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), realisasi anggaran mencapai **95.70%**. Sisa anggaran sebanyak **Rp. 85.296.060.**

442.- (delapan puluh lima milyar, dua ratus sembilan puluh enam juta, enam puluh ribu empat ratus empat puluh dua rupiah)

b. Capaian Kinerja Anggaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

Anggaran 2025 (Rp)			% Realisasi Anggaran
Pagu	Realisasi	Sisa	
138.162.132.00	133.939.714.236	4.222.417.764	96,94

Dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2024, realisasi anggaran tahun 2025 mengalami penurunan sebesar **-0.80%**.

Tahun	Anggaran (Rp)			% Realisasi Anggaran
	Pagu	Realisasi	Sisa	
2024	219.666.193.000	214.691.581.801	4.974.611.199	97,74
2025	138.162.132.000	133.939.714.236	4.222.417.764	96,94

3. Capaian Kinerja Mendukung Asta Protas Kementerian Agama Berdampak

Dukungan terhadap pelaksanaan Asta Protas Kementerian Agama Berdampak, dijabarkan dalam berbagai kegiatan sebagai berikut

No	Asta Protas Menteri Agama	Bentuk Kegiatan
1	Kerukunan dan cinta kemenuasiaan	- AMAL Awali Moring Dengan Do'a Agar Lancar : mengawali aktifitas di tempat kerja dengan doa bersama yang dipandu oleh rohaniwan masing-masing agama. - KARENA Kamis Rezeki Nyata Antar Sesama: donasi uang dari ASN Kementerian Agama pada hari Kami ditukarkan dengan bahan-bahan makanan pokok seperti beras dan telur, dan langsung didistribusikan pada hari itu juga kepada masyarakat yang membutuhkan
2	Ekoteologi	- BERSERI Bersih-Bersih Rabu Sehat, Indah, dan Rapi: suatu gerakan membersihkan dan merapikan tempat kerja masing-masing ASN, dilaksanakan setiap hari Rabu setelah senam pagi - PEDULI Pegawai Hijau untuk Lingkungan Lestari: merupakan aksi yang dilakukan oleh ASN Kementerian Agama, berupa membawa tanaman hias untuk ditempatkan di lingkungan tempat kerja, serta memelihara dan merawatnya secara berkesinambungan. - CATIN NAMPAK Calon Pengantin Menanam dan Berdampak: merupakan inovasi layanan pra-nikah berbasis ekoteologi, yakni mengajarkan pasangan untuk menanam tumbuhan sebagai simbol komitmen

No	Asta Protas Menteri Agama	Bentuk Kegiatan
		menjaga bumi dan keluarga. Aksi ini dalam bentuk menanam pohon produktif di sekitar tempat tinggal atau tempat ibadah calon pengantin bersangkutan 4. GEMES BERSERI Gerakan Madrasah Mengelola Sampah. Sehat dan Berteknologi: merupakan langkah nyata untuk menanamkan kesadaran ekologis di madrasah. Aksi ini mengintegrasikan pendidikan lingkungan berbasis nilai Islam dengan teknologi sederhana dalam pengelolaan sampah dan kesehatan lingkungan madrasah. Bentuk kegiatannya adalah: • Pelatihan pengelolaan sampah dengan teknologi sederhana komposter, biopori, bank sampah digital. • Aksi madrasah hijau dan festival inovasi ekoteologi. 5. Kolaborasi lintas instansi: Dinas Lingkungan Hidup, Balai Diklat, dan Perguruan Tinggi Keagamaan
3	Layanan keagamaan berdampak	Sinergi Layanan Nikah dengan Layanan Dokumen Kependudukan: merupakan aksi mensinergikan layanan nikah pada KUA dengan penerbitan dokumen kependudukan. Secara bertahap. Aksi ini dilakukan pada beberapa KUA dengan terlebih dahulu berkolaborasi dengan OPD Catatan Sipil dan Kependudukan di Kabupaten/Kota setempat.
4	Pendidikan unggul, ramah dan terintegrasi	SIGMA Sinergi dan Integrasi Ilmu Guru Madrasah: bertujuan menyatukan ilmu pengetahuan dan nilai Islam agar pembelajaran di madrasah lebih holistik dan kontekstual. Bentuk kegiatannya adalah: a. Pelatihan integrasi sains dan Islam bagi guru. b. Pengembangan modul pembelajaran integrative c. Kompetisi riset sains islami antar madrasah.
5	Pesantren berdaya	LPQ BERSINAR Lembaga Pendidikan Quran Berdampak, Berprestasi, dan Bersinergi: merupakan upaya penguatan lembaga pembelajaran Al-Qur'an agar berdaya saing dan berkontribusi terhadap masyarakat. Bentuk kegiatannya adalah: a. Pelatihan dan sertifikasi guru LPQ. b. Lomba-lomba tahfiz dan tilawah tingkat provinsi c. Pembentukan BKS LPQ Sumatera Barat
6	Pemberdayaan ekonomi umat	BERANI Bedah Rumah dan Bina Penghuni: adalah gerakan sosial keagamaan yang mengintegrasikan perbaikan rumah tidak layak huni dengan pembinaan keagamaan dan pemberdayaan masyarakat. Tahapannya adalah: 1. Identifikasi rumah tidak layak huni. 2. Pembinaan penghuni oleh penyuluh agama. 3. Kolaborasi dengan Baznas, LAZ, dan pemerintah daerah. 4. Pelaksanaan bedah rumah

No	Asta Protas Menteri Agama	Bentuk Kegiatan
7	Pemberdayaan rumah ibadah	Pengembangan Masjid Ramah bertujuan untuk mewujudkan masjid yang modern, profesional, dan berdaya guna bagi masyarakat luas. Kategori Masjid Ramah yaitu: 1. Masjid Ramah Anak MRA. Menyediakan ruang aman, nyaman, kreatif, dan rekreatif untuk kegiatan positif anak-anak. 2. Masjid Ramah Difabel dan Lansia. Memiliki fasilitas dan aksesibilitas yang mendukung kenyamanan penyandang disabilitas dan lansia. 3. Masjid Ramah Lingkungan (MRL). Mengedepankan konstruksi dan arsitektur yang ramah lingkungan. 4. Masjid Ramah Keragaman. Mendorong inklusivitas dan toleransi antarumat beragama dan berbagai latar belakang. 5. Masjid Ramah Dhuafa dan Musafir. Memberikan perhatian khusus dan bantuan bagi fakir miskin serta musafir.
8	Digitalisasi tatakelola	1. APIK ASN Pembelajar untuk Inovasi dan Kompetensi: merupakan aksi kegiatan pembelajaran secara daring oleh ASN Kementerian Agama dengan materi-materi yang diutamakan terkait dengan pemanfaatan IT, seperti pengelolaan Aplikasi Srikandi, Aplikasi SI-ASN, penggunaan software Canva dan CapCut. 2. PETARUNG KEREN Pelayanan Terpadu Unggul Ramah Kelompok Rentan: merupakan pengembangan aplikasi layanan digital pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

4. Nilai Efisiensi

Nilai efisiensi atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2025, adalah :

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Efisiensi} &= \text{Capaian Kinerja} / \text{Realisasi Anggaran} \\
 &= 100 / 96.94 \\
 &= 1.03
 \end{aligned}$$

Biaya (input) yang kecil, digunakan untuk menghasilkan hasil (output) yang semakin tinggi

Padang, 19 Januari 2026
Kepala Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Barat



Mustafa

LAMPIRAN

Perkin 2025 Teknokrat (Awal)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahyudin
Jabatan : Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Ali Ramdhani
Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian Agama

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Muhammad Ali Ramdhani

Tangerang, 18 Desember 2024

Pihak Pertama,

Mahyudin

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Jaminan Kebebasan Beribadah	a. Persentase rekomendasi <i>Early Warning System</i> yang di tindaklanjuti	60 %
		b. Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi	70
2.	Meningkatnya kualitas penyiaran agama yang berdampak pada spiritual dan sosial dan Event Keagamaan	a. Nilai kesalehan umat beragama pada kanwil dengan kategori tinggi	87 %
		b. Persentase peningkatan jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/perayaan agama bernafaskan agama (MTQ, Pesparani, Pesparawi, Utsawa Dharmagita, Swayamvara Tripitaka Gatha)	89 %
		c. Persentase penylar agama yang memperoleh sertifikat kompetensi.	40 %
3.	Peningkatan kemitraan dengan tokoh dan lembaga keagamaan	Persentase tokoh agama, lembaga agama dan ormas keagamaan yang dibina	92,5 %
4.	Meningkatnya sarana pendukung pelayanan keagamaan	a. Persentase peningkatan sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	88,33 %
		b. Persentase peningkatan kitab suci yang disediakan	50 %
		c. Persentase peningkatan buku keagamaan yang disediakan	50 %
		d. Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	70 %
5.	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama	a. Persentase Mou, PKS dan bentuk kerjasama penyuluhan yang ditindaklanjuti	100 %
		b. Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	70,75 %
		c. Persentase pemenuhan jumlah penyuluh pada tiap jenjang fungsional	74,33 %
6.	Meningkatnya akses Catin terhadap layanan bimbingan perkawinan	a. Presentase calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan	75 %
		b. Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah	65 %

7.	Meningkatnya partisipasi keluarga dalam layanan bimbingan keluarga	Persentase keluarga mendapatkan bimbingan keluarga sakinah/ bahagia/ sukinah/ kristiani/ hittasukhaya	76,66 %
8.	Meningkatnya kualitas pelayanan KUA	a. Perentase KUA yang direvitalisasi	100 %
		b. Persentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana	100 %
		c. Persentase KUA yang menyelenggarakan layanan inovatif dan berbasis digital	50 %
		d. Persentase penghulu yang memenuhi komposisi kebutuhan KUA	80 %
9.	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar	95 %
10.	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	a. Persentase pusat pendaftaran dan pembatalan haji yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	30 %
		b. Tingkat kepuasan pusat pendaftaran dan pembatalan haji	75 %
11.	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	a. Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	90 %
12.	Meningkatnya kualitas penerimaan zakat dan wakaf/dana sumbangan/sosial keagamaan	a. Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan	60 %
		b. Persentase harta benda wakaf yang di kelola dan dikembangkan produktif	98 %
		c. Persentase kerjasama pengembangan pemanfaatan aset wakaf	98 %
13.	Meningkatnya Profesionalitas Lembaga Dana Sosial Keagamaan	a. Persentase Lembaga dana sosial keagamaan/Zakat yang sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan professional	98 %
		b. Persentase lembaga Zakat dan Wakaf yang dibina	100 %
14.	Meningkatnya pemerataan akses Pendidikan yang berkualitas	a. Persentase satuan pendidikan/ pesantren yang memenuhi Standar sarpras	78,5 %
		b. Persentase satuan pendidikan/ pesantren yang menyediakan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif	2,25 %

		c. Persentase peningkatan jumlah siswa/santri pada satuan pendidikan	35 %
		d. Persentase peningkatan jumlah siswa/santri pada satuan pendidikan daerah 3 T	3 %
		e. Persentase Anak Kelas 1 MI/Ula/ Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA)	55 %
		f. Persentase ATS yang mengikuti Program Pendidikan Kesetaraan (PPK) di Pondok Pesantren	3 %
		g. Persentase satuan pendidikan nonformal yang direvitalisasi	65 %
15.	Meningkatnya persentase penyelesaian pendidikan MA/Ulya/ SMTK/SMAK/Utama Widyalyaya/ sederajat	Persentase siswa dalam satu kohort yang lulus tepat waktu	82,5 %
16.	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	a. Persentase siswa yang mengikuti asesmen (AN)	87,5 %
		b. Persentase santri yang mengikuti Imtihan Wathani (IW)	44 %
		c. Indeks keberagamaan siswa pada madrasah/sekolah/widyalyaya/widya dharma	75 %
		d. Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa	63,33 %
17.	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang inovatif	a. Persentase satuan pendidikan/ pesantren yang menerapkan kurikulum yang berfokus pada kompetensi esensial, adaptif, dan kontekstual	62,5 %
		b. Persentase satuan pendidikan/ pesantren yang menerapkan kurikulum agama bermuatan moderasi beragama	97,5 %
		c. Persentase satuan pendidikan/ pesantren yang memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern	77,5 %
18.	Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu	a. Persentase PAUD/RA/Pratama Widyalyaya/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	50 %

		b. Persentase MI/SDTK/Adhi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	70 %
		c. Persentase MTs/SMPTK/Madyama Widyalyaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	75 %
		d. Persentase MA/SMTK/SMAK/Utama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	70 %
		e. Persentase Satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil asesmen minimal jayyid	25 %
		f. Persentase peserta didik pada pendidikan keagamaan/pesantren yang menyelesaikan pendidikan setara formal	40%
		g. Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	43,5 %
		h. Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	1,75 %
		i. Persentase lulusan pendidikan keagamaan dan pendidikan pesantren yang memperoleh rekognisi	60 %
19.	Meningkatnya kualitas pendidikan vokasi berbasis kerjasama	a. Persentase MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri	50 %
		b. Persentase MA Kejuruan dan MA Program Keterampilan yang meningkatkan life skill melalui program magang	50 %
20.	Menguatnya pendidikan karakter siswa	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	65 %
21.	Meningkatnya kualitas lingkungan belajar	a. Persentase satuan pendidikan Ramah Anak	55,5 %
		b. Persentase siswa yang memperoleh nilai karakter minimal baik	82,5 %
		c. Persentase satuan pendidikan yang memiliki kultur mutu kelembagaan.	60 %

22.	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan	a. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada madrasah yang bermuatan moderasi beragama	120
		b. Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina	222
23.	Menguatnya Implementasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI)	a. Persentase RA/PAUDQU/Pratama Widyalya/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang menerapkan program Holistik-Integratif	60 %
		b. Persentase PAUD/TK yang menerapkan kurikulum agama yang berfokus pada kompetensi esensial secara adaptif dan kontekstual	50 %
24.	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	a. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidik S1	85,33 %
		b. Persentase tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi pendidik S1	71,66 %
		c. Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	66,66 %
		d. Persentase tenaga kependidikan yang memperoleh sertifikat kompetensi	57,16 %
		e. Persentase pemenuhan kebutuhan Guru Pendidikan Agama pada satuan Pendidikan	56,6 %
		f. Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	42,5 %
		g. Persentase Kepala Madrasah/Sekolah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	40 %
		h. Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal baik	42,5
		i. Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah/Sekolah (AKP) minimal predikat terampil	45 %
		j. Persentase satuan pendidikan yang memiliki indikator kualitas pembelajaran dengan kategori baik	70 %
		k. Persentase Guru yang meningkat jenjang karir	25,5 %
		l. Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir.	25,25 %

25.	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	a. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75
		b. Persentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai standar	90 %
		c. Persentase satker yang memperoleh nilai tingkat kematangan penerapan manajemen risiko minimal 3	60%
		d. Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar dan tepat waktu	80%
		e. Persentase satuan kerja yang menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi	80%
		f. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90
		g. Persentase penyelesaian kerugian Negara pada Kementerian Agama	80 %
		h. Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	2 Dok
		i. Indeks Profesionalisme ASN	71
		j. Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	85 %
		k. Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	10 %
		l. Persentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	85 %
		m. Nilai Kepuasan Layanan (Langsung) Kepegawaian	100 %
		n. Persentase kasus hukum yang terselesaikan	100 %
		o. Persentase rekomendasi izin orang asing	100 %
		p. Persentase pemberitaan negatif tentang Kemenag yang discounter	100 %
		q. Jumlah viewer yang memanfaatkan Digital layanan Kementerian Agama	100.000
		r. Persentase layanan keagamaan dan pendidikan berbasis IT	75 %
		s. Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	90 %
		t. Persentase digitalisasi arsip yang mudah diakses	80 %

ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2025

Total Alokasi Anggaran Provinsi Sumatera Barat : Rp. 1.720.523.479.000

No.	Program / Kegiatan	Anggaran
1	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	45.892.556.000
	5620 Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	1.893.596.000
	2104 Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	19.374.584.000
	2122 Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	997.200.000
	2123 Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	12.584.000.000
	2124 Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	2.240.000.000
	2137 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	1.445.000.000
	2140 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	2.105.380.000
	2143 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	266.000.000
	2145 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha	429.170.000
	2126 Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	54.575.000
	2147 Pelayanan Haji Dalam Negeri	312.481.000
	2148 Pembinaan Haji	4.190.570.000
2	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	136.782.438.000
	2128 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam	840.000.000
	2129 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	134.851.588.000
	2136 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	863.850.000
	2142 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	55.000.000
	4012 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha	172.000.000
3	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	69.929.958.000
	2127 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	8.986.246.000
	2133 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	58.718.772.000
	4433 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam	1.554.000.000
	4434 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen	283.000.000
	4435 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik	237.940.000
	4437 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha	150.000.000
4	Program Dukungan Manajemen	1.467.918.527.000
	2098 Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	137.385.000
	2099 Pembinaan Administrasi Kepegawaian	339.914.000
	2100 Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	263.244.923.000
	2101 Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	744.362.000
	2102 Pembinaan Administrasi Perencanaan	690.009.000
	2103 Pembinaan Administrasi Umum	19.506.606.000
	2106 Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	316.594.000
	2125 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	8.329.222.000
	2135 Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	41.212.894.000

No.	Program / Kegiatan	Anggaran
2138	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	70.000.000
2141	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik	213.870.000
5102	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	163.524.000
2144	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu	233.100.000
5105	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha	245.800.000
2150	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	3.096.305.000
5100	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	230.000.000
5708	Dukungan Manajemen Pendidikan	1.129.144.019.000

Tangerang, 18 Desember 2024

Atasan Pimpinan Satuan Kerja
Muhammad Ali Ramdhani

Pimpinan Unit Kerja
Mulyono

PERKIN 2025 REVISI I



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 REVISI I

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mustafa

Jabatan : Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kamaruddin Amin

Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian Agama

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Jakarta, 21 Desember 2025

Pihak Pertama,

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2026
BIDANG AGAMA				
1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	1 Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi	Nilai	70,89
		2 Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	Persen	16,00
		3 Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Persen	30,40
		4 Persentase peningkatan audiens MTQ/ Pesparani/ Pesperawi/ Utsaawa Dhar mugita/ Swayam Vara Tripitaka Gatha	Persen	22,80
		5 Persentase peningkatan peserta event seni budaya	Persen	30,40
		6 Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Persen	76,00
2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	1 Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Persen	81,99
		2 Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Persen	1:5
		3 Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi	Persen	30,00
		4 Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pernikahan	Persen	12,14
		5 Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	Persen	15,00
		6 Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	Persen	16,63
		7 Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	Persen	2,38
		8 Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan	Persen	19,00
		9 Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah	Persen	19,00
		10 Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	Persen	14,73
		11 Persentase rekomendasi hasil pengawasan hafal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan	Persen	18,00

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2026
3	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	Persen	99,85
4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1 Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	Persen	52,63
		2 Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu	Nilai	75,00
5	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah	Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A),	Persen	
		a. Lembaga penyelenggara haji khusus;		75,00
		b. Lembaga penyelenggara umrah		85,00
6	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar	Persen	95 %
7	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	1 Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	Persen	90 %
		2 Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	Persen	100
BIDANG PENDIDIKAN				
8	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik	Persen	73,15
9	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	1 Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Persen	2,19
		2 Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	Persen	60,80
		3 Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren	Persen	0,71
		4 Persentase Anak Kelas 1 MI/SD /Adi Widyalyaya/Mula Dhamma sekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/ Taman Seminari/Pratama Widya Ilaya/ Nava Dhammassekha)	Persen	13,30
		5 Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	Persen	19,00

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2026
		6 Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	Persen	20,05
10	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	1 Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a Literasi membaca b Numerasi	Nilai	65,31 62,23
		2 Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Persen	83,00
		3 Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Persen	95,00
		4 Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Jumlah	500
		5 Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	Persen	0,71
		6 Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	Persen	93,00
		7 Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	Persen	61,75
		8 Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	Persen	1,75
		9 Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	Persen	14,25
		10 Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Persen	0,71
		11 Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Persen	49,40
		12 Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	Persen	41,50
11	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	1 Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	41,50
		2 Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	Persen	1 : 10
		3 Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Persen	29
		4 Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	28,74

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2026
		5 Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Persen	38,60
		6 Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	Persen	64,65
		7 Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	Persen	40,17
		8 Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan Kristen (AKP) minimal predikat terampil	Persen	68,40
		9 Persentase guru yang meningkat jenjang karir	Persen	1,44
		10 Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	Persen	24,01
		11 Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Persen	39,48
		12 Persentase rekomendasi pengaduan dan pemecatan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Persen	46,30
BIDANG TATA KELOLA				
12	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	90,00
13	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1 Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	Persen	72,68
		2 Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	Nilai	38,24
14	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	83,00
		2 Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persen	85,50
		3 Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Persen	92,49
		4 Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Persen	76,00
		5 Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Persen	93,58
15	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1 Indeks Profesionalisme ASN	Persen	76,58
		2 Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Persen	75,00

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2026
		3 Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/ inspiratif	Orang	6
16	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1 Persentase kasus hukum yang terselesaikan	Persen	87,03
		2 Persentase rekomendasi izin orang asing	Persen	78,50
17	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1 Persentase digitalisasi arsip dan mudah di akses	Persen	71,73
		2 Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	Persen	83,00
		3 Nilai layanan kesehatan	Persen	88,00
18	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	1 Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	Persen	89,48
		2 Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	Persen	18,00
19	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1 Indeks Pembangunan Statistik	Nilai	1,5
		2 Persentase data statistik yang dipublikasi	Persen	58
20	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan	1 Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	Persen	96,00
		2 Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama	Persen	1,8
		3 Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persen	16,00
		4 Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persen	16,00
		5 Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK	Persen	73,00
		6 Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra	Persen	67,76
		7 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bidang Pendidikan	Nilai	88,35

PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	45.892.556,000
	5620 Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	1.893.596.000
	2104 Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	19.374.584.000
	2122 Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	997.200.000
	2123 Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	12.584.000.000
	2124 Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	2.240.000.000
	2137 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	1.445.000.000
	2140 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	2.105.380.000
	2143 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	266.000.000
	2145 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha	429.170.000
	2126 Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	54.575.000
	2147 Pelayanan Haji Dalam Negeri	312.481.000
	2148 Pembinaan Haji	4.190.570.000
2	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	136.782.438,000
	2128 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam	840.000.000
	2129 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	134.851.588.000
	2136 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	863.850.000
	2142 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	55.000.000
	4012 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha	172.000.000
3	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	69.929.958,000
	2127 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	8.986.246.000
	2133 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	58.718.772.000
	4433 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam	1.554.000.000
	4434 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen	283.000.000
	4435 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik	237.940.000
	4437 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha	150.000.000
4	Program Dukungan Manajemen	1.467.918.527,000
	2098 Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	137.385.000
	2099 Pembinaan Administrasi Kepegawaian	339.914.000
	2100 Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	263.244.923.000
	2101 Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	744.362.000
	2102 Pembinaan Administrasi Perencanaan	690.009.000
	2103 Pembinaan Administrasi Umum	19.506.606.000
	2106 Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	316.594.000
	2125 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	8.329.222.000
	2135 Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	41.212.894.000
	2138 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	70.000.000
	2141 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik	213.870.000
	5102 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	163.524.000
	2144 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu	233.100.000
	5105 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha	245.800.000

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)
	2150 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	3.096.305.000
	5100 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Binas Kristen	230.000.000
	6708 Dukungan Manajemen Pendidikan	1.129.144.019.000



Atas Pimpinan Satuan Kerja

Kartawidjadin Amin

Pimpinan Satuan Kerja


D. Mustafa

Mulyono 67

18



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Kuini No. 79 B Padang, 2514 Telpn, (0751) 21686, Fax. (0751) 22583
website: <http://sumbar.kemenag.go.id>, email: kanwilsumbar@kemenag.go.id

Nomor : B-1/Kw.03/OT.01.2/04/2025 25 April 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Rangkap
Hal : Penyampaian Laporan Capaian Kinerja Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Triwulan I Tahun 2025

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
Cq. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana
di

Tempat

Dengan hormat, menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor : B-52/B.IV.2/OT.01.0/04/2025 tentang Penyampaian Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan arahan Sekretaris Jenderal pada rapat Pimpinan Eselon II Sekretariat Jenderal pada 21 April 2025, maka dengan ini kami sampaikan Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat sebagaimana terlampir

Demikian disampaikan, atas perhatiannya dihaturkan terima kasih.

Kepala,



Mahyudin

Tembusan :
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta.

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Kinerja	Beferingan	Data Dukung / Dokumentasi
			Kwarta	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pendukung pelayanan keagamaan	proses pelayanan pendaftaran yang dilakukan							
		2. Persentase peningkatan kitab suci yang dilakukan	50	Rp. 112.530.000	0%	Rp. -	0		
		3. Persentase peningkatan buku keagamaan yang dilakukan	50	Rp. 100.000.000	20%	Rp. -	50		https://drive.google.com/drive/folders/15t9v2Lw4fM6E7700Wj1J8b2rVv7Agm2?usp=sharing
		4. Persentase masjid/musholla bermerkifiat anah hitam	70	Rp. 185.000.000	0%	Rp. 9.000.000	0		https://drive.google.com/drive/folders/15t9v2Lw4fM6E7700Wj1J8b2rVv7Agm2?usp=sharing
5	Meningkatnya kualitas penyuluh agama	1. Persentase Masi, PAS dan tingkat kerjanya pemutihan yang dilakukan	100	Rp. 400.000.000	30%	Rp. -	20		https://drive.google.com/drive/folders/10461Wj1J8b2rVv7Agm2?usp=sharing
		2. Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	20,75	Rp. 1.522.880.000	20%	Rp. 300.880.000	20,27		https://drive.google.com/file/d/1J8b2rVv7Agm2/view?usp=sharing
		3. Persentase pemenuhan jumlah penyuluh pada tiap jenjang fungsional	74,33	Rp. -	74%	Rp. -	100		https://drive.google.com/drive/folders/107J8b2rVv7Agm2?usp=sharing
6	Meningkatnya akhlak Cati terhadap layanan bimbingan	1. Persentase nilai pengantar yang menunjukkan bimbingan perkawinan	75	Rp. -	22%	Rp. -	29,33		https://drive.google.com/drive/folders/107J8b2rVv7Agm2?usp=sharing

Dokumen ini telah dimunculkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Elektronik (BNSF), tidak dapat dihapus dan tidak dapat diubah.

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

No	Sumber Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Kinerja	Beban Kerja	Data Dukung / Dokumentasi
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	perkawinan								https://dhuatpftb1.basda.provsumbar.go.id/umrah.html
		2. Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah	40	Rp. -	40%	Rp. -	83,33		https://dhuatpftb1.basda.provsumbar.go.id/umrah.html
3	Meningkatnya partisipasi keluarga dalam layanan bimbingan keluarga	Persentase keluarga mendapatkan bimbingan keluarga sukma/ keluarga/ sukma/ krida/ keluarga	76,66	Rp. 243.520.000	34%	Rp. -	33,92		https://dhuatpftb1.basda.provsumbar.go.id/umrah.html
4	Meningkatnya kualitas pelayanan KIA	1. Persentase KIA yang direvisi	100	Rp. 9.800.000.000	7%	Rp. 7.290.000	7		https://dhuatpftb1.basda.provsumbar.go.id/umrah.html
		2. Persentase KIA yang memenuhi standar sarana dan prasarana	100	Rp. 334.380.000	15%	Rp. -	15		https://dhuatpftb1.basda.provsumbar.go.id/umrah.html
		3. Persentase KIA yang menerapkan layanan kearifan dan budaya digital	10	Rp. -	0%	Rp. -	0		https://dhuatpftb1.basda.provsumbar.go.id/umrah.html
		4. Persentase pengukuhan yang memenuhi komposisi kebutuhan KIA	50	Rp. 420.000.000	0%	Rp. -	0		https://dhuatpftb1.basda.provsumbar.go.id/umrah.html
5	Meningkatnya kualitas	5. Persentase pelayanan sukma/	85	Rp. 3.857.420.000	0%	Rp. 3.360.000	0		https://dhuatpftb1.basda.provsumbar.go.id/umrah.html

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penertiban Elektronik (BNPNE) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Elektronik (BPJPE).

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Kinerja	Selisihan	Data Dukung / Dokumentasi
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	peayanan (jumlah haji)	konsumsi, transportasi) (jumlah haji sesuai standar							http://www.kemendagri.go.id/ http://www.kemendagri.go.id/ http://www.kemendagri.go.id/
10	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1. Persentase proses pendaftaran dan pendaftaran haji yang memenuhi standar sesuai dan prosedur dan standar pelayanan	30	Rp 65.125.000	30%	Rp 960.000	100		http://www.kemendagri.go.id/ <a <="" a="" href="http://www.kemendagri.go.id/

		2. Tingkat kepuasan proses pendaftaran dan pendaftaran haji	75	Rp 71.400.000	75,8%	Rp 330.000	124,8		http://www.kemendagri.go.id/ <a <="" a="" href="http://www.kemendagri.go.id/

11	Meningkatnya kualitas pelayanan jumlah haji	1. Persentase proses haji yang menyelesaikan kinerja diatas 75	90	Rp 425.800.000	0%	Rp 75.339.900	0		http://www.kemendagri.go.id/ <a <="" a="" href="http://www.kemendagri.go.id/

12	Meningkatnya kualitas pelayanan paket dan Wakaf Dana Sumbangan Sosial Keagamaan	1. Persentase pelaksanaan program pendayagunaan paket dan pengembangan wakaf dalam pengembangan keagamaan dan peningkatan kesejahteraan	60	Rp 130.000.000	60%	Rp 4.340.000	100		http://www.kemendagri.go.id/ <a <="" a="" href="http://www.kemendagri.go.id/

		2. Persentase harta benda wakaf yang di kelola dan dikembangkan produktif	60	Rp -	0%	Rp -	0		http://www.kemendagri.go.id/ <a <="" a="" href="http://www.kemendagri.go.id/

		3. Persentase kerjasama pengembangan pemanfaatan aset wakaf	90	Rp 30.000.000	0%	Rp -	0		http://www.kemendagri.go.id/ <a <="" a="" href="http://www.kemendagri.go.id/

13	Meningkatnya Profesionalitas Lembaga Dana Sosial Keagamaan	1. Persentase lembaga dana sosial keagamaan/ paket yang sesuai prinsip syariah, akuntabel, dan profesional	90	Rp 50.000.000		Rp 490.000	0		http://www.kemendagri.go.id/ <a <="" a="" href="http://www.kemendagri.go.id/

		2. Persentase Lembaga Zakat dan Wakaf	100	Rp 200.000.000	87%	Rp 15.195.000	0		http://www.kemendagri.go.id/ <a <="" a="" href="http://www.kemendagri.go.id/

Disusun di Kota Padang, Sumatera Barat, pada tanggal 15 Januari 2025
yang ditanda-tangani dan dimeterai dengan stempel resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Kinerja	Selisihan	Data Bukti / Dokumentasi
			Kwarta	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Meningkatnya persiapan akses pendidikan yang berkualitas	1. Yang dilulus							
		1. Persentase satuan pendidikan/ pesantren yang memenuhi standar nasional	75,5	Rp 16.732.226.800	0,4%	Rp 140.238.471	0,8		https://dirjen.pendidikan.go.id/informasi/2025/03/20/2025032015041730360121/2025032015041730360121
		2. Persentase satuan pendidikan/ pesantren yang menyediakan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan khusus	2,25	Rp -	0,022 %	Rp -	1,82		https://dirjen.pendidikan.go.id/informasi/2025/03/20/2025032015041730360121/2025032015041730360121
		3. Persentase peningkatan jumlah siswa/santri pada satuan pendidikan	55	Rp -	0,3%	Rp -	25,71		https://dirjen.pendidikan.go.id/informasi/2025/03/20/2025032015041730360121/2025032015041730360121
		4. Persentase peningkatan jumlah siswa/santri pada satuan pendidikan di bawah 17	3	Rp -	2,18%	Rp -	356,32		https://dirjen.pendidikan.go.id/informasi/2025/03/20/2025032015041730360121/2025032015041730360121
		5. Persentase Anak Berkesulitan/UU/Anak yang Perlu Mengikuti PNU (16/16/16)	10	Rp -	97,04 %	Rp -	176,68		https://dirjen.pendidikan.go.id/informasi/2025/03/20/2025032015041730360121/2025032015041730360121
		6. Persentase ATS yang mengikuti Program Pendidikan Nusantara (PNP) di Pesantren	3	Rp -	1,7%	Rp -	54,67		https://dirjen.pendidikan.go.id/informasi/2025/03/20/2025032015041730360121/2025032015041730360121
		7. Persentase satuan pendidikan menengah yang diakreditasi	40	Rp -		Rp -	0		
15	Meningkatnya persiapan penyelenggaraan haji	Persentase siswa dalam satu cohort yang lulus tepat waktu	82,5	Rp -		Rp -	0		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Elektronik (BNSF), sesuai UU dan standar lainnya

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

No	Sumber Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Kinerja	Beferingan	Data Dukung / Dokument
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Diklat InK/Asya/SHIK/SHIKK/Utama/Widyatama/berhaji/ Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan	1. Persentase siswa yang mengikuti asesmen (AK)	82,5	Rp -	0%	Rp -	-	0	Bers Pada Tahun Selesai https://drive.google.com/drive/folders/1WwKt52s_Hlqps7l3b3TbCt6t753wcy7?usp=sharing
		2. Persentase siswa yang mengikuti teslisan Waduan (TW)	44	Rp -		Rp -	-	0	
		3. Indeks keberagaman siswa pada madrasah/ sekolah/ minilab/widyadharma	75	Rp -		Rp -	-	0	
		4. Rata-rata nilai pengantar modern beragama siswa	65,18	Rp -		Rp -	-	0	
17	Meningkatnya kualitas pelayanan keislaman yang bermutu	1. Persentase satuan pendidikan/ pesantren yang menerapkan keislaman yang berfokus pada kompetensi material, adaptif, dan kontekstual	62,51	Rp -	20%	Rp -	-	21.97	https://drive.google.com/drive/folders/1WwKt52s_Hlqps7l3b3TbCt6t753wcy7?usp=sharing
		2. Persentase satuan pendidikan/ pesantren yang menerapkan keislaman agar bermuatan modern beragama	97,5	Rp -		Rp -	-	0	
		3. Persentase satuan pendidikan/ pesantren yang memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern	77,3	Rp -	20%	Rp -	-	21.01	

Dokumen ini telah diunggah ke akun elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Elektronik (BNSF), tidak dapat dihapus

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Kinerja	Beban Kerja	Data Dukung / Bukti
			Kwarta	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Meningkatnya kepeloporan dan keaktifan guru pada kegiatan pelatihan dan pengkaderan pendidik	1. Persentase siswa yang memperoleh nilai karakter minimal baik	82,5	Rp -		Rp -	-	0	
		2. Persentase satuan pendidikan yang memiliki kultur mutu kolektif	80	Rp -	0%	Rp -	-	0	
		3. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada madrasah yang bermutu secara nasional	120	Rp -	50	Rp -	-	45,83	https://data.sumsatb.go.id/data/kegiatan-ekstrakurikuler-keagamaan-pada-madrasah-yang-bermutu-secara-nasional
		4. Jumlah guru pendidik pada madrasah yang aktif	222	Rp -	70	Rp -	-	31,53	https://data.sumsatb.go.id/data/guru-pendidik-pada-madrasah-yang-aktif
23	Meningkatnya implementasi Program Bangun Anak Usia Dini melalui Integrasi (PAUD-RI)	1. Persentase PAUD/TK/PAUD yang menerapkan program integrasi	80	Rp -	0%	Rp -	-	0	
		2. Persentase PAUD/TK yang menerapkan kurikulum agama yang berbasis pada kompetensi awal secara adaptif dan kontekstual	80	Rp -		Rp -	-	0	
24	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	1. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidik SL	85,33	Rp -	82,35	Rp -	-	96,07	https://data.sumsatb.go.id/data/guru-pendidik-pada-satuan-pendidikan

Laporan Capaian Kinerja Triwulanan I Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

No	Sumber Regulasi	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Kinerja	Beban Kerja	Data Dukung / Evidensi
			Nilai	Anggaran	Nilai	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		indikator produk terampil							
		10. Persentase satuan pendidikan yang memiliki indikator kualitas pembelajaran dengan kategori baik	70	Rp -		Rp	-	0	
		11. Persentase Guru yang memiliki jenjang karir	21,3	Rp -	100	Rp	-	62,75	PPG Guru PA
		12. Persentase Pengawas yang memiliki jenjang karir	23,29	Rp -	0%	Rp	-	0	https://dlvr.it/9nqk7w https://dlvr.it/9nqk7w https://dlvr.it/9nqk7w https://dlvr.it/9nqk7w https://dlvr.it/9nqk7w
25	Merencanakan tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	1. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	75	Rp 61.513.000		Rp	-	0	
		2. Persentase dokumen perencanaan yang di revisi sesuai standar	90	Rp 482.014.000	100	Rp	-	20	https://dlvr.it/9nqk7w https://dlvr.it/9nqk7w https://dlvr.it/9nqk7w https://dlvr.it/9nqk7w https://dlvr.it/9nqk7w
		3. Persentase satuan yang memperoleh nilai Tingkat kemitatanan penempatan manajemen risiko minimal 3	60	Rp -	0%	Rp	-	0	
		4. Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar dan tepat waktu	60	Rp -	100	Rp	-	20	https://dlvr.it/9nqk7w https://dlvr.it/9nqk7w https://dlvr.it/9nqk7w https://dlvr.it/9nqk7w https://dlvr.it/9nqk7w
		5. Persentase satuan kerja yang memiliki rencana aksi tahunan/linier	60	Rp 495.930.000	100	Rp	-	60,5	https://dlvr.it/9nqk7w https://dlvr.it/9nqk7w https://dlvr.it/9nqk7w https://dlvr.it/9nqk7w https://dlvr.it/9nqk7w
		6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	Rp 120.730.000	0%	Rp	-	0	

Information on North Westland's geology is contained in the geological and mineral resources maps published in 1986. These maps are available from the Department of Scientific and Industrial Research (DSIR), Box 100, Wellington, New Zealand.

Laporan Capaian Kinerja Triwulanan I Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

No	Sumber Regulasi	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Kinerja	Beferingan	Data Dukung / Eviden
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		17. Asetlah sistem yang memuatkan Digital layanan keristerhan Agama	100	Rp -	25%	Rp -	25		https://data.google.com/sheets/d/1pN0e18G0y8QdV-13u8B8dC0t1M8wG2/edit?usp=sharing&tab=11311811834893801608&usp=sharing
		18. Peningkatan layanan keagamaan dan pendidikan berbasis IT	75	Rp 130.175.000	18%	Rp -	24		https://data.google.com/sheets/d/1pN0e18G0y8QdV-13u8B8dC0t1M8wG2/edit?usp=sharing
		19. Peningkatan sarana dan prasarana perkotaan yang dikembangkan berbasis roadmap	90	Rp 10.005.754.000	22%	Rp 1.607.955.666	24-44		https://data.google.com/sheets/d/1pN0e18G0y8QdV-13u8B8dC0t1M8wG2/edit?usp=sharing
		20. Peningkatan digitalisasi aset yang mudah diakses	80	Rp -	20%	Rp -	25		https://data.google.com/sheets/d/1pN0e18G0y8QdV-13u8B8dC0t1M8wG2/edit?usp=sharing
TOTAL REBATA CAPAIAN KINERJA			23.44		TOTAL ANGGARAN		Rp 133.391.877.000		
TARGET KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025			25%		TOTAL REALISASI ANGGARAN		Rp 19.123.335.673		
CAPAIAN KINERJA SATIS			93.75		CAPAIAN REALISASI ANGGARAN %		12.48		

Kepala, 25 April 2025

Dokumen ini telah diproses dengan sistem elektronik menggunakan perangkat elektronik yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul. Hasil akhir dari proses tersebut



Mahyudin

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

No	Beban Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi Kinerja TWB	Realisasi Anggaran TWB	Capaian Kinerja TWB	Keterangan TWI	Keterangan TWB	Data Dukung / Evident
			Kinerja	Anggaran						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Jumlah Kabupaten Berkeadilan	1. Peningkatan kualitas Early Warning System (keagamaan) yang di implementasi (KUB)	60	Rp -	100%	Rp -	100,00%			https://drive.google.com/drive/folders/1e9psUWq5Xan3W7f9k35VWwC7Tr90R12usp?sharing https://drive.google.com/file/d/1BnEh4ChvmskVW2QmFmFQEWJ8FnFZa/view?usp=sharing
		2. Rasio Indeks Ketahanan Umat Beragama Provinsi (KUB)	70	Rp 626.888.000	0%	Rp 60.000.000	0,00%	Masih Dalam Tahap Penyusunan BOP	Anggaran BOP yang tersedia setelah efisiensi Rp. 60.000.000,- dan sudah direalisasikan seluruhnya, sehingga realisasi anggaran setelah efisiensi sebesar 100%.	https://drive.google.com/drive/folders/18w2o6u4Cq82D6XIHUqyATcC18UC905uk7usp?sharing
2	Meningkatnya kualitas pelayanan agama	1. Rasio kesediaan umat beragama pada kerusi dengan kategori tinggi	87	Rp -	0%	Rp -	0,00%	Pembinaan Penyuluh		https://drive.google.com/drive/folders/18

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi Kinerja TW II	Realisasi Anggaran TW II	Capaian Kinerja TW II	Keterangan TW I	Keterangan TW II	Data Dukung / Evident
			kinerja	Anggaran						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pengembangan potensi spiritual dan sosial dan event keagamaan							Agama		https://drive.google.com/drive/folders/1181xx2152u3h3h0vY3nHtmmG08P70u4wP6u8?usp=sharing
		2. Peningkatan jumlah peserta event keagamaan/ event sosial budaya keagamaan/ penyaji agama bermanfaat (MTO, Paskawil, Paskawil, Utusan Dharma, Gasepmas Trijaya Dharma)	88	Rp 560.000.000	48%	Rp 11.244.000	53,93%			https://drive.google.com/drive/folders/1181xx2152u3h3h0vY3nHtmmG08P70u4wP6u8?usp=sharing
		3. Peningkatan penyaji agama yang mempunyai sertifikat kompetensi	10	Rp -	0%	Rp -	0,00%			-
3	Peningkatan komitmen dengan tokoh dan lembaga keagamaan	Peningkatan jumlah agama, lembaga agama dan ormas keagamaan yang dibina	82,5	Rp 2.415.000.000	23%	Rp 52.064.000	27,69%			https://drive.google.com/drive/folders/1A0d27u3h3h0vY3nHtmmG08P70u4wP6u8?usp=sharing
4	Meningkatnya sarana pendukung pelayanan keagamaan	1. Peningkatan sarana dan prasarana layanan pelayanan yang disediakan	88,33	Rp 530.000.000	10%	Rp 14.225.000	11,32%			
		2. Peningkatan pengabdian sosial yang disediakan	50	Rp 112.530.000	48%	Rp -	96,00%			https://drive.google.com/drive/folders/1181xx2152u3h3h0vY3nHtmmG08P70u4wP6u8?usp=sharing

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi Kinerja TW II	Realisasi Anggaran TW II	Capaian Kinerja TW II	Keterangan TW I	Keterangan TW II	Data Dukung / Evident
			kinerja	Anggaran						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										shering
		1	Persentase peningkatan buku keagamaan yang disediakan	80	Rp 300.000.000	25%	Rp -	50,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1XyU2aaRAFRZ176RLUJghIjWW2AqU183Dn8-shering
		4	Persentase masjid/musholla bersertifikat arsh kiblat	70	Rp 185.000.000	0%	Rp 39.748.300	0,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1XyU2aaRAFRZ176RLUJghIjWW2AqU183Dn8-shering
5	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama	1	Persentase Mui, PKS dan bentuk keagamaan yang penyuluhan ditindaklanjuti	100	Rp 650.000.000	50%	Rp -	50,00%		https://drive.google.com/drive/folders/164LWUjOh83wzCM8D8kuztFQm6uVhAd1i7usgndt-ve-1ow
		2	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	70,78	Rp 1.522.500.000	50%	Rp 366.968.900	70,67%		https://drive.google.com/file/d/1u24R0YjdsjP5umY9Fw8A/svM6j8PH6/view?usp=sharing
		3	Persentase pemenuhan jumlah penyuluh pada tiap jenjang fungsional	74,33	Rp -	74%	Rp -	200,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1TP

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi Kinerja TW II	Realisasi Anggaran TW II	Capaian Kinerja TW II	Keterangan TW I	Keterangan TW II	Data Dukung / Evident
			kinerja	Anggaran						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Meningkatnya akses Catin terhadap layanan bimbingan perkawinan	1. Persentase orang pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan	75	Rp -	52%	Rp -	69,33%			https://drive.google.com/drive/folders/1s6vGjhu8Pat7i-Bak2iQ3FeQ9m5W1?usp=sharing
		2. Persentase "Niraga" UCA sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pernikahan	85	Rp -	50%	Rp -	76,92%			https://drive.google.com/drive/folders/1apvDhXSCy2Qc_vf8n8dGx8fDm1aG08x?usp=sharing
7	Meningkatnya partisipasi keluarga dalam layanan bimbingan keluarga	Persentase keluarga yang mendapatkan bimbingan keluarga sukarela/bahagi/sukarela/bahagi/bahagi	76,46	Rp 245.530.000	35%	Rp -	85,68%			https://drive.google.com/drive/folders/16T2jGc2mV_wd1DGIkueHm2g7_wP3xvH2m?usp=sharing
8	Meningkatnya kualitas pelayanan KUA	1. Persentase KUA yang terakreditasi	100	Rp 5.000.000.000	7%	Rp 142.117.900	7,00%			https://drive.google.com/drive/folders/1eTj8Hh3epm9C88hMAFDQ23Dm0m0aDe?usp=sharing
		2. Persentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana	100	Rp 334.080.000	15%	Rp 16.040.000	15,00%			https://drive.google.com/drive/folders/1i...

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi Kinerja TW II	Realisasi Anggaran TW II	Capaian Kinerja TW II	Keterangan TW I	Keterangan TW II	Data Dukung / Evident
			kinerja	Anggaran						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3								https://drive.google.com/drive/folders/1U2M_3u8FqgH33F2_3L3HfKYux7A7Zjagmh-rtag
		3	Realisasi KUA yang menyelenggarakan layanan inovatif dan berbasis digital	30	Rp	50%	Rp	-	100,00%	https://drive.google.com/drive/folders/1U2M_3u8FqgH33F2_3L3HfKYux7A7Zjagmh-rtag
		4	Realisasi pangkuan yang memenuhi kebutuhan KUA	30	Rp 420.000.000	50%	Rp	62.780.000	100,00%	
8	Meningkatnya kualitas pelayanan (percepatan haji)	1	Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jenjang haji sesuai standar	90	Rp 1.657.670.000	100%	Rp	1.676.781.405	100,36%	https://drive.google.com/drive/folders/11m2a62eyCSU5bFYxQn-ghu2dgdKuf
10	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran dalam haji	1	Persentase pusat pendaftaran dan pembatalan haji yang memenuhi standar nasional dan standar pelayanan	30	Rp 65.925.000	30%	Rp	960.000	100,00%	https://drive.google.com/drive/folders/11m2a62eyCSU5bFYxQn-ghu2dgdKuf
		2	Tingkat kepuasan pusat pendaftaran dan pembatalan haji	75	Rp 71.400.000	71%	Rp	330.000	100,00%	https://drive.google.com/drive/folders/11m2a62eyCSU5bFYxQn-ghu2dgdKuf
11	Meningkatnya kualitas pembinaan	1	Persentase pegawai haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	90	Rp 435.800.000	90%	Rp	140.000.000	100,00%	https://drive.google.com/drive/folders/11m2a62eyCSU5bFYxQn-ghu2dgdKuf

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi Kinerja TW II	Realisasi Anggaran TW II	Capaian Kinerja TW II	Keterangan TW I	Keterangan TW II	Data Dukung / Evident
			kinerja	Anggaran						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	jumlah tpi:									Gt-phu2d9dktul
12	Meningkatnya kualitas pelayanan zakat dan Wakaf Dana Sumbangan Sosial Keagamaan	1. Penerimaan kolektif: program pemanfaatan zakat dan pengembangan wakaf dalam pengembangan kemakmuran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	80	Rp 150.000.000	60%	Rp 5.320.000	300,00%			https://drive.google.com/drive/folders/1441W-1h83edCM80b9u1rf-QmEnVAg57r7usand0et_Link
		2. Penerimaan dari beres wakaf yang di terima dan dikembangkan produktif	88	Rp -	0%	Rp -	0,00%			
		3. Penerimaan sebagai pengembangan aset wakaf	88	Rp 25.000.000	0%	Rp 8.188.000	0,00%			
13	Meningkatnya Profesionalitas Lembaga Dana Sosial Keagamaan	1. Penerimaan lembaga dana sosial keagamaan zakat yang sesuai prinsip syariah, akuntabel, dan profesional	88	Rp 50.000.000	98%	Rp 1.410.000	300,00%			https://drive.google.com/drive/folders/1A-QD2iv3H8d8k7yVd8p8jz6P2uP54huped-Link_Link
		2. Penerimaan Lembaga Zakat dan Wakaf yang etnis	100	Rp 200.000.000	75%	Rp 28.185.000	75,00%			
14	Meningkatnya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas	1. Penerimaan satuan pendidikan/ pesantren yang memenuhi Standar nasional	74,5	Rp 36.732.128.000	1%	Rp 201.425.657	1,58%			https://drive.google.com/drive/folders/1W-A3-R52a_859g47MnTJjCTgLL733PnCY7n9p9bating

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi Kinerja TW II	Realisasi Anggaran TW II	Capaian Kinerja TW II	Keterangan TW I	Keterangan TW II	Data Dukung / Evident
			kinerja	Anggaran						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Persentase satuan pendidikan/ pesantren yang menyediakan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan informal	2,25	Rp -	0,023%	Rp -	1,02%			https://drive.google.com/drive/folders/1edv7uafVtaKKUMGgWWtdZloi4QyeT
		3. Persentase peningkatan jumlah siswa/kelas pada satuan pendidikan	35	Rp -	8%	Rp -	23,71%			https://drive.google.com/drive/folders/1edv7uafVtaKKUMGgWWtdZloi4QyeT
		4. Persentase peningkatan jumlah siswa/kelas pada satuan pendidikan daerah 3 T	3	Rp -	3%	Rp -	100,33%			https://drive.google.com/drive/folders/1edv7uafVtaKKUMGgWWtdZloi4QyeT
		5. Persentase Anak Kandang 1 Milia/Bekasari yang Pemah Mengikut PAUD (TODABA)	55	Rp -	97%	Rp -	175,44%			https://drive.google.com/drive/folders/1edv7uafVtaKKUMGgWWtdZloi4QyeT
		6. Persentase ATS yang mengikuti Program Kewirausahaan (PKK) di Pondok Pesantren	3	Rp -	2%	Rp -	56,67%			https://drive.google.com/drive/folders/1edv7uafVtaKKUMGgWWtdZloi4QyeT
		7. Persentase satuan pendidikan nonformal yang direhabilitasi	88	Rp -	0%	Rp -	0,00%			
		18. Meningkatkan persentase penyelesaian perkara di Pengadilan	82,5	Rp -	0%	Rp -	0,00%			

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi Kinerja TW II	Realisasi Anggaran TW II	Capaian Kinerja TW II	Keterangan TW I	Keterangan TW II	Data Dukung / Evident
			kinerja	Anggaran						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	1. Persentase siswa yang mengikuti asesmen (AK)	67,5	Rp -	0%	Rp -	0,00%	Baru Pada Tahap Sosialisasi		https://drive.google.com/drive/folders/1W-Ai-R52x-8Sog41MnTFjCT6s1753PpCY7uamr-haring
		2. Persentase guru yang mengikuti latihan Ilmiah (LI)	44	Rp -	0%	Rp -	0,00%			
		3. Indeks keberagaman siswa pada madrasah/ pesantren/ wilyayah/wilyayaherna	76	Rp -	0%	Rp -	0,00%			
		4. Rata-rata nilai penguatan modernisasi keagamaan siswa	83,33	Rp -	0%	Rp -	0,00%			
17	Meningkatnya kualitas pelayanan kurikulum yang inovatif	1. Persentase satuan pendidikan/ pesantren yang menerapkan kurikulum yang efektif pada kompetensi, adaptasi, dan kontekstual	82,34	Rp -	33%	Rp -	35,96%			https://drive.google.com/drive/folders/1W-Ai-R52x-8Sog41MnTFjCT6s1753PpCY7uamr-haring

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi Kinerja TW II	Realisasi Anggaran TW II	Capaian Kinerja TW II	Keterangan TW I	Keterangan TW II	Data Dukung / Evident
			kinerja	Anggaran						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Peningkatan kualitas pendidikan/pekerjaan yang memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern	97,5	Rp -	95%	Rp -	97,44%			
		3. Peningkatan kualitas pendidikan/pekerjaan yang memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern	77,5	Rp -	40%	Rp -	51,61%			https://drive.google.com/drive/folders/1W6kR52x_85qg4TMsT6jCTgs1753P0Cv3uqps-haring
18	Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu	1. Peningkatan PAUD/RA/Kitarna Wilayah/ Taman Sederhana/ Dhammasattha yang terakreditasi minimal B	50	Rp -	44%	Rp -	31,60%	137 RA dengan Kreditasi B dari 430 RA		https://drive.google.com/drive/folders/1M6xjAW5p4u6Q05eQpaf5GPlgR0Q48/ummp-haring
		2. Peningkatan MESOTK/Kitu Wilayah/Mula Dhammasattha yang terakreditasi minimal B	70	Rp 345.850.000	47%	Rp 118.655.000	66,49%	74 MI dengan Akreditasi B dari 159 MI		https://drive.google.com/drive/folders/1M6xjAW5p4u6Q05eQpaf5GPlgR0Q48/ummp-haring
		3. 25	76	Rp 765.000.000	42%	Rp -	55,95%	175 MTs dengan Akreditasi B dari 417 MTs		https://drive.google.com/drive/folders/1M6xjAW5p4u6Q05eQpaf5GPlgR0Q48/ummp-haring

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi Kinerja TW II	Realisasi Anggaran TW II	Capaian Kinerja TW II	Keterangan TW I	Keterangan TW II	Data Dukung / Evident
			kinerja	Anggaran						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Persentase MA/MTK/MAW/Uluma Widyaisaya Utama Diutamakan yang terakreditasi minimal B	70	Rp -	41%	Rp -	59,14%	12 MA dengan Akreditasi B dari 222 MA di Sumatera Barat		https://drive.google.com/drive/folders/1GAsJAy04Ptp8Q3xGaef9GP1gROOAR7uspsbating
		4. Persentase Satuan pendidikan formal yang memperoleh minimal 1000 orang minimal layak	26	Rp -	0%	Rp -	0,00%			
		5. Persentase peserta didik pada pendidikan keagamaan/keislaman yang menyelesaikan pendidikan setara formal	40	Rp -	0%	Rp -	0,00%			
		6. Persentase satuan pendidikan umum yang terlengkap	43,5	Rp -	22%	Rp -	72,57%			https://drive.google.com/drive/folders/1adw7w1Dta8Kt4ME8gWW76z7m4G3ye7

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi Kinerja TW II	Realisasi Anggaran TW II	Capaian Kinerja TW II	Keterangan TW I	Keterangan TW II	Data Dukung / Evident
			kinerja	Anggaran						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7. Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	1,75	Rp 142.690.000	0,036%	Rp -	2,00%	Pelaksanaan MQON ke VIII sebanyak 87 Orang Kelahiran akan di laksanakan pada Bulan Oktober 2025 dan 0,036% Siswa Madrasah telah mengikuti kompetisi nasional		https://drive.google.com/drive/folders/1adY7aWY7aR8K0W8SgWWdnZ1u18Q1ye7 https://drive.google.com/drive/folders/1WAlcRS2x_8Sg4TMsTlCTgl175dP6Cy7hnpet-hening
		8. Persentase lulusan pendidikan keagamaan dan pendidikan pesantren yang memperoleh fotogenral	90	Rp -	0%	Rp -	0,00%			
12	Meningkatnya kualitas pendidikan vokasi berbasis kearifan lokal	1. Persentase MA Kejuruan/ MA Program Keterampilan yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri	90	Rp -	0%	Rp -	0,00%			
		2. Persentase MA Kejuruan dan MA Program Keterampilan yang meningkatkan life skill melalui program magang	90	Rp -	0%	Rp -	0,00%			

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi Kinerja TW II	Realisasi Anggaran TW II	Capaian Kinerja TW II	Keterangan TW I	Keterangan TW II	Data Dukung / Evident
			kinerja	Anggaran						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Meningkatnya kualitas karakter siswa	Persentase seluruh pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	88	Rp 50.000.000	31%	Rp -	33,85%	Masih Dalam Tahap Sosialisasi		https://drive.google.com/drive/folders/1W41cR52x_85gg4TMs11jC7gk1753FpCY?usp=sharing
21	Meningkatnya kualitas tinggungan belajar	1. Persentase seluruh pendidikan Ramah Anak	82,5	Rp -	21%	Rp -	45,05%	Target Pongpes Ramah anak Adalah 0,6 %, namun Belum Terakana dan pada Madrasah juga masih dalam Tahap Sosialisasi		https://drive.google.com/drive/folders/1adYhaGfYnaRkXvWfmgWW19d2lur8QyeY
		2. Persentase siswa yang mempunyai nilai karakter minimal baik	82,5	Rp -	0%	Rp -	0,00%			
		3. Persentase seluruh pendidikan yang memiliki kultur mutu pembelajaran	40	Rp -	60%	Rp -	200,00%			
22	Meningkatnya kepeloporan dan ketaqwaan generasi muda dan pengemban bangsa	1. Jumlah ekstrakurikuler keagamaan pada madrasah yang penguatan modernisasi	128	Rp -	52%	Rp -	43,44%			https://drive.google.com/drive/folders/1W41cR52x_85gg4TMs11jC7gk1753FpCY?usp=sharing

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi Kinerja TW II	Realisasi Anggaran TW II	Capaian Kinerja TW II	Keterangan TW I	Keterangan TW II	Data Dukung / Evident
			kinerja	Anggaran						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pendidikan kependidikan	2	Jumlah guru pamuka pada madrasah yang dina	222	Rp	70%	Rp	-	31,33%	https://drive.google.com/drive/folders/1W4i-PS2k_80sg4TMs1TjC7qk173MfoCYtuspis-haring
23	Menguatkan implementasi Program dengan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI)	1	Persentase RAKPAUDOU Pratama Wilayah ya/ Taman BermainNew Diaksanakan yang menerapkan program Holistik-Integratif	90	Rp	0%	Rp	-	0,00%	
		2	Persentase PAUDITK yang menerapkan kurikulum agama yang berfokus pada kompetensi minimal secara adaptif dan kontekstual	30	Rp	0%	Rp	-	0,00%	
24	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	1	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1	85,32	Rp	92%	Rp	-	108,05%	https://drive.google.com/drive/folders/1ad-c2wafVt4kK30JMEGg-WW0da3bi9QyeE https://drive.google.com/drive/folders/1W4i-PS2k_80sg4TMs1TjC7qk173MfoCYtuspis-haring
		2	Persentase tenaga kependidikan yang	71,88	Rp	72%	Rp	-	100,07%	

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi Kinerja TW II	Realisasi Anggaran TW II	Capaian Kinerja TW II	Keterangan TW I	Keterangan TW II	Data Dukung / Evident
			kinerja	Anggaran						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		memerch pendidik		-						
		5. Peningkatan guru yang memiliki sertifikasi pendidik	88,88	Rp -	54%	Rp -	81,01%	GPA yang telah memiliki sertifikat pendidik		https://drive.google.com/drive/folders/3adV2wvCvnaKXvMNggWAhWiaZia8Qyev
		6. Peningkatan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi	97,18	Rp 362.500.000	0%	Rp 1.371.000	0,00%			
		8. Peningkatan pemerataan kebutuhan Guru Pendidikan Agama pada satuan Pendidikan	88,8	Rp 69.891.458.000	35%	Rp 25.834.073.900	68,20%	Pembayaran TPG		https://drive.google.com/drive/folders/3WAlcP52x_85g4T8nTf1C7gk1753PwCvFuapnsbeting
		8. Peningkatan guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat baik	42,5	Rp -	0%	Rp -	0,00%			
		7. Peningkatan Rapor Madrasah/Dakwah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Rapor Madrasah/Dakwah (AKO) minimal predikat sangat baik	40	Rp -	0%	Rp -	0,00%			
		8. Peningkatan guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai	42,5	Rp -	0%	Rp -	0,00%	Masih dalam Tahap		https://drive.google.com/drive/folders/3WAlcP52x_85g4T8nTf1C7gk1753PwCvFuapnsbeting

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi Kinerja TW II	Realisasi Anggaran TW II	Capaian Kinerja TW II	Keterangan TW I	Keterangan TW II	Data Dukung / Evident
			kinerja	Anggaran						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		melaksanakan Saragema minimal baik						Pembinaan		A6R5x_85q41Mx11j_C5t41753PwCY7uapn_haring
		6. Peningkatan pengesahan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Penguasaan Madrasah/Ibtidaiyah (AKP) minimal predikat sangat baik	45	Rp -	0%	Rp -	0,00%			
		55. Peningkatan satuan pendidikan yang memiliki indikator kualitas pembelajaran dengan kategori baik	70	Rp -	0%	Rp -	0,00%			
		11. Peningkatan Guru yang meningkat yang baik	25,5	Rp -	16%	Rp -	52,75%	PPG Guru PAI		https://drive.google.com/drive/folders/1edc70eaf51a8K0500gWW0u21oi8JyeY
		12. Peningkatan Penguasaan yang meningkat yang baik	25,25	Rp -	0%	Rp -	0,00%			
25	Meningkatkan tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75	Rp 61.515.000	50%	Rp -	55,67%			
		2. Peningkatan dokumen perencanaan yang disusun sesuai standar	90	Rp 482.014.000	80%	Rp -	38,89%			https://drive.google.com/drive/folders/1uP0XVww0kN6c3CH_g0u_1AT52DQs1MM?usp=sharing

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi Kinerja TW II	Realisasi Anggaran TW II	Capaian Kinerja TW II	Keterangan TW I	Keterangan TW II	Data Dukung / Evident
			kinerja	Anggaran						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1. Persentase salinan yang memperoleh nilai tingkat kematangan - penerapan manajemen risiko minimal 3	20	Rp -	0%	Rp -	0,00%			
		4. Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar dan tepat waktu	80	Rp -	90%	Rp -	92,30%			https://drive.google.com/drive/folders/1e5QJfYdHt38GZr5M4c9BOjKTx5M6bImThusp-sharing
		5. Persentase satuan kerja yang menyusun rencana aksi/Ratifikasi Bioteknologi	80	Rp 495.930.000	63%	Rp -	78,13%			https://drive.google.com/drive/folders/1m4pA1h-jdMGvH8DG5n-1kx100kmpn1N7usp-sharing
		6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	Rp 125.730.000	33%	Rp -	36,32%			
		7. Persentase penyelesaian tugas-tugas Negara pada Kementerian Agama	80	Rp -	0%	Rp -	0,00%			https://drive.google.com/drive/folders/1sM7CduAC-z-1c58884pof1aaf5r4PEg7usp-drive-link
		8. Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	2	Rp 30.497.843.000	50%	Rp 14.367.495.821	50,00%	Pembayaran Gaji Tahun Pegawai		
		9. Indeks Profesionalisme ASN	71	Rp -	0%	Rp -	0,00%			

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi Kinerja TW II	Realisasi Anggaran TW II	Capaian Kinerja TW II	Keterangan TW I	Keterangan TW II	Data Dukung / Evident
			kinerja	Anggaran						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10. Persentase salinan lama yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengalokasian SDM Aparatur (NON) sesuai kebutuhan	80	Rp 170.320.000	85%	Rp 51.170.000	100,00%	Rencana Kebutuhan Pegawai Tahun 2025 Belum ditetapkan		https://drive.google.com/drive/folders/1DyW8uXVUMYrC3HUXWACu0DyTN0n0Qa?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/138-bnuafghm-dl2w/0bU5h3h0PK8M-69Pup-wdang
		11. Persentase AGH yang memperoleh penghargaan pegawai berprestasi regional	10	Rp -	0%	Rp -	0,00%			
		12. Persentase AGH yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	80	Rp 60.102.000	0%	Rp -	0,00%			
		13. Toleransi Kejadian Layanah (Langsung/Kepada Katan	100	Rp -	50%	Rp -	50,00%			https://drive.google.com/drive/folders/1DyW8uXVUMYrC3HUXWACu0DyTN0n0Qa?usp=drive_link
		14. Persentase kasus hukum yang terselesaikan	100	Rp 27.020.000	50%	Rp -	50,00%			https://drive.google.com/drive/folders/1DyW8uXVUMYrC3HUXWACu0DyTN0n0Qa?usp=drive_link

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Rendisi asi Kinerja TW II	Realisasi Anggaran TW II	Capaian Kinerja TW II	Keterangan TWT	Keterangan TWT	Data Dukung / Evident
			kinerja	Anggaran						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15 Peningkatan keterampilan dan orang-orang	100	Rp 85.810.000	50%	Rp -	50,00%			
		16 Peningkatan pertumbuhan negatif tentang Kemandirian Agensi yang disosialisasikan	100	Rp 145.900.000	50%	Rp 43.980.000	50,00%			https://drive.google.com/drive/folders/1BjQWtHJvSgVlUlaZSAFhuRqDmzPua-ahara
		17 Jumlah viewer yang memanfaatkan Digital Layanan Kementerian Agama	100	Rp -	50%	Rp -	50,00%			https://docs.google.com/spreadsheets/d/eA6wGy/KOYdCj8nNkCYMMyf/edit?usp=sharing&hl=id-tt-113181543645803606&tuo=true&true&true
		18 Peningkatan layanan keagamaan dan pendidikan berbasis IT	75	Rp 130.175.000	80%	Rp 116.775.626	106,67%			https://drive.google.com/drive/folders/1mV0KKruakWOHAIDQGsdhs94stus9ffI?usp=sharing
		19 Peningkatan sarana dan prasarana pembangunan yang dikembangkan berbasis madani	90	Rp 30.035.704.000	25%	Rp 2.525.706.783	27,78%			https://drive.google.com/drive/folders/1eQc3P6chrrvjngdQNDSTbdooWhOTuasenheing

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi Kinerja TW II	Realisasi Anggaran TW II	Capaian Kinerja TW II	Keterangan TW I	Keterangan TW II	Data Dukung / Eviden
				kinerja	Anggaran						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		20	Persentase digitalisasi arsip yang mudah diakses	80	Rp	40%	Rp	50,00%			https://drive.google.com/drive/u/1/folders/3YMRUP9dUw-VW-CgggOQhAMVafk2_aRZrt
TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA				61,73%		TOTAL ANGGARAN			Rp. 152.393.877.000		
TARGET KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025				50,00%		TOTAL REALISASI ANGGARAN			Rp. 46.859.206.392		
CAPAIAN KINERJA SATKER				89,46%		CAPAIAN REALISASI ANGGARAN %			32,6 %		



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Kuini No. 79 B Padang, 2514 Telp. (0751) 21686, Fax. (0751) 22583
website: <http://sumbar.kemenag.go.id>, email: kanwilsumbar@kemenag.go.id

Nomor : B-2/Kw.03/OT.01.2/10/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Rangkap
Hal : Penyampaian Laporan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025

17 Oktober 2025

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
Cq. Kepala Biro Organisasi Dan Tata Laksana

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama, maka dengan ini kami sampaikan Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat sebagaimana terlampir

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

Pit.Kepala,



Edison

No.SP : 190426/MA/KP/07/6/2025
Tanggal : 30 Juni 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Kinerja TWR RI	Keterangan	Data Dukung / Evident
			kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2. Persentase penerjemah agama yang memperoleh sertifikat kompetensi	40	Rp -	40%	Rp -	100%		
3	Peningkatan kemitraan dengan tokoh dan lembaga keagamaan	Persentase tokoh agama, lembaga agama dan ormas keagamaan yang dilatih	92,5	Rp 2.615.000.000	75%	Rp 418.734.460	81%		https://drive.google.com/drive/folders/1500DZvChdUk7vYyUeRtoePQ5uG6d4Usarshane-link
4	Memingkatkan sarana pendukung pelayanan keagamaan	1. Persentase peningkatan sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	88,33	Rp 330.000.000	75%	Rp 46.780.600	85%		
		2. Persentase peningkatan kitab suci yang disediakan	30	Rp 112.530.000	48%	Rp -	95%		https://drive.google.com/drive/folders/15xv12w8BFR270xUJ3d4dWwY78d833Usarshane-link
		3. Persentase peningkatan buku keagamaan yang disediakan	30	Rp 100.000.000	48%	Rp -	95%		https://drive.google.com/drive/folders/15xv12w8BFR270xUJ3d4dWwY78d833Usarshane-link
		4. Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	70	Rp 185.000.000	70%	Rp 104.051.228	100%		https://drive.google.com/drive/folders/15xv12w8BFR270xUJ3d4dWwY78d833Usarshane-link
5	Memingkatkan kualitas penyuluhan agama	1. Persentase Mui, PKS dan bentuk kerjasama penyuluhan yang dibudayakan	100	Rp 150.000.000	75%	Rp 302.804.844	75%		https://drive.google.com/drive/folders/1543W-4h83wKvM8DWhUeFGmEwV6dEUsarshane-link
		2. Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	70,75	Rp 1.522.300.000	75%	Rp 401.484.190	106%		https://drive.google.com/drive/folders/1e48V1mnd16hV5P6BAw6UdU8DhUdWwUsarshane-link
		3. Persentase pemenuhan jumlah penyuluh pada tiap jenjang fungsional	74,33	Rp -	74%	Rp -	100%		https://drive.google.com/drive/folders/1Y7P1Q4McDmWwUe-dhQ8dUggrFQmLhUsarshane-link

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (B2E), Badan Sber dan Sand Negara (BSN).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi		Capaian Kinerja TWR II	Keterangan	Data Dukung / Evident
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6	Meningkatnya akses Catin terhadap layanan bimbingan perkawinan	1	Persentase calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan	75	Rp. -	65%	Rp. -	87%		https://drive.google.com/drive/folders/1a6yCidapUPd7L3e6G091eQ3w0WtJupw-sharng
		2	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah	65	Rp. -	57%	Rp. -	88%		https://drive.google.com/drive/folders/1a6yCidapUPd7L3e6G091eQ3w0WtJupw-sharng
7	Meningkatnya partisipasi keluarga dalam layanan bimbingan keluarga	Persentase mendapatkan keluarga sakinah/ rukunah/ maknanya		76,66	Rp. 243.520.000	55%	Rp. 22.230.000	72%		https://drive.google.com/drive/folders/1K72Gd0mV_c8L2G8w0WtJupw-sharng
8	Meningkatnya kualitas pelayanan KUA	1	Persentase KUA yang direvitalisasi	100	Rp. 9.800.385.000	75%	Rp. 1.597.607.160	75%		https://drive.google.com/drive/folders/1oT88H45emphK8HMAF0Z1Dnd1naxDe7upw-sharng
		2	Persentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana	100	Rp. 384.980.000	75%	Rp. 87.989.500	75%		https://drive.google.com/drive/folders/1k-4u6ufjG4w0WtJupw-sharng
		3	Persentase KUA yang menyelenggarakan layanan inovatif dan berbasis digital	50	Rp. -	50%	Rp. -	100%		https://drive.google.com/drive/folders/1U28d1_3d8ceFCX282L_8_3d10wv2A77upw-sharng
		4	Persentase penguku yang memenuhi komposisi kebutuhan KUA	50	Rp. 470.000.000	50%	Rp. 153.885.839	100%		
9	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	1	Persentase pelayanan (plomodas, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar	45	Rp. 3.637.670.000	100%	Rp. 3.717.218.405	100%		https://drive.google.com/drive/folders/11m2aG2wvC685H3eQ1-sharng
10	Meningkatnya kualitas	1	Persentase pendaftaran	30	Rp. 66.925.000	30%	Rp. 4.450.000	100%		https://drive.google.com/drive/folders/11m2aG2wvC685H3eQ1-sharng

yang disediakan oleh Data Besar Sarafika Elektronik (DSSE), Badan Sber dan Sandi Negara (BSN).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi		Capaian Kinerja TW III	Keterangan	Data Dukung / Evident
				kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	pelayanan pendaftaran ibadah haji		pembatalan haji yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan							mu7duKuf
		2	tingkat kepuasan pusat pendaftaran dan pembatalan haji	75	Rp 71.400.000	90%	Rp 69.270.000	120%		https://drive.google.com/drive/folders/13m2eQ2vvc9s42MFYvQl-onu4dadKuf
11	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	1	Persentase pahlawan haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	90	Rp 435.800.000	90%	Rp 218.436,77%	100%		https://drive.google.com/drive/folders/13m2eQ2vvc9s42MFYvQl-onu4dadKuf
12	Meningkatnya kualitas pembinaan zakat dan wakaf/dana sumbangan /sosial Keagamaan	1	Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam pemanfaatan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan	60	Rp 150.000.000	60%	Rp 13.965,000	100%		https://drive.google.com/drive/folders/1G5tW-1d-B3w8Vn5DduLefGmEwVdVdTr-7uon-9kiv-link
		2	Persentase harta benda wakaf yang di kelola dan dikembangkan produktif	98	Rp -	0%	Rp -	0%		
		3	Persentase layanan pengembangan pemanfaatan aset wakaf	98	Rp 35.000.000	0%	Rp 13.644,000	0%		
13	Meningkatnya Profesionalitas Lembaga Dana Sosial Keagamaan	1	Persentase lembaga dana sosial keagamaan/ zakat yang sesuai prinsip syariah, akuntabel, dan profesional	98	Rp 30.000.000	98%	Rp 17.766,000	100%		https://drive.google.com/drive/folders/1N2H0Cv2HddqUyVdVdWd6E7UuPc5d7uon9kiv-link
		2	Persentase Lembaga Zakat dan Wakaf yang dibina	100	Rp 200.000.000	85%	Rp 110.872,000	85%		

Teknik ini akan berdampak secara efektif meningkatkan tingkat kinerja yang diberikan oleh Dana Besar Sankasi Elektronik (DSE), Badan Sber dan Sandi Negara (BSN).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Kinerja TWR RI	Keterangan	Data Dukung / Evident
			kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Meningkatnya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas	1. Persentase satuan pendidikan/ pesantren yang memenuhi standar sarana	78.5	Rp 16.732.128.000	60%	Rp 1.209.602.333	76%		https://drive.google.com/drive/folders/1W9i8BzA_8UedTb4T6cTef175JEnCYuagmharing
		2. Persentase satuan pendidikan/ pesantren yang menyediakan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusi	1,25	Rp -	0%	Rp -	1%		https://drive.google.com/drive/folders/1ed7uafVta80UuMFQgWW6aZuJ8QnY
		3. Persentase peningkatan jumlah siswa/santri pada satuan pendidikan	35	Rp -	8%	Rp -	23%		https://drive.google.com/drive/folders/1ed7uafVta80UuMFQgWW6aZuJ8QnY
		4. Persentase peningkatan jumlah siswa/santri pada satuan pendidikan daerah 3 T	3	Rp -	3%	Rp -	100%		https://drive.google.com/drive/folders/1ed7uafVta80UuMFQgWW6aZuJ8QnY
		5. Persentase Anak Kelas 1 MI/SLB/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/BA/BA)	35	Rp -	97%	Rp -	120%		https://drive.google.com/drive/folders/1ed7uafVta80UuMFQgWW6aZuJ8QnY
		6. Persentase ATS yang mengikuti Program Pendidikan Keterserapan (PRC) di Pendid Pesantren	3	Rp -	2%	Rp -	67%		https://drive.google.com/drive/folders/1ed7uafVta80UuMFQgWW6aZuJ8QnY
		7. Persentase satuan pendidikan nonformal yang direvitalisasi	65	Rp -	65%	Rp -	100%		
15	Meningkatnya persentase penyelenggaraan	Persentase siswa dalam satu kohort yang lulus tepat waktu	82.5	Rp -	82%	Rp -	99%		

Teknologi telah dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan oleh Balai Besar Sanitasi Elektronik (BSTE), Badan Sibar dan Sandi Negara (BSN).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Kinerja TWR RI	Keterangan	Data Dukung / Evident
			kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pendidikan MA/ULiyah/SM/MTs/ SMAN/Ubama Widyalyaya /setingkat								
16	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1. Persentase siswa yang mengikuti asramen (AN)	87.5	Rp -	87%	Rp -	99%	Baru Pada Tahap Socialisasi	https://drive.google.com/drive/folders/1W9NtR5Za_85xetTm8TE8TetJ3733PvCY?usp=sharing
		2. Persentase santri yang mengikuti Intihun Wathani (IW)	88	Rp -	80%	Rp -	91%		
		3. Indeks keberagaman siswa pada madrasah/ sekolah/ widyalaya/widyadharma	75	Rp -	75%	Rp -	100%		
		4. Rata-rata nilai pengujian moderat beragama siswa	63.33	Rp -	60%	Rp -	91%		https://drive.google.com/drive/folders/1W9NtR5Za_85xetTm8TE8TetJ3733PvCY?usp=sharing
17	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang inovatif	1. Persentase satuan pendidikan/ pesantren yang menerapkan kurikulum yang bertokus pada kompetensi esensial, adaptif, dan kontekstual	62.33	Rp -	50%	Rp -	80%		https://drive.google.com/drive/folders/1W9NtR5Za_85xetTm8TE8TetJ3733PvCY?usp=sharing
		2. Persentase satuan pendidikan/ pesantren yang menerapkan kurikulum agama bermuatan moderat beragama	97.5	Rp -	95%	Rp -	97%		
		3. Persentase satuan pendidikan/ pesantren yang memanfaatkan	77.5	Rp -	60%	Rp -	77%		https://drive.google.com/drive/folders/1W9NtR5Za_85xetTm8TE8TetJ3733PvCY?usp=sharing

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Kinerja TJW RI	Keterangan	Data Dukung / Evident
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		teknologi digital dan penerapan pedagogi modern							JPaCCTusp-sharing
18	Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu	1. Persentase PAUD/RA/Pratama Widyalaya/ Taman Sederhana/Daya Dhammassekha yang terakreditasi minimal B	50	Rp -	46%	Rp -	92%	197 RA dengan Kreditasi B dari 430 RA	https://drive.google.com/drive/folders/1SIAuAWHPlu6HQ15wCuef9GPlu8OO4B?usp=sharing
		2. Persentase MI/SDK/Adhi Widyalaya/Muda Dhammassekha yang terakreditasi minimal B	70	Rp 343.850.000	47%	Rp 164.555.000	67%	74 MI dengan Akreditasi B dari 139 MI	https://drive.google.com/drive/folders/1SIAuAWHPlu6HQ15wCuef9GPlu8OO4B?usp=sharing
		3. Persentase MTs/SMPTK/Madrasah Widyalaya/ Muda Dhammassekha yang terakreditasi minimal B	75	Rp 763.000.000	42%	Rp -	56%	175 MTs dengan Akreditasi B dari 417 MTs	https://drive.google.com/drive/folders/1SIAuAWHPlu6HQ15wCuef9GPlu8OO4B?usp=sharing
		4. Persentase MA/SMITK/SMAN/Utama Widyaiswarya/ Utama Dhammassekha yang terakreditasi minimal B	70	Rp -	41%	Rp -	59%	92 MA dengan Akreditasi B dari 222 MA se Sumatera Barat	https://drive.google.com/drive/folders/1SIAuAWHPlu6HQ15wCuef9GPlu8OO4B?usp=sharing
		4. Persentase lulusan pendidikan pesantren yang memperoleh hasil asesmen minimal layak	25	Rp -	0%	Rp -	0%		
		5. Persentase peserta didik pada pendidikan keagamaan/pesantren yang menyelesaikan pendidikan setara	20	Rp -	0%	Rp -	0%		

Teknologi telah dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan yang diberikan oleh Badan Besar Sarafika Elektronik (BSSE), Badan Sibar dan Badan Hukum (BSBH).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Kinerja TWT III	Keterangan	Data Dukung / Evidensi	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			formal							
		6	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	43,5	Rp -	32%	Rp -	74%		https://drive.google.com/drive/folders/1adVYua1Yta800Jh8GqW006s20a8Qye1
		7	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	1,75	Rp 142.690.000	0%	Rp -	2%	Pelaksanaan MQON ke VII sebanyak 87 Orang Kaffah akan di luncurkan pada Bulan Oktober 2025 dan 0.034% Siswa Madrasah telah mengikuti kompetisi nasional	https://drive.google.com/drive/folders/1adVYua1Yta800Jh8GqW006s20a8Qye1 https://drive.google.com/drive/folders/1Y6A0d57a_8Sge4TMaTjE1aLLp290CY7hnp-sharing
		8	Persentase lulusan pendidikan keagamaan dan pendidikan pesantren yang memperoleh rekognisi	60	Rp -	50%	Rp -	80%		
19	Meningkatnya kualitas pendidikan unikasi berbasis kerjasama	1	Persentase MA Kejuruan/ MA Program Keasmpilan yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri	30	Rp -	50%	Rp -	100%		
		2	Persentase MA Kejuruan dan MA Program Keasmpilan yang meningkatkan life skill melalui program magang	30	Rp -	50%	Rp -	100%		
20	Menguatnya pendidikan karakter siswa	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran		65	Rp 50.000.000	55%	Rp -	85%	Masih Dalam Tahap Sosialisasi	https://drive.google.com/drive/folders/1W9A0d57a_8Sge4TMaTjE1aLLp290CY7hnp-sharing
21	Meningkatnya kualitas lingkungan	1	Persentase satuan pendidikan Ramah Anak	55,5	Rp -	50%	Rp -	90%	target Ronges Ramah anak Adalah 0,6 %, namun Belum Terlaksana	https://drive.google.com/drive/folders/1adVYua1Yta800Jh8GqW006s20a8Qye1

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi		Capaian Kinerja TJW RI	Keterangan	Data Dukung / Evident
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	belajar								dan pada Madrasah juga masih dalam Tahap Sosialisasi	82x6T
		2	Persentase siswa yang memperoleh nilai karakter minimal baik	82,5	Rp	-	75%	Rp	-	93%
		3	Persentase lulusan pendidikan yang memiliki kultur mutu kecermatan	60	Rp	-	60%	Rp	-	100%
22	Meningkatnya kepeloporan dan keasrian keragaman pemuda dan pendiri bangsa pendidikan keperanannya	1	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada madrasah yang bermuatan model beragama	120	Rp	-	98%	Rp	-	83%
		2	Jumlah gugus pemuda pada madrasah yang dibina	222	Rp	-	30000%	Rp	-	90%
23	Meningkatnya implementasi Program Bangun Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-H)	1	Persentase RA/PAUDQU/Pratama Vidya ya/ taman Seminar/Itawa Dharma/Itawa yang menerapkan program Holistik-Integratif	60	Rp	-	50%	Rp	-	83%
		2	Persentase PAUD/TK yang menerapkan kurikulum agama yang bertokus pada kompetensi keandalan secara adaptif dan kontekstual	30	Rp	-	48%	Rp	-	95%
24	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga	1	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidik S1	85,33	Rp	-	92%	Rp	-	108%

Teknologi telah dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan oleh Balai Besar Sanitasi Elektronik (BSTE), Badan Sber dan Sandi Negara (BSN).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Kinerja TWR II	Keterangan	Data Dukung / Evidensi
			kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	kependidikan pada satuan pendidikan								92e8f1.... https://drive.google.com/drive/folders/1W9dU52e_8Sze4TMsT6G7Jd1275J3P6CY?usp=sharing
		2. Persentase tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi pendidik S1	71,66	Rp -	72%	Rp -	100%		
		3. Persentase guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	66,66	Rp -	54%	Rp -	81%	GPAL yang telah memiliki sertifikat pendidik	https://drive.google.com/drive/folders/1W9dU52e_8Sze4TMsT6G7Jd1275J3P6CY?usp=sharing
		4. Persentase tenaga kependidikan yang memperoleh kompetensi	57,16	Rp 162.500.000	55%	Rp 10.395.500	95%		
		5. Persentase pemenuhan kebutuhan Guru Pendidikan Agama pada satuan Pendidikan	56,6	Rp 49.491.458.000	50%	Rp 43.098.416.600	88%	Pembayaran TPG	https://drive.google.com/drive/folders/1W9dU52e_8Sze4TMsT6G7Jd1275J3P6CY?usp=sharing
		6. Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	42,5	Rp -	0%	Rp -	0%		
		7. Persentase Kepala Madrasah/Sekolah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	40	Rp -	31%	Rp -	88%		
		8. Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai	42,5	Rp -	35%	Rp -	82%	Masih dalam tahap Pembinaan	https://drive.google.com/drive/folders/1W9dU52e_8Sze4TMsT6G7Jd1275J3P6CY?usp=sharing

yang diberikan oleh Balai Besar Sanitasi Elektronik (BSTE), Badan Sibar dan Sandi Negara (BSN).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi		Capaian Kinerja TWR RI	Keterangan	Data Dukung / Evident
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			moderat berserta minimal baik							JPaCCrupchadina
		9	Persentase pegawai yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pegawai Madrasah/Sekolah (AKP) minimal predikat terampil	45	Rp -	35%	Rp -	70%		
		10	Persentase lulusan pendidikan yang memiliki indikator kualitas pembelajaran dengan kategori baik	70	Rp -	70%	Rp -	100%		
		11	Persentase Guru yang meningkat jenjang karir	25.5	Rp -	10%	Rp -	63%	PPG Guru PAI	https://drive.google.com/drive/folders/1aH7uafVt9a0x0m7G699W6u2d180yY
		12	Persentase Pegawai yang meningkat jenjang karir	25.5	Rp -	10%	Rp -	39%		
29	Monitoringnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	1	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75	Rp 61.515.000	50%	Rp -	67%		
		2	Persentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai standar	90	Rp 482.014.000	80%	Rp -	89%		https://drive.google.com/drive/folders/1cPCXVwvnsdHf63Ch_uhu_WTUpQ5atHm7Uamsharing
		3	Persentase sektor yang memperoleh nilai Tingkat kemandirian penerapan manajemen risiko minimal 3	60	Rp -	0%	Rp -	0%		
		4	Persentase laporan kinerja satuan kerja	80	Rp -	60%	Rp -	75%		https://drive.google.com/drive/folders/

yang diberikan oleh Data Base Sistemasi Elektronik (DSTE), Badan Sber dan Sand Negara (BSN).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi		Capaian Kinerja TWR RI	Keterangan	Data Dukung / Evident
				kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			sesuai standar dan tepat waktu							https://drive.google.com/drive/folders/1u0G86sR03RC7eH4rG9Q8T55y6d4n1?usp=sharing
		5	Persentase satuan kerja yang menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi	80	Rp 495.920.000	75%	Rp -	94%		https://drive.google.com/drive/folders/1u0G86sR03RC7eH4rG9Q8T55y6d4n1?usp=sharing
		6	Misi indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	Rp 119.730.000	65%	Rp -	72%		
		7	Persentase penyelesaian kegiatan Negara pada Kementerian Agama	80	Rp -	85%	Rp -	100%		https://drive.google.com/drive/folders/1u0G86sR03RC7eH4rG9Q8T55y6d4n1?usp=sharing
		8	Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	2	Rp 30.497.840.000	50%	Rp 20.343.571.454	50%	Pembayaran Gaji Tunai Pegawai	
		9	Indeks Profesionalisme ASN	75	Rp -	0%	Rp -	0%		
		10	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	85	Rp 170.820.000	0%	Rp 65.000.000	0%	Bencana Kebutuhan Pegawai Tahun 2025 belum ditetapkan	https://drive.google.com/drive/folders/1u0G86sR03RC7eH4rG9Q8T55y6d4n1?usp=sharing
		11	Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/inspirasi	30	Rp -	0%	Rp -	0%		
		12	Persentase ASN yang memperoleh sertifikat peningkatan kompetensi	85	Rp 40.102.000	0%	Rp -	0%		
		13	Misi Kepuasan Layanan (Langsung) Kepada watan	100	Rp -	100%	Rp -	100%		https://drive.google.com/drive/folders/1u0G86sR03RC7eH4rG9Q8T55y6d4n1?usp=sharing

Dikemas ke dalam standstandar elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sarafasi Elektronik (BSE), Badan Sber dan Sand Negara (BSN).

[illegible]

Teknik ini telah dimanfaatkan secara efektif menggunakan sistem elektronik yang dibangun oleh Rudi Basri, Sarjana Teknik Elektro (STPE), Badan Spektasi dan Pengembangan Riset (BSR).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Kuini No. 79 B Padang, 2514 Telpn, (0751) 21686, Fax. (0751) 22583
website: <http://sumbar.kemenag.go.id>, email: kanwilsumbar@kemenag.go.id

Nomor : B-7/Kw.03/OT.01.2/01/2026 15 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Rangkap
Hal : Penyampaian Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV tahun 2025

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
Cq. Kepala Biro Organisasi Dan Tata Laksana

Dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan amanat Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama, kami laporkan sebagaimana perihal surat sebagaimana terlampir:

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

Kepala,



Mustafa

Lampiran
 Nomor : B-7/KW.03/DT.01.2/01/2026
 Tanggal : 15 Januari 2026

Sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat memiliki jumlah Sasaran Kegiatan sebanyak 25 (dua puluh lima) dengan jumlah indikator kinerja sasaran kegiatan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) beserta target yang telah ditetapkan sebagaimana pada tabel berikut :

Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW IV		Capaian Kinerja TW IV	Keterangan	Eviden
			kinerja	Anggaran Akhir	Kinerja	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Jaminan Kebebasan Beribadah	1. Persentase rekomendasi Early Warning System (keagamaan) yang di tindaklanjuti (KUB)	80	Rp -	100.00%	Rp -	120.00%		https://dms.podne.go.id/dms/keagamaan/earlyWarning
		2. Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi (KUB)	70	Rp 60,000,000	85.02%	Rp 60,000,000	120.00%		https://dms.podne.go.id/dms/keagamaan/KUB
Rerata Capaian Sasaran Kegiatan 1							120.00%		
2	Meningkatnya kualitas penyerian agama yang berdampak pada spiritual dan sosial dan event keagamaan	1. Nilai kesalahan umat beragama pada kamwil dengan kategori tinggi	87	Rp -	87.00%	Rp -	100.00%		https://dms.podne.go.id/dms/keagamaan/kamwil
		2. Persentase peningkatan jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/ perayaan agama bernafaskan agama (MTQ, Pesparani, Pesparawi, Utsawa, Dharmagita, Swayamwara, Tripekala Gatha)	89	Rp 264,715,000	89.00%	Rp 263,480,653	100.00%		https://dms.podne.go.id/dms/keagamaan/mtq https://dms.podne.go.id/dms/keagamaan/pesparani https://dms.podne.go.id/dms/keagamaan/pesparawi https://dms.podne.go.id/dms/keagamaan/utsawa https://dms.podne.go.id/dms/keagamaan/dharmagita https://dms.podne.go.id/dms/keagamaan/swayamwara https://dms.podne.go.id/dms/keagamaan/tripekala https://dms.podne.go.id/dms/keagamaan/gatha

Tekstur ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BPSSE), Badan Standar dan Sandi Negara (BSN).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW IV		Capaian Kinerja TW IV	Keterangan	Eviden
			kinerja	Anggaran Aktor	Kinerja	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3 Persentase penyiar agama yang memperoleh sertifikat kompetensi	40	Rp -	40.00%	Rp -	100.00%		https://drive.google.com/drive/folders/1u1u95Tt4Tmny5L0C6d2Jm4yH8K6d1Sgppm9v?usp=sharing
Rerata Capaian Sasaran Kegiatan 2							100.00%		
3	Peningkatan kemitraan dengan tokoh dan lembaga keagamaan	Persentase tokoh agama, lembaga agama dan ormas keagamaan yang dibina	92.5	Rp 534,115,000	92.50%	Rp 534,187,725	100.00%		https://drive.google.com/drive/folders/111ay7hu_vjGf8ag8e5uP7G6e2Y76W47u9t?usp=sharing
Rerata Capaian Sasaran Kegiatan 3							100.00%		
4	Meningkatkan sarana pendukung pelayanan keagamaan	1 Persentase peningkatan sarana dan prasarana layanan peribedatan yang disediakan	88.33	Rp 363,402,000	88.33%	Rp 369,537,605	100.00%		https://drive.google.com/drive/folders/1yC6a6d0Jm4L1m4y4tWu6Fm4p4k000?usp=sharing
		2 Persentase peningkatan kitab suci yang disediakan	50	Rp 20,000,000	50.00%	Rp 19,950,000	100.00%		https://drive.google.com/drive/folders/1yC6a6d0Jm4L1m4y4tWu6Fm4p4k000?usp=sharing
		3 Persentase peningkatan buku keagamaan yang disediakan	50	Rp 51,909,000	50.00%	Rp 47,322,000	100.00%		https://drive.google.com/drive/folders/1yC6a6d0Jm4L1m4y4tWu6Fm4p4k000?usp=sharing
		4 Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	70	Rp 112,913,000	70.00%	Rp 112,862,228	100.00%		https://drive.google.com/drive/folders/1yC6a6d0Jm4L1m4y4tWu6Fm4p4k000?usp=sharing
Rerata Capaian Sasaran Kegiatan 4							100.00%		
5	Meningkatkan kualitas penyuluhan agama	1 Persentase Mbu, PKS dan bentuk kerjasama yang penyuluhan ditindaklanjuti	100	Rp 299,218,000	70.00%	Rp 290,248,843	70.00%		https://drive.google.com/drive/folders/1s4i1W0802e3p4WdKt12d7Gnt4w5d47L7?usp=sharing
		2 Rasio penyuluh agama	70.75	Rp	70.75%	Rp 498,564,100	100.00%		https://drive.google.com/drive/folders/1s4i1W0802e3p4WdKt12d7Gnt4w5d47L7?usp=sharing

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW IV		Capaian Kinerja TW IV	Keterangan	Evident
			kinerja	Anggaran Aktif	Kinerja	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama		515,699,000					https://dms.google.com/drawings/d/12b19422m9vshk9W75d00652731JRP54wY7uagpndm3_zk8
		3 Persentase pemenuhan jumlah penyuluh pada tiap jenjang fungsional	74.33	Rp -	74.33%	Rp -	100.00%		https://dms.google.com/drawings/d/131_2C3T1Tz2vsm105637BUCTP5T6g7knp3_dh0r-8m
Rerata Capaian Sasaran Kegiatan 5							90.00%		
6	Meningkatkan akses Catin terhadap layanan bimbingan perkawinan	1 Persentase calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan	75	Rp -	80.00%	Rp -	106.67%		https://dms.google.com/drawings/d/1eC3d06vCh03K_h8gYvF5uolPwOp4hag2AK0TRap-shumng
		2 Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah	65	Rp -	75.00%	Rp -	115.38%		https://dms.google.com/drawings/d/1eC3d06vCh03K_h8gYvF5uolPwOp4hag2AK0TRap-shumng
Rerata Capaian Sasaran Kegiatan 6							111.03%		
7	Meningkatkan partisipasi keluarga dalam layanan bimbingan keluarga	Persentase keluarga mendapatkan bimbingan keluarga sakinah/ bahagia/ sukinah/ kristiani/ hidasukhaya	76.66	Rp 79,410,000	80.00%	Rp 42,408,000	104.36%		https://dms.google.com/drawings/d/1eC3d06vCh03K_h8gYvF5uolPwOp4hag2AK0TRap-shumng
Rerata Capaian Sasaran Kegiatan 7							104.36%		
8	Meningkatkan kualitas pelayanan KUA	1 Persentase KUA yang direvitalisasi	100	Rp 7,480,881,000	100.00%	Rp 7,325,827,125	100.00%		https://dms.google.com/drawings/d/1eC3d06vCh03K_h8gYvF5uolPwOp4hag2AK0TRap-shumng
		2 Persentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana	100	Rp 334,080,000	100.00%	Rp 165,928,500	100.00%		https://dms.google.com/drawings/d/1eC3d06vCh03K_h8gYvF5uolPwOp4hag2AK0TRap-shumng
		3 Persentase KUA yang	50	Rp -	50.00%	Rp -	100.00%		https://dms.google.com/drawings/d/1eC3d06vCh03K_h8gYvF5uolPwOp4hag2AK0TRap-shumng

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW IV		Capaian Kinerja TW IV	Keterangan	Evidensi
			kinerja	Anggaran Akhir	Kinerja	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		menyelenggarakan layanan inovatif dan berbasis digital							https://dms.apside.com/dms/rtbms/tyc26260304_Hg-w/BawPucdMhaz2023/apsidms
		4 Persentase penghulu yang memenuhi komposisi kebutuhan KUA	50	Rp 420,000,000	50.00%	Rp 281,527,439	100.00%		https://dms.apside.com/dms/rtbms/tyc26260304_Hg-w/BawPucdMhaz2023/apsidms
Rerata Capaian Sasaran Kegiatan 8							100.00%		
9	Meningkatkan kualitas pelayanan jemaah haji	1 Persentase pelayanan (akomodasi, transportasi) jemaah haji sesuai standar	95	Rp 3,537,306,000	100.00%	Rp 3,759,618,405	105.26%		https://dms.apside.com/dms/rtbms/tyc26260304_Hg-w/BawPucdMhaz2023/apsidms
Rerata Capaian Sasaran Kegiatan 9							105.26%		
10	Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran badan haji	1 Persentase pusat pendaftaran haji yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	30	Rp 168,177,000	30.00%	Rp 168,113,500	100.00%		https://dms.apside.com/dms/rtbms/tyc26260304_Hg-w/BawPucdMhaz2023/apsidms
		2 Tingkat kepuasan pusat pendaftaran haji	75	Rp 114,222,000	90.00%	Rp 114,103,000	120.00%		https://dms.apside.com/dms/rtbms/tyc26260304_Hg-w/BawPucdMhaz2023/apsidms
Rerata Capaian Sasaran Kegiatan 10							110.00%		
11	Meningkatkan kualitas pembinaan jemaah haji	1 Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	90	Rp 262,766,000	90.00%	Rp 262,623,625	100.00%		https://dms.apside.com/dms/rtbms/tyc26260304_Hg-w/BawPucdMhaz2023/apsidms
Rerata Capaian Sasaran Kegiatan 11							100.00%		
12	Meningkatkan kualitas penerimaan zakat dan Wakaf/dana Sumbangan	1 Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan	60	Rp 85,695,000	60.00%	Rp 84,667,765	100.00%		https://dms.apside.com/dms/rtbms/tyc26260304_Hg-w/BawPucdMhaz2023/apsidms

Tekanan ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BPSSE), Badan Sertifikasi dan Sandi Negara (BSN).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW IV		Capaian Kinerja TW IV	Keterangan	Evident
			Kinerja	Anggaran Aktor	Kinerja	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sosial Keagamaan	2 Peningkatan kesejahteraan Persentase harta benda wakaf yang di kelola dan dikembangkan produktif	98	Rp 75,000,000	98.00%	Rp 74,825,000	100.00%		https://drive.google.com/drive/folders/1suBRRtRqgHwWzQvZ5SHXGdU88m/BkAspp-ditaw-iss
		3 Persentase kerjasama pengembangan pemanfaatan aset wakaf	98	Rp 21,271,000	98.00%	Rp 21,229,000	100.00%		https://drive.google.com/drive/folders/1TYeKx0D000pLjKkP0MPCAYyR4DMM-vip-drive-iss
Rerata Capaian Sasaran Kegiatan 12							100.00%		
13	Meningkatkan Profesionalitas Lembaga Dana Sosial Keagamaan	1 Persentase lembaga dana sosial keagamaan/ zakat yang sesuai prinsip syariah, akuntabel, dan profesional	98	Rp 40,000,000	98.00%	Rp 39,925,000	100.00%		https://drive.google.com/drive/folders/1tbDUrEHM-STYBU
		2 Persentase Lembaga Zakat dan Wakaf yang dibina	100	Rp 127,569,000	100.00%	Rp 125,516,069	100.00%		https://drive.google.com/drive/folders/1sc0Fh0T0503HUFWbSC-UmhwtA-husnabihar-iss
Rerata Capaian Sasaran Kegiatan 13							100.00%		
14	Meningkatkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas	1 Persentase satuan pendidikan/ pesantren yang memenuhi Standar sarpras	78.5	Rp 16,464,590,000	80.00%	Rp 15,732,828,995	76.43%		https://drive.google.com/drive/folders/1TPJAAW0VYVw3kwpDfCAXNPhlweIb0U17
		2 Persentase satuan pendidikan/ pesantren yang menyediakan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif	2.25	Rp -	2.25%	Rp -	100.00%		https://drive.google.com/drive/folders/1AJCHW00Uw0tlusCST-Aydk-L3TWKd17
		3 Persentase peningkatan jumlah siswa/santri pada satuan pendidikan	35	Rp -	35.00%	Rp -	100.00%		https://drive.google.com/drive/folders/1AgfIL_uKhUpptglw0tkbks051KbyUwvstbw-iss

Teknologi ini telah dimanfaatkan secara efektif untuk membangun Sistem Pakar Elektronik yang digunakan oleh Badan Besar Nasional Elektronik (BBNE), Badan Siper dan Sandi Negara (BSN).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW IV		Capaian Kinerja TW IV	Keterangan	Eviden	
			kinerja	Anggaran Akhir	Kinerja	Anggaran				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4. Persentase peningkatan jumlah siswa/santri pada satuan pendidikan daerah 3 T	3	Rp	-	3.00%	Rp	-	100.00%	https://drive.google.com/drive/folders/1uqM72PvW0T88L_cGee5T3A8vzrUk9w?usp=sharing
		5. Persentase Anak Kelas 1 MI/Ula/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA)	55	Rp	-	97.00%	Rp	-	176.36%	https://drive.google.com/drive/folders/1UJCp0Pm0y0d300bN9e5u5e0712462C7uqum8m?usp=sharing
		6. Persentase ATS yang mengikuti Program Pendidikan Kesetaraan (PPK) di Pondok Pesantren	3	Rp	-	2.00%	Rp	-	66.67%	https://drive.google.com/drive/folders/1G2V3e3JgDm0ar9m00y0p0m0m?usp=sharing
		7. Persentase satuan pendidikan nonformal yang direvitalisasi	65	Rp	-	65.00%	Rp	-	100.00%	https://drive.google.com/drive/folders/1u8e0b0e7u0q0r0f3e0e0e0u0c0e0u0?usp=sharing
Rerata Capaian Sasaran Kegiatan 14							102.78%			
15	Meningkatkan persentase penyelesaian pendidikan MA/Ulya/SMTK/SMAK/Ulta ma Widyalya / sederajat	Persentase siswa dalam satu kohort yang lulus tepat waktu	82.5	Rp	-	95.40%	Rp	-	115.64%	https://drive.google.com/drive/folders/15Mh0u0K0st0f0c0e0e0c0e0e0c0e0?usp=sharing
Rerata Capaian Sasaran Kegiatan 15							115.64%			
16	Meningkatkan kualitas penilaian pendidikan	1. Persentase siswa yang mengikuti asesmen (AN)	87.5	Rp	-	80.70%	Rp	-	92.23%	https://drive.google.com/drive/folders/1dU0d0_p0p0v0n0c0e0c0e0e0c0e0?usp=sharing
		2. Persentase santri yang	44	Rp	-	37.59%	Rp	-	85.43%	https://drive.google.com/drive/folders/1dU0d0_p0p0v0n0c0e0c0e0e0c0e0?usp=sharing

[illegible]

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW IV		Capaian Kinerja TW IV	Keterangan	Evidensi
			kinerja	Anggaran Akhir	Kinerja	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		minimal B							https://www.google.com/drawings/draw/1W2uag-0dwa-fek
	3	Persentase MTa/SMPTK/Madyama Widyadaya/ Muda Dharma Sekha yang terakreditasi minimal B	75	Rp -	49,43%	Rp -	65,91%		https://www.google.com/drawings/draw/1W2uag-0dwa-fek
	d.	Persentase MA/SMTK/SMK/Utama Widyadaya/ Utama Dharma Sekha yang terakreditasi minimal B	70	Rp -	47,95%	Rp -	68,50%		https://www.google.com/drawings/draw/1W2uag-0dwa-fek
	4	Persentase Satuan pendidikan pesantren yang memperoleh hasil asesmen minimal jayid	25	Rp -	79,33%	Rp -	120,00%		https://www.google.com/drawings/draw/1W2uag-0dwa-fek
	5	Persentase peserta didik pada pendidikan keagamaan/pesantren yang menyelesaikan pendidikan setara formal	40	Rp -	40,00%	Rp -	100,00%		https://www.google.com/drawings/draw/1W2uag-0dwa-fek
	6	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	43,5	Rp -	43,50%	Rp -	100,00%		https://www.google.com/drawings/draw/1W2uag-0dwa-fek
	7	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	1,75	Rp 14,496,000	1,73%	Rp 14,496,000	99,80%		https://www.google.com/drawings/draw/1W2uag-0dwa-fek

Diketahui oleh: *(tanda tangan)* Kepala Sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah yang ditandatangani oleh: Badan Besar Sanitasi Elektronik (BSE), Badan Sekeloa Sanitasi Elektronik (BSSE) yang ditandatangani oleh: Badan Besar Sanitasi Elektronik (BSE), Badan Sekeloa Sanitasi Elektronik (BSSE)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi TW IV		Capaian Kinerja TW IV	Keterangan	Evident
				kinerja	Anggaran Aktor	Kinerja	Anggaran			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		8	Persentase lulusan pendidikan keagamaan dan pendidikan pesantren yang memperoleh rekognisi	60	Rp -	99,80%	Rp -	120.00%		https://drive.google.com/drive/folders/1Wt4KKvYA7dFgUj-0wSczTVY2kHnR63JyVAm?doc=Idr-3d4
Rerata Capaian Sasaran Kegiatan 18								93.29%		
19	Meningkatnya kualitas pendidikan vokasi berbasis kerjasama	1	Persentase MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri	50	Rp -	50.00%	Rp -	100.00%		https://drive.google.com/drive/folders/1m3eAht-dLlE-D_0oq4KnPUwaZ-AmyVweeZ?usp=Idr-3d4
		2	Persentase MA Kejuruan dan MA Program Keterampilan yang meningkatkan life skill melalui program magang	50	Rp -	50.00%	Rp -	100.00%		https://drive.google.com/drive/folders/1Mf6P-wtXyVtT-gUvYduUyA1-nrk-mmeDnp-dmr-3d4
Rerata Capaian Sasaran Kegiatan 19								100.00%		
20	Menguatkan pendidikan karakter siswa	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran		65	Rp -	65.00%	Rp -	100.00%		https://drive.google.com/drive/folders/1BUXxQoa_dhwar-6Gbu1pao5dudHy-kzu1m8c?usp=Idr-3d4
Rerata Capaian Sasaran Kegiatan 20								100.00%		
21	Meningkatnya kualitas lingkungan belajar	1	Persentase satuan pendidikan Ramah Anak	55.5	Rp -	55.50%	Rp -	100.00%		https://drive.google.com/drive/folders/1NClVva8tHufGS-6mdYfas2-wk-P-J63?usp=Idr-3d4
		2	Persentase siswa yang memperoleh nilai karakter minimal baik	82.5	Rp -	78.85%	Rp -	95.61%		https://drive.google.com/drive/folders/1gCub9QrdgmsdDr7-gDnc0hdSMcf-yd?usp=Idr-3d4
		3	Persentase satuan pendidikan yang memiliki kultur mutu kelembagaan	60	Rp -	60.00%	Rp -	100.00%		https://drive.google.com/drive/folders/1A-3ggd-0027-negPO-Ebz2-Hsdgm8HYs

www.elsevier.com/locate/jmb

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi TW IV		Capaian Kinerja TW IV	Keterangan	Eviden
				kinerja	Anggaran Akhir	Kinerja	Anggaran			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
										https://www.google.com/drive/folders/1JLk3350k0Kns0U1n8hM7C1_gaZ7usp-drive_4m3 https://www.google.com/drive/folders/1gWQ8RT7TDy1i_3K8P60WwL7M8T8fha3p-drive_1k6
Rerata Capaian Sasaran Kegiatan 21								98.97%		
22	Meningkatnya kepemimpinan dan kesukarelawan pemuda dan pengembangunan pendidikan keperamukaan	1	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada madrasah yang bermuatan moderasi beragama	120	Rp -	398.00%	Rp -	120.00%		https://drive.google.com/drive/folders/1gWQ8RT7TDy1i_3K8P60WwL7M8T8fha3p-drive_1k6
		2	Jumlah gugus premuka pada madrasah yang dibina	222	Rp -	241.00%	Rp -	108.58%		https://drive.google.com/drive/folders/1gWQ8RT7TDy1i_3K8P60WwL7M8T8fha3p-drive_1k6
Rerata Capaian Sasaran Kegiatan 22								114.28%		
23	Menguatnya implementasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI)	1	Persentase RA/PAUDQ/Pratama Widyalya/ Taman Seminar/Neu Dhemmasakhs yang menerapkan program Holistik-Integratif	60	Rp -	42.36%	Rp -	70.60%		https://drive.google.com/drive/folders/1gWQ8RT7TDy1i_3K8P60WwL7M8T8fha3p-drive_1k6
		2	Persentase PAUD/TK yang menerapkan kurikulum agama yang berfokus pada kompetensi esensial secara adaptif dan kontekstual	50	Rp -	50.00%	Rp -	100.00%		
Rerata Capaian Sasaran Kegiatan 23								85.30%		
24	Meningkatnya kualitas	1	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi	85.33	Rp -	81.09%	Rp -	95.03%		https://drive.google.com/drive/folders/1gWQ8RT7TDy1i_3K8P60WwL7M8T8fha3p-drive_1k6

yang diterbitkan oleh Badan Nasional Pendidikan Elektronik (BNPE), Badan Standar dan Sandi Negara (BSN).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW IV		Capaian Kinerja TW IV	Keterangan	Evidensi
			kinerja	Anggaran Aktor	Kinerja	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pendidik dan tenaga kependidikan pada seluruh pendidikan	pendidik S1							https://drive.google.com/drive/folders/1T8p8SAWw-0dugL18sdt_070New?usp=sharing
		2 Persentase tenaga kependidikan memenuhi pendidik S1	71.66	Rp -	53.15%	Rp -	74.17%		https://drive.google.com/drive/folders/1HnpqGvncvew?usp=sharing
		3 Persentase guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	66.66	Rp -	66.65%	Rp -	99.99%		https://drive.google.com/drive/folders/18R0T4FcdRt0dCk9nufgZt0r0t?usp=sharing
		4 Persentase kependidikan memperoleh kompetensi	57.16	Rp 26,000,000	57.16%	Rp 25,987,000	100.00%		https://drive.google.com/drive/folders/1Gd1U7T0w6WYn22uap0t0b0d0kY?usp=sharing
		5 Persentase pemenuhan kebutuhan Guru Pendidikan Agama pada satuan Pendidikan	56.6	Rp 67,994,896,000	50.00%	Rp 67,943,523,320	88.34%		
		6 Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	42.5	Rp -	29.30%	Rp -	68.94%		https://drive.google.com/drive/folders/1Gd1U7T0w6WYn22uap0t0b0d0kY?usp=sharing
		7 Persentase Kepala Madrasah/Sekolah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	40	Rp -	30.01%	Rp -	75.03%		https://drive.google.com/drive/folders/1Gd1U7T0w6WYn22uap0t0b0d0kY?usp=sharing
		8 Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal baik	42.5	Rp -	42.50%	Rp -	100.00%		https://drive.google.com/drive/folders/1Gd1U7T0w6WYn22uap0t0b0d0kY?usp=sharing

Teknologi adalah landasannya secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang digunakan oleh Badan Nasional Sandi Elektronik (BSE), Badan Sear dan Sandi Negara (BSN).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi TW IV		Capaian Kinerja TW IV	Keterangan	Eviden	
				kinerja	Anggaran Akhir	Kinerja	Anggaran				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
		9	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah/Sekolah (AKP) minimal predikat terampil	45	Rp	-	32,24%	Rp	-	71.64%	https://drive.google.com/file/d/1M7Hh2s_KuHmFtUdAveid8d8m7Y_8_PfCpaw/view?usp=sharing
		10	Persentase satuan pendidikan yang memiliki indikator kualitas pembelajaran dengan kategori baik	70	Rp	-	52,51%	Rp	-	75.01%	https://drive.google.com/file/d/1Gv9BtUuafu0x0P_4_0p0T8yLW0ly/view?usp=sharing
		11	Persentase Guru yang meningkat jenjang karir	25.5	Rp	-	25.50%	Rp	-	100.00%	https://drive.google.com/file/d/1G9W0uP30u0GgQnUfVd0l8U021hU446uW/view?usp=sharing
		12	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	25.5	Rp	-	25.50%	Rp	-	100.00%	https://drive.google.com/file/d/1Gv9BtUuafu0x0P_4_0p0T8yLW0ly/view?usp=sharing
Rerata Capaian Sasaran Kegiatan 24									87.35%		
25	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	1	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75	Rp	-	88.56%	Rp	-	118.08%	
		2	Persentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai standar	90	Rp	-	95.00%	Rp	-	105.56%	
		3	Persentase satker yang memperoleh nilai Tingkat kemandirian penerapan manajemen risiko minimal 3	60	Rp	-	0.00%	Rp	-	100.00%	
		4	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar dan tepat waktu	80	Rp	-	90.00%	Rp	-	112.50%	
		5	Persentase satuan kerja yang menyusun rencana	80	Rp	-	99.40%	Rp	-	120.00%	https://drive.google.com/file/d/1Gv9BtUuafu0x0P_4_0p0T8yLW0ly/view?usp=sharing

Dokumen ini telah diunduh dengan menggunakan aplikasi aplikasi yang disediakan oleh Badan Besar Sarafika Elektronik (BSE), Badan Sisa dan Sisa Negara (BSN).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW IV		Capaian Kinerja TW IV	Keterangan	Evident
			Kinerja	Anggaran Aktor	Kinerja	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		dikal Reformasi Birokrasi							https://data.go.id/dataset/indikator-reformasi-birokrasi-2019-2020">https://data.go.id/dataset/indikator-reformasi-birokrasi-2019-2020
6		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	Rp -	89,67%	Rp -	99,83%		
7		Persentase penyelesaian kerugian Negara pada Kementerian Agama	90	Rp -	82,30%	Rp -	102,88%		
8		Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	2	Rp 30,490,602,000	2,00%	Rp 29,208,167,905	100,00%		https://data.go.id/dataset/laporan-keuangan-semester-i-dan-ii-tahun-2019-2020">https://data.go.id/dataset/laporan-keuangan-semester-i-dan-ii-tahun-2019-2020
9		Indeks Profesionalisme ASN	71	Rp -	80,69%	Rp -	113,65%		https://data.go.id/dataset/indikator-profesionalisme-asn-2019-2020">https://data.go.id/dataset/indikator-profesionalisme-asn-2019-2020
10		Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	85	Rp 68,160,000	85,00%	Rp 65,030,000	100,00%		
11		Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/inspratif	10	Rp -	10,00%	Rp -	100,00%		
12		Persentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	85	Rp -	0,00%	Rp -	0,00%		
13		Nilai Kepuasan Layanan (Langsung) Kepegawaian	100	Rp -	100,00%	Rp -	100,00%		https://data.go.id/dataset/nilai-kepuasan-layanan-kepegawaian-2019-2020">https://data.go.id/dataset/nilai-kepuasan-layanan-kepegawaian-2019-2020
14		Persentase kasus hukum yang terselesaikan	100	Rp -	100,00%	Rp -	100,00%		https://data.go.id/dataset/persentase-kasus-hukum-yang-terselesaikan-2019-2020">https://data.go.id/dataset/persentase-kasus-hukum-yang-terselesaikan-2019-2020

Tekanan ini telah berdampak negatif secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang ditunjukkan oleh nilai Beta negatif signifikan. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa tekanan pasar modal dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW IV		Capaian Kinerja TW IV	Keterangan	Evident
			Kinerja	Anggaran Aktor	Kinerja	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 5 Persentase rekomendasi izin orang asing	100	Rp -	100.00%	Rp -	100.00%		https://drive.google.com/drive/folders/1gRdHmWvYkagCqL8tPUUQDnVxZ8mg-dlax-1m
		1 6 Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicountai	100	Rp 68.225,000	100.00%	Rp 50.990,000	100.00%		
		1 7 Jumlah viewer yang memanfaatkan layanan Digital Kementrian Agama	100	Rp -	100.00%	Rp -	100.00%		https://drive.google.com/drive/folders/1D_gf-VwzOjChubVrYyGpawZ7NardBwdf7uap-shamglostd-1187M15L4WwagQ1809skJat-Chuak-drtug
		1 8 Persentase layanan keagamaan dan pendidikan berbasis IT	75	Rp 3,600.000	80.00%	Rp 2.011,619	106.67%		https://drive.google.com/drive/folders/1TLaF5Cgk-fuaDaJChtu-50eb3ZK3Gbz7egmbasng
		1 9 Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	90	Rp 7,857,912.000	90.00%	Rp 7.243,753,350	100.00%		https://drive.google.com/drive/folders/1a8Haf-L1u8-mufba-waww8Hma-BRmd-T7eqadlnar-1m
		2 0 Persentase digitalisasi arsip yang mudah diakses	80	Rp -	99.90%	Rp -	120.00%		https://drive.google.com/drive/folders/12851-uP5oUL-L-2L-z78iaabscmrtaqr-0d
Rerata Capaian Sasaran Kegiatan 25							99.95%	Rerata Capaian Kinerja	101.38%
TOTAL RERATA CAPAIAN KINERJA			101.38%		TOTAL ANGGARAN			Rp	138,162,132,000
TARGET KINERJA s.d TRIWULAN IV TAHUN 2025			100		TOTAL REALISASI ANGGARAN			Rp	135,119,843,867
CAPAIAN KINERJA SATKER			101.38%		CAPAIAN REALISASI ANGGARAN %			97.80 %	

Tekanan ini telah berdampak negatif secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang ditunjukkan oleh hasil pengujian statistik dengan menggunakan uji t. Hasil pengujian statistik dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tekanan ini telah berdampak negatif secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Kepala,



Mustafa